

RPJMD

Kabupaten
Seram bagian Timur
Tahun
2025-2029

Pemerintah Daerah Kabupaten
Seram Bagian Timur
Tahun 2025



Ita Wotu Nusa



Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si.
BUPATI

M. Miftah T. R. Wattimena, S.Ip., MA
WAKIL BUPATI



bappedalitbangsbt



bappedalitbangsbt2022@gmail.com



Jln. Ampera. bula



**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2025

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - b. bahwa RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
 - c. bahwa perlu adanya arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah

Provinsi Maluku Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 164);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 186);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025-2029.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
18. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menetapkan Visi, Misi dan Program Pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran; dan

- c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan daerah provinsi yang berbatasan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kedudukan RPJMD;
- b. sistematika RPJMD;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB II KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja Pemerintahan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

- (1) RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. BAB V Penutup
- (2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Bappedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan Perencanaan RPJMD; dan
 - b. Pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan Perencanaan RPJMD;
 - b. Pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. Hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

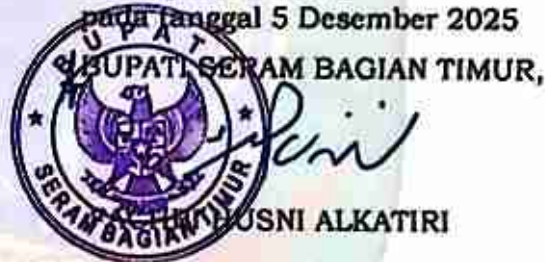
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 5 Desember 2025



Diundangkan di Bula
pada tanggal 5 Desember 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 230

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih yang berpedoman kepada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025.

Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bagi satuan kerja didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 189**

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari Visi Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Timur Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera Dan Berbudi Luhur. Serta untuk Mencapai Visi Tersebut, Kami Telah Merumuskan Misi Yang Terukur, Antara Lain:

1. Meningkatkan Fasilitas, Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Kesehatan, Kesehatan Mental, Serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kolaborasi Untas Sektor Dan Partisipasi Aktif

Masyarakat.

2. Meningkatkan Fasilitas, Akses Dan Mutu Pelayanan Pendidikan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas Dan Terampil.
3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kompetitif Dengan Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Menjadikan Sektor Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Seni Budaya Sebagai Tulang Punggung Perekonomian Masa Depan.
5. Membangun Masyarakat Yang Berbudi Luhur Melalui Implementasi Dan Penyelarasan Nilai Agama Dan Budaya.
6. Menyelenggarakan Dan Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dilandasi Nilai-Nilai Keluhuran Budi Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government.

Dengan Program unggulan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Maluku. Dokumen ini akan menjadi landasan operasional dan pedoman bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam melaksanakan roda pembangunan selama lima tahun ke depan.

Tantangan pembangunan di masa mendatang menuntut kita untuk lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, RPJMD 2025-2029 ini difokuskan pada upaya:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- Transformasi ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan lokal (pertanian, perikanan, dan pariwisata).
- Pemerataan pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi wilayah dan mempercepat aksesibilitas antar-pulau.
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang tertuang dalam dokumen ini sangat bergantung pada sinergi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari jajaran birokrasi, DPRD, sektor swasta, hingga seluruh lapisan masyarakat di Bumi "Ita Wotu Nusa".

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan pemikiran, tenaga, dan waktu dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan amanah demi mewujudkan masyarakat Seram Bagian Timur yang sehat, cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi ikhtiar kita bersama



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	6
1.4. Maksud Dan Tujuan	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
2. Gambaran Umum Daerah	14
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	14
2.2. Gambaran Kinerja Keuangan Sebelumnya	145
2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis	173
3. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan	188
3.1. Visi dan Misi RPJMD 2025-2029	188
3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	192
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	207
3.4. Program Prioritas Daerah	212
4. Program Perangkat Daerah dan Kinerja	248
4.1. Program Perangkat Daerah	248
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	311
5. Penutup	328
5.1. Kesimpulan Substansial	332
5.2. Kaidah Pelaksanaan	332
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	332
5.4. Penutup	333
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Presentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur	15
Tabel 2.2. Ekoregion Kabupaten Seram Bagian Timur	18
Tabel 2.3. Geometri sungai besar di Kabupaten SBT	25
Tabel 2.4. Jenis Vegetasi Alami di Kabupaten Seram Bagian Timur	32
Tabel 2.5. Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Seram Bagian Timur (kg), 2024	33
Tabel 2.6. Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten SBT (Ton), 2020-2024	35
Tabel 2.7. Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten SBT (juta Rupiah), 2020-2024	35
Tabel 2.8. Perhitungan kinerja jasa/layanan ekosistem di Kabupaten Seram Bagian Timur	39
Tabel 2.9. Perkembangan dan Distribusi Listrik di Kabupaten SBT, 2020-2024	41
Tabel 2.10.Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	44
Tabel 2.11.Timbulan dan Penanganan Sampah di Kabupaten SBT, 2021-2023	46
Tabel 2.12.Sebaran dan Kepadatan Penduduk setiap Kecamatan di Seram Bagian Timur di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020-2024	51
Tabel 2.13.Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten SBT Tahun 2024	52
Tabel 2.14.Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku	61
Tabel 2.15.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020-2024	77
Tabel 2.16.Jumlah UMKM di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020-2024	92
Tabel 2.17.Daerah-daerah yang belum berlistrik di Kabupaten Seram Bagian Timur	97
Tabel 2.18.Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Seram Bagian Timur	98
Tabel 2.19. Lokasi Pengembangan Energi Terbarukan)PLTS of Gird) Kabupaten Seram Bagian Timur	98
Tabel 2.20.Data Perumahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024	104
Tabel 2.21.Indikator Kriminalitas di Kabupaten SBT Tahun 2020-2024	115
Tabel 2.22.Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	118
Tabel 2.23.Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	145

Kabupaten SBT 2020-2024	
Tabel 2.24. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 – 2024 (Rp.)	150
Tabel 2.25. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 – 2024	154
Tabel 2.26. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 5 Tahun Terakhir (2020 – 2024)	157
Tabel 2.27. Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 dan 2024	159
Tabel 2.28. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020 – 2024	165
Tabel 2.29. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2025 – 2030	166
Tabel 2.30. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020 - 2024	166
Tabel 2.31. Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020 - 2024	166
Tabel 2.32. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2025 – 2030	167
Tabel 2.33. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2025 - 2030	168
Tabel 2.34. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2025 - 2030	168
Tabel 2.35. Isu Strategis Global, RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045	182
Tabel 2.36. Isu Strategis RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029	182
Tabel 3.1. Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029	189
Tabel 3.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029	193
Tabel 3.3. Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029	208
Tabel 3.4. Program dan Indikasi Kegiatan Prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur	213
Tabel 3.5. Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Seram Bagian Timur Dalam RPJMN 2025 – 2029	222
Tabel 3.6. Penahapan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029	226
Tabel 3.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2025 – 2029	230
Tabel 4.1. Indikasi Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030	254
Tabel 4.2. Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2030	310
Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Seram Bagian Timur	311
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Kabupaten Seram Bagian Timur	313

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	6
Gambar 1.2. Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	7
Gambar 1.3. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023-2043	9
Gambar 1.4. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	10
Gambar 1.5. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	11
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Seram Bagian Timur	14
Gambar 2.2. Peta batas Ekologi Ekoregion Kabupaten SBT	17
Gambar 2.3. Peta Ekoregion Kabupaten Seram Bagian Timur	19
Gambar 2.4. Peta Elevasi Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur	20
Gambar 2.5. Peta Kelerengan Kabupaten SBT	21
Gambar 2.6. Peta Jenis Tanah Kabupaten Seram Bagian Timur	22
Gambar 2.7. Cekungan Air Tanah Provinsi Maluku	23
Gambar 2.8. Peta DAS Kabupaten Seram Bagian Timur	27
Gambar 2.9. Peta Vegetasi Alami Kabupaten Seram Bagian Timur	32
Gambar 2.10. Persentase Luasan Layanan/Jasa Lingkungan di Kabupaten SBT	39
Gambar 2.11. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur 2020-2024	40
Gambar 2.12. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten SBT, 2020-2024	41
Gambar 2.13. Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	43
Gambar 2.14. IKLH Kabupaten Seram Bagian Timur, 2021-2024	44
Gambar 2.15. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	45
Gambar 2.16. Peta Multi Bencana Kabupaten Seram Bagian Timur	48
Gambar 2.17. Indeks Risiko Bencana Kabupaten SBT, 2020-2024	49
Gambar 2.18. Perkembangan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	50
Gambar 2.19. Infografis proyeksi penduduk Kabupaten SBT, 2025-2029	53
Gambar 2.20. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	58
Gambar 2.21. Persentase Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	59
Gambar 2.22. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	60
Gambar 2.23. PDRB per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	62
Gambar 2.24. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Seram	63

	Bagian Timur, 2020-2024	
Gambar 2.25.	Rasio Gini Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	64
Gambar 2.26.	IPM dan Dimensi Penyusunnya di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	65
Gambar 2.27.	Usia Harapan Hidup di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	66
Gambar 2.28.	Prevalensi Stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	68
Gambar 2.29.	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	69
Gambar 2.30.	Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	70
Gambar 2.31.	Capaian Literasi Siswa di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024	71
Gambar 2.32.	Capaian Numerasi Siswa di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024	72
Gambar 2.33.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	73
Gambar 2.34.	Indeks Literasi Digital Provinsi Maluku, 2020-2024	74
Gambar 2.35.	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Seram Bagian Timur, 2022-2024	75
Gambar 2.36.	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku, 2020- 2024	78
Gambar 2.37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2020- 2024	79
Gambar 2.38.	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	80
Gambar 2.39.	Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Maluku, 2020-2023	81
Gambar 2.40.	IBANGGA Kabupaten Seram Bagian Timur, 2021-2024	82
Gambar 2.41.	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	83
Gambar 2.42.	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	84
Gambar 2.43.	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	85
Gambar 2.44.	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku, 2020-2024	86
Gambar 2.45.	Angka Ketergantungan Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	88
Gambar 2.46.	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	89
Gambar 2.47.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2023	90
Gambar 2.48.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	93
Gambar 2.49.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	94
Gambar 2.50.	Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Maluku, 2020-2024	95
Gambar 2.51.	Indeks Pembangunan TIK Provinsi Maluku Tahun 2020-2024	99
Gambar 2.52.	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	100
Gambar 2.53.	Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	101

Gambar 2.54.	Pilar Infrastruktur IDSD Kabupaten Seram Bagian Timur, 2022-2024	102
Gambar 2.55.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	103
Gambar 2.56.	Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Seram Bagian Timur, 2022-2024	105
Gambar 2.57.	Capaian IDM di setiap Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024	106
Gambar 2.58.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	107
Gambar 2.59.	Pilar Stabilitas Ekonomi Makro IDSD Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	108
Gambar 2.60.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten SBT, 2020-2024	109
Gambar 2.61.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten SBT, 2020-2024	111
Gambar 2.62.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku, 2020-2024	114
Gambar 2.63.	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	116
Gambar 2.64.	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2020 - 2024	147
Gambar 2.65.	Perkembangan Masing-masing Unsur Pendapatan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2024	148
Gambar 2.66.	Kontribusi Sumber PAD Terhadap PAD Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020 - 2024	148
Gambar 2.67.	Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer	149
Gambar 2.68.	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2020 - 2024	151
Gambar 2.69.	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	151
Gambar 2.70.	Perkembangan Belanja Operasi Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024	152
Gambar 2.71.	Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020 - 2024	153
Gambar 2.72.	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020 - 2024	155
Gambar 2.73.	Perkembangan SiLPA Tahun Berjalan Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024 (Rp.)	156
Gambar 2.74.	Perkembangan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Pegawai) Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020 - 2024	164
Gambar 2.75.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020 - 2024	164
Gambar 2.76.	Perkembangan dan Tren Pembangunan Ekonomi Desa di Seram Bagian Timur Selama 3 Tahun Terakhir (2022-2024)	170
Gambar 3.1.	Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten SBT Dengan Misi RPJMD Provinsi Maluku	191

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur perlu menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan tepat sasaran, mengingat perencanaan tersebut merupakan elemen fundamental dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan di daerah. Perencanaan yang dirancang secara sistematis dan berbasis data memungkinkan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan dilakukan secara efektif dan efisien, selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Selain itu, perencanaan yang terstruktur juga berperan penting dalam mendukung pemerintah daerah dalam proses pengalokasian sumber daya secara optimal, menjamin keberlanjutan pembangunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ketentuan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi, serta arah pembangunan nasional agar berjalan secara konsisten, harmonis, selaras, dan bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diperlukan upaya penyelarasan antara dokumen perencanaan pembangunan pada tingkatan yang berbeda. Sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024, penyelarasan tersebut diwujudkan melalui penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, guna mewujudkan sasaran pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat. Sinergitas pusat dan daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi tumpuan utama mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu "**Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**" dan Visi Maluku Emas 2045 yaitu "**Maluku Maju, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan**", Serta Visi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur: "**Seram Bagian Timur Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan**"

Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi Maluku Emas 2045. Untuk itu ke depan hasil capaian pembangunan yang diperoleh selama dua dekade perencanaan 2005-2025 perlu dilakukan penguatan-penguatan yang lebih signifikan, karena tantangan global dan nasional membutuhkan langkah-langkah perubahan dan percepatan untuk memposisikan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang menuju pada kondisi yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, upaya mewujudkan Visi Kabupaten Seram Bagian Timur perlu didukung dengan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir dinamika permasalahan daerah berbasis data dan indikator yang bermutu dan terukur.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh kuat di dunia internasional dengan angka kemiskinan mendekati nol (0) persen (target SDGs) dan ketimpangan berkurang. Oleh sebab itu ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi acuan pembangunan Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh presiden RI yaitu stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesimbangan, serta sumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berperan sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan yang prosesnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi untuk menajamkan target dan sasaran pembangunan agar mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan di daerah berupa RKPD.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dokumen RPJMD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RTRW.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 14 ayat 1 : "BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD", maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dalam bidang perencanaan perlu untuk menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029.

Selain pendekatan Teknokratik, penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanah Permendagri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS berfungsi untuk penjaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD, sehingga pengambilan keputusan pembangunan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dapat

dihindari. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan skenario pembangunan daerah guna menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Skenario pembangunan merupakan alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan.

Penyusunan dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur mengadopsi pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pendekatan teknokratis, 2) Pendekatan partisipatif, 3) Pendekatan politis, serta 4) Pendekatan atas bawah dan bawah atas (*top down* dan *bottom up*). Selain itu, perlu mengusung prinsip holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Tematik adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025-2029 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024, Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si dan M. Miftah T. R. Wattimena, S.Ip., MA terpilih secara resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2025–2030 dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Sehubungan dengan pelantikan tersebut, disusunlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, program prioritas daerah, serta strategi pencapaian pembangunan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan janji kepala daerah terpilih dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

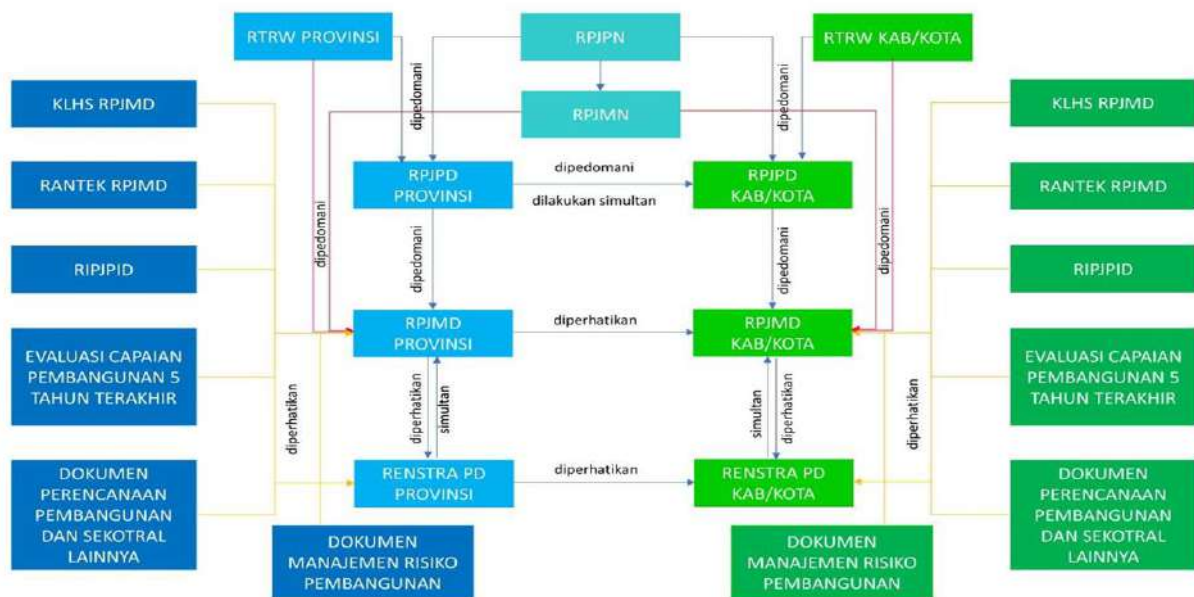
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan infentarisasi pmutakhiran klasifikasi, kedefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-

- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 164);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010-2030;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2025 Tentang RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 186);
31. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur.

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Sumber: Inmendagri No 2 Tahun 2025

Gambar 1.1. Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

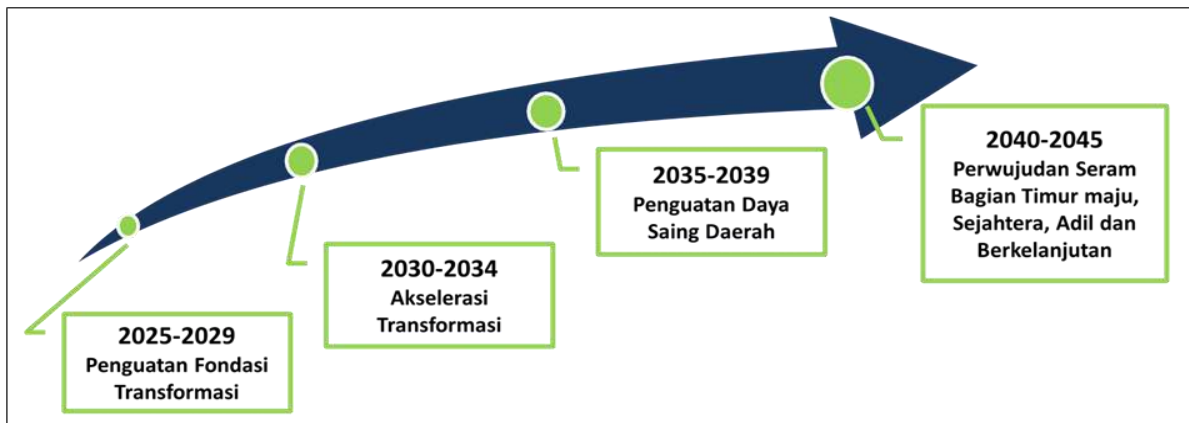
Penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029,

RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029 agar tercapai keselarasan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Penyusunannya dilakukan secara simultan dengan dokumen perencanaan lain, seperti KLHS RPJMD, Rancangan Teknis RPJMD, serta evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir yang menjadi dasar perumusan arah kebijakan baru. Selain itu, RPJMD juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan sektoral, dokumen manajemen risiko pembangunan, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Maluku, maupun Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai acuan tata ruang wilayah. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan lebih operasional melalui Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) agar program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap perangkat daerah dapat mendukung secara langsung pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

1.3.1. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur

RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat arah kebijakan, visi, serta sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang menjadi penjabaran tahapan pertama dari RPJPD. Dengan demikian, RPJMD memiliki fungsi strategis sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah pada periode lima tahun, sekaligus menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi capaian target RPJPD secara bertahap.

Pentahapan pembangunan jangka panjang merupakan periodisasi perencanaan jangka menengah yang dilakukan secara terukur dengan prinsip kesinambungan pembangunan.



Sumber: RPJP Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2045

Gambar 1.2. Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Tahap pertama tahun 2025-2029 disebut dengan tahapan Penguatan Fondasi Transformasi. Merupakan periode rencana pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah guna mewujudkan Seram Bagian Timur Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan. Pada tahap ini ditargetkan adanya pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, penguatan produktivitas tenaga kerja, penguatan modal sosial masyarakat serta penguatan pembangunan lingkungan hidup secara integratif.

Tahap ini merupakan tahap penguatan fondasi untuk transformasi tahap-tahap selanjutnya. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat pertahun sebesar 4,5 – 5,1 persen.

- **Mewujudkan kesejahteraan Sosial Masyarakat, SDM berkualitas dan unggul.**
Difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan serta perlindungan sosial.
- **Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing, mandiri dan inklusif.**
Difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan melalui pengembangan sentra-sentra industri yang telah memiliki potensi berkembang yang cukup besar pada saat ini, peningkatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja, digitalisasi, pengembangan produk wisata baru yang kreatif dan inovatif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, iklim investasi yang semakin baik.
- **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan inovatif.**
Difokuskan pada perbaikan dan penataan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis merit system (meritokrasi), peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi, penataan regulasi daerah dan pemberdayaan masyarakat sipil. Penyusunan regulasi yang mendukung pembangunan yang adil dan ramah lingkungan juga akan menjadi prioritas.
- **Mewujudkan ketahanan budaya dan ekologi yang tangguh dan adaptif.**
Difokuskan pada peningkatan nilai-nilai kebudayaan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana alam.
- **Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan.**
Difokuskan pada penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah sebagai landasan transformasi melalui peningkatan perluasan dan pemerataan cakupan akses layanan infrastruktur dasar dan transportasi termasuk penguatan jejaring konektivitas wilayah yang berbasis mitigasi bencana, perluasan jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan pemenuhan kebutuhan energi melalui diversifikasi sumber energi listrik termasuk mendorong investasi energi baru terbarukan.
- **Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan.**
Pada tahap ini difokuskan pada peningkatan pemanfaatan cakupan sektor yang didanai pemerintah pusat/provinsi dan sumber dana lainnya.

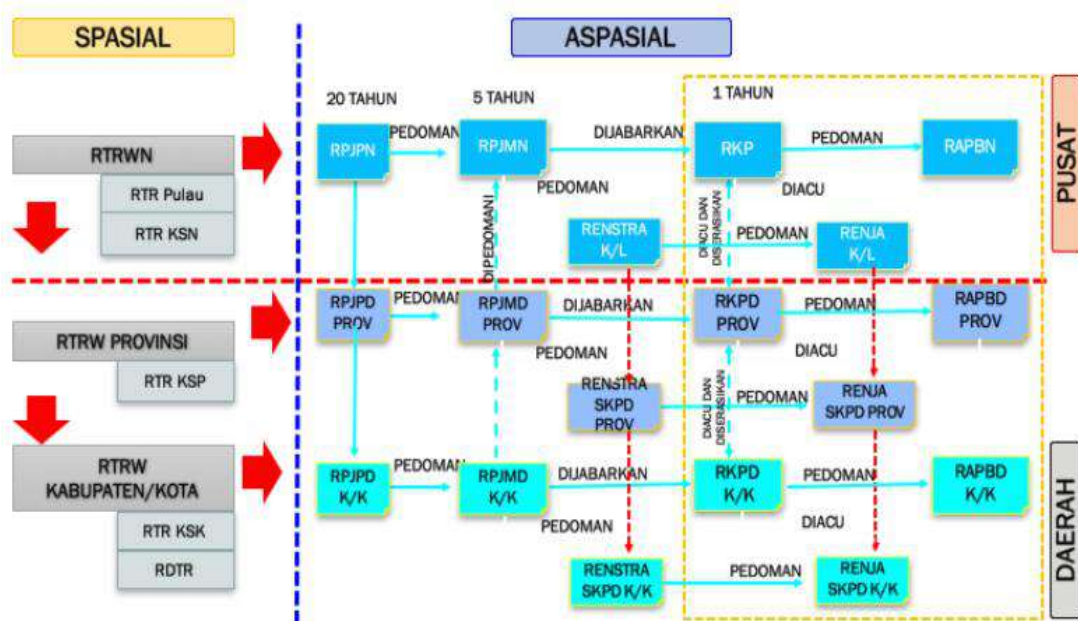
Tahapan ini merupakan tahap penguatan dasar untuk menjamin keberhasilan pembangunan di masa depan.

1.3.2. RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Maluku dan RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur. Mengingat RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur yang baru masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah, maka penyusunan dokumen RPJMD ini untuk sementara masih mengacu pada RTRW yang

lama, termasuk visi dan arah pengembangannya. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah tetap memiliki landasan hukum yang jelas dan terarah, sekaligus menjaga konsistensi antara kebijakan pembangunan jangka menengah dengan dokumen tata ruang yang berlaku. Penyesuaian terhadap RTRW baru akan dilakukan setelah penetapan resmi melalui Perda, sehingga RPJMD dapat lebih sinkron dengan arah penataan ruang yang baru.

Visi dari penataan ruang Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008–2028 adalah “Terwujudnya wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis sumberdaya kepulauan yang mendukung terwujudnya masyarakat yang rukun, adil, sejahtera, maju dan mandiri”. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur.

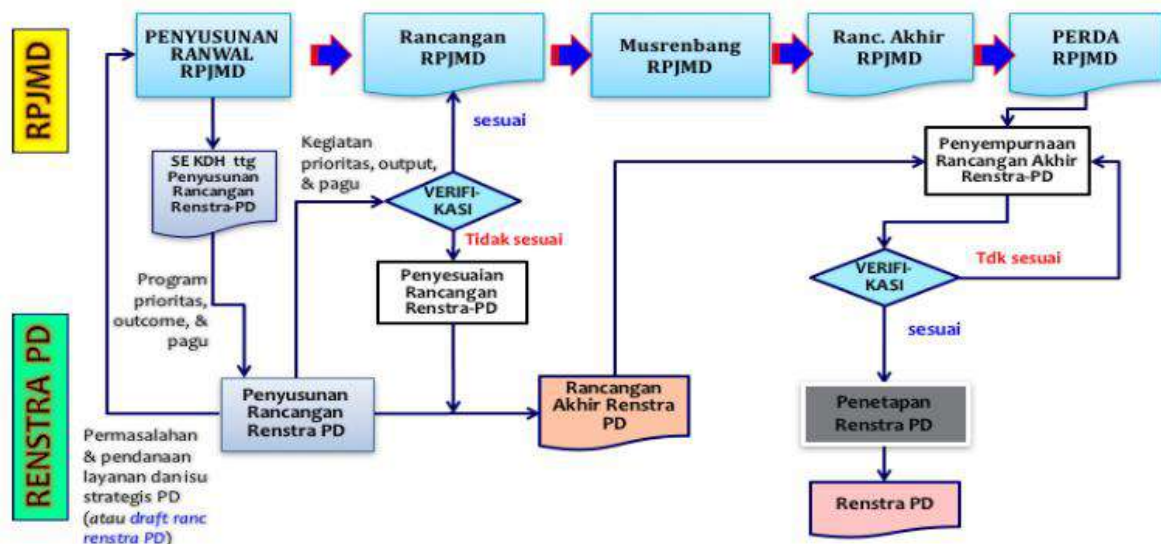


Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.3. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur

1.3.3. RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang dilaksanakan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Seram Bagian Timur.



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.4. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD, yang dilengkapi dengan Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) mengenai penyusunan rancangan Renstra PD. Dalam tahap ini, perangkat daerah menyusun rancangan Renstra PD berdasarkan permasalahan, kebutuhan pendanaan, layanan, serta isu strategis yang ada.

Selanjutnya, rancangan RPJMD diverifikasi untuk melihat kesesuaian kegiatan prioritas, output, outcome, dan pagu anggaran dengan rancangan Renstra PD. Apabila tidak sesuai, maka rancangan Renstra PD perlu disesuaikan kembali. Namun, bila sesuai, proses dilanjutkan ke tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Musrenbang RPJMD kemudian difinalisasi menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Setelah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) RPJMD, rancangan akhir Renstra PD juga disempurnakan dan kembali diverifikasi. Apabila hasil verifikasi tidak sesuai, dilakukan perbaikan hingga tercapai kesesuaian. Jika sudah sesuai, maka dilakukan penetapan Renstra PD secara resmi.

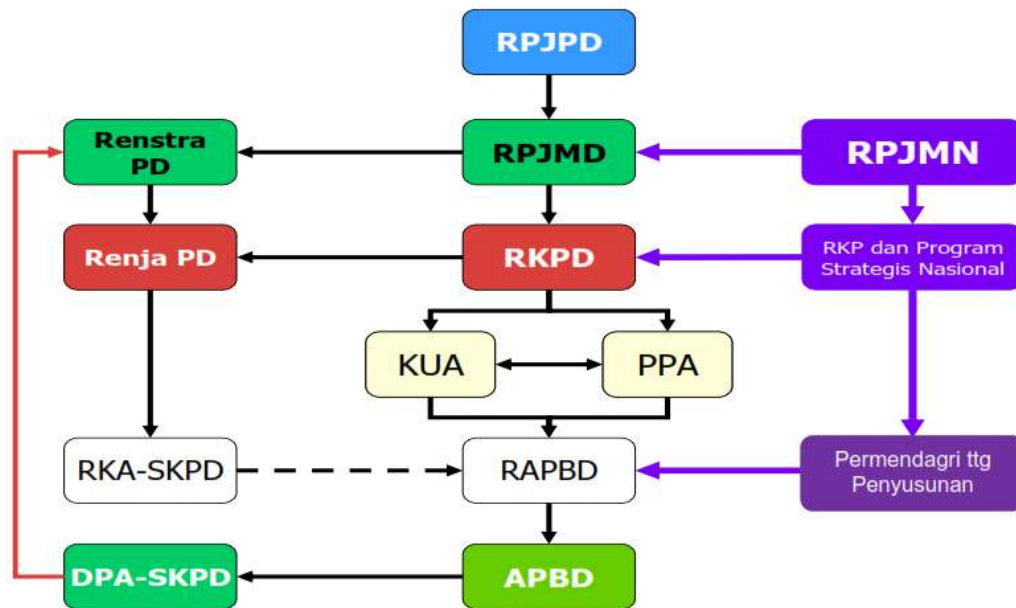
Dengan demikian, gambar ini menegaskan bahwa penyusunan Renstra PD harus selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga setiap perangkat daerah memiliki acuan strategis yang konsisten dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.3.4. Hubungan RPJMD dan RKPD

Substansi RPJMD merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Karena itu RPJMD harus dijabarkan lebih teknis dalam perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai penjabaran RPJMD, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan, RKPD juga memuat prioritas program dan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Seram Bagian Timur secara berjenjang mulai dari tingkat Negeri/Desa hingga Kabupaten.

Selanjutnya hasil konsultasi publik dijadikan sebagai input untuk penajaman RKPD dan menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA (Kebijakan Umum Anggaran) serta PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.5 Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD 2025-2029 adalah sebagai landasan untuk penyusunan RKPD, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur lainnya. Penyusunannya menggunakan pendekatan teknokratik memuat analisis gambaran umum kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan isu strategis Daerah, serta rekomendasi.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam rencana pembangunan daerah yang terukur dan dapat diimplementasikan selama periode 2025-2029;
2. Menyediakan pedoman perencanaan pembangunan bagi seluruh perangkat daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan arah pembangunan kabupaten dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, meliputi RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya;

4. Mengintegrasikan isu-isu strategis dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
5. Menyediakan instrumen evaluasi kinerja kepala daerah dan perangkat daerah untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - a. Aspek geografi dan demografi;
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Aspek Daya Saing Daerah;
 - d. Aspek Pelayanan Umum.
 - e. Standar Pelayanan Minimal;
 - f. Kerjasama daerah;
 - g. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
 - h. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah.
2. Gambaran Keuangan Daerah
 - a. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024.
 - b. Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2030.
3. Permasalahan Dan Isu Strategis
 - a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - a. Visi dan Misi; dan
 - b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program Perangkat Daerah:

- a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
- a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

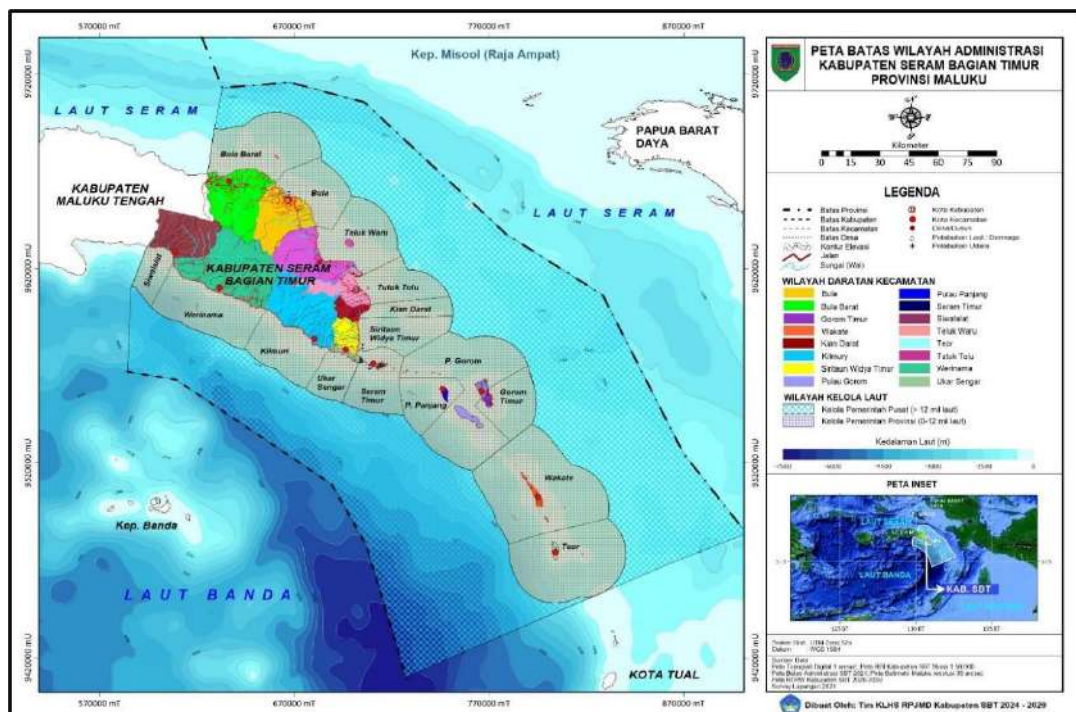
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah merangkum data dan informasi pembangunan yang merupakan potret hasil pembangunan periode sebelumnya. Gambaran umum kondisi daerah terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut diturunkan menjadi fokus- fokus pembangunan daerah sebagai bagian dari capaian kinerja pembangunan daerah. Untuk memahami lebih lanjut berbagai potensi dan kinerja pembangunan selama ini, berikut gambaran umum Kabupaten Seram Bagian Timur dari berbagai aspek.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

I. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Bagian ini memaparkan letak geografis dan batas-batas wilayah secara administratif, serta menggambarkan peran dan kontribusi wilayah terhadap kawasan sekitarnya maupun wilayah yang lebih luas. Kontribusi tersebut mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, serta aspek lain yang relevan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Penjabaran ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi strategis dan nilai fungsi wilayah dalam konteks pengembangan kawasan secara regional maupun nasional.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Seram Bagian Timur

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau yang menyebutkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur

(SBT) memiliki luas wilayah sekitar 20.603,28 km², yang terdiri atas luas laut sebesar 14.877,77 km² kemudian luas wilayah daratan Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 5.725,513 km². Luas daratan tersebut mencakup sekitar 30,88% dari total luas daratan Pulau Seram (Gambar 2.1).

Secara fisik-geografis, wilayah Kabupaten SBT memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, yang diundangkan pada tanggal 18 Desember 2003. Sejak pembentukannya, Kabupaten SBT terus mengalami perkembangan dalam hal tata kelola pemerintahan, termasuk pemekaran wilayah administratif kecamatan dan desa.

Sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan pelayanan pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan pemekaran wilayah kecamatan dan peningkatan status dusun menjadi negeri administratif. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang memungkinkan dusun-dusun yang telah memenuhi syarat administratif dan sosial untuk ditingkatkan statusnya menjadi Negeri Administratif. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Provinsi Maluku.

Selanjutnya, pada tahun 2024, Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan pemekaran wilayah dengan menambahkan satu kecamatan yaitu Kecamatan Ukar Sengan. Pemekaran ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Ukar Sengan di Kabupaten SBT

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Presentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Pulau Gorom	Kataloka	91,303	1,59%
2	Kesui Watubela	Tamher Timur	37,58	0,66%
3	Teor	Wermaf Kampung Baru	23,41	0,41%
4	Gorom Timur	Miran	29,29	0,51%
5	Pulau Panjang	Pulau Panjang	20,53	0,36%
6	Seram Timur	Geser	58,15	1,02%
7	Tutuk Tolu	Air Kasar	330,09	5,76%
8	Kilmury	Kilmury	837,62	14,63%
9	Werinama	Werinama	993,84	17,36%
10	Siwalalat	Atiahu	845,087	14,76%
11	Bula	Bula	643,36	11,24%
12	Bula Barat	Waiketam	829,27	14,48%
13	Kian Darat	Watu-Watu	129,23	2,26%
14	Siritaun Wida Timur	Keta Rumadan	172,37	3,01%
15	Teluk Waru	Waru	669,67	11,70%

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
16	Ukar Sengan	Urung	15,2	0,27%
	Jumlah		5,725,513	100,00%

Sumber: -Dokumen Revisi RTRW Kabupaten SBT tahun 2023

- Data Bagian Tata Pemerintahan Kab. SBT Tahun 2025

- Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Saat ini, Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri atas 16 kecamatan dan 198 negeri/desa administratif. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Werinama, yang mencakup sekitar 17,20% dari total luas wilayah Kabupaten SBT. Sebaliknya, kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ukur Sengan, yang hanya mencakup sekitar 0,26% dari total luas wilayah kabupaten. Sementara itu, wilayah di luar daratan Pulau Seram mencakup 5 kecamatan kepulauan, yaitu:

- Kecamatan Seram Timur
- Kecamatan Pulau Gorom
- Kecamatan Gorom Timur
- Kecamatan Pulau Panjang
- Kecamatan Kesui Watubela
- Kecamatan Teor

Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten SBT meliputi 62 pulau, baik besar maupun kecil, yang tersebar dalam cakupan wilayah masing-masing kecamatan kepulauan. Luas wilayah dan persentase terhadap total luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur menurut kecamatan dapat dilihat pada

Tabel 2.1.

1. Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Gugus Pulau

Dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan dengan pendekatan berbasis Gugus Pulau. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013–2033.

Konsep Gugus Pulau merupakan pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan Maluku, yang secara geografis, sosial, dan ekonomis tersebar dan terpisah oleh perairan. Berdasarkan pendekatan ini, wilayah Provinsi Maluku dibagi menjadi 12 Gugus Pulau, yang masing-masing menjadi unit perencanaan dan pengembangan wilayah secara terpadu.

Dalam pembagian ini, Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk dalam Gugus Pulau IV, bersama dengan wilayah-wilayah lain yang memiliki kesamaan geografis, potensi sumber daya, dan keterkaitan fungsional. Penetapan ini menjadi acuan dalam menyusun strategi pembangunan wilayah, pengembangan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarwilayah dalam satu gugus maupun dengan gugus lainnya.

2. Batas Ekologis dan Ekoregion Kabupaten Seram Bagian Timur

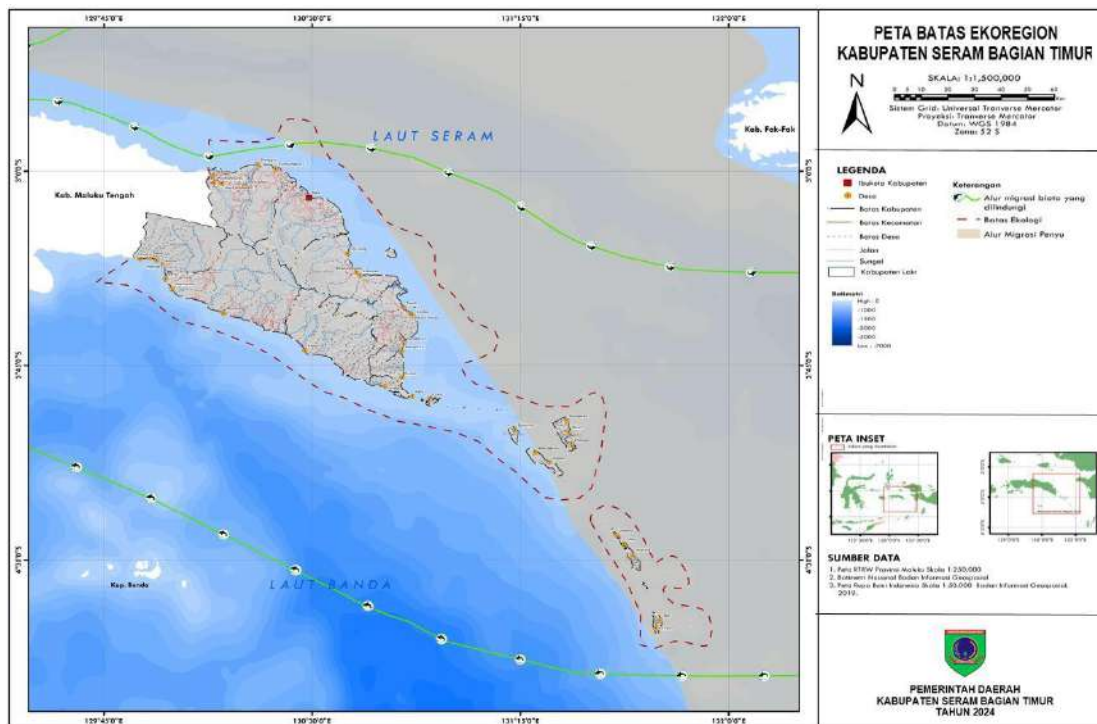
a. Batas Ekologis

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Timur, penentuan batas ekologis menjadi salah satu aspek penting yang mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 105 Tahun 2022. Batas ekologis merupakan wilayah yang memiliki keterkaitan ekologis dan sosial secara langsung dengan wilayah perencanaan.

Penetapan batas ekologis ini didasarkan pada analisis sejumlah Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang meliputi:

- Peta hutan primer
- Peta mangrove primer dan sekunder
- Peta permukiman penduduk
- Peta sebaran terumbu karang
- Peta jalur migrasi fauna laut
- Peta kawasan perlindungan laut dan pantai (ekosistem sensitif)

Data IGT tersebut ditumpang-susun (overlay) untuk menghasilkan batas ekologis yang menggambarkan keterkaitan sistem alam dengan aktivitas sosial masyarakat (Gambar 2.2)



Sumber: Laporan Induk KLHS – RPJPD SBT 2025-2045

Gambar 2.2. Peta batas Ekologi Ekoregion Kabupaten SBT

b. Ekoregion dan Karakteristik Bentang Lahan

Ekoregion merupakan satuan bentang alam yang mencerminkan hubungan dinamis antar unsur lingkungan seperti udara, air, tanah, batuan, dan keanekaragaman hayati yang mempengaruhi keberlanjutan hidup manusia. Ekoregion juga menjadi parameter penting dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) berbasis ekosistem.

Berdasarkan hasil interpretasi spasial, ekoregion di Kabupaten SBT terbagi ke dalam empat tipe utama, yaitu:

1. Dataran
2. Lembah

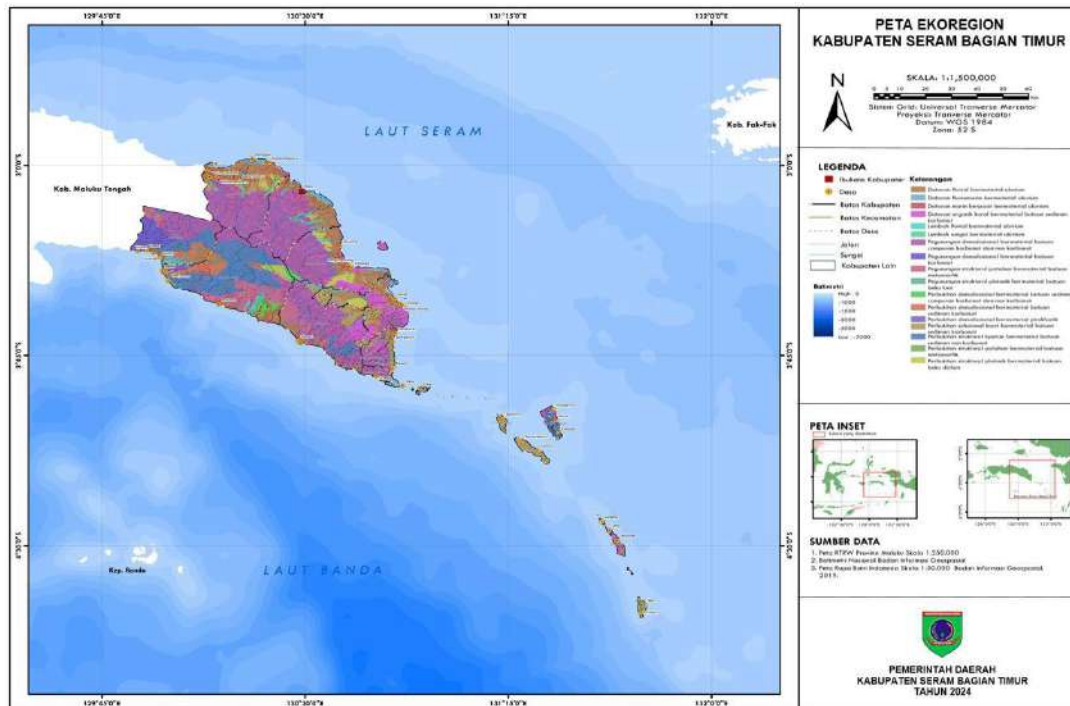
3. Perbukitan
4. Pegunungan

Beberapa ekosistem utama dan fungsi lingkungannya dijelaskan pada tabel 2.2 dan sebarannya secara spasial diperlihatkan pada gambar 2.3.

Tabel 2.2. Ekoregion Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Ekoregion (Bentang Alam)	Karakteristik Umum	Luas	
			km ²	%
1	Dataran fluvial bermaterial alluvium	Relief datar, bahan aluvial, fungsi sebagai pelindung abrasi dan pariwisata alam pesisir	926,32	16,11
2	Dataran fluviomarin bermaterial alluvium	Zona transisi sungai dan laut, potensi pertanian dan budidaya pesisir	100,59	1,75
3	Dataran marin berpasir bermaterial alluvium	Pantai berpasir, penting untuk pariwisata dan perlindungan ekosistem pesisir	67,25	1,17
4	Dataran organik koral bermaterial batuan sedimen karbonat	Dataran koral, mendukung habitat laut dangkal dan keanekaragaman hayati	312,81	5,44
5	Lembah fluvial bermaterial alluvium	Lembah sungai datar, cocok untuk permukiman dan pertanian	30,62	0,53
6	Lembah sungai bermaterial alluvium	Aliran sungai aktif, mendukung irigasi dan kehidupan desa	105,75	1,84
7	Pegunungan denudasional bermaterial batuan campuran karbonat dan non karbonat	Luas dominan, proses pelapukan tinggi, hutan dipterokarpa pamah	2191,68	38,11
8	Pegunungan denudasional bermaterial batuan karbonat	Pegunungan tua dengan batu gamping, habitat alami spesifik	168,41	2,93
9	Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	Relief terjal, pengatur iklim lokal dan sumber air permukaan	346,93	6,03
10	Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku luar	Pegunungan kecil dari batuan beku, potensi geotourism	7,68	0,13
11	Perbukitan denudasional bermaterial sedimen campuran karbonat dan non karbonat	Bukit hasil erosi, bervegetasi campuran	61,51	1,07
12	Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	Bukit batu gamping, potensi gua dan sumber air tanah	126,66	2,20
13	Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik	Bukit dari hasil letusan gunung api, tanah subur lokal	22,31	0,39
14	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	Topografi karst, gua bawah tanah, habitat kelelawar, wisata alam	361,59	6,29
15	Perbukitan struktural lipatan bermaterial sedimen non karbonat	Struktur lipatan aktif, batu pasir, napal, cocok untuk konservasi	745,8	12,97
16	Perbukitan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik	Bukit terjal dari batuan keras, potensi air permukaan	17,47	0,30
17	Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	Bukit dari intrusi magma, bentuk unik, cocok geowisata	157,59	2,74
Jumlah			5750,97	100,00

Sumber: Hasil analisis Tim KLHS RPJPD Kabupaten SBT, 2024



Sumber: Laporan Induk KLHS – RPJPD SBT 2025-2045

Gambar 2.3. Peta Ekoregion Kabupaten Seram Bagian Timur

3. Geomorfologi dan Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur

Berdasarkan kajian geomorfologi, Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan keragaman bentang alam yang cukup signifikan, yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipe utama: vulkanik, denudasional, solusional, dan fluvial.

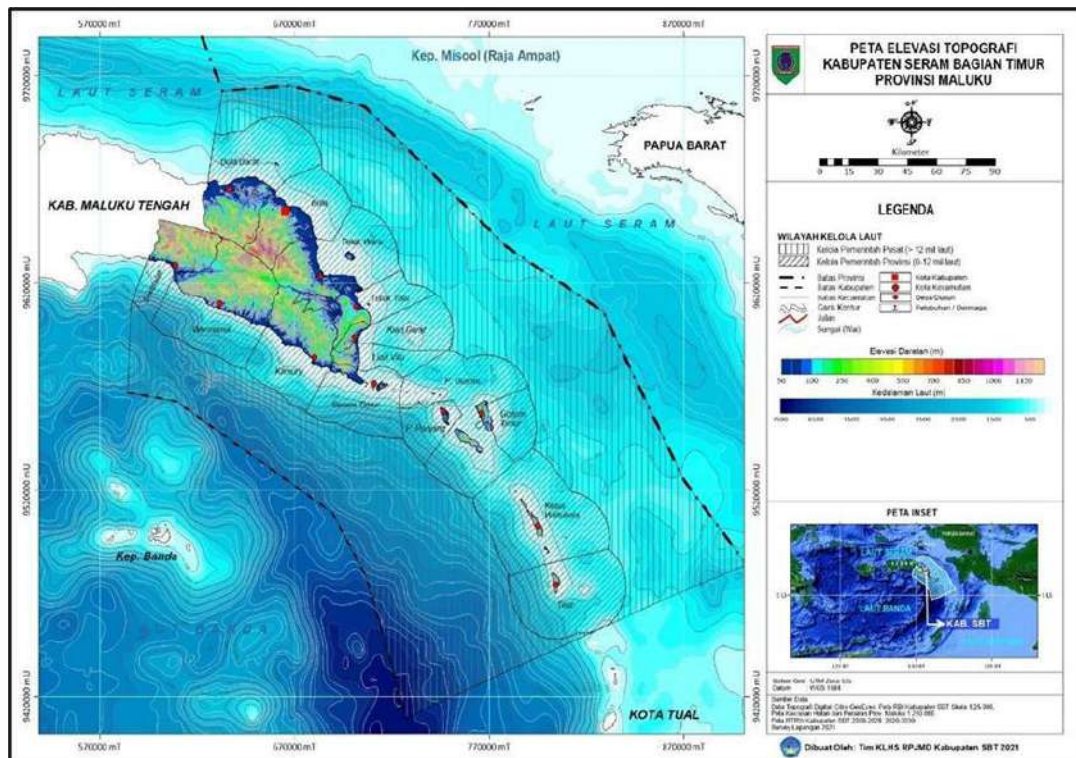
- Bentang alam vulkanik dicirikan oleh adanya formasi pegunungan dan lereng yang curam, membentuk topografi yang dramatis dan menantang. Wilayah ini umumnya memiliki kerentanan tinggi terhadap erosi dan tanah longsor.
- Bentang alam denudasional terbentuk akibat proses pelapukan dan erosi jangka panjang, menghasilkan formasi pegunungan dan perbukitan dengan ciri khas berupa kubah dan punggung melengkung. Bentang ini menciptakan lanskap yang unik dan memiliki nilai estetika tinggi.
- Bentang alam solusional terbentuk melalui proses pelarutan batuan karbonat, seperti batugamping, yang membentuk topografi karst seperti bukit kerucut, dolina, dan gua bawah tanah.
- Bentang alam fluvial terbentuk oleh aktivitas aliran sungai yang memahat dataran rendah dan lembah-lembah, sering kali ditandai dengan adanya endapan aluvium yang subur dan cocok untuk pemukiman maupun pertanian.

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada kisaran ketinggian rata-rata antara 0–500 meter hingga 500–1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kemiringan lahan di wilayah ini juga sangat bervariasi, mencakup kelas lereng:

- 0–3% (datar hingga sangat landai),
- 8–15% (landai hingga agak curam),
- 30–50% (curam), dan

- 50% (sangat curam).

Secara spasial mengenai distribusi topografi diperlihatkan pada peta elevasi topografi Kabupaten Seram Bagian Timur pada gambar 2.4



Sumber: Laporan Induk KLHS – RPJPD SBT 2025-2045

Gambar 2.4. Peta Elevasi Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur

4. Karakteristik Kemiringan Lereng di Kabupaten Seram Bagian Timur

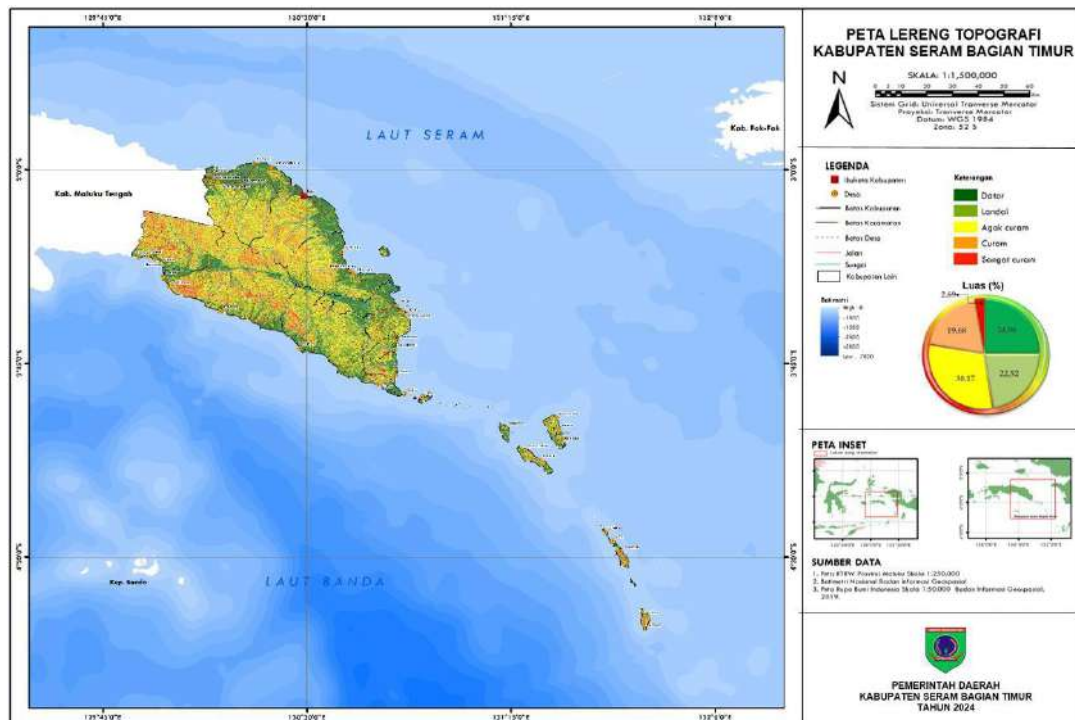
Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan dua tipe kelereng yang dominan, yaitu elevasi rendah dengan kontur bergelombang dan bergelombang kasar yang terjal, serta elevasi menengah dengan karakteristik serupa, yang cenderung memiliki lereng lebih curam pada bagian selatan dan timur wilayah. Kondisi ini mencerminkan dinamika geomorfologi wilayah yang kompleks dan beragam.

Berdasarkan interpretasi peta pada Gambar 2.6 klasifikasi kemiringan lereng di wilayah ini dapat dirinci sebagai berikut:

- Datar hingga landai (0,0–8,0%): mencakup area seluas 1.434,37 km² atau 24,94% dari total daratan.
- Landai (8,0–15,0%): mencakup 1.294,93 km² (22,52%).
- Agak curam (15,0–25,0%): mencakup 1.734,83 km² (30,17%), menjadikannya kategori kelereng dengan luas terbesar.
- Curam (25,0–45,0%): seluas 1.132,42 km² (19,68%).
- Sangat curam (>45,0%): mencakup 154,42 km² atau 2,69% dari total wilayah daratan Kabupaten SBT.

Kondisi kelereng ini memengaruhi banyak aspek penggunaan lahan, mulai dari kesesuaian untuk permukiman, pertanian, hingga konservasi. Wilayah dengan lereng yang curam hingga sangat curam umumnya memiliki keterbatasan dalam pembangunan dan rentan terhadap erosi serta bencana longsor, sementara wilayah

datar hingga landai lebih potensial untuk pengembangan kawasan produktif.



Sumber: Laporan Induk KLHS – RPJPD SBT 2025-2045

Gambar 2.5. Peta Kelerengan Kabupaten SBT

5. Jenis Tanah di Kabupaten Seram Bagian Timur

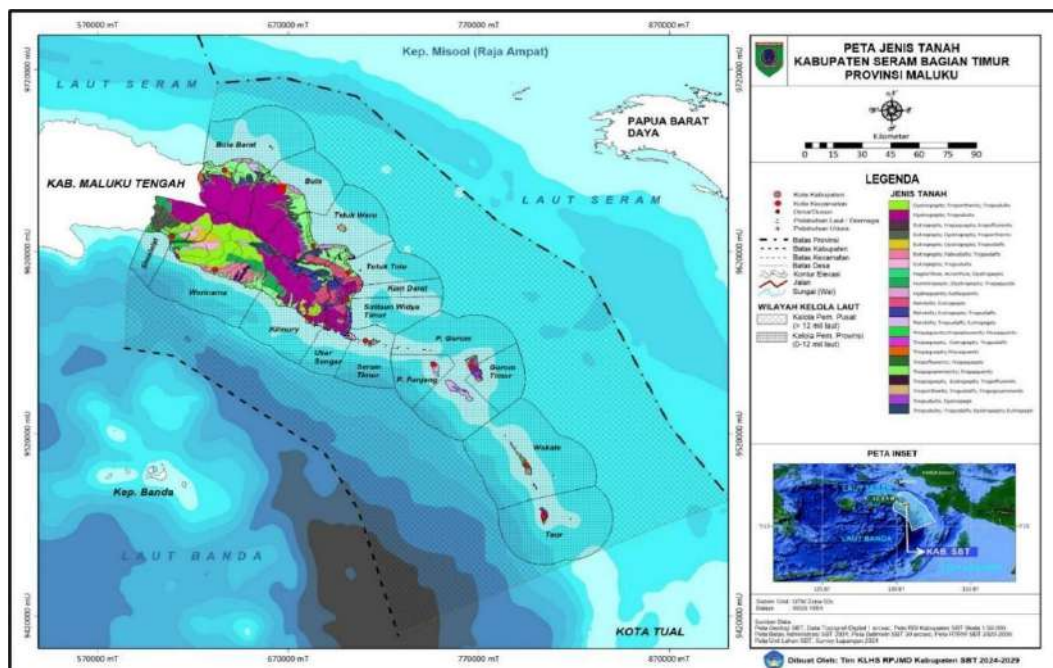
Mayoritas tanah di Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari jenis tanah kompleks, yang meliputi tanah Alluvial, Inceptisol, Ultisol, serta jenis-jenis tanah kompleks lainnya. Berdasarkan Gambar 2.6 jenis tanah yang memiliki cakupan wilayah terluas adalah tanah Alluvial dengan luasan mencapai 3.146,34 km² (63,95%), sedangkan tanah Flufisol distrik merupakan jenis dengan sebaran terkecil, seluas 669,39 km² (13,61%).

Klasifikasi dan Karakteristik Jenis Tanah

1. Dystropepts Dalam klasifikasi Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2022), Dystropepts merupakan bagian dari ordo Inceptisol, termasuk ke dalam subordo Tropepts. Jenis tanah ini menunjukkan tingkat perkembangan sedang dengan horizon kambik, namun belum mencapai kriteria horizon argilik. Tanah ini memiliki karakteristik pH masam, kejenuhan basa rendah, dan umumnya terdapat di lereng perbukitan atau pegunungan. Di Kabupaten SBT, Dystropepts tersebar pada lahan yang berpotensi untuk pertanian, kehutanan, dan konservasi sumber daya alam.
2. Ultisols adalah tanah tua dengan pelapukan intensif, ditandai oleh horizon iluviasi liat silikat (argilik atau kandik) dan kejenuhan basa <35%. Jenis tanah ini banyak ditemukan pada wilayah dataran, perbukitan, dan pegunungan vulkanik di Kabupaten SBT, terutama pada bahan induk seperti lempung, batupasir, andesit, dan basal, dengan kemiringan lahan berkisar antara 8%–40%. Ultisol mengandung mineral liat sekunder seperti kaolinit, gibsit, dan oksida besi/aluminium, yang umumnya menyebabkan reaktivitas tanah rendah dan ketersediaan unsur hara terbatas.
3. Eutropepts merupakan great group dari ordo Inceptisol, subordo Udepts, yang

berkembang pada daerah dengan kelembapan tanah cukup tinggi sepanjang tahun. Jenis tanah ini memiliki kejenuhan basa tinggi dan kesuburan sedang hingga tinggi. Di Kabupaten SBT, Eutropepts dapat ditemukan pada dataran rendah dan cekungan yang masih mendapat pengaruh aktivitas aliran sungai. Tanah ini berwarna kelabu atau coklat, bertekstur liat berpasir, dan cocok untuk pertanian intensif.

4. Tropaquepts merupakan bagian dari subordo Aquepts dalam ordo Inceptisol, berkembang di lahan cekung dan datar yang mengalami kejenuhan air secara periodik. Tanah ini terbentuk dari endapan aluvium, dan dicirikan oleh kondisi reduksi-oksidasi yang menghasilkan warna karatan (mottling). Di Kabupaten SBT, Tropaquepts banyak dijumpai pada daerah rawan genangan dan cocok untuk pemanfaatan lahan basah, pertanian lahan sawah, dan hutan rawa.
5. Tropudults merupakan great group dari ordo Ultisol, subordo Udults. Tanah ini terbentuk di daerah tropis basah dengan kandungan lempung tinggi dan pelapukan intensif. Kejenuhan basa rendah, serta terbentuknya horizon argilik, menjadi ciri utama tanah ini. Di Kabupaten SBT, Tropudults berkembang dari material batuan sedimen atau vulkanik pada lahan dengan relief bervariasi, dan sering dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian berkelanjutan dan kehutanan konservatif.



Sumber: Laporan Induk KLHS – RPJPD SBT 2025-2045

Gambar 2.6. Peta Jenis Tanah Kabupaten Seram Bagian Timur

6. Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi di Kabupaten Seram Bagian Timur

Berdasarkan tinjauan hidrogeologi, wilayah Kepulauan Maluku dapat diklasifikasikan ke dalam empat mandala air tanah (groundwater province), sebagaimana dikemukakan oleh Souisa (2018), yaitu:

1. Mandala air tanah dataran
2. Mandala air tanah gunung api strato
3. Mandala air tanah karst
4. Mandala air tanah perbukitan bergelombang

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sendiri termasuk dalam dua kelompok mandala air tanah, yakni:

1. Mandala Air Tanah Dataran

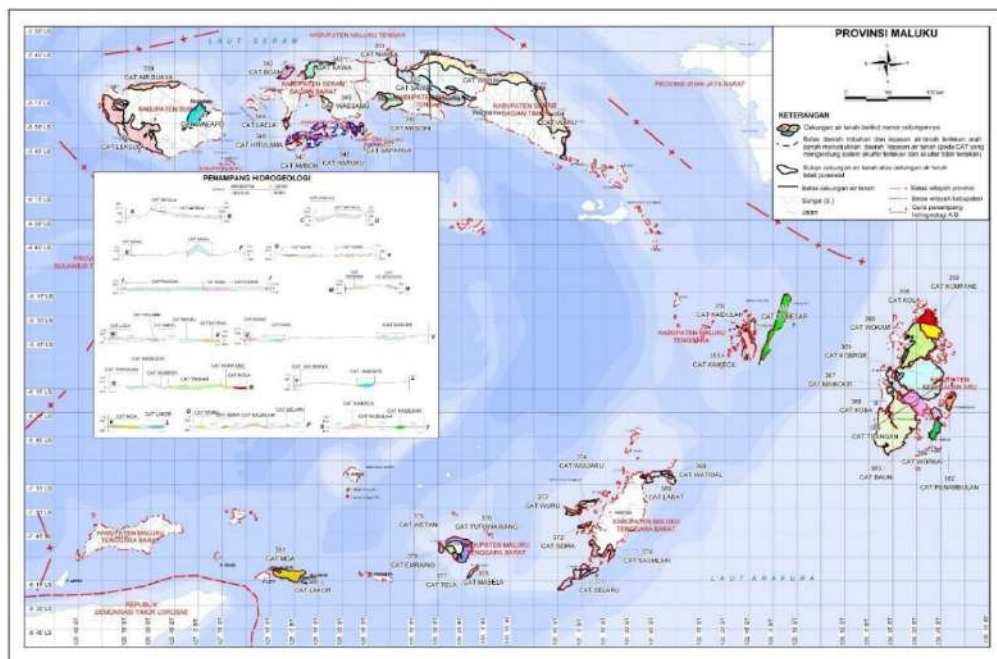
Mandala ini tersebar di daerah pantai, bantaran banjir (*floodplain*), dan dataran antar perbukitan. Ciri utama wilayah ini adalah:

- Batuan penyusun: material lepas hingga setengah padu, terdiri atas lempung, pasir, kerikil, dan kadang-kadang bongkah.
- Sifat aliran air tanah: mengalir melalui ruang antar butir, dengan sistem porositas primer.
- Potensi air tanah: umumnya berpotensi sedang, cocok untuk pemanfaatan domestik dan pertanian skala kecil.

2. Mandala Air Tanah Perbukitan Bergelombang

Mandala ini dibentuk oleh:

- Batuan penyusun: terdiri atas batuan sedimen, batuan malihan (metamorf), dan batuan beku dari zaman Tersier.
- Karakteristik: batuan bersifat padu dan kedap air (*impermeable rocks*), menyebabkan pergerakan air tanah sangat terbatas dan bergantung pada rekahan atau celah sekunder.
- Potensi air tanah: relatif rendah, dengan suplai air tanah yang terbatas, sehingga perlu pengelolaan konservatif dan efisien.



Sumber: Pamsimas, 2024

Gambar 2.7. Cekungan Air Tanah Provinsi Maluku

Dalam konteks sistem pengelolaan air tanah, Cekungan Air Tanah (CAT) digunakan sebagai unit perencanaan dan pengelolaan. Seperti ditunjukkan dalam gambar 2.7 CAT menjadi acuan dalam:

- Perumusan kebijakan pengelolaan air tanah,
- Strategi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air tanah,
- Pemantauan dan evaluasi terhadap daya rusak dan kapasitas dukung air tanah.

Pendekatan berbasis CAT ini penting untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan air tanah di tengah dinamika penggunaan lahan dan perubahan iklim. Berdasarkan peta gambar 2.7, Kabupaten Seram Bagian Timur tercakup dalam dua Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu:

- CAT Wahai
- CAT Waru

Namun hingga saat ini, penetapan resmi CAT di wilayah administrasi Kabupaten Seram Bagian Timur masih belum dilakukan secara definitif berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah. Keputusan ini hanya mencakup CAT lintas kabupaten/kota, sehingga wilayah administratif yang berada di dalam satu kabupaten, seperti SBT, belum memiliki penetapan formal meskipun telah teridentifikasi keberadaan CAT-nya.

Kriteria Penetapan Cekungan Air Tanah, Menurut regulasi, suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai CAT jika memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologi dan/atau kondisi hidraulik air tanah.
2. Memiliki daerah imbuhan dan luasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah yang terintegrasi.
3. Memiliki satu kesatuan sistem akuifer yang berkesinambungan secara hidrogeologis.

Penilaian Potensi Ketersediaan Air Tanah, Penilaian terhadap potensi air tanah (groundwater quantity) di suatu CAT dilakukan dengan mempertimbangkan jenis aliran air tanah, antara lain:

- Air tanah bebas (tidak tertekan),
- Air tanah semi-tertekan, dan
- Air tanah tertekan.

Dari hasil evaluasi umum, wilayah yang memiliki potensi ketersediaan air tanah relatif tinggi di Kabupaten SBT terdapat pada mandala air tanah perbukitan bergelombang, yang mencakup sebagian wilayah CAT Wahai dan CAT Waru.

Mandala ini dikontrol oleh litologi akuifer yang terdiri dari:

- Breksi vulkanik
- Lava
- Tuf gunungapi
- Batu gamping koral

Jenis batuan ini umumnya bersifat akuifer produktif, khususnya jika memiliki banyak rekahan atau pori sekunder, yang memungkinkan terjadinya penyimpanan dan pergerakan air tanah dalam jumlah besar.

a. Pola Aliran Sungai dan Dinamika Hidrologi di Kabupaten Seram Bagian Timur

Larian air (runoff) yang berasal dari curah hujan di permukaan tanah pada awalnya mengalir dalam bentuk sheetwash, yakni lapisan tipis air setebal beberapa milimeter yang bergerak di atas permukaan tanah. Seiring waktu, sheetwash ini mulai mengerosi substrat (lapisan dasar tanah atau batuan) di bawahnya. Menurut Souisa (2018), tingkat erosi yang terjadi sangat tergantung pada kecepatan aliran, kekuatan (kekompakan dan resistensi) substrat, serta keberadaan dan kerapatan vegetasi penutup.

Pada bagian substrat yang lebih lemah, sheetwash mulai membentuk alur kecil akibat proses downcutting (pengikisan vertikal), yang kemudian berkembang menjadi saluran aliran air permanen atau semi permanen. Proses ini merupakan cikal bakal terbentuknya sistem sungai.

Aliran air di dalam saluran dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

- Aliran saluran terbuka (open channel flow), yakni aliran yang permukaannya bersentuhan langsung dengan atmosfer dan banyak dijumpai di sungai, saluran irigasi, saluran drainase, dan kanal.
- Aliran saluran tertutup (pipe flow), yang terjadi di bawah permukaan tanah, biasanya dalam bentuk aliran air tanah di dalam akuifer, dan bergerak akibat tekanan hidrostatik atau gradien hidrolik.

Sungai-sungai di Kabupaten Seram Bagian Timur terbentuk mengikuti penampang topografi dari wilayah hulu di pegunungan menuju ke hilir dan akhirnya bermuara ke laut. Pola aliran sungai dibentuk oleh struktur geologi, seperti patahan, rekahan, dan sistem perlipatan batuan.

b. Pola Aliran Sungai di Kabupaten SBT

Berdasarkan analisis morfologi dan geologi, sungai-sungai di wilayah ini menunjukkan beragam pola aliran, antara lain:

- Pola dendritik: berkembang pada batuan homogen dan relatif datar, menyerupai cabang pohon.
- Pola paralel: terjadi pada lereng curam atau pada daerah dengan struktur batuan berlapis sejajar.
- Pola trellis: berkembang pada daerah dengan lipatan sinklin dan antiklin.
- Pola rektanguler: dikontrol oleh sistem rekahan atau patahan tegak lurus.
- Pola radial: ditemukan di sekitar puncak gunung atau kubah vulkanik, mengalir menjauhi pusat.

Wilayah Kabupaten SBT dilintasi oleh 132 sungai besar dan kecil, baik yang bersifat permanen maupun intermiten. Di antara sungai-sungai tersebut, terdapat dua sungai besar yang mengalir sepanjang tahun (perennial), yaitu:

- Sungai Bobot di Kecamatan Werinama, dengan lebar sekitar 70 meter.
- Sungai Masiwang, yang berfungsi sebagai batas alami antara Kecamatan Teluk Waru dan Kecamatan Tutuk Tolu, dengan lebar sekitar 85 meter.

Tingkat kerapatan jaringan sungai (drainage density) di Kabupaten SBT tergolong tinggi, mencerminkan kondisi topografi yang relatif curam dan substrat yang memungkinkan terbentuknya jaringan sungai yang luas dan kompleks. Hal ini berdampak pada tingginya kapasitas infiltrasi dan aliran permukaan, serta penting dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), konservasi tanah, dan pengendalian banjir.

Tabel 2.3. Geometri sungai besar di Kabupaten SBT

No	Nama Sungai Besar Kecil	Panjang (km)	Luas DAS (km ²)	No	Nama Sungai Besar Kecil	Panjang (km)	Luas DAS (km ²)
1	Wai Matakabu	40,12	208,50	24	Wai Kian	8,84	188,41
2	Wai Bubi	39,85	114,10	25	Wai Aruan	4,72	17,39
3	Wai Kapailuw	24,37	691,32	26	Wai Salagur	8,41	282,54

No	Nama Sungai Besar Kecil	Panjang (km)	Luas DAS (km ²)
4	Wai Fufa	31,51	148,90
5	Wai Englas	4,76	22,20
6	Wai Lola Besar	25,97	15,62
7	Wai Lola Kecil	8,35	417,70
8	Wai Suat	2,60	19,20
9	Wai Bula Air	16,23	77,37
10	Wai Balifar	33,24	120,23
11	Wai Salas	25,37	109,42
12	Wai Kola	25,98	2.504,07
13	Wai Niff	22,17	96,81
14	Wai Meer	18,25	88,08
15	Wai Dawang	4,02	841,56
16	Wai Beli	22,27	76,12
17	Wai Fesan	1,20	8,16
18	Wai Masiwang	82,64	473,54
19	Wai Sesar Gah	13,74	178,07
20	Wai Danama	0,84	4,62
21	Wai Keliga	2,39	36,99
22	Wai Angar	2,43	20,26
23	Wai Artafela	3,18	8,27

No	Nama Sungai Besar Kecil	Panjang (km)	Luas DAS (km ²)
27	Wai Keta	10,84	112,77
28	Wai Suru	3,02	25,62
29	Wai Urung	5,67	25,88
30	Wai Bitorik	8,51	108,17
31	Wai Guli-Guli	8,15	163,04
32	Wai Batu Mangar	3,25	7,59
33	Wai Tum	15,16	1.001,14
34	Wai Osong	11,93	341,46
35	Wai Batu Asa	8,35	52,53
36	Wai Hatumeten	6,93	338,49
37	Wai Bobot	39,61	959,31
38	Wai Arewan	2,05	1,36
39	Wai Kinali	2,55	0,21
40	Wai Samboru	1,79	0,01
41	Wai Dulak	2,13	0,15
42	Wai Dai	2,05	0,04
43	Wai Buan	1,29	0,02
44	Wai Miran	3,36	0,27
45	Wai Derak	1,82	0,03

Sumber: Kabupaten SBT Dalam Angka, 2019

c. Dinamika Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Implikasinya terhadap Hidrologi Wilayah

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dari tahun ke tahun berdampak signifikan terhadap perubahan tata guna lahan, terutama pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Konversi lahan secara intensif untuk keperluan permukiman, pertanian, dan infrastruktur telah mengakibatkan degradasi fungsi hidrologis DAS, sehingga tidak mampu lagi mengelola limpasan air hujan secara optimal.

Kondisi ini diperparah saat musim hujan dengan intensitas tinggi, yang menyebabkan peningkatan debit aliran sungai secara drastis. Debit yang meningkat ini menjadi pemicu terjadinya erosi permukaan, longsor tebing, serta proses transportasi dan akumulasi sedimen. Sedimen atau material debris yang terbawa oleh aliran air bergerak dengan kecepatan tinggi menuju wilayah dataran rendah. Pada titik tertentu, kecepatan aliran mulai menurun, menyebabkan butiran sedimen mengendap di beberapa lokasi strategis, seperti:

- Meander sungai, membentuk teras sungai (river terrace).
- Hilir sungai, membentuk kipas alluvial (alluvial fan).
- Muara sungai, membentuk delta, sebagai hasil interaksi antara proses fluvial dan kelautan (Souisa, 2018).

d. Pola Arah Aliran dan Karakteristik DAS

Berdasarkan kondisi topografi dan morfologi wilayah, pola aliran sungai di

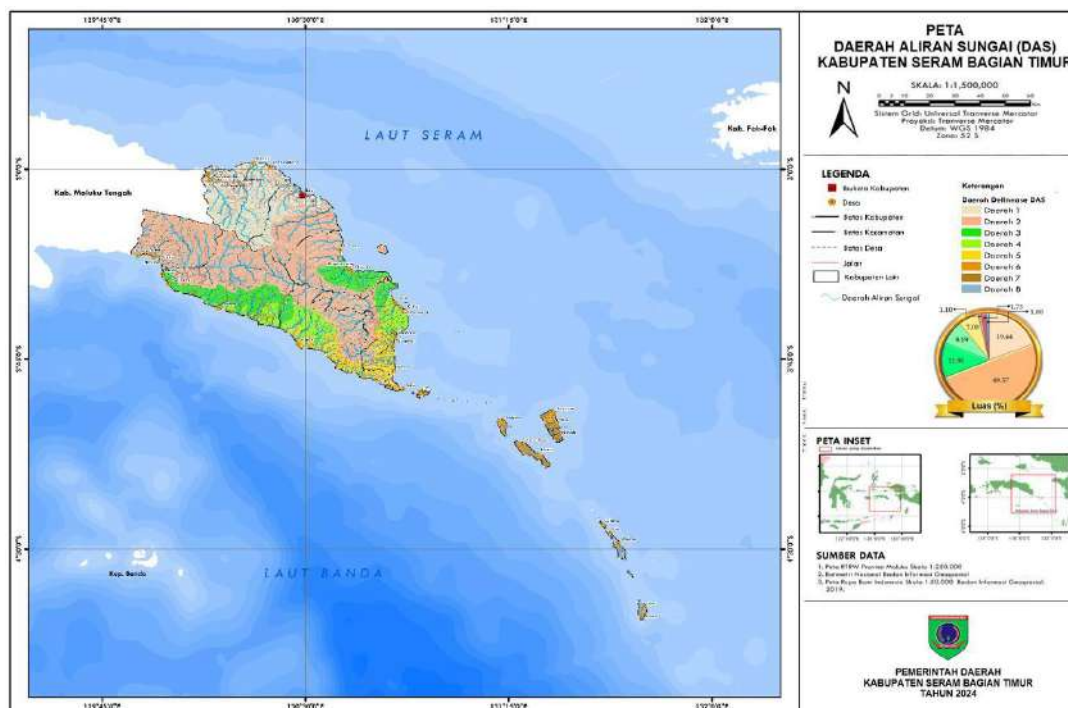
Kabupaten SBT dapat diklasifikasikan ke dalam empat arah utama aliran sungai berikut:

1. DAS Masiwang – Mengalir ke arah timur, dengan kecepatan aliran sedang hingga tinggi.
2. DAS Matakabu – Mengalir ke arah utara, dengan kecepatan aliran sedang hingga tinggi.
3. DAS Bobot – Mengalir ke arah barat, dengan kecepatan aliran tinggi hingga sangat tinggi.
4. DAS Wai Bubi – Mengalir ke arah utara, dengan kecepatan aliran tinggi hingga sangat tinggi.

Potensi dan Peran DAS dalam Pertanian dan Hidrologi. Wilayah DAS, terutama di dataran rendah seperti Masiwang dan Bobot, merupakan kawasan produktif untuk budidaya pertanian. Daerah ini menjadi pusat produksi buah-buahan, sayuran, dan komoditas pertanian lainnya yang penting bagi ketahanan pangan lokal. Selain sebagai daerah pertanian, DAS tersebut juga berfungsi sebagai daerah imbuhan air tanah (recharge area).

Secara hidrogeologis, wilayah ini memiliki tipe air tanah sebagai berikut:

- Air tanah tidak tertekan, yang dominan pada elevasi 0,0 – 36,0 meter di atas permukaan laut, dengan kedalaman muka air tanah rata-rata kurang dari 5 meter di bawah muka tanah (mbmt).
- Pola aliran air tanah tidak tertekan relatif sejajar dengan kontur topografi, mengalir dari kaki perbukitan menuju ke pusat dataran.
 - Di DAS Masiwang, aliran air tanah bergerak ke arah barat mengikuti arah aliran permukaan.
 - Di DAS Matakabu, aliran bergerak ke arah utara, juga konsisten dengan arah aliran sungai di permukaan.



Sumber: Laporan Induk KLHS – RPJPD SBT 2025-2045

Gambar 2.8. Peta DAS Kabupaten Seram Bagian Timur

e. Zonasi Neraca Air Tanah Berdasarkan Morfologi dan Geologi

Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Seram Bagian Timur sangat dipengaruhi oleh kontrol batuan dasar dan struktur geologi yang mendasarinya. Karakteristik tersebut memainkan peran penting dalam membentuk pola pergerakan dan penyimpanan air tanah di wilayah ini. Berdasarkan analisis morfologi wilayah dan struktur geologi, neraca air tanah di Kabupaten SBT dapat diklasifikasikan ke dalam dua zona utama, yaitu:

1. Zona Air Tanah Sedang hingga Tinggi (Punggung Pemisah Air Morfologis)
Zona ini secara umum menempati wilayah-wilayah punggung morfologi (morphological water divide), yaitu area puncak topografi yang berfungsi sebagai pemisah alami antara satu DAS dengan DAS lainnya. Lokasi ini merupakan titik-titik strategis sebagai daerah tangkapan hujan (catchment area) yang mengalirkan air ke empat DAS utama (Masiwang, Matakabu, Bobot, dan Wai Bubi). Selain itu, zona serupa juga terdapat di bagian selatan wilayah Kabupaten SBT, di mana terdapat dua punggung morfologis yang berfungsi sebagai penampung dan penyimpan air tanah alami.
2. Zona Air Tanah Sedang hingga Tinggi (Perimeter Wilayah Kabupaten SBT)
Zona ini hampir mengelilingi seluruh batas wilayah Kabupaten SBT, dan berpotensi tinggi dalam menyimpan air tanah, terutama apabila sistem vegetasi dan penutup lahan alami tetap terjaga. Kelestarian vegetasi memiliki peran kunci dalam mendukung daya peresapan air (*recharge rate*) serta mengurangi laju limpasan permukaan (*surface run-off*) yang berlebihan. Dengan sistem vegetasi yang stabil, infiltrasi air hujan ke dalam tanah meningkat, memungkinkan pembentukan akuifer yang efisien serta menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah.

f. Karakteristik Sungai dan Debit Sungai di Kabupaten Seram Bagian Timur

Sungai, sebagai salah satu bentuk saluran terbuka, memiliki karakteristik yang sangat bervariasi tergantung pada elemen-elemen fluidanya, seperti kecepatan aliran dan luas saluran. Kecepatan aliran dan luas saluran yang diperoleh di setiap titik pengamatan akan menghasilkan besaran debit sungai, yang digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk penyediaan air untuk irigasi, kebutuhan rumah tangga, serta industri lainnya.

Di Kabupaten Seram Bagian Timur, terdapat sejumlah sungai dan mata air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, terutama untuk rumah tangga dan pertanian. Salah satu sungai utama yang sangat vital bagi irigasi adalah Sungai Masiwang dan Sungai Bobot, yang memiliki aliran stabil sepanjang tahun. Kedua sungai ini sangat berperan dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian, khususnya di wilayah dataran rendah, yang mengandalkan air sungai untuk pengairan tanaman.

Pola aliran sungai-sungai besar seperti Sungai Masiwang, Sungai Bobot, serta beberapa sungai kecil lainnya di Kabupaten SBT, umumnya bersifat dendritik. Pola

dendritik mengindikasikan bahwa aliran sungai mengarah dari daerah pegunungan menuju dataran rendah dan akhirnya bermuara di pesisir laut.

Selama musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, debit air yang meningkat pada sungai-sungai besar ini berisiko menyebabkan banjir. Luapan air dari sungai sering kali menyebar ke area sekitar aliran, bahkan meluas ke area vegetasi di sekitarnya. Banjir yang terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan sungai menampung volume air yang berlebih, yang akhirnya meluap ke sepanjang sisi kiri dan kanan sungai hingga beberapa meter dari batas normalnya.

g. Danau Sole: Ekosistem Unik di Kabupaten Seram Bagian Timur

Danau merupakan suatu bentuk ekosistem air dengan kandungan fluida cair yang menempati wilayah relatif kecil pada permukaan bumi jika dibandingkan dengan laut dan daratan. Meskipun dari segi luas wilayah danau lebih kecil, namun peranannya sangat penting dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia (Connell dan Miller, 1995).

Salah satu ekosistem danau yang unik di Provinsi Maluku adalah Danau Sole, yang terletak di Pulau Manowaku, Desa Amarsekaru, Kecamatan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Danau ini dikenal sebagai danau asin, menjadikannya sebagai danau terunik di Maluku.

Karakteristik dan Morfologi Danau

Danau Sole terbagi menjadi dua bagian utama:

- Danau Sole Besar, yang dikelilingi oleh dinding-dinding karang dengan ketinggian sekitar ± 12 meter. Di sekeliling danau terdapat kawasan hutan cemara yang padat, khususnya pada bagian sempadan danau.
- Danau Sole Kecil, yang memiliki bentuk lebih terbuka dan kedalaman yang lebih rendah dibandingkan Danau Sole Besar.

Danau Sole memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait:

1. Fungsi Ekologis
 - Sebagai habitat organisme air.
 - Mengontrol keseimbangan air terutama saat terjadi pasang dan surut.
 - Berperan dalam menjaga iklim mikro di wilayah sekitarnya.
2. Fungsi Sosial
 - Menyediakan pemandangan alam yang indah, sehingga menjadi potensi lokasi rekreasi dan edukasi masyarakat lokal.
3. Fungsi Ekonomi
 - Berpotensi sebagai sumber perikanan air payau dan tempat budidaya ikan.
 - Dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata, baik ecotourism maupun geotourism, yang berskala lokal hingga internasional.

Meskipun memiliki potensi yang besar, hingga saat ini Danau Sole belum dikelola secara maksimal. Pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menjaga fungsi ekologis danau sekaligus mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonominya.

7. Batimetri

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang terletak di Pulau Seram, dikelilingi oleh Laut Seram di utara, Laut Arafura di timur, dan Laut Banda di selatan. Letak

geografis ini menempatkan wilayah SBT dalam zona terbuka terhadap energi gelombang tinggi, baik saat musim Barat maupun musim Timur, terutama dengan keberadaan arus kuat dari arah selatan pada musim Timur (April–Juni).

Secara geologis, Pulau Seram berada dalam formasi Busur Luar Kepulauan Non-Magmatik, menjadikan Laut Seram dan Laut Banda sebagai dua palung laut dalam yang signifikan. Kedalaman laut yang ekstrem di wilayah ini memiliki pengaruh besar terhadap dinamika oseanografi regional serta potensi sumber daya laut. Selain itu, keberadaan Jalur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, yang menghubungkan perairan Timur-Barat dan Utara Indonesia, semakin menambah pentingnya posisi strategis SBT, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002.

a. Morfologi Dasar Laut

Kabupaten SBT memiliki:

- Luas perairan laut: $\pm 14.877,77 \text{ km}^2$
- Panjang garis pantai: $\pm 627,58 \text{ km}$
- Wilayah kelola laut 0–4 mil: $\pm 6.947,98 \text{ km}^2$
- Wilayah perairan 4–12 mil: $\pm 12.189,82 \text{ km}^2$

Informasi batimetri (kedalaman laut) dan morfologi dasar laut sangat penting dalam perencanaan ruang laut, terutama untuk mendukung kegiatan industri, perikanan, dan transportasi laut. SBT merupakan wilayah yang dilintasi oleh pipa bawah laut untuk distribusi minyak dari kilang ke kapal tanker, dan juga jalur kabel listrik bawah laut di bagian timurnya.

Pada kedalaman 12 meter, telah ditetapkan sebagai lokasi single point mooring, yaitu titik tambat kapal yang berperan dalam sistem bongkar muat lepas pantai.

Di wilayah timur, terutama Tanjung Masiwang dan Teluk Waru, karakteristik perairannya merupakan laut dangkal dengan kedalaman maksimal sekitar 100 meter saat surut terendah (zero datum). Kedalaman ini bervariasi hingga batas isodepth 200 meter, dengan tingkat kemiringan lereng:

- Di dalam Teluk Waru: antara 1,2–3,7%
- Di luar teluk, menuju kedalaman 200 meter: kemiringan lereng mencapai 8,3–14,3%, dengan jarak dari garis pantai ke isodepth 200 meter berkisar 0,55–0,94 km

Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah pesisir SBT memiliki transisi batimetri yang relatif tajam di beberapa titik, yang penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan pelabuhan, pariwisata laut, dan konservasi ekosistem pesisir.

8. Pasang Surut Air Laut (*Tidal Conditions*)

Pasut merupakan perubahan tinggi rendahnya permukaan laut yang disebabkan oleh gaya tarik gravitasi matahari dan bulan, serta dipengaruhi oleh kondisi dasar laut, posisi benua dan pulau, serta gaya Coriolis. Tipe pasut suatu perairan dapat dibedakan menjadi:

- Tipe tunggal (diurnal): satu kali pasang dan surut per hari
- Tipe ganda (semi-diurnal): dua kali pasang dan surut per hari
- Tipe campuran: gabungan dari keduanya

Tipe pasut di perairan SBT tergolong pasut campuran dengan dominasi semi-diurnal (predominantly semi-diurnal tide), yang juga umum dijumpai di perairan Maluku. Ciri khasnya adalah dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari, dengan tinggi pasang pertama biasanya lebih rendah daripada pasang kedua.

Tunggang air (tidal range) maksimum di wilayah ini umumnya kurang dari 2,0 meter. Dengan kondisi topografi laut yang landai, saat surut terendah, sebagian besar dataran pasang surut dapat terlihat di atas permukaan air.

II. Potensi Sumber Daya Alam

1. Vegetasi Alami di Kabupaten Seram Bagian Timur

Berdasarkan salah satu parameter dalam kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), diketahui bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki 22 jenis vegetasi alami, yang setara dengan 55,0% dari total 40 jenis vegetasi alami yang tercatat di Provinsi Maluku (Gambar 2.9)

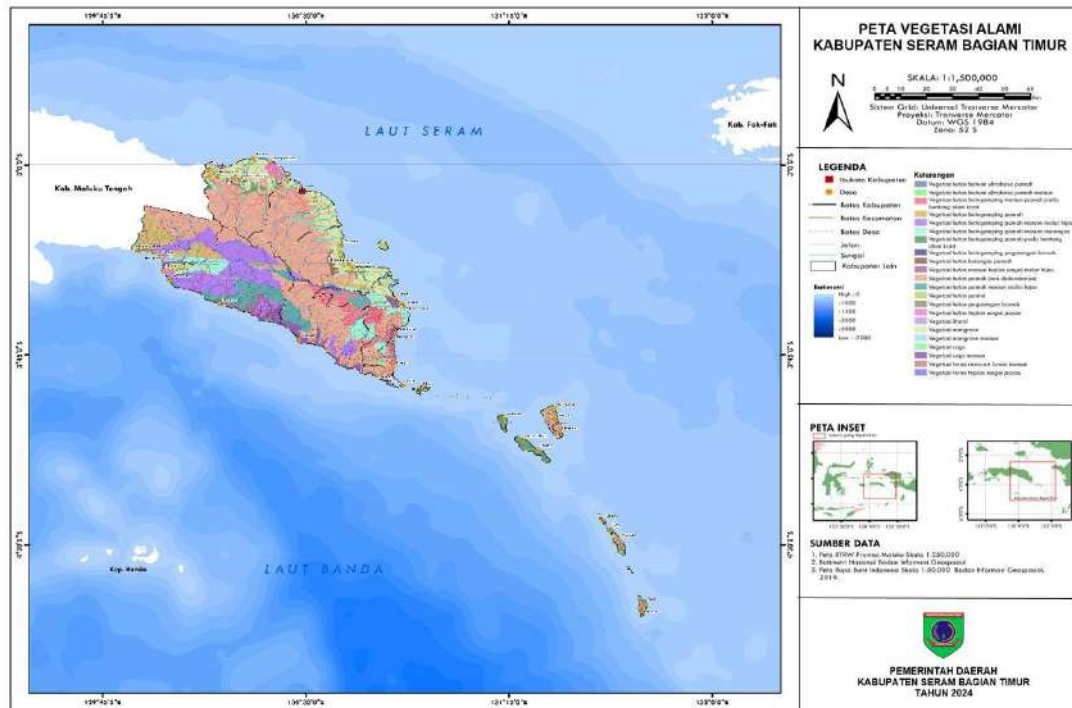
Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki keragaman vegetasi yang cukup tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap kekayaan hayati vegetasi alami di tingkat provinsi.

Vegetasi alami merupakan komponen biotik dalam suatu ekosistem yang terdiri atas berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami dan menempati wilayah atau relung ekologis tertentu. Jenis-jenis vegetasi ini mencakup berbagai bentuk penutupan lahan, seperti hutan, kebun, padang rumput, hingga kawasan tundra. Batas vegetasi didefinisikan sebagai zona transisi antara area dengan tutupan vegetasi yang jelas, seperti hutan, dan area yang memiliki tutupan vegetasi minim atau tidak ada sama sekali, seperti puncak bukit, pasir pantai, atau lahan berbatu dan berkerikil.

Jenis vegetasi alami yang paling dominan di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah vegetasi hutan pamah (non-dipterokarpa), yang mencakup luas sekitar 2.406,98 km² atau setara dengan 41,85% dari total luas wilayah daratan kabupaten. Selain itu, terdapat beberapa jenis vegetasi alami lainnya yang cukup signifikan, antara lain:

- Vegetasi hutan batu gamping pamah monsunal malar hijau, seluas 749,87 km² (13,04%)
- Vegetasi hutan mangrove, seluas 594,05 km² (10,33%)
- Vegetasi hutan batu gamping pamah monsunal merangas, seluas 321,23 km² (5,59%)

Keberagaman vegetasi alami ini tidak hanya mencerminkan tingginya potensi ekologi dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi salah satu indikator penting dalam perhitungan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, khususnya dalam hal regulasi iklim mikro, perlindungan tanah, dan konservasi air.



Sumber: Laporan Induk KLHS – RPJPD SBT 2025-2045

Gambar 2.9 Peta Vegetasi Alami Kabupaten Seram Bagian Timur

Selain jenis-jenis vegetasi dominan tersebut, terdapat pula beberapa tipe vegetasi alami lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luasan yang relatif lebih kecil. Keberadaan vegetasi ini, meskipun tidak mendominasi secara spasial, tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal, mendukung fungsi ekologis, serta menunjang daya dukung lingkungan secara keseluruhan. Informasi mengenai distribusi lengkap dan rincian luasan masing-masing jenis vegetasi alami di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jenis Vegetasi Alami di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Jenis Vegetasi	Karakteristik	Luas	
			km ²	%
1	Vegetasi hutan pamah (non-dipterokarpa)	Hutan dataran rendah, dominasi tumbuhan non-dipterokarpa, kelembaban tinggi.	2.406,98	44,57
2	Vegetasi hutan batu gamping pamah monsun malar hijau	Hutan hijau sepanjang tahun, tumbuh di tanah kapur, curah hujan musiman.	749,87	13,88
3	Vegetasi mangrove	Hutan pesisir pasang surut, akar napas (pneumatofor), habitat biota pesisir.	594,05	11,00
4	Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	Hutan musiman hijau, curah hujan sedang-tinggi, tutupan rapat.	352,99	6,54
5	Vegetasi hutan batu gamping pamah monsun merangas	Hutan semi-gugur, tumbuh di batu kapur, daun rontok saat kemarau.	321,23	5,95
6	Vegetasi hutan batu gamping pamah	Vegetasi khas tanah berbatu kapur, tajuk pohon sedang hingga tinggi.	279,83	5,18
7	Vegetasi hutan batu gamping monsun pamah pada bentang alam karst	Hutan karstik, beradaptasi dengan cekungan dan lereng curam, tanah dangkal.	228,74	4,24

No	Jenis Vegetasi	Karakteristik	Luas	
			km ²	%
8	Vegetasi hutan batu gamping pamah pada bentang alam karst	Hutan karstik, namun dengan tutupan vegetasi lebih terbuka.	148,79	2,75
9	Vegetasi hutan pantai	Vegetasi semak-pohon rendah, tahan salinitas dan abrasi laut.	145,18	2,69
10	Vegetasi hutan monsun tepian sungai malar hijau	Vegetasi sepanjang aliran sungai, tetap hijau sepanjang tahun.	45,41	0,84
11	Vegetasi hutan tepian sungai payau	Vegetasi di zona transisi air asin dan tawar, biasanya rawa-rawa.	33,47	0,62
12	Vegetasi kerangas pamah	Hutan di tanah pasir miskin hara, dominasi semak dan pohon kecil.	24,31	0,45
13	Vegetasi mangrove monsun	Mangrove yang mengalami musim kemarau panjang, produktivitas rendah.	24,82	0,46
14	Vegetasi litoral	Semak dan perdu di pasir pantai, tahan angin dan semprotan garam.	26,24	0,49
15	Vegetasi hutan batu gamping pegunungan bawah	Vegetasi di lereng batu gamping, suhu lebih dingin, pohon menengah.	2,29	0,04
16	Vegetasi hutan pegunungan bawah	Hutan dataran tinggi rendah, kelembaban tinggi, tajuk rapat.	5,15	0,10
17	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	Tumbuhan khas tanah logam berat (nikel, magnesium), keragaman rendah.	6,19	0,11
18	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun	Tumbuhan khas tanah logam berat, namun adaptif terhadap musim kering dan curah hujan rendah.	5,5	0,10
Jumlah			5.401,04	100,00

Sumber: Hasil analisis Tim KLHS RPJPD Kabupaten SBT, 2024

Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki kontribusi strategis terhadap kawasan regional maupun provinsi Maluku secara keseluruhan. Beberapa kontribusi utama tersebut meliputi:

1. Kontribusi Ekonomi

- Perikanan dan Kelautan: Dengan dominasi wilayah laut yang mencapai lebih dari 70% dari total wilayahnya, Kabupaten SBT memiliki potensi besar sebagai pusat produksi perikanan tangkap dan budidaya laut. Wilayah ini menyumbang hasil perikanan yang signifikan bagi kebutuhan konsumsi lokal maupun distribusi ke wilayah lain di Maluku dan luar provinsi.
- Pertanian dan Perkebunan: Di wilayah daratan, terutama di bagian timur dan selatan pulau, berkembang aktivitas pertanian dan perkebunan, seperti cengkih, pala, kelapa, dan sagu, yang menjadi komoditas unggulan daerah.

Tabel 2.5. Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Seram Bagian Timur (kg), 2024

Kecamatan	Kelapa	Cengkeh	Pala	Sagu
Pulau Gorom	1.018	445	346	28
Kesui Watubela	905	216	191	58
Teor	1.218	103	56	5
Gorom Timur	526	328	195	27

Kecamatan	Kelapa	Cengkeh	Pala	Sagu
Pulau Panjang	982	7	2	2
Seram Timur	541	349	60	584
Tutuk Tolu	570	507	75	2.671
Kilmury	1.068	575	69	2.881
Siritaun Wida Timur	341	245	57	530
Kian Darat	398	286	105	562
Werinama	1.713	398	114	1.097
Siwalalat	1.476	426	52	498
Bula	1.243	424	14	3
Bula Barat	1.312	67	43	3.474
Teluk Waru	1.114	139	49	7.108
Ukar Sengan	-	-	-	-
Seram Bagian Timur 2024	14.425	4.515	1.428	19.528
Seram Bagian Timur 2023	16.979,30	2.461,00	1.585,00	
Seram Bagian Timur 2022	16.979,30	5.046,20	1.363,85	
Seram Bagian Timur 2021	16.773,00	4.995,20	1.305,50	
Seram Bagian Timur 2020	16.728,70	4.963,00	1,298,55	

Sumber; Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2025, BPS

2. Kontribusi Infrastruktur dan Konektivitas

- o Kabupaten SBT berperan dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Kepulauan Maluku melalui pelabuhan laut dan jaringan transportasi laut. Beberapa pelabuhan pengumpul dan pelabuhan perintis berfungsi sebagai simpul logistik penting, mendukung distribusi barang dan mobilitas penduduk antarpulau.

3. Kontribusi Lingkungan Hidup dan Konservasi

- o Wilayah SBT memiliki kawasan pesisir, laut, dan hutan yang menjadi habitat penting keanekaragaman hayati, termasuk kawasan konservasi perairan dan hutan lindung. Fungsi ekologis ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas iklim mikro serta mendukung ketahanan lingkungan di kawasan timur Pulau Seram.
- o Potensi energi baru dan terbarukan, seperti tenaga air dan tenaga surya, juga menjadi perhatian dalam pengembangan wilayah berkelanjutan.

4. Kontribusi Sosial-Budaya

- o SBT memiliki kekayaan budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas Maluku, dengan peran penting dalam pelestarian tradisi, bahasa daerah, dan kearifan lokal masyarakat pesisir dan pedalaman.

a. Potensi Perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, didukung oleh letak geografis yang strategis di wilayah perairan timur Pulau Seram yang berbatasan langsung dengan Laut Seram, Laut Banda, dan perairan Laut Arafura. Wilayah ini termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715, yang dikenal sebagai salah satu kawasan

dengan produktivitas perikanan laut tertinggi di Indonesia.

1. Potensi Perikanan Tangkap

Perairan Kabupaten SBT yang luas, kaya akan sumber daya ikan pelagis dan demersal, menjadikannya sebagai kawasan yang potensial untuk kegiatan perikanan tangkap. Beberapa jenis ikan ekonomis penting yang menjadi target penangkapan antara lain:

- Ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, dan tongkol,
- Ikan pelagis kecil seperti layang, selar, dan kembung,
- Ikan demersal seperti kakap, kerapu, dan ekor kuning,
- Hasil laut lainnya seperti cumi-cumi, lobster, udang, dan rajungan.

Tabel 2.6. Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten SBT (Ton), 2020-2024

Kecamatan	Perikanan Laut				
	2020	2021	2022	2023	2024
Seram Timur	8.290	6.340	6.392	6.406	6.597
Bula	1.430	2.530	2.542	2.547	4.458
Pulau Gorom	2.585	3.785	3.805	4.411	2.827
Kesui Watubela	1.820	1.670	1.682	1.687	1.788
Werinama	775	985	997	1.002	1.052
Teor	1.385	900	900	965	1.014
Bula Barat	597	717	729	854	895
Pulau Panjang	767	787	789	854	880
Tutuk Tolu	589	599	611	716	724
Gorom Timur	425	465	469	534	563
Kilmury	245	255	255	370	388
Teluk Waru	104	218	230	345	352
Siwalalat	249	299	299	314	330
Kian Darat	159	169	181	306	318
Siritaun Wida Timur	129	139	151	250	258
Ukar Sengan	-	-	-	-	-
Seram Bagian Timur	19.549	19.858	20.032	21.561	22.444

Sumber: Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka, BPS

Tabel 2.7. Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten SBT (juta Rupiah), 2020-2024

Kecamatan	Perikanan Laut				
	2020	2021	2022	2023	2024
Seram Timur	199.505,00	82.225,00	95.900,42	108.902,00	98.957,70
Bula	32.820,00	32.814,00	38.913,02	43.299,00	66.872,70
Pulau Gorom	65.665,00	49.091,00	38.070,42	57.343,00	42.405,00
Kesui Watubela	41.790,00	21.660,00	16.840,42	16.870,00	16.094,16
Werinama	17.635,00	12.775,00	9.990,42	15.030,00	15.781,50
Bula Barat	15.090,00	9.300,00	8.768,42	8.695,43	13.419,00
Pulau Panjang	17.732,00	10.207,00	7.910,42	8.540,00	13.194,30
Teor	32.820,00	11.673,00	9.020,42	9.650,12	9.128,35
Gorom Timur	11.163,00	6.031,00	4.710,42	5.340,00	8.440,50
Tutuk Tolu	13.376,00	7.769,00	6.130,42	7.160,00	6.517,51
Teluk Waru	2.344,00	2.828,00	2.320,42	3.618,36	5.273,25

Kecamatan	Perikanan Laut				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kilmury	5.780,00	3.307,00	2.570,42	3.700,00	4.270,04
Siritaun Wida Timur	2.884,00	1.803,00	1.530,42	2.550,00	3.862,50
Siwalalat	5.788,00	3.878,00	3.010,42	3.140,00	3.628,13
Kian Darat	3.755,00	2.192,00	1.830,42	3.060,05	3.089,85
Ukar Sengan	-	-	-	-	-
Seram Bagian Timur	468.147,00	257.553,00	247.516,84	296.897,96	310.934,49

Sumber: Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2025, BPS

Data produksi perikanan laut tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa Kabupaten SBT memiliki potensi yang besar dan terus berkembang di sektor perikanan laut, baik dari sisi volume maupun penyebarannya yang merata di hampir seluruh kecamatan pesisir. Hal ini memberikan peluang besar untuk pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, termasuk penguatan rantai pasok, peningkatan kapasitas nelayan, dan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan perikanan dan unit pengolahan hasil tangkapan.

2. Potensi Perikanan Budidaya

Selain perikanan tangkap, Kabupaten SBT juga memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan budidaya, baik budidaya laut (marikultur), budidaya tambak, maupun budidaya air tawar. Kawasan pesisir dengan ekosistem teluk dan perairan tenang sangat cocok untuk budidaya komoditas laut seperti:

- Rumput laut (*Eucheuma* sp.)
- Ikan kerapu dan kakap melalui sistem keramba jaring apung (KJA)
- Kerang mutiara dan tiram

Sementara itu, di wilayah daratan dengan ketersediaan sumber air tawar, komoditas yang dapat dikembangkan meliputi ikan nila, lele, dan gurami. Kecamatan Siritaun Wida Timur dan Teluk Waru tercatat sebagai wilayah dengan potensi budidaya air payau dan air tawar yang menjanjikan.

Meskipun potensi besar dimiliki, sektor perikanan di Kabupaten SBT menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain:

- Keterbatasan armada dan alat tangkap yang ramah lingkungan,
- Minimnya akses nelayan terhadap pembiayaan dan pelatihan teknis,
- Infrastruktur pendukung yang belum merata,
- Pengelolaan sumber daya perikanan yang masih bersifat ekstensif.

Dengan kekayaan potensi perikanan tangkap dan budidaya yang dimiliki, Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki peluang strategis untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan sangat diperlukan agar sektor ini dapat berkembang secara optimal tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam laut di masa depan.

b. Potensi Pariwisata Alam di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), sebagai bagian dari Kepulauan Maluku, memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata berbasis alam. Keanekaragaman lanskap, ekosistem

pesisir, laut, dan hutan hujan tropis menjadikan wilayah ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang mencari pengalaman wisata berbasis keindahan alam dan keaslian lingkungan.

1. Ekowisata Bahari

Kabupaten SBT memiliki garis pantai yang panjang, perairan laut yang jernih, dan gugusan pulau-pulau kecil dengan keindahan bawah laut yang potensial untuk kegiatan snorkeling, diving, dan island hopping. Terumbu karang yang masih relatif alami serta kekayaan biota laut seperti ikan hias, penyu, dan moluska menjadi daya tarik utama bagi wisata bahari. Misalnya Pulau Grogos dan pulau karang bais adalah pulau-pulau kecil di gugusan perairan SBT yang memiliki ekosistem laut seperti terumbu karang, lamun, zona intertidal, serta potensi perikanan dan kelautan. Salah satu daya tarik utama di SBT juga adalah Pulau Geser, sebuah pulau berpenduduk yang dikenal dengan lautnya yang jernih, terumbu karang yang berwarna-warni, serta kehidupan masyarakat pesisir yang masih mempertahankan tradisi bahari. Aktivitas seperti snorkeling, menyelam, dan pengamatan biota laut menjadi daya tarik bagi wisatawan yang menyukai wisata bahari. Wilayah SBT tidak hanya pantai dan laut — ada juga pulau-pulau kecil dengan ekosistem yang kaya dan karakteristik unik.

Selain itu ada beberapa lokasi yang memiliki potensi pengembangan ekowisata laut antara lain:

- Pulau Panjang dan Pulau Kasiui, yang memiliki pantai pasir putih dan spot penyelaman.
- Perairan sekitar Kecamatan Wakate dan Pulau Gorom, yang cocok untuk wisata memancing dan observasi laut.

2. Wisata Hutan dan Pegunungan

Luasnya kawasan hutan hujan tropis, termasuk hutan pamah dan hutan batu gamping, menghadirkan potensi wisata alam seperti trekking, pengamatan flora-fauna endemik, dan wisata petualangan. Vegetasi alami yang kaya serta keanekaragaman hayati, termasuk burung endemik Maluku seperti kakatua putih (*Cacatua alba*), dapat menjadi daya tarik utama untuk wisata pengamat burung (*bird watching*) dan fotografi alam.

3. Wisata Air Terjun dan Sumber Air Alam

Beberapa wilayah di Kabupaten SBT memiliki potensi wisata air terjun dan mata air alami yang belum banyak tereksplorasi, yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata minat khusus. Air terjun yang berada di kawasan hutan primer atau sekunder menawarkan suasana alami yang sejuk dan eksotik.

4. Kawasan Pesisir dan Hutan Mangrove

Kabupaten SBT memiliki kawasan pesisir seperti Pantai Gumumae di Kota Bula yang menjadi lokasi rekreasi favorit masyarakat lokal. Pantai ini memiliki garis pantai yang panjang, pasir putih, serta area pepohonan yang membuatnya nyaman untuk kegiatan keluarga. Selain itu ada beberapa wilayah pesisir dengan ekosistem mangrove yang masih terjaga, seperti yang terdapat di Kecamatan Bula, Kian Darat, dan Teluk Waru, menawarkan potensi wisata edukasi lingkungan (*environmental education tourism*), wisata perahu, dan fotografi lanskap. Selain berfungsi ekologis sebagai penyangga pantai, kawasan mangrove juga memiliki keindahan alami yang menarik.

5. Wisata Budaya dan Alam Terpadu

Beberapa komunitas adat di SBT yang hidup berdampingan dengan alam membuka peluang untuk pengembangan wisata berbasis komunitas (community-based tourism), yang menggabungkan antara kearifan lokal, atraksi budaya, dan keindahan alam. Wisata ini sekaligus mendukung pelestarian tradisi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di beberapa desa adat, wisatawan juga dapat menemukan tradisi budaya seperti upacara adat, tarian adat, serta kerajinan lokal yang menjadi identitas masyarakat Seram Bagian Timur.

Meskipun potensi pariwisata alam di Kabupaten SBT sangat besar, pengembangannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur penunjang pariwisata yang belum memadai, serta minimnya promosi dan investasi. Namun, dengan pengelolaan yang berbasis konservasi dan partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, sektor pariwisata alam di Kabupaten SBT dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang ramah lingkungan.

III. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Secara operasional, penghitungan dan penentuan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup pada ekoregion Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan dengan pendekatan berbasis jasa lingkungan yang mengacu pada fungsi-fungsi ekosistem. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa semakin tinggi fungsi layanan ekosistem dalam menyediakan jasa lingkungan di suatu wilayah, maka semakin besar pula kemampuan lingkungan hidup tersebut dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia, makhluk hidup lainnya, serta menjaga keseimbangan ekologis. Selain itu, semakin tinggi fungsi ekosistem, semakin besar pula kapasitas lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Keterbatasan dalam ketersediaan data serta batasan operasional penghitungan mendorong penggunaan tiga komponen utama sebagai bahan input, yaitu bentang lahan, vegetasi alami, dan penutupan lahan. Berdasarkan pendekatan ini, ditetapkan empat belas (14) fungsi jasa ekosistem yang dikelompokkan ke dalam tiga (3) kategori layanan jasa lingkungan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Implementasi konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa lingkungan dilakukan secara spasial dengan menyusun peta daya dukung dan daya tampung berdasarkan kinerja tiga jenis layanan jasa lingkungan, yang secara keseluruhan mencakup dua puluh (20) fungsi ekosistem. Proses penilaian dilakukan melalui pemberian skor dan bobot terhadap masing-masing fungsi ekosistem, dengan acuan data dan metodologi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Provinsi Maluku.

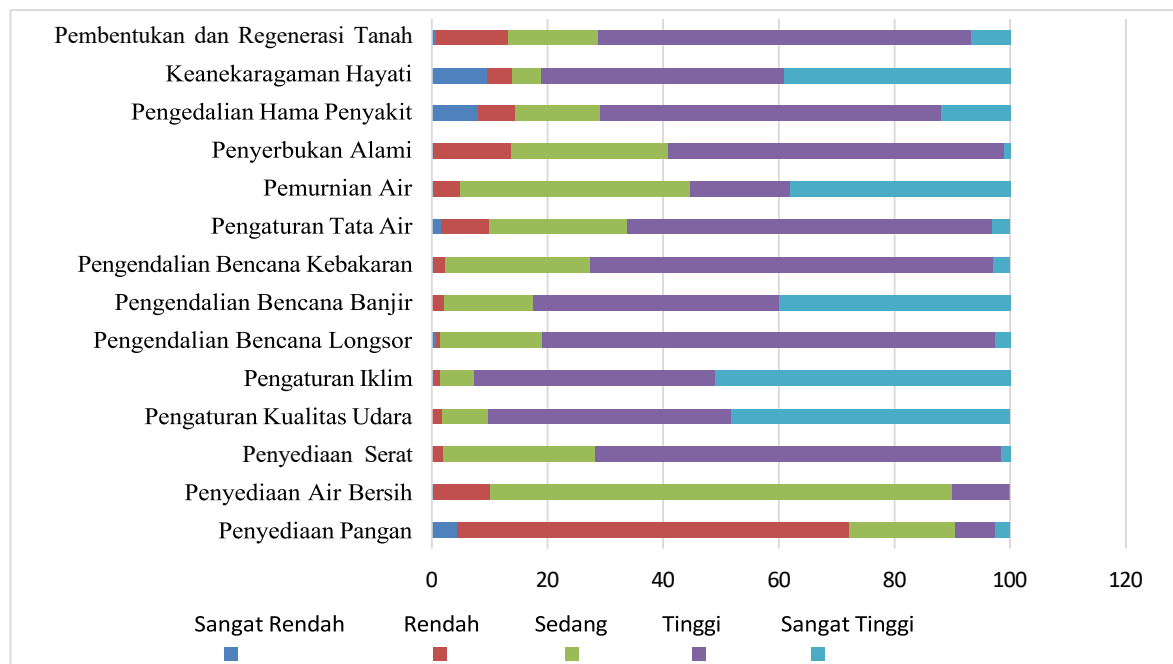
Hasil perhitungan kinerja jasa atau layanan ekosistem di Kabupaten Seram Bagian Timur disajikan pada Gambar 2.10 Berdasarkan analisis dan proyeksi data yang bersumber dari Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Seram Bagian Timur, diketahui bahwa status daya dukung pangan secara umum masih berada dalam batas aman dan belum terlampaui dalam proyeksi ke depan. Namun, ketika dilakukan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan, ditemukan bahwa telah terjadi keterlampaian yang mengarah pada kondisi defisit. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan

di wilayah tersebut, kecuali apabila sagu dimasukkan sebagai sumber pangan alternatif yang dapat menutupi kekurangan tersebut.

Tabel 2.8. Perhitungan kinerja jasa/layanan ekosistem di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Jasa Lingkungan	Kategori/Kelas layanan jasa (Persen luas)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Penyediaan Pangan	4,29	67,9	18,27	6,97	2,58
2	Penyediaan Air Bersih	0,28	9,84	79,87	9,87	0,14
3	Penyediaan Serat	0,02	1,95	26,32	70,13	1,58
4	Pengaturan Kualitas Udara	0,07	1,71	7,98	42,05	48,19
5	Pengaturan Iklim	0,37	1,18	5,89	41,51	51,05
6	Pengendalian Bencana Longsor	0,68	0,82	17,7	78,18	2,62
7	Pengendalian Bencana Banjir	0,07	2,14	15,25	42,59	39,96
8	Pengendalian Bencana Kebakaran	0,3	2,02	25,1	69,68	2,89
9	Pengaturan Tata Air	1,59	8,39	23,75	63,26	3,01
10	Pemurnian Air	0,46	4,45	39,84	17,19	38,06
11	Penyerbukan Alami	0,16	13,62	27,13	58,05	1,05
12	Pengendalian Hama Penyakit	8,02	6,35	14,73	58,98	11,92
13	Keanekaragaman Hayati	9,54	4,36	4,99	42,02	39,09
14	Pembentukan dan Regenerasi Tanah	0,83	12,35	15,66	64,41	6,75

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten SBT, 2025-2029



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten SBT, 2025-2029

Gambar 2.10. Persentase Luasan Layanan/Jasa Lingkungan di Kabupaten SBT

IV. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, penilaian terhadap kondisi ketahanan pangan dilakukan melalui pendekatan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* yang disusun berdasarkan

tiga dimensi utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Indeks ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan serta merumuskan strategi yang tepat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dengan wilayah yang terdiri atas gugusan pulau dan tantangan geografis yang cukup kompleks, Kabupaten Seram Bagian Timur menghadapi dinamika dalam distribusi pangan, aksesibilitas masyarakat terhadap sumber pangan, serta kualitas gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, pemetaan indeks ketahanan pangan menjadi instrumen penting dalam perencanaan intervensi kebijakan pembangunan pangan dan pengentasan kerentanan gizi masyarakat di daerah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025

Gambar 2.11. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur 2020-2024

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 IKP SBT berada dalam kategori rendah. Capaian IKP SBT mengalami tren peningkatan sejak tahun 2022, capaian IKP pada tahun 2022-2024 berada pada kategori sedang, dimana capaian 2024 merupakan capaian tertinggi dalam 6 tahun terakhir, namun belum mencapai kategori tinggi (nilai $> 75,68$). Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah, baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan pangan secara berkelanjutan.

2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PKKP) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, khususnya dalam aspek ketersediaan dan aksesibilitas pangan oleh masyarakat. Indikator ini mencerminkan persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi minimum harian yang diperlukan untuk hidup sehat dan aktif. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, pemantauan terhadap indikator PKKP menjadi krusial mengingat kondisi geografis dan tantangan distribusi pangan yang dihadapi daerah kepulauan. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan angka PKKP dari tahun ke tahun memberikan gambaran yang penting terkait efektivitas program ketahanan pangan dan intervensi kebijakan yang telah dijalankan, serta menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025

Gambar 2.12. Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan Kabupaten SBT, 2020-2024

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PKKP) di Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan di akhir periode. Pada tahun 2020, angka PKKP tercatat sebesar 38,31 persen, yang mencerminkan tingkat ketidacukupan konsumsi pangan yang cukup tinggi di masyarakat. Nilai ini terus menurun hingga tahun 2022 dengan angka 30,54 persen. Namun demikian, pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan menjadi 31,79 persen dan Kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 33,34 persen. Secara umum, tren ini menunjukkan perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, yang mencerminkan membaiknya aksesibilitas dan ketersediaan pangan di daerah, meskipun fluktuasi pada tahun terakhir mengindikasikan perlunya penguatan intervensi untuk memastikan kesinambungan perbaikan.

3. Konsumsi Listrik

Konsumsi listrik di Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan indikator teknis yang mencerminkan tingkat kebutuhan energi serta perkembangan sosial ekonomi wilayah. Sebagai bagian dari energi listrik yang digunakan untuk mendukung aktivitas rumah tangga, layanan publik, dan kegiatan ekonomi, tren konsumsi listrik memberikan gambaran terhadap pertumbuhan permintaan energi dan tingkat elektrifikasi. Analisis konsumsi listrik penting dalam perencanaan sektor energi untuk menjamin ketersediaan pasokan yang andal dan berkelanjutan.

Tabel 2.9. Perkembangan dan Distribusi Listrik di Kabupaten SBT, 2020–2024

Tahun	Daya Terpasang (kW)	Produksi Listrik (kWh)	Listrik Terjual (kWh)	Dipakai Sendiri (kWh)	Susut/ Hilang (kWh)	Pelanggan Listrik
2020	11.825	23.338.752	21.914.211	90.092	612.184	41.235
2021	19.939	23.820.687	20.748.186	55.085	3.017.417	21.027
2022	14.981	23.682.406	21.776.925	473.684	2.072.210	23.789
2023	27.333	52.487.382	23.673.485	-	2.449.631	25.823
2024	18.833	54.903.486	26.124.022	-	1.430.560	27.424

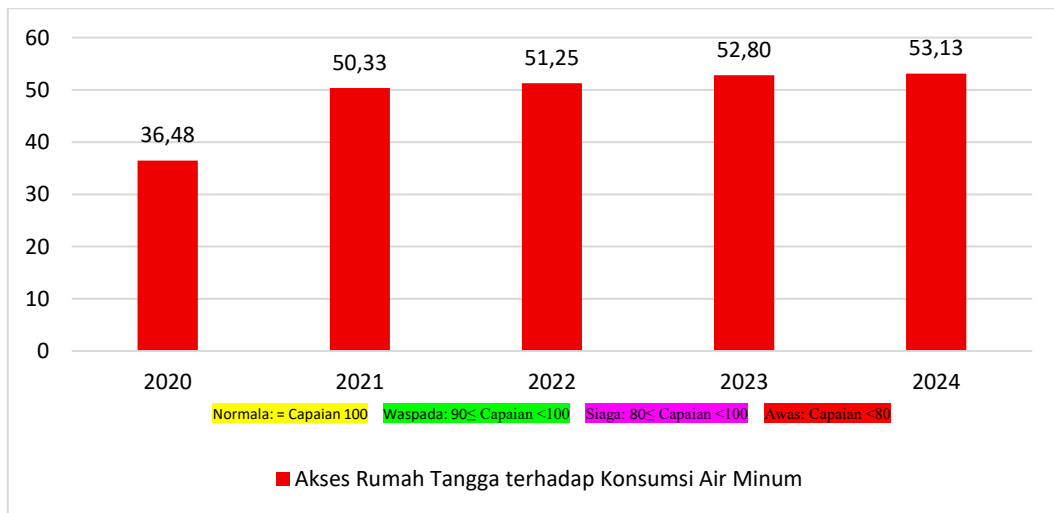
Sumber: Maluku Dalam Angka, Badan Pusat Statistika, 2025

Tabel 2.9 menunjukkan tren fluktuatif pada daya terpasang, produksi, dan konsumsi listrik. Secara umum, terjadi peningkatan signifikan pada daya terpasang dari 11.825 kW pada tahun 2020 menjadi 27.333 kW pada 2023, sebelum menurun kembali menjadi 18.833 kW pada 2024. Produksi listrik juga mengalami pertumbuhan yang cukup tajam, terutama pada tahun 2023 dan 2024, mencerminkan peningkatan kapasitas pembangkitan. Namun, perbandingan antara produksi dan listrik terjual menunjukkan masih terdapat potensi inefisiensi, yang tercermin dari tingginya angka susut atau kehilangan energi, terutama pada tahun 2021 dan 2023. Selain itu, data menunjukkan ketidakkonsistenan dalam jumlah pelanggan listrik, dengan lonjakan tajam pada tahun 2020 yang tidak sebanding dengan tren tahun-tahun berikutnya, mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan metode pencatatan atau kebijakan elektrifikasi. Permasalahan lain yang perlu dicermati adalah hilangnya data pemakaian sendiri pada tahun 2023 dan 2024, yang dapat mengganggu akurasi analisis konsumsi energi secara menyeluruh. Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan keandalan sistem distribusi serta perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan data kelistrikan daerah.

4. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan air minum yang layak dan aman tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan status gizi individu, tetapi juga berdampak pada produktivitas serta ketahanan sosial-ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, air minum menjadi salah satu aspek fundamental yang terkait erat dengan pilar ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), jumlah rumah tangga pada tahun 2024 tercatat sebanyak 39.888 rumah tangga berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kondisi geografis wilayah kepulauan yang tersebar serta terbatasnya infrastruktur menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan dan pemerataan akses terhadap air bersih. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh air minum yang layak dan aman. Oleh karena itu, pemantauan terhadap indikator akses air minum menjadi sangat penting. Selain untuk mengukur sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, indikator ini juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Upaya penyediaan sarana air bersih yang berkelanjutan perlu terus ditingkatkan, baik melalui pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, maupun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan langkah tersebut, diharapkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dapat semakin meningkat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesehatan, kesejahteraan, dan ketahanan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.



Sumber: Dinas PUPR Kab. SBT, Diolah 2025

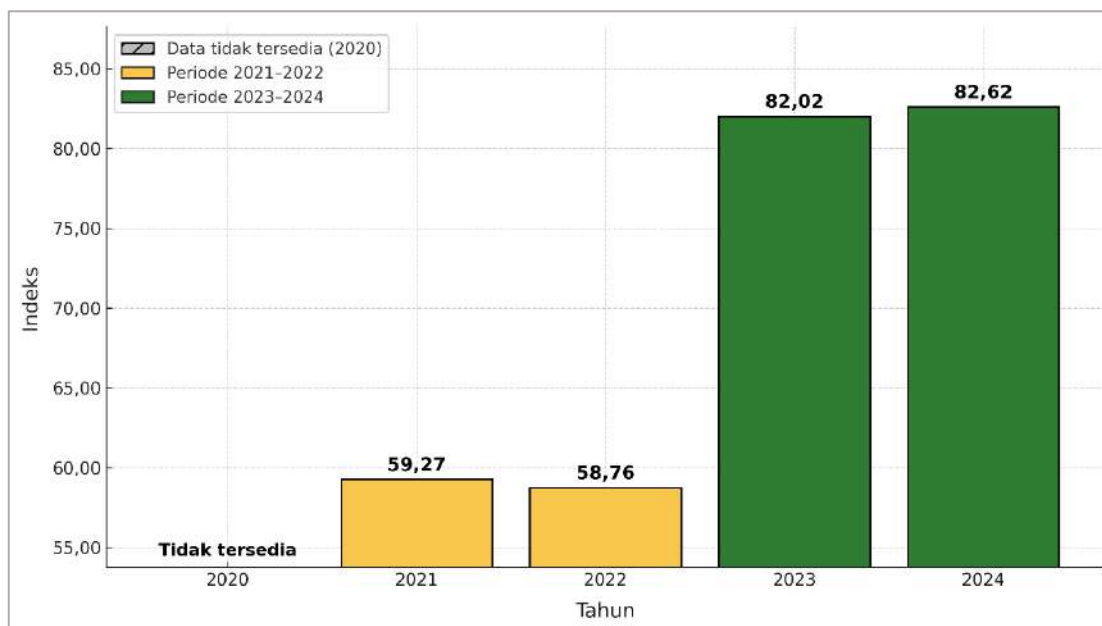
Gambar 2.13. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum di Kabupaten SBT, 2020-2024

Berdasarkan data diatas, akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentase akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum tercatat sebesar 36,48% (14.210 Rumah Tangga) yang terlayani, angka ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya dimana pada tahun 2021 menjadi 50,33 (19.786 Rumah Tangga), tahun 2022 meningkat 51,25% (20.206 Rumah Tangga), tahun 2023 meningkat 52,80% (20.984 rumah Tangga) dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 53,13% (21.182 Rumah tangga) kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam ketersediaan air minum yang layak di setiap tahunnya meskipun tantangan aksesibilitas dan distribusi air bersih masih perlu perhatian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

V. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup di daerah ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH memberikan gambaran umum mengenai kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada periode tertentu, yang dapat digunakan untuk memantau kecenderungan perubahan kondisi lingkungan tersebut. Indeks ini telah dikembangkan sejak tahun 2009 dan digunakan sebagai acuan nasional untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Perhitungan IKLH mencakup empat komponen utama, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Komponen-komponen tersebut secara simultan memberikan informasi yang penting untuk memahami kondisi lingkungan yang ada, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur.



Sumber: KemenLHK, 2025

Gambar 2.14. IKLH Kabupaten Seram Bagian Timur, 2021-2024**Tabel 2.10 Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024**

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	-	-	-	60	60
Indeks Kualitas Udara	-	91,45	91,02	92,74	94,22
Indeks Tutupan Lahan	-	-	-	100	100
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	-	59,27	58,76	82,02	82,62

Sumber: KemenLHK, 2025

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK, 2025), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, IKLH tercatat sebesar 59,27, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 58,76 yang merupakan kategori "Sedang". Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan, di mana IKLH mencapai angka 82,02 dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 82,62 yang termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

Peningkatan IKLH pada tahun 2024 tidak terlepas dari capaian beberapa indikator penyusunnya. Indeks Kualitas Udara menunjukkan tren peningkatan dari 91,45 pada tahun 2021 menjadi 94,22 pada tahun 2024, setelah sempat menurun sedikit pada tahun 2022 sebesar 91,02. Sementara itu, Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan mulai tercatat pada tahun 2024 dengan nilai masing-masing sebesar 60 dan 100. Nilai Indeks Tutupan Lahan yang maksimal mengindikasikan keberhasilan dalam menjaga atau memulihkan kawasan vegetasi di wilayah tersebut.

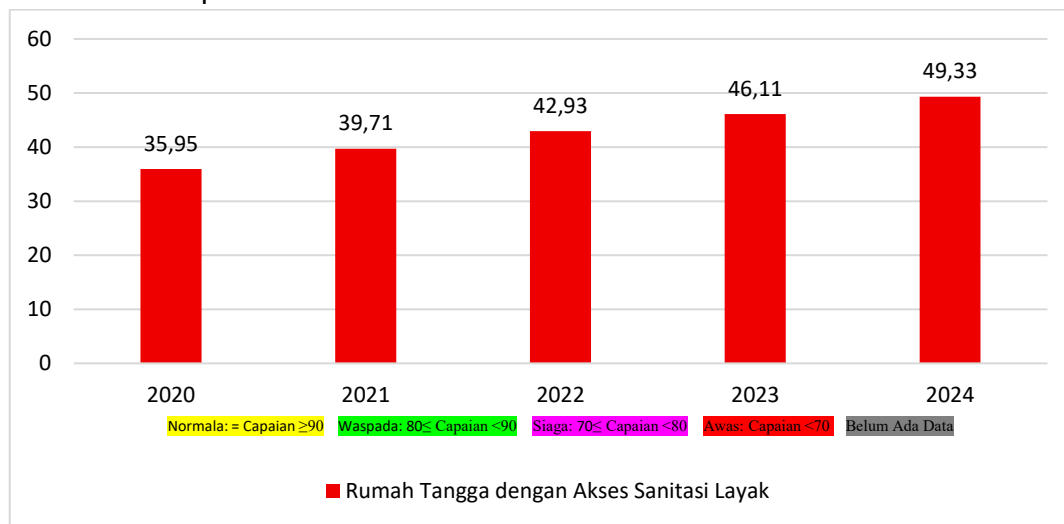
Secara umum, tren peningkatan IKLH pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan hasil positif dari upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan, serta menunjukkan bahwa kualitas udara dan tutupan lahan menjadi kontributor utama dalam peningkatan indeks tersebut.

Selain itu capaian IKLH di tahun 2023 dan 2024 mencerminkan keberhasilan berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Timur, serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun untuk tahun 2020, data terkait IKLH dan indikator penyusunnya tidak tersedia, sehingga evaluasi terhadap kondisi kualitas lingkungan hidup tahun tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi

Akses terhadap sanitasi yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), upaya untuk memastikan rumah tangga memiliki akses sanitasi yang layak menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kesehatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Sanitasi yang baik tidak hanya mencakup fasilitas pembuangan limbah yang memadai, tetapi juga mencakup pengelolaan air bersih dan pengendalian pencemaran. Kondisi sanitasi yang memadai dapat mengurangi risiko penyakit berbasis sanitasi, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembahasan ini akan fokus pada kondisi akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di SBT, dengan menganalisis data dan perkembangan yang ada selama beberapa tahun terakhir.



Sumber: Dinas PUPR Kab. SBT, Diolah 2025

Gambar 2.15. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Berdasarkan data dari Gambar 2.15 "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024", terlihat peningkatan bertahap dalam persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Pada tahun 2020, capaiannya mencapai 35,95% (14.004 rumah Tangga), kemudian naik menjadi 39,71% (15.611 rumah Tangga) pada 2021, menunjukkan kenaikan sekitar

3,76 poin. Tahun 2022 mencatatkan peningkatan menjadi 42,93% (16.926 rumah Tangga), diikuti kenaikan lagi ke 46,11% (18.325 rumah Tangga) pada 2023, masing-masing dengan pertumbuhan sekitar 3,22 poin dan 3,18 poin. Pada 2024, capaian tertinggi tercatat sebesar 49,33% (19.667 rumah Tangga), naik sekitar 3,22 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun ada tren peningkatan yang konsisten sebesar total 13,38 poin dari 2020 hingga 2024, semua angka masih berada dalam kategori "Awat" (capaian <70%), menunjukkan bahwa akses sanitasi layak masih menjadi tantangan utama di wilayah ini.

3. Timbulan dan Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup serta mendukung terciptanya pemukiman yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu indikator yang mencerminkan efektivitas pengelolaan tersebut adalah persentase timbulan sampah yang terolah melalui fasilitas pengolahan sampah yang tersedia. Timbulan sampah yang berhasil diolah mencerminkan keberfungsian infrastruktur persampahan serta kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Timur, pemantauan terhadap jumlah sampah yang terolah di fasilitas resmi menjadi penting untuk menilai efektivitas sistem pengelolaan sampah yang ada, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan dalam upaya pengurangan dampak lingkungan dari limbah domestik.

Tabel 2.11. Timbulan dan Penanganan Sampah di Kabupaten SBT, 2020–2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah	Ton	24.905,23	24.957,06	25.068,02	25.290,85	25.727,94
Jumlah Pengurangan Sampah	Ton	21,9	29,2	36,5	43,8	51,1
	Persen	0,08793334	0,11700096	0,14560384	0,173185164	0,19861676
Jumlah Penanganan Sampah	Ton	3.942	4.343	4.343	4.343	4.343
	Persen	15,8280008	17,4038929	17,3268571	17,17419541	16,8824243

Sumber: Dinas LH Kabupaten SBT 2025

Data timbulan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan bahwa volume timbulan sampah mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, yakni sebesar 24.905 ton pada tahun 2020, meningkat menjadi 25.727 ton pada tahun 2024. Meskipun demikian, jumlah sampah yang berhasil dikurangi cukup tinggi, yaitu sebesar 21.9 ton (0,08%) pada tahun 2020 dan 51.1 ton (0,19%) pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya pengurangan sampah, meskipun persentasenya mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun.

Selain itu data penanganan sampah masih tergolong sangat rendah dimana pada tahun-tahun awal, yakni hanya sebesar 3.942 ton (15,82%) kemudian pada tahun 2021 4.343 ton (17,40%) dan kembali menurun hingga pada tahun 2023 dengan jumlah sampah yang berhasil ditangani mencapai 4.343 ton atau 16,88% dari total timbulan. Secara keseluruhan angka penanganan sampah masih jauh dari optimal, mengingat lebih dari 90% sampah belum tertangani secara sistematis.

Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat, agar

pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan.

VI. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Klimatologi

Kabupaten SBT memiliki iklim laut tropis dengan pengaruh musiman yang kuat, ditentukan oleh posisi geografisnya yang dikelilingi laut dan topografi beragam. Iklim dipengaruhi angin muson, membentuk musim hujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi tercatat pada Mei (472,4 mm) dan terendah pada Juli (77,3 mm). Suhu tertinggi terjadi pada Januari (29,2°C) dan terendah pada Agustus (23,7°C). Kelembaban rata-rata 86%, dengan kecepatan angin rata-rata 19 knot (tertinggi 29 knot di Desember). Intensitas penyinaran matahari tertinggi pada Oktober (80%).

2. Zona Agroklimat

Zona agroklimat di SBT didasarkan pada klasifikasi Oldeman (1980), yang mempertimbangkan curah hujan tahunan dan distribusi bulan basah/kering. Zona ini menentukan potensi dan kesesuaian lahan untuk pertanian.

3. Kajian Risiko Bencana

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan terhadap bencana akibat kondisi geologis (zona pertemuan empat lempeng aktif) dan klimatologis (perubahan musim). Terdapat sembilan bencana alam (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem/abrasi) dan satu bencana non-alam (epidemi/wabah penyakit). Strategi mitigasi terpadu dan pengurangan risiko bencana (PRB) diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.

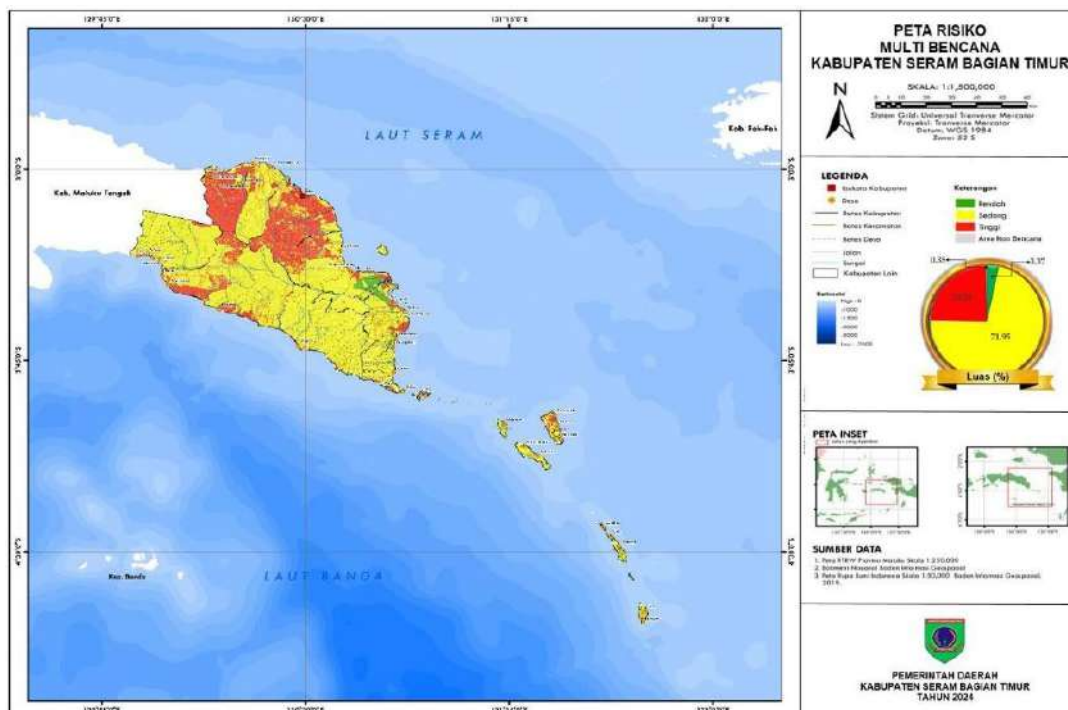
- a. Bencana Gerakan Tanah Sekitar 60,35% wilayah SBT bebas dari bahaya gerakan tanah, tetapi kecamatan seperti Siwalalat, Werinama, Kilmuri, Bula, dan Teluk Waru berisiko tinggi karena lereng curam, tanah labil, dan curah hujan tinggi. Zona kerentanan tinggi terdapat di perbukitan dan patahan aktif, membutuhkan mitigasi seperti reboisasi, penataan drainase, dan pembatasan penggunaan lahan. Rekomendasi: integrasi zonasi risiko dalam tata ruang, intervensi struktural/vegetatif, dan edukasi masyarakat.
- b. Bencana Gempa Bumi Struktur geologi SBT (endapan Kuartar, batuan Tersier, dan Pra-Tersier) yang lunak dan terletak di zona penunjaman Laut Seram meningkatkan risiko gempa, likuifaksi, dan gerakan tanah. Zona kerentanan tinggi berada di wilayah padat penduduk, tambang emas, dan eksplorasi geothermal. Mitigasi meliputi penguatan kesiapsiagaan, penyesuaian tata ruang, dan pembatasan aktivitas berisiko.
- c. Bencana Tsunami SBT, di zona Busur Banda, memiliki risiko tsunami tinggi dengan 99 kejadian tercatat di Maluku (1600–2023). Pesisir dengan kemiringan 0°–5° berisiko tinggi, 5°–30° sedang, dan >30° rendah. Mitigasi mencakup penataan ruang pesisir dan sistem peringatan dini.
- d. Bencana Banjir Wilayah berisiko tinggi banjir meliputi Kecamatan Bula Barat, Bula, Teluk Waru, Tutuk Tolu, Ukar Sengar, dan Werinama, dipengaruhi curah hujan tinggi dan kondisi aliran sungai. Mitigasi: pengelolaan drainase, reboisasi, dan infrastruktur penanggulangan banjir.
- e. Bencana Banjir Bandang Risiko tinggi di Werinama selatan, Teluk Waru timur, dan Tutuk Tolu timur, dipicu curah hujan ekstrem dan kondisi geografis.

Mitigasi: pengendalian aliran sungai, infrastruktur, dan tata ruang berbasis risiko.

- f. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kecamatan Bula Barat, Bula, dan Pulau Gorom rentan kebakaran hutan akibat curah hujan rendah, El Nino, dan aktivitas manusia. Risiko tinggi (7,34%) dan sedang (74,06%) memerlukan mitigasi berbasis masyarakat dan pengelolaan lahan.
- g. Bencana Kekeringan Kekeringan dipicu El Nino, dengan curah hujan rendah (0–100 mm/bulan) pada Agustus–Oktober. Zona risiko sedang hingga tinggi (10,83%) memerlukan pengelolaan sumber daya air.
- h. Bencana Cuaca Ekstrem Angin kencang (≥ 120 km/jam) berisiko tinggi di 8,33% wilayah, terutama dataran rendah dan pemukiman. Mitigasi: infrastruktur tahan cuaca, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat.
- i. Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Pesisir SBT rentan terhadap gelombang ekstrem (> 2 m), menyebabkan abrasi, intrusi air laut, dan banjir rob. Mitigasi: sabuk hijau, relokasi permukiman, dan tata ruang pesisir adaptif.
- j. Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit Epidemik/wabah penyakit membutuhkan pemetaan zonasi risiko untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan.

4. Kajian Multi Bencana

Potensi risiko bencana di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dimodelkan dalam bentuk peta risiko yang menggambarkan sembilan jenis bencana alami dan satu bencana non-alami. Bencana alami tersebut disebabkan oleh dinamika lithosfer, hidrosfer, dan atmosfer, sedangkan bencana non-alami berkaitan dengan perubahan iklim dan aktivitas manusia.



Sumber: Laporan Induk KLHS – RPJPD SBT 2025-2045

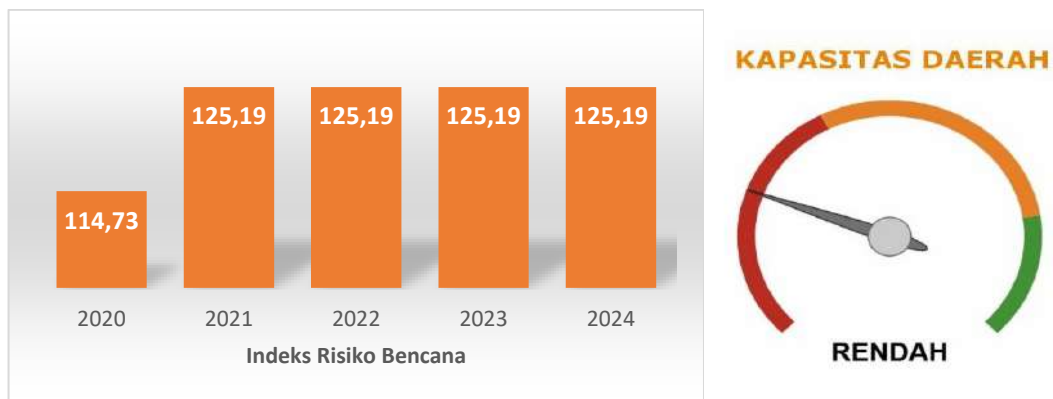
Gambar 2.16. Peta Multi Bencana Kabupaten Seram Bagian Timur

Peta multi-bencana ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai ancaman bencana di wilayah tersebut. Wilayah dengan risiko bencana tinggi (24.34%) terletak

di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Bula Barat, Bula, Teluk Waru, Kilmuri, Werinama, sebagian Kecamatan Kian Darat, dan Pulau Gorom. Sementara itu, zona risiko bencana sedang (71.95%) mencakup hampir seluruh wilayah Kabupaten SBT. Meskipun stabil dalam kondisi saat ini, zona ini memerlukan perencanaan yang hati-hati dalam penggunaan hutan dan lahan untuk mempertahankan statusnya. Zona risiko sedang ini tersebar di dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan di berbagai kecamatan di Kabupaten SBT.

5. Indeks Risiko Bencana dan Kapasitas Daerah

Indeks risiko bencana merupakan alat yang digunakan untuk mengukur potensi kerusakan dan dampak yang ditimbulkan oleh berbagai jenis bencana di suatu wilayah. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, indeks risiko bencana disusun berdasarkan pemodelan berbagai potensi bencana yang disebabkan oleh faktor alam, seperti dinamika lithosfer, hidrosfer, dan atmosfer, serta bencana non-alami yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia. Penilaian risiko bencana ini penting untuk memahami ancaman yang dihadapi wilayah ini, serta untuk merumuskan langkah-langkah mitigasi yang efektif.



Sumber: InaRisk BNPB, 2025

Gambar 2.17. Indeks Risiko Bencana dan Kapasitas Daerah Kabupaten SBT, 2020-2024

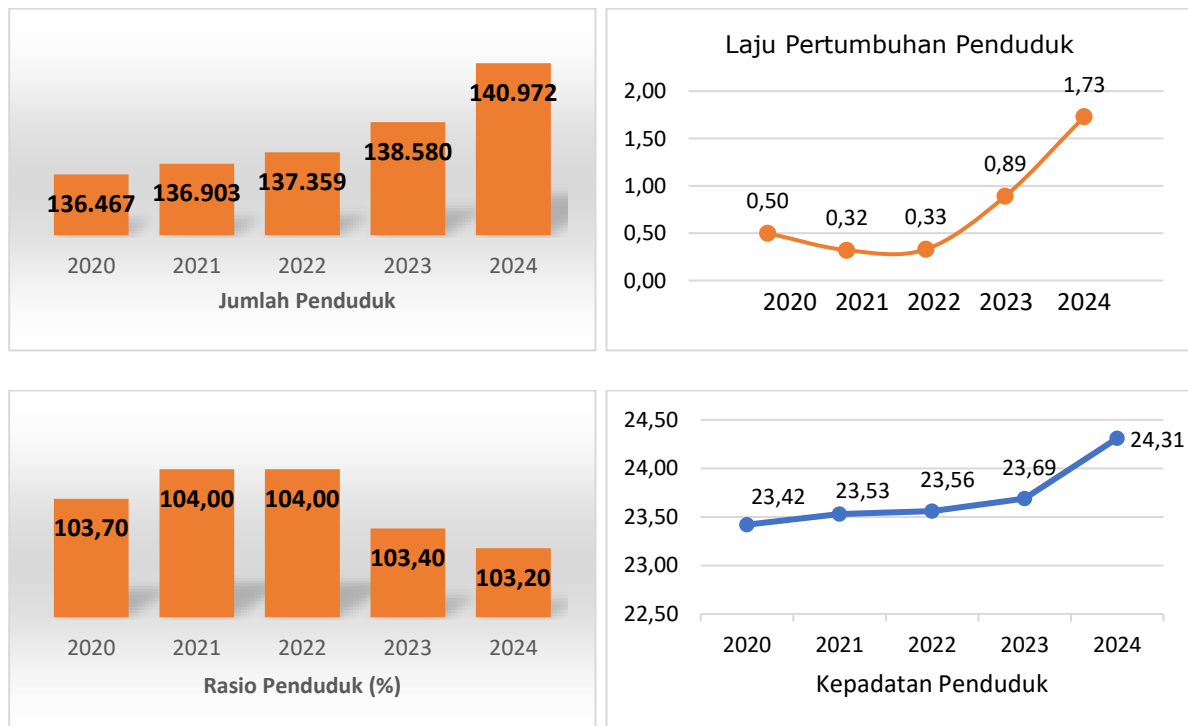
Indeks Risiko Bencana (IRBI) SBT meningkat dari 114,73 (2020) menjadi 125,19 (2024), berada pada kelas risiko sedang. Peningkatan ini menunjukkan memburuknya risiko tanpa perbaikan signifikan. Kelemahan utama: kebijakan dan kelembagaan, kesiapsiagaan, dan sistem informasi/logistik. Paparan penduduk tinggi terhadap kekeringan, gempa bumi, dan cuaca ekstrem, diperparah rendahnya kapasitas daerah. Diperlukan upaya terintegrasi untuk meningkatkan kelembagaan, sistem informasi, dan kesiapsiagaan masyarakat.

VII. Demografi

1. Perkembangan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik demografi yang beragam, baik dari segi jumlah penduduk, sebaran wilayah, maupun komposisi usia dan jenis kelamin. Kondisi demografis ini memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam aspek pengurangan risiko bencana, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan luas wilayah yang cukup besar dan penduduk yang tersebar di berbagai kecamatan, pemahaman terhadap dinamika

demografi menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran.



Sumber: Dinas Capil Kabupaten SBT, (Data diolah, 2025)

Gambar 2.18. Perkembangan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Gambar tersebut menyajikan dinamika demografi Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2020–2024 dalam bentuk grafik teknis yang menggambarkan tren jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk. Selama periode tersebut, jumlah penduduk mengalami peningkatan signifikan dari 136.467 jiwa pada tahun 2020 menjadi 140.972 jiwa pada tahun 2024. Puncak laju pertumbuhan terjadi pada tahun 2024 sebesar 1,73%. Rasio jenis kelamin cenderung menurun dari 104,00% (2021–2022) menjadi 103,20% pada 2024, menunjukkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan dari 23,42 jiwa/km² pada 2020 menjadi 26,31 jiwa/km² pada 2024, mencerminkan peningkatan tekanan demografis yang berimplikasi pada kebutuhan perencanaan ruang dan layanan dasar yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

2. Sebaran Penduduk di setiap Kecamatan pada Tahun 2024

Sebaran penduduk merupakan aspek krusial dalam perencanaan pembangunan wilayah. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, distribusi penduduk tahun 2024 mencerminkan konsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah pesisir, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, aksesibilitas, dan potensi sumber daya. Informasi ini penting untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Tabel 2.12 . Sebaran dan Kepadatan Penduduk setiap Kecamatan di Seram Bagian Timur

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)					Laju pertumbuhan rata-rata (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bula	25.713	26.113	26.558	26.695	27.386	39,97	40,59	41,28	41,49	42,57	1,59
2	Seram Timur	12.378	12.278	12.185	12.255	7.525	168,75	167,39	166,12	167,08	129,41	-11,72
3	Werinama	5.943	5.849	5.805	5.741	5.796	5,98	5,89	5,84	5,78	5,83	-0,62
4	Pulau Gorom	22.134	21.960	21.692	21.787	21.911	242,43	240,53	237,59	238,63	239,99	-0,25
5	Wakate	9.110	9.130	8.932	9.039	9.166	242,42	242,95	237,68	240,53	243,91	0,15
6	Tutuk Tolu	6.996	6.964	6.993	7.033	7.137	21,19	21,10	21,19	21,31	21,62	0,5
7	Siwalalat	6.355	6.270	6.288	6.404	6.792	7,50	7,40	7,42	7,56	8,02	1,68
8	Kilmury	6.338	6.248	6.335	6.440	6.713	7,57	7,46	7,56	7,69	8,01	1,46
9	Pulau Panjang	2.719	2.644	2.633	2.648	2.670	132,44	128,79	128,25	128,98	130,05	-0,45
10	Teor	2.955	2.915	3.076	3.195	3.301	126,23	124,52	131,40	136,48	141,01	2,79
11	Gorom Timur	9.293	9.446	9.374	9.426	9.548	317,28	322,50	320,04	321,82	325,98	0,68
12	Bula Barat	8.186	8.408	8.629	8.540	8.564	9,30	9,55	9,80	9,70	9,73	1,14
13	Kian Darat	6.153	6.209	6.329	6.450	6.540	47,61	48,05	48,97	49,91	50,61	1,53
14	Siritaun Wida Timur	6.832	6.832	6.947	7.137	7.197	39,64	39,64	40,30	41,41	41,75	1,31
15	Teluk Waru	5.362	5.385	5.583	5.790	5.904	8,01	8,04	8,34	8,65	8,82	2,44
16	Ukar Sengan					4.822					317,24	-
	TOTAL	136.467	136.903	137.359	138.580	140.972	23,42	23,53	23,56	23,69	24,31	0,82

Sumber: Dinas Capil Kabupaten SBT, Diolah Bappeda Litbang SBT Tahun 2025

Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten SBT Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	Bula	13.714	13.672	27.386
2	Seram Timur	3.774	3.751	7.525
3	Werinama	2.912	2.884	5.796
4	Pulau Gorom	11.075	10.836	21.911
5	Wakate	4.657	4.509	9.166
6	Tutuk Tolu	3.652	3.485	7.137
7	Siwalalat	3.428	3.364	6.792
8	Kilmury	3.394	3.319	6.713
9	Pulau Panjang	1.318	1.352	2.670
10	Teor	1.663	1.638	3.301
11	Gorom Timur	4.805	4.743	9.548
12	Bula Barat	4.452	4.112	8.564
13	Kian Darat	3.284	3.256	6.540
14	Siritaun Wida Timur	3.581	3.616	7.197
15	Teluk Waru	3.016	2.888	5.904
16	Ukar Sengan	2.461	2.361	4.822
	Seram Bagian Timur	71.186	69.786	140.972

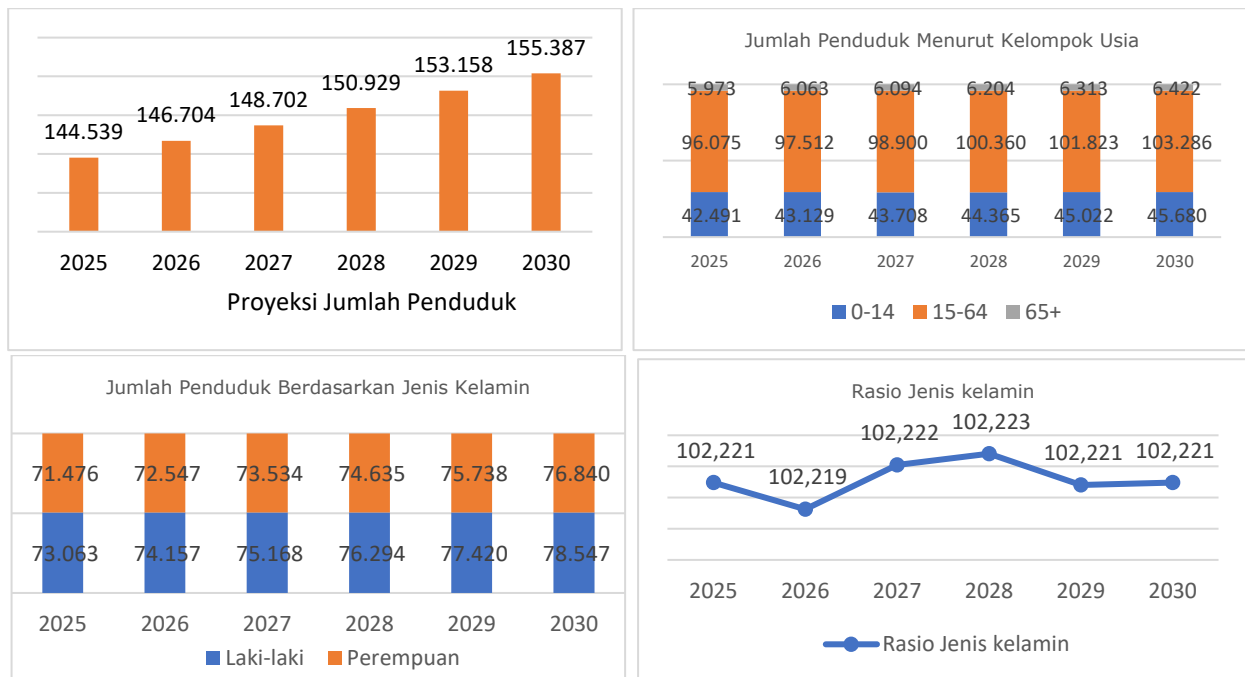
Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. SBT dalam Kab. SBT dalam Angka 2025

Sebaran penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 menunjukkan konsentrasi yang tidak merata, dengan dominasi pada wilayah pusat pertumbuhan. Kecamatan Bula merupakan wilayah dengan populasi terbanyak dengan jumlah penduduknya adalah 27.386 jiwa, disusul Pulau Gorom (21.911 jiwa) dan Gorom Timur (9.548 jiwa), mencerminkan peran strategis wilayah tersebut dalam sistem sosial-ekonomi dan tata ruang kabupaten. Sementara itu, kecamatan seperti Pulau Panjang, Teor, dan Ukur Sengan memiliki jumlah penduduk relatif rendah karena keterbatasan akses dan infrastruktur. Pola ini mengindikasikan perlunya kebijakan pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan spasial dan memperkuat pertumbuhan yang inklusif.

3. Proyeksi Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur

Proyeksi penduduk merupakan instrumen perencanaan strategis yang digunakan untuk memperkirakan jumlah, struktur, dan persebaran penduduk di masa mendatang berdasarkan tren demografi sebelumnya. Informasi ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah, terutama dalam penentuan kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur, serta dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Dapat dilihat pada gambar Berikut:



Sumber: Dinas Capil Kabupaten SBT, (Data diolah, 2025)

Gambar 2.19. Infografis proyeksi penduduk Kabupaten SBT, 2025-2030

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur, total penduduk pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 144.539 jiwa dan terus meningkat menjadi 155.387 jiwa pada tahun 2030. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun terjadi pertumbuhan sekitar 7,5% atau rata-rata lebih dari 2.000 jiwa per tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika kependudukan yang cukup stabil dan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

Dari segi struktur umur, kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi dengan jumlah 96.075 jiwa (66,5%) pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 103.286 jiwa (66,5%) di tahun 2030. Kelompok usia muda (0-14 tahun) berjumlah 42.491 jiwa (29,4%) pada tahun 2025 dan naik menjadi 45.680 jiwa (29,4%) pada tahun 2030. Sementara itu, kelompok lanjut usia (65 tahun ke atas) memiliki jumlah relatif kecil yaitu 5.973 jiwa (4,1%) di tahun 2025 dan meningkat menjadi 6.422 jiwa (4,1%) pada tahun 2030. Dengan komposisi ini terlihat bahwa penduduk usia produktif masih mendominasi, yang memberi peluang pemanfaatan bonus demografi, meskipun kebutuhan pelayanan untuk anak-anak dan lansia juga harus diantisipasi.

Bila ditinjau dari jenis kelamin, penduduk laki-laki pada tahun 2025 tercatat sebanyak 73.063 jiwa (50,6%) dan meningkat menjadi 78.547 jiwa (50,6%) pada tahun 2030. Sedangkan penduduk perempuan berjumlah 71.476 jiwa (49,4%) di tahun 2025 dan meningkat menjadi 76.840 jiwa (49,4%) pada tahun 2030. Rasio jenis kelamin relatif stabil di angka 102, yang berarti setiap 102 laki-laki terdapat 100 perempuan. Keseimbangan ini menandakan bahwa distribusi jenis kelamin berjalan normal tanpa perbedaan signifikan, sehingga tidak menimbulkan potensi beban ketidakseimbangan demografis di masa depan.

4. Keberadaan Masyarakat Adat

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya, dengan keberadaan masyarakat hukum adat yang memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai lokal dan keberlanjutan sumber daya alam. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Timur sampai tahun 2024 telah memiliki Peraturan Bupati atas dua negeri yakni Negeri Kataloka dengan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut berbasis MHA Kataloka Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut berbasis MHA Negeri Amar Sekaru Kabupaten Seram Bagian Timur. Masyarakat adat di SBT umumnya mendiami komunitas yang dikenal sebagai *negeri adat*, yakni unit sosial dan teritorial tradisional yang memiliki sistem nilai, norma, hukum, dan kelembagaan tersendiri, serta diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan masyarakat adat di SBT bukan sekadar simbol warisan masa lalu, tetapi juga menjadi identitas sosial-budaya yang hidup, dinamis, dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

a. Negeri Adat

Negeri adat merupakan entitas utama dan sekaligus fondasi eksistensial masyarakat adat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sebagai satuan sosial-budaya yang bersifat otonom secara tradisional, negeri adat bukan sekadar unit administratif, melainkan komunitas adat yang memiliki sistem nilai, norma, hukum, kelembagaan, dan wilayah yang telah terbentuk secara turun-temurun dan dijalankan secara konsisten oleh warga adatnya.

Beberapa karakteristik utama dari negeri adat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut:

- Wilayah Adat (Ulayat):
Setiap negeri adat memiliki wilayah ulayat yang jelas dan diakui secara adat maupun sosial. Wilayah ini mencakup kawasan daratan seperti hutan, kebun, dan permukiman, serta perairan seperti sungai, danau, dan wilayah pesisir hingga laut. Wilayah ulayat bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi komunitas adat, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan kultural yang tinggi karena dianggap sebagai warisan leluhur. Pengelolaan wilayah ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui mekanisme hukum adat yang ketat.
- Warga Adat:
Warga adat merupakan individu yang memiliki ikatan genealogi atau kekerabatan dengan negeri adat, dan secara sosial-kultural diakui sebagai bagian dari komunitas adat tersebut. Keanggotaan warga adat bersifat turun-temurun dan meniscayakan ketaatan terhadap norma dan struktur adat setempat.
- Hukum Adat:
Sistem hukum adat berfungsi sebagai norma kolektif yang mengatur berbagai aspek kehidupan warga negeri adat, termasuk hak atas tanah, pola pewarisan, mekanisme penyelesaian sengketa, tata cara perkawinan, dan pelaksanaan ritual adat. Hukum ini dijalankan oleh kelembagaan adat yang sah dan dilengkapi dengan sanksi sosial atau denda adat terhadap pelanggaran norma (ngam/sasi), sehingga menciptakan ketertiban sosial secara internal.
- Simbol dan Ritual Adat:

Setiap negeri adat memiliki simbol budaya yang khas seperti rumah adat (*baileo*), tiang pusaka, atau benda-benda sakral lainnya yang menjadi penanda identitas kultural. Selain itu, pelaksanaan upacara adat memiliki fungsi sosial dan spiritual yang penting dalam memperkuat kohesi sosial, regenerasi nilai-nilai luhur, serta menjaga harmoni antara manusia, leluhur, dan alam.

b. Kelembagaan Adat

Struktur kelembagaan adat di Kabupaten Seram Bagian Timur mencerminkan sistem pemerintahan tradisional yang masih hidup dan berfungsi secara aktif dalam tata kehidupan masyarakat adat. Kelembagaan adat tersebut memiliki peran yang strategis dalam menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan konflik, mengatur pemanfaatan sumber daya alam, serta mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Meskipun terdapat variasi bentuk dan istilah antar-negeri, pola kelembagaan umumnya memiliki komponen-komponen pokok sebagai berikut:

- **Raja atau Kepala Negeri**
Raja merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur negeri adat. Proses pengangkatan Raja umumnya dilakukan berdasarkan prinsip garis keturunan yang sah, dan/atau melalui musyawarah adat yang melibatkan Saniri Negeri. Sebagai figur otoritatif, Raja bertanggung jawab atas kepemimpinan umum negeri, menjaga ketertiban dan harmoni sosial, menyelesaikan sengketa adat, serta mewakili negeri adat dalam relasi eksternal, baik dengan pemerintah maupun antar komunitas adat lainnya.
- **Saniri Negeri (Dewan Adat)**
Saniri Negeri adalah lembaga permusyawaratan tertinggi dalam struktur pemerintahan adat, yang berfungsi memberikan pertimbangan dan kontrol terhadap kebijakan dan tindakan Raja. Saniri terdiri dari para tetua adat, kepala *soa* (marga atau unit genealogis dalam negeri), tokoh masyarakat, dan perwakilan dari marga-marga yang ada. Fungsi utama Saniri meliputi merumuskan dan menetapkan kebijakan adat, menyelesaikan sengketa internal, serta mengawasi jalannya pemerintahan adat secara kolektif.
- **Marga**
Marga merupakan unit kekerabatan dasar dalam masyarakat adat, yang memiliki hak dan peran tertentu dalam struktur sosial maupun pengelolaan sumber daya. Setiap marga biasanya memiliki tugas-tugas adat yang spesifik, serta hak atas bagian tertentu dari tanah ulayat. Keberadaan marga menjadi elemen penting dalam pewarisan nilai-nilai, pengelolaan konflik internal, dan pelaksanaan upacara adat.
- **Sistem Sasi/Ngam**
Sasi adalah pranata adat yang berfungsi sebagai mekanisme pengaturan dan pelestarian sumber daya alam secara kolektif. Sistem ini menetapkan larangan sementara atas pengambilan hasil alam (seperti hasil laut, hutan, dan tanaman tertentu) pada wilayah tertentu. Sasi diberlakukan berdasarkan kesepakatan komunitas dan diumumkan secara adat, serta dijaga oleh aparat adat seperti *kewang*. Pelanggaran terhadap sasi dikenai sanksi sosial atau denda adat, sehingga mekanisme ini efektif dalam menjaga keberlanjutan ekologi lokal.
- **Tokoh Adat Fungsional**
Selain Raja dan Saniri, terdapat tokoh-tokoh adat lainnya yang memiliki peran

husus dalam pelaksanaan tata kelola adat, antara lain:

- Latupati: Pemimpin upacara atau ritual adat yang memiliki otoritas spiritual dalam komunitas adat.
- Marinyo: Juru bicara adat atau penyampai pesan resmi dalam kegiatan adat dan antar-negeri.
- Kewang: Petugas adat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan *sasi*, serta pelindung lingkungan adat dan sumber daya alam.

Struktur kelembagaan adat ini berfungsi tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam menciptakan ketertiban, mendorong partisipasi kolektif, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks pembangunan daerah, penguatan kelembagaan adat di Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi salah satu elemen penting untuk mewujudkan pembangunan berbasis kearifan lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Suku Asli

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) merupakan wilayah yang secara sosiokultural mencerminkan keragaman etnis yang khas dari Pulau Seram secara keseluruhan. Tidak seperti beberapa wilayah di Indonesia yang didominasi oleh satu atau dua kelompok etnis utama, struktur demografis dan kultural di SBT terbentuk dari keberadaan beragam suku bangsa, masing-masing dengan identitas bahasa, adat istiadat, dan sistem sosial yang unik.

Keberagaman ini memperkuat identitas kultural SBT sebagai bagian dari kawasan kepulauan Maluku yang dikenal kaya akan pluralitas etnis. Adapun sejumlah suku bangsa yang signifikan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi Suku Alifuru, Suku Naulu, Suku Seram, Suku Bati, Suku Bali, Suku Arab, Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Kei, Suku Buton, Suku Toraja, Suku Betawi dan Suku Tionghoa.

d. Bahasa Adat

Masyarakat adat di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memiliki kekayaan linguistik yang merepresentasikan kompleksitas etnis, budaya, serta sejarah migrasi dan interaksi antarkelompok masyarakat. Bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga merupakan media utama dalam pewarisan nilai-nilai budaya, sistem pengetahuan lokal, dan identitas kolektif masyarakat adat.

Di wilayah SBT, sejumlah bahasa daerah yang digunakan oleh komunitas adat diantaranya bahasa seram yang umumnya digunakan oleh sebagian besar masyarakat Seram Bagian Timur, bahasa elnama, bahasa kesui, bahasa teor, bahasa bati, bahasa beun/boing, bahasa hote dan bahasa bobat.

Bahasa daerah berfungsi sebagai media utama dalam pelestarian dan transmisi pengetahuan tradisional, termasuk cerita rakyat, nyanyian adat, mantra, dan sistem kepercayaan lokal. Namun demikian, saat ini keberlangsungan bahasa-bahasa tersebut menghadapi tantangan serius akibat pengaruh dominasi bahasa nasional, migrasi penduduk, perubahan pola hidup, serta rendahnya pewarisan bahasa kepada generasi muda.

Upaya pelestarian bahasa daerah perlu menjadi bagian integral dalam kebijakan kebudayaan dan pendidikan daerah. Pemerintah daerah, bersama lembaga adat, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil, perlu mendorong revitalisasi bahasa lokal

melalui dokumentasi, integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah, serta pelibatan generasi muda dalam kegiatan budaya berbasis bahasa ibu.

Pelestarian bahasa daerah merupakan langkah strategis dalam menjaga ketahanan budaya lokal dan memperkuat identitas masyarakat adat sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Masyarakat adat di Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki sistem pengetahuan lokal yang kaya dan terintegrasi dengan praktik kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini mencakup berbagai aspek ekologis dan sosial, yang secara turun-temurun diwariskan melalui tradisi lisan, praktik budaya, dan ritual adat. Secara umum, bentuk kearifan lokal tersebut meliputi:

- **Sistem Pengetahuan Lokal**
Masyarakat adat memiliki pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan alam sekitarnya, termasuk dalam bidang pertanian tradisional, perikanan berbasis musim, pengobatan tradisional berbasis tanaman lokal, serta navigasi laut yang mengandalkan fenomena alam. Pengetahuan ini tidak terpisah dari sistem kepercayaan dan adat yang berlaku, dan menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
- **Seni dan Budaya Tradisional**
Kekayaan ekspresi budaya tercermin dalam beragam tarian adat, musik tradisional seperti penggunaan alat musik tifa dan gong, seni anyaman, ukiran kayu, serta narasi lisan yang mengandung nilai moral dan sejarah kolektif komunitas. Praktik seni budaya ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan penguatan identitas.
- **Sistem Kekerabatan**
Struktur sosial masyarakat adat masih sangat dipengaruhi oleh sistem marga (fam) atau mataputi. Sistem ini menentukan hak waris, garis keturunan, relasi sosial, serta norma perkawinan dalam komunitas. Dalam konteks pemerintahan adat, struktur kekerabatan ini juga memainkan peran penting dalam legitimasi kepemimpinan dan distribusi hak atas tanah ulayat.
- **Relasi dengan Lingkungan Alam**
Filosofi hidup masyarakat adat SBT mencerminkan relasi harmonis dengan alam. Alam tidak semata dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi sebagai entitas hidup yang memiliki nilai spiritual. Hal ini tercermin dalam praktik *sasi*—larangan adat temporer untuk mengambil hasil alam guna menjaga siklus ekologi dan keberlanjutan sumber daya.

Namun demikian, keberlanjutan eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Seram Bagian Timur dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis, antara lain:

- **Pengakuan Hukum yang Belum Optimal**
Meskipun telah terdapat kerangka hukum nasional yang mengakui eksistensi masyarakat adat, implementasi di tingkat lokal, khususnya pengakuan atas wilayah adat dan perlindungan hak-hak kolektif, masih menghadapi hambatan normatif dan administratif.
- **Tekanan Pembangunan Ekonomi**
Perluasan sektor-sektor industri, seperti perkebunan skala besar, tambang, dan proyek infrastruktur, berpotensi mengancam wilayah adat dan mengganggu keberlanjutan mata pencaharian tradisional masyarakat adat.
- **Erosi Budaya dan Bahasa**

Proses modernisasi, urbanisasi, serta kurangnya regenerasi nilai-nilai adat berkontribusi terhadap melemahnya penggunaan bahasa daerah dan praktik budaya lokal di kalangan generasi muda.

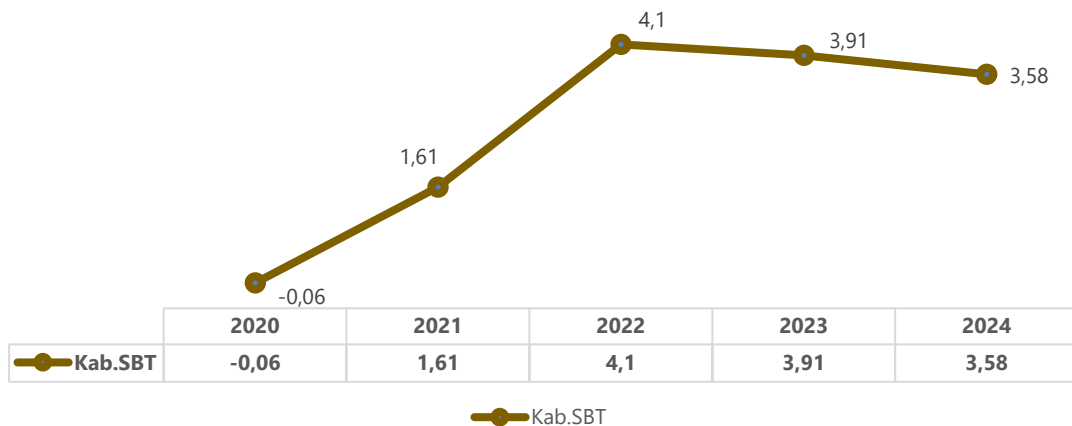
Kendati demikian, terdapat optimisme melalui berbagai inisiatif strategis yang mulai diurusutamakan, baik oleh pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas adat itu sendiri. Upaya penguatan kelembagaan adat, revitalisasi bahasa dan budaya lokal, serta penguatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya menjadi agenda penting dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

I. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam cukup melimpah, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini menjadi indikator penting untuk menilai kinerja pembangunan daerah serta efektivitas pengelolaan potensi yang dimiliki. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan infrastruktur, investasi publik dan swasta, serta kondisi eksternal seperti harga komoditas dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, analisis terhadap laju pertumbuhan ekonomi di wilayah ini tidak hanya mencerminkan capaian pembangunan secara kuantitatif, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.20. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Gambar 2. menyajikan tren laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2020 hingga 2024, yang memperlihatkan fluktuasi sebagai respons terhadap berbagai dinamika ekonomi, baik dari sisi domestik maupun global. Pada tahun 2020, perekonomian daerah menunjukkan terjadi kontraksi sebesar -0,06% sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan signifikan pada sektor-sektor utama. Situasi ini mulai

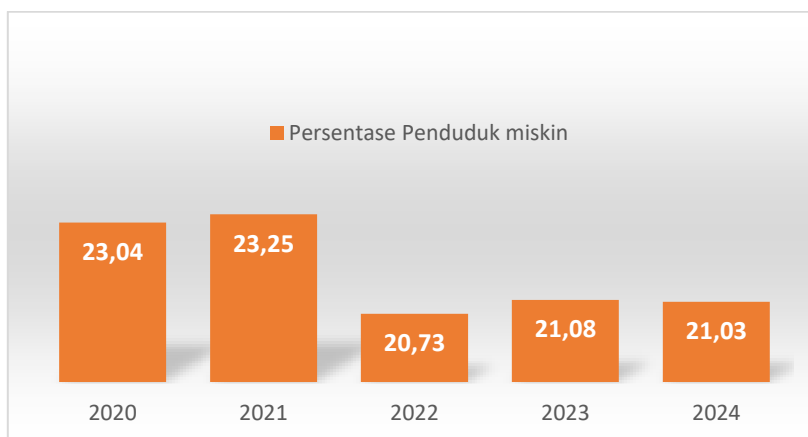
mengalami perbaikan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan mencapai 1,61%, yang menandai fase awal pemulihan, meskipun pemulihan tersebut masih terbatas oleh berbagai kendala struktural dan belum merata di seluruh sektor.

Pemulihan ekonomi berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian pertumbuhan sebesar 4,10%, yang menandakan peningkatan produktivitas dan mobilitas ekonomi, khususnya pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, serta perdagangan dan jasa. Sementara itu, pada tahun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan mencapai 3,58% pada tahun 2024, meskipun tetap berada dalam tren positif yang menunjukkan keberlanjutan proses pemulihan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik dalam merespons krisis dan mampu mengembalikan momentum pertumbuhan dalam jangka menengah. Untuk itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor pendorong pertumbuhan serta formulasi strategi pembangunan yang lebih terarah dan berbasis potensi lokal guna memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, isu kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup penduduk. Meskipun terdapat berbagai program dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat, persentase penduduk miskin di wilayah ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor struktural, seperti keterbatasan akses terhadap layanan dasar, rendahnya produktivitas sektor ekonomi utama, serta keterisolasian wilayah yang memengaruhi distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, analisis terhadap dinamika tingkat kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi penting untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, terarah, dan berbasis pada potensi serta karakteristik lokal.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 2.21. Persentase Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

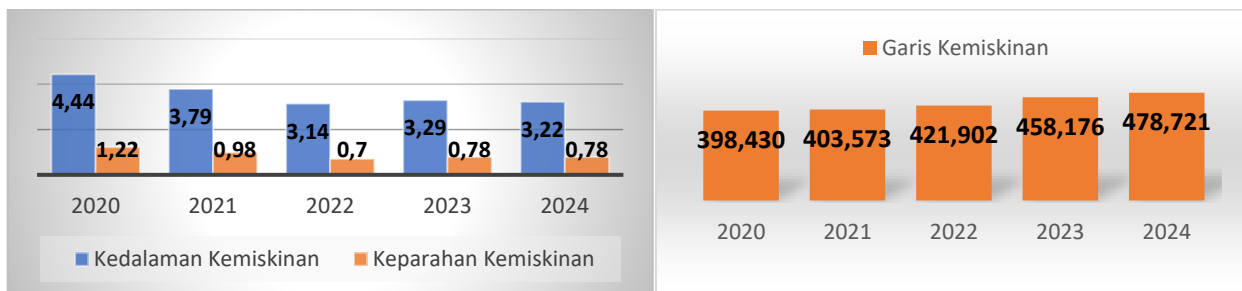
Gambar 2.21 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Seram

Bagian Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi daerah. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 23,04%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 23,25%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh proses pemulihan ekonomi pasca pandemi yang belum merata.

Perkembangan yang lebih positif terjadi pada tahun 2022, ketika angka kemiskinan menurun signifikan menjadi 20,73%. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan efektifnya program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah. Meskipun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 21,08%, mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan penurunan kemiskinan. Tahun 2024 mencatat penurunan kembali ke angka 21,03%, menunjukkan adanya perbaikan secara perlahan namun konsisten.

Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat progres, pengentasan kemiskinan masih memerlukan perhatian serius melalui penguatan intervensi yang tepat sasaran, peningkatan akses layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Data indikator kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan perubahan kualitas hidup penduduk miskin. Dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan, terjadi peningkatan pada awal periode (2020), yang menunjukkan memburuknya kondisi ekonomi kelompok termiskin. Namun, sejak 2021 hingga 2024, kedua indikator ini menunjukkan tren penurunan yang konsisten—kedalaman kemiskinan turun dari 3,79 menjadi 3,22, dan keparahan kemiskinan stabil di angka 0,78—mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi pada kelompok penduduk miskin ekstrem.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.22. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Sementara itu, garis kemiskinan terus mengalami kenaikan dari Rp. 398.430 pada 2020 menjadi Rp. 478.721 pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan pengeluaran minimum untuk hidup layak, yang erat kaitannya dengan tekanan inflasi dan perubahan struktur konsumsi. Secara umum, meskipun kualitas hidup kelompok termiskin membaik, tekanan ekonomi terhadap penduduk secara keseluruhan juga meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada penguatan daya beli, pemerataan akses layanan dasar, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

3. PDRB ADHK

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu, sehingga pengaruh inflasi telah dieliminasi. Dengan demikian, PDRB ADHK mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil dan menjadi alat penting untuk menilai kinerja pembangunan ekonomi daerah dari waktu ke waktu. Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Timur, PDRB ADHK berperan sebagai ukuran utama dalam melihat kemampuan daerah menghasilkan output ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengalokasian sumber daya, serta evaluasi kontribusi daerah terhadap perekonomian Provinsi Maluku secara keseluruhan.

Tabel 2.14. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	-0,03	3,83	5,65	4,41	4,62
Maluku Tenggara	-0,22	3,42	5,65	4,84	5,44
Maluku Tengah	-0,4	3,32	5,21	4,35	5,28
Buru	-0,02	2,97	5,34	4,02	4,38
Kepulauan Aru	-0,04	3,47	5,64	4,97	5,45
Seram Bagian Barat	-0,17	3,4	5,62	4,66	5,62
Seram Bagian Timur	-0,06	1,61	4,1	3,91	3,58
Maluku Barat Daya	-0,13	19,41	10,28	24,7	6,7
Buru Selatan	-0,01	3,5	5,53	4,58	4,97
Kota Ambon	-1,95	4,08	5,1	4,47	5,96
Kota Tual	-0,18	3,58	5,65	5,85	4,93
Maluku	-0,91	3,05	5,11	5,21	5,34

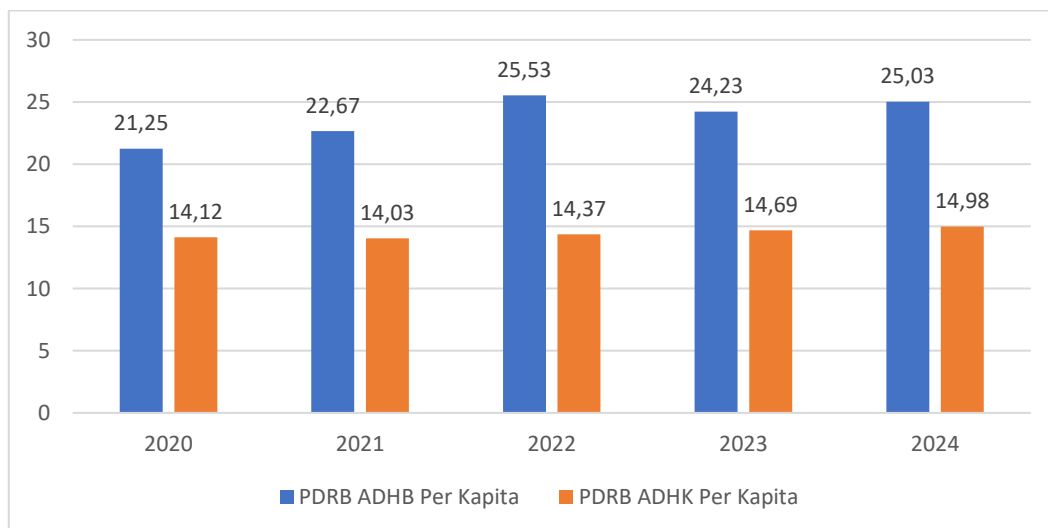
Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2020–2024, Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil meskipun berada di bawah rata-rata provinsi. Pada tahun 2020, perekonomian SBT mengalami kontraksi sebesar -0,06 persen, sejalan dengan tekanan ekonomi yang juga dialami Provinsi Maluku yang terkontraksi -0,91 persen. Memasuki tahun 2021, pemulihan ekonomi di SBT mulai terlihat dengan pertumbuhan 1,61 persen, namun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Provinsi Maluku sebesar 3,05 persen.

Pada periode 2022–2024, laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Seram Bagian Timur terus bergerak positif, masing-masing sebesar 4,10 persen (2022), 3,91 persen (2023), dan 3,58 persen (2024). Walaupun tren ini menunjukkan kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi pertumbuhan SBT terhadap PDRB ADHK Provinsi Maluku relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten/kota lain yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi, seperti Kota Ambon, Maluku Tengah, maupun Maluku Barat Daya. Pada saat yang sama, Provinsi Maluku secara agregat mencatat pertumbuhan yang lebih kuat, yaitu 5,11 persen pada 2022, 5,21 persen pada 2023, dan 5,34 persen pada 2024.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur tetap memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB ADHK Provinsi Maluku melalui pertumbuhan ekonomi yang konsisten, meskipun laju pertumbuhannya masih berada di bawah rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan peran ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor produktif unggulan agar kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap perekonomian Provinsi Maluku dapat semakin optimal di masa mendatang.

4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah, mencerminkan pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap individu dalam wilayah tersebut. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, perkembangan PDRB per kapita memberikan gambaran tentang dinamika ekonomi daerah, serta sejauh mana sumber daya ekonomi yang ada dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Analisis terhadap PDRB per kapita ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan dan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.23. PDRB per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per kapita Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami fluktuasi cukup signifikan. Pada tahun 2020 tercatat menurun menjadi Rp21,25 juta sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Meskipun terjadi sedikit pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, nilai ini belum sepenuhnya kembali ke level pra-pandemi. Hingga tahun 2024, PDRB ADHB per kapita tercatat sebesar Rp25,03 juta.

Sementara itu, data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita, yang lebih mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil karena telah disesuaikan terhadap inflasi, menunjukkan tren yang relatif stagnan. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK per kapita tercatat sebesar Rp14,12 juta pada tahun 2020. Dalam lima tahun

terakhir, nilai tersebut meningkat perlahan, mencapai Rp14,98 juta pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi riil pasca-pandemi berjalan secara bertahap, namun belum sepenuhnya pulih ke level sebelum tahun 2020.

Perbedaan tren antara PDRB ADHB dan ADHK per kapita mencerminkan pengaruh tekanan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi nominal, serta perlunya penguatan fondasi ekonomi produktif yang mampu mendorong pertumbuhan riil secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan, untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kabupaten Seram Bagian Timur.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam menilai dinamika pasar tenaga kerja di suatu daerah, mencerminkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja meskipun aktif mencari pekerjaan. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi, karena dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan memperburuk kesenjangan sosial. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, seperti pengembangan sektor-sektor produktif dan peningkatan kapasitas industri lokal, TPT masih menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, seperti keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta rendahnya tingkat investasi di sektor-sektor ekonomi unggulan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam terhadap tren TPT di Kabupaten Seram Bagian Timur sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerah ini.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Gambar 2.24. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten SBT, 2020-2024

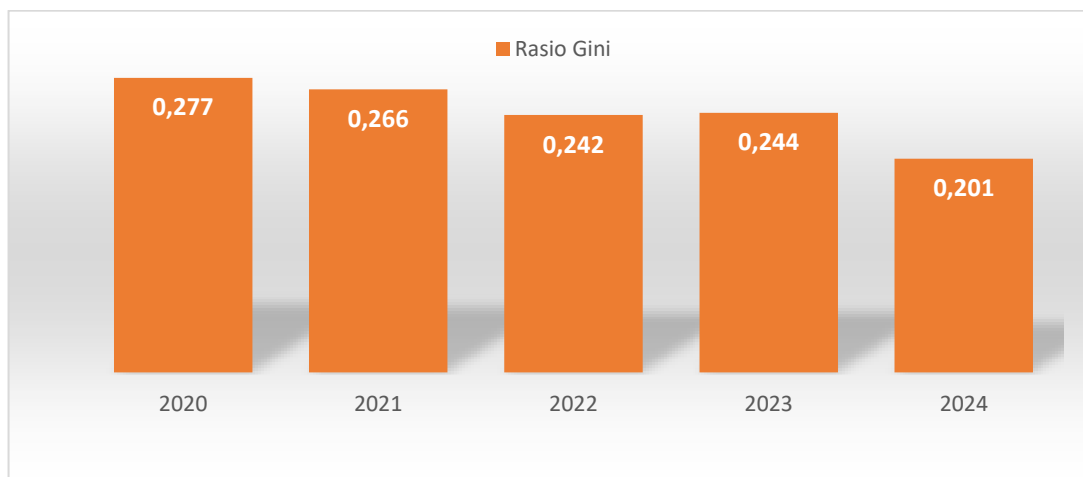
Gambar 2. menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 3,61%, yang kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan signifikan pada sektor-sektor ekonomi utama dan menurunkan kesempatan kerja. Tahun 2021 menunjukkan kenaikan lebih lanjut ke angka 3,88%, yang mencerminkan pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya merata, dengan sejumlah sektor masih mengalami kesulitan dalam menciptakan

lapangan pekerjaan.

Perbaikan mulai terlihat pada tahun 2022, ketika TPT turun signifikan menjadi 3,38%, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi serta efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan TPT turun lebih lanjut menjadi 3,31%, menandakan tren positif dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2024, TPT stabil dengan sedikit penurunan lagi menjadi 3,24%, yang mengindikasikan konsistensi dalam upaya pengurangan pengangguran. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, grafik ini menunjukkan tren penurunan jangka panjang yang menggambarkan dampak positif dari kebijakan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur.

6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu daerah. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, Indeks Gini memberikan gambaran tentang sejauh mana kesenjangan ekonomi antar penduduk. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan yang ada, sementara nilai yang lebih rendah menunjukkan distribusi yang lebih merata. Ketimpangan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, serta tingkat perkembangan sektor ekonomi. Memahami dinamika Indeks Gini di Kabupaten Seram Bagian Timur sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, melainkan dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh warga daerah.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Gambar 2.25. Rasio Gini Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Gambar 2. menunjukkan perkembangan Rasio Gini di Kabupaten Seram Bagian Timur pada periode 2020-2024. Nilai Rasio Gini yang lebih rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sementara nilai yang lebih tinggi mencerminkan ketimpangan yang lebih besar. Pada tahun 2020, Rasio Gini berada pada angka 0,277, yang mengindikasikan perbaikan kecil dalam distribusi

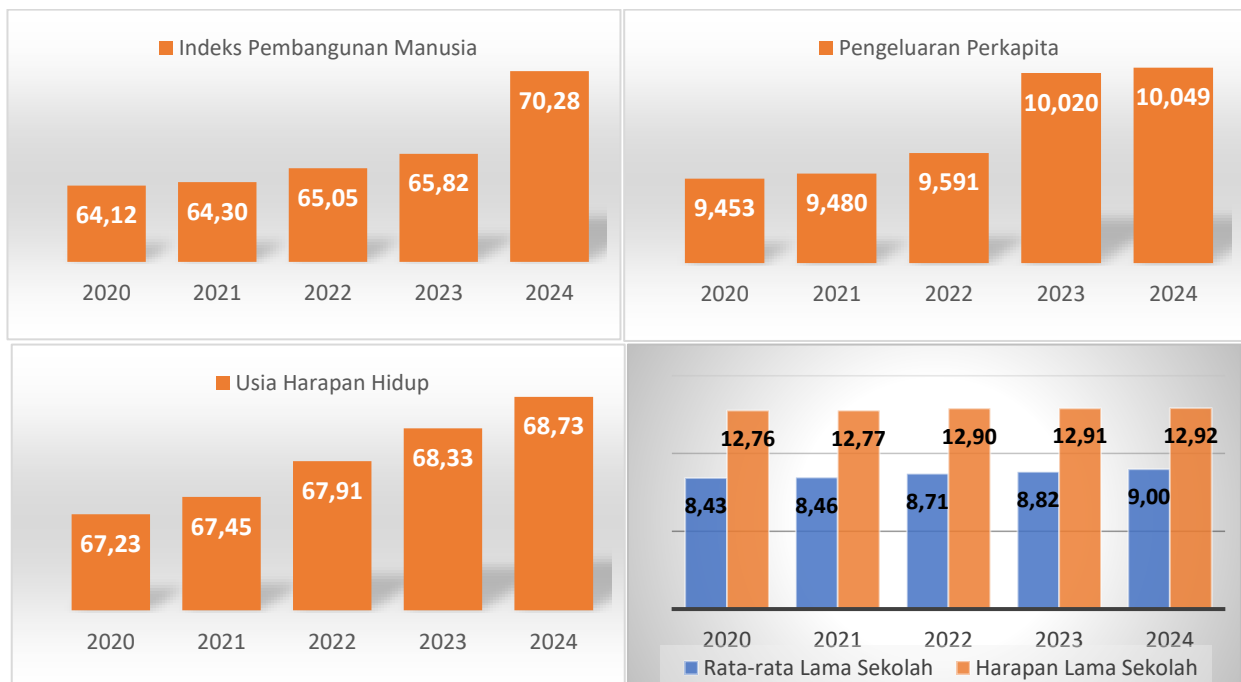
pendapatan. Perbaikan lebih lanjut terlihat pada tahun 2021, dengan Rasio Gini turun menjadi 0,266, menunjukkan adanya pengurangan ketimpangan yang signifikan.

Peningkatan perbaikan distribusi pendapatan berlanjut pada tahun 2022, dengan Rasio Gini turun lebih tajam menjadi 0,242, yang mencerminkan upaya yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan menjadi 0,244, nilai tersebut masih menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Rasio Gini menurun signifikan menjadi 0,201, yang merupakan pencapaian signifikan dalam pemerataan pendapatan dan bisa jadi mencerminkan dampak positif dari kebijakan redistribusi atau program pengentasan ketimpangan yang berhasil.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren penurunan ketimpangan yang konsisten di Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan kecuali pada sedikit peningkatan pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan mulai memberikan hasil yang positif, dan distribusi pendapatan semakin merata seiring berjalannya waktu.

7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang mencerminkan capaian pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, IPM merefleksikan kualitas hidup masyarakat dan keberhasilan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan akses layanan dasar dan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, pemantauan IPM menjadi penting sebagai dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Gambar 2.26. IPM dan Dimensi Penyusunnya di Kabupaten SBT, 2020-2024

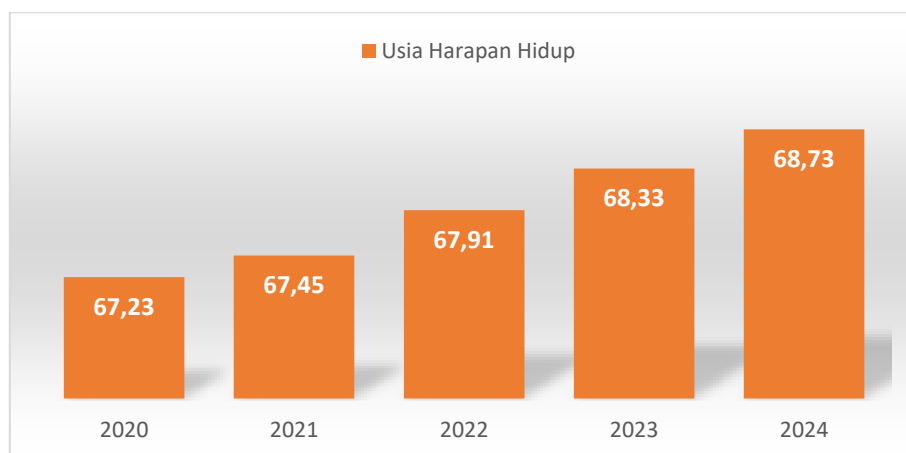
Gambar 2.26 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif yang mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nilai IPM naik dari 64,12 pada tahun 2020 menjadi 70,28 pada tahun 2024, mencerminkan kemajuan yang konsisten di berbagai aspek dasar pembangunan manusia. Kenaikan ini terutama didukung oleh perbaikan dalam tiga dimensi utama IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Dimensi kesehatan tercermin oleh peningkatan usia harapan hidup, mengalami peningkatan dari 67,23 tahun 2020 menjadi 68,73 tahun 2024. Hal tersebut menandakan peningkatan signifikan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan. Di sektor pendidikan, terjadi kemajuan baik pada rata-rata lama sekolah (dari 8,43 tahun 2020 menjadi 9,00 tahun 2024) maupun harapan lama sekolah (dari 12,76 tahun 2020 menjadi 12,92 tahun 2024), yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan partisipasi pendidikan. Sementara itu, indikator pengeluaran per kapita yang meningkat dari 9.453 ribu rupiah menjadi 10.049 ribu rupiah mencerminkan daya beli masyarakat yang membaik, meskipun tetap perlu memperhitungkan tekanan inflasi. Secara keseluruhan, kemajuan ini menggambarkan efektivitas berbagai intervensi pembangunan, sekaligus menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi lanjutan guna menjaga dan mempercepat peningkatan IPM secara berkelanjutan.

II. Kesehatan untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, indikator ini mencerminkan rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola mortalitas yang berlaku saat ini tetap konstan sepanjang hidup mereka. Perkembangan Usia Harapan Hidup menjadi cerminan dari akses terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta kualitas lingkungan hidup secara umum. Oleh karena itu, peningkatan indikator ini dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Gambar 2.27. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 67,23 pada tahun 2020 menjadi 68,73 pada tahun 2024 mencerminkan perbaikan pada determinan kesehatan masyarakat, termasuk gizi, lingkungan, dan pelayanan medis.

Peningkatan UHH ini memperkuat perlunya kebijakan yang menjaga momentum positif, antara lain: penguatan layanan kesehatan primer, penyuluhan kesehatan berbasis masyarakat, serta pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih secara merata. Strategi ini krusial untuk memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat berkelanjutan dan inklusif.

2. Indeks Keluarga Sehat

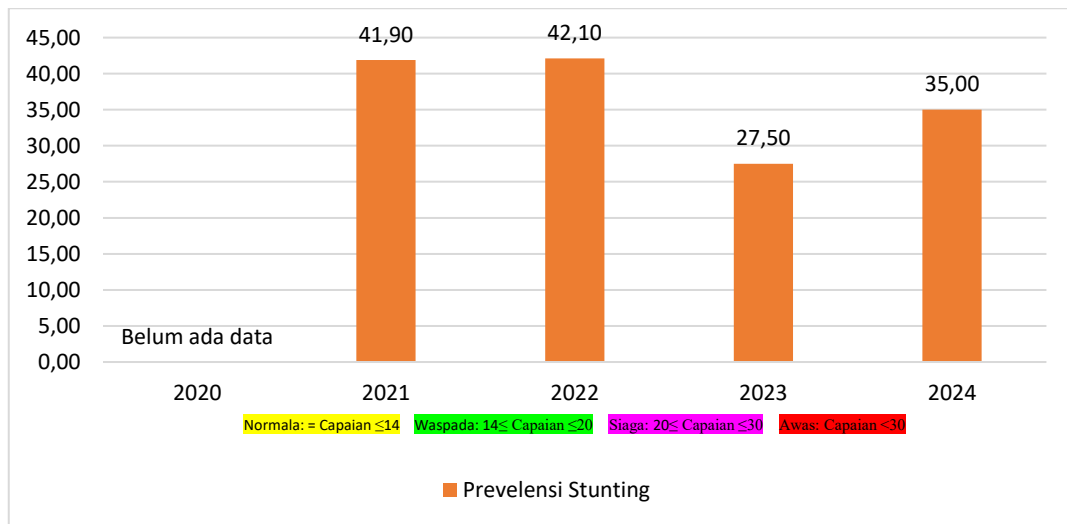
Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk mengukur status kesehatan keluarga secara holistik, dalam kerangka pendekatan Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga. IKS tersusun atas 12 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga domain utama: perilaku kesehatan, lingkungan sehat, dan akses serta pemanfaatan layanan kesehatan.

Nilai IKS Provinsi Maluku tahun 2023 sebesar 0,172 dapat digunakan sebagai indikator proxy untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Seram Bagian Timur. Nilai ini merefleksikan masih rendahnya pemenuhan komponen dasar kesehatan keluarga, sehingga diperlukan penguatan lintas sektor untuk meningkatkan capaian IKS, khususnya pada aspek perilaku preventif, infrastruktur sanitasi, dan jaminan layanan kesehatan.

Selanjutnya sesuai arah dinas kesehatan provinsi maluku Indeks Keluarga Sehat telah digantikan dengan Integrasi layanan Primer (ILP) yang merupakan salah satu dari enam pilar transformasi bidang kesehatan di Indonesia. Integrasi layanan primer ini bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat.

3. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai status gizi dan kesehatan anak di suatu wilayah. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, isu stunting menjadi perhatian strategis mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Stunting tidak hanya mencerminkan kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam 1.000 hari pertama kehidupan, tetapi juga berhubungan erat dengan faktor sanitasi, pola asuh, dan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Oleh karena itu, pemantauan tren prevalensi stunting di wilayah ini penting sebagai dasar perumusan intervensi lintas sektor yang terarah dan berkelanjutan.



Sumber: SKI dan SSGI Kemenkes RI, 2025

Gambar 2.28. Prevalensi Stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

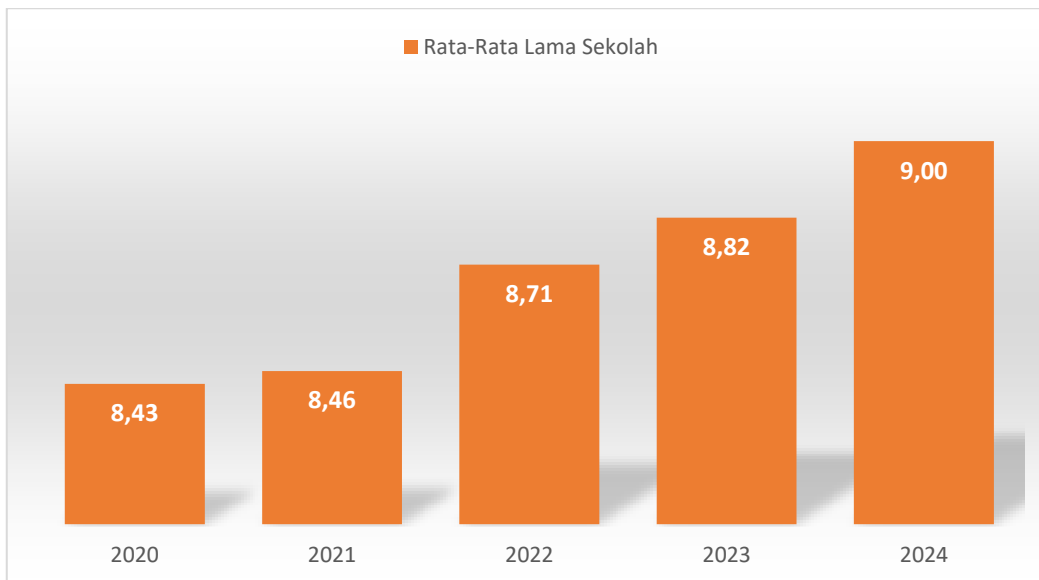
Gambar 2.28 menampilkan tren prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2020–2024. Prevalensi stunting tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 41,90% (kategori AWAS). Pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 27,50% (kategori SIAGA), yang kemungkinan mencerminkan efektivitas program intervensi gizi dan peningkatan layanan kesehatan dasar. Kondisi stunting mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir, dimana tahun 2024 menjadi 35,00% dan kembali berada pada kategori AWAS. Hal ini menandakan belum adanya upaya yang konsisten dalam menjaga stabilisasi capaian. Secara keseluruhan, tren ini menyoroti perlunya konsistensi dalam pelaksanaan program gizi terpadu, perbaikan sanitasi, dan edukasi masyarakat untuk memastikan penurunan stunting yang berkelanjutan.

III. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merefleksikan tingkat pencapaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, perkembangan RLS mencerminkan sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan formal serta kemampuan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan yang tersedia. Pemantauan indikator ini penting untuk menilai kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan dan perencanaan pembangunan sektor pendidikan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Gambar 2.9 menyajikan tren perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2020 hingga 2024. Selama kurun waktu tersebut, RLS menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 8,43 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,00 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan positif dalam capaian pendidikan formal penduduk usia 25 tahun ke atas.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Gambar 2.29. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Analisis terhadap tren ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan, yang secara signifikan dipengaruhi oleh implementasi berbagai program afirmatif, seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian bantuan biaya pendidikan, serta dukungan terhadap digitalisasi sistem pembelajaran.

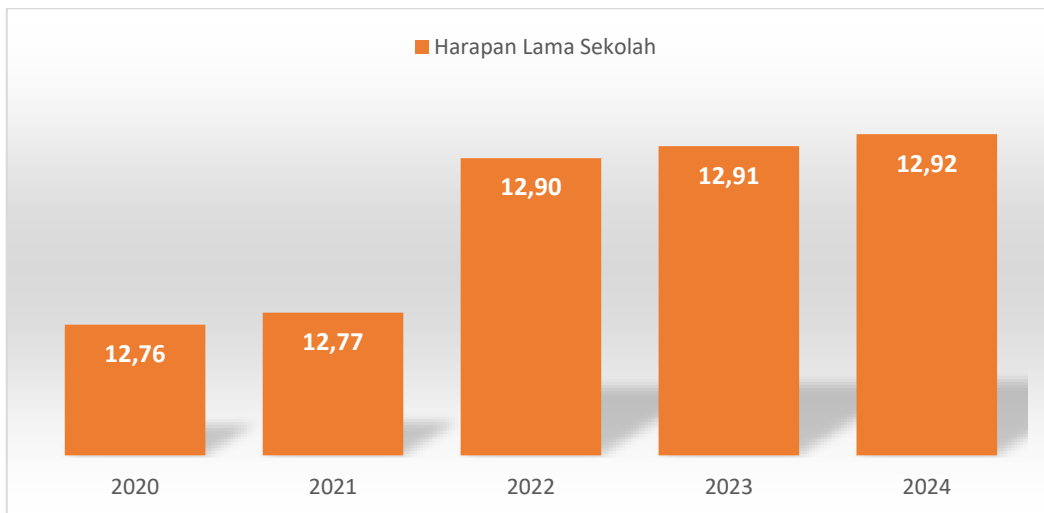
Sebagai salah satu indikator utama dalam dimensi pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan RLS tidak hanya mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan kontribusi strategis terhadap penguatan daya saing dan produktivitas daerah dalam jangka panjang.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak yang baru lahir. Indikator ini mencerminkan ekspektasi terhadap akses dan keberlangsungan pendidikan di masa depan, serta menjadi salah satu komponen utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan.

Semakin tinggi angka HLS, semakin besar peluang generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang lebih panjang dan berkualitas. Peningkatan HLS tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam penyediaan layanan pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia yang lebih kompeten, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Gambar 2. memperlihatkan tren Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2019 hingga 2024. HLS merupakan estimasi rata-rata lama pendidikan formal yang diperkirakan akan ditempuh oleh seorang anak sejak lahir, apabila mengikuti sistem pendidikan yang berlaku saat ini.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Gambar 2.30. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Selama lima tahun terakhir, HLS menunjukkan peningkatan bertahap dari 12,76 tahun pada 2020 menjadi 12,92 tahun pada 2024. Tren positif ini mencerminkan kemajuan dalam perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah. Peningkatan ini merupakan hasil dari kebijakan afirmatif di sektor pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas yang lebih memadai, program bantuan pendidikan, serta integrasi teknologi dalam proses pembelajaran.

Kendati demikian, tantangan pemerataan pendidikan masih perlu mendapat perhatian, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan terisolasi. Upaya berkelanjutan dibutuhkan untuk menjamin bahwa seluruh anak di Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh kesempatan pendidikan yang setara, berkelanjutan, dan berkualitas.

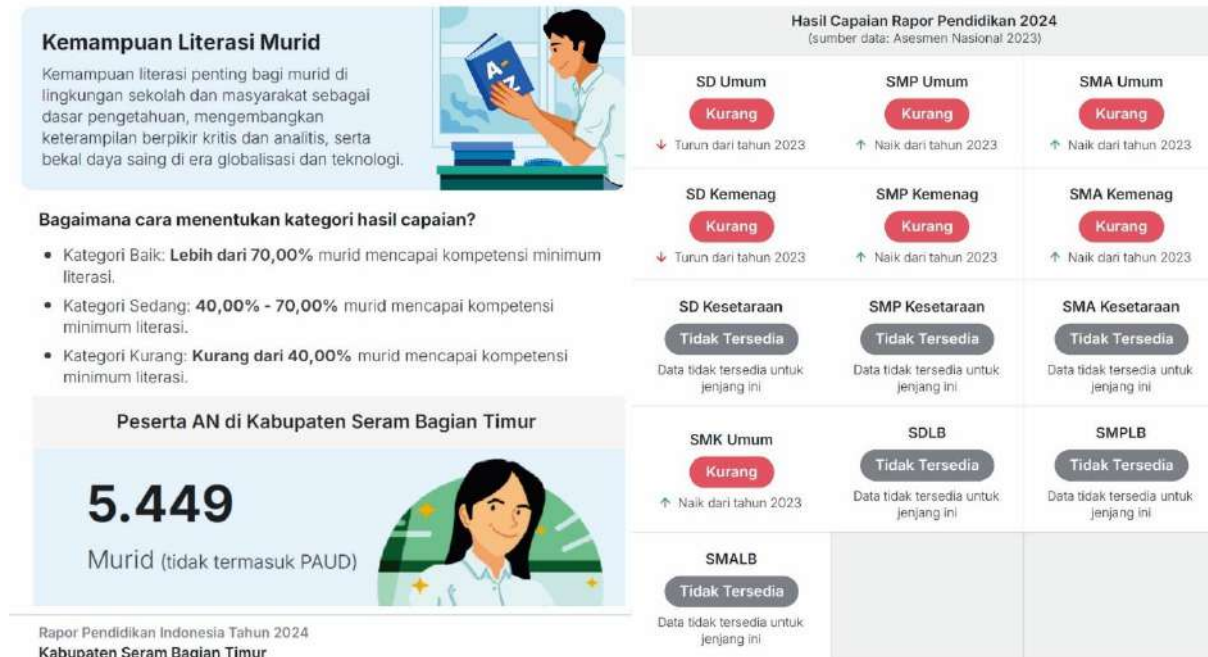
3. Literasi dan Numerasi

Capaian Literasi dan Numerasi Siswa di Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan dasar di daerah ini. Kedua indikator ini mencerminkan kemampuan dasar membaca, menulis, serta keterampilan matematika yang dimiliki oleh penduduk, khususnya anak-anak di usia sekolah. Tingkat literasi dan numerasi yang baik berpengaruh langsung terhadap perkembangan sumber daya manusia dan potensi ekonomi wilayah, sehingga sangat penting untuk terus memantau dan meningkatkan kedua aspek ini melalui kebijakan pendidikan yang tepat dan program-program yang mendukung.

a. Literasi

Capaian literasi siswa di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024, berdasarkan data Rapor Pendidikan Indonesia dari Kemendikdasmen, menunjukkan kondisi yang masih memerlukan perhatian serius. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) yang diikuti oleh 5.449 murid (tidak termasuk PAUD), mayoritas jenjang dan jenis satuan pendidikan berada dalam kategori "Kurang", yang berarti kurang dari 40 persen peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi. Jenjang SD Umum dan SD Kemenag menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan penurunan kualitas literasi dasar pada fase pendidikan

awal yang semestinya menjadi fondasi utama. Sebaliknya, jenjang SMP, SMA, dan SMK—baik umum maupun di bawah Kementerian Agama—menunjukkan tren peningkatan, meskipun capaian keseluruhan masih belum mampu keluar dari kategori rendah.



Sumber: Rapor Pendidikan Indonesia – Kemendikdasmen, 2025

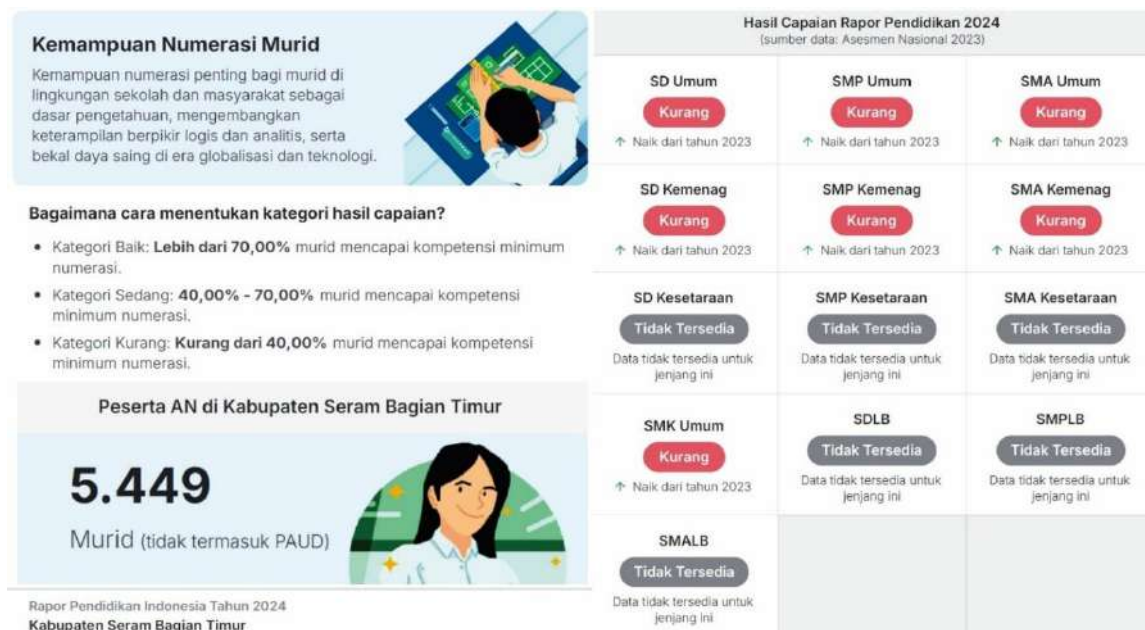
Gambar 2.31. Capaian Literasi Siswa di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024

Kondisi ini mencerminkan tantangan yang kompleks dalam ekosistem pendidikan literasi di daerah, mulai dari kualitas pembelajaran, ketersediaan sumber daya literasi, hingga keterlibatan orang tua dan lingkungan belajar di rumah. Ketiadaan data pada jenjang pendidikan kesetaraan dan satuan pendidikan luar biasa (SLB) juga menjadi hambatan dalam memperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian literasi, khususnya bagi kelompok rentan dan marginal.

Sebagai respons terhadap situasi ini, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bersama dinas teknis dan pemangku kepentingan terkait perlu merancang kebijakan intervensi yang komprehensif dan berbasis bukti. Strategi ini mencakup pelaksanaan kajian diagnostik mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah, terutama pada jenjang pendidikan dasar; penguatan kapasitas guru dalam metode pengajaran literasi yang kontekstual dan berbasis fonik; peningkatan akses terhadap bahan bacaan bermutu dan revitalisasi fasilitas perpustakaan; serta pelibatan komunitas, orang tua, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong budaya literasi. Selain itu, penguatan sistem data dan pelaporan capaian literasi untuk seluruh jenjang dan jenis pendidikan perlu menjadi prioritas guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan inklusif. Upaya peningkatan kemampuan literasi merupakan investasi jangka panjang yang esensial untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia dan mempercepat transformasi sosial-ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Timur.

b. Numerasi

Capaian numerasi siswa di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan dalam Rapor Pendidikan Indonesia yang bersumber dari hasil Asesmen Nasional (AN) 2023, menggambarkan situasi yang masih berada dalam kategori memprihatinkan. Dari total 5.449 peserta didik yang mengikuti AN, capaian numerasi pada seluruh jenjang dan jenis satuan pendidikan—baik SD, SMP, SMA, SMK umum maupun madrasah (Kemenag)—secara konsisten berada dalam kategori “Kurang”, yakni kurang dari 40 persen murid yang berhasil mencapai kompetensi minimum numerasi. Walaupun demikian, terdapat tren peningkatan capaian numerasi dibandingkan tahun sebelumnya pada hampir semua jenjang, menunjukkan adanya indikasi perbaikan kinerja pembelajaran, meskipun belum cukup untuk menggeser capaian ke kategori “Sedang” maupun “Baik”.



Sumber: Rapor Pendidikan Indonesia – Kemendikdasmen, 2025

Gambar 2.32. Capaian Numerasi Siswa di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024

Rendahnya capaian numerasi ini merupakan tantangan struktural yang mencerminkan masih lemahnya penguasaan peserta didik terhadap keterampilan berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah matematis yang kontekstual—kemampuan yang esensial dalam pembangunan sumber daya manusia unggul di era berbasis data dan teknologi. Ketidakterpenuhinya kompetensi minimum numerasi pada sebagian besar murid juga mengindikasikan bahwa intervensi yang telah dilakukan sebelumnya masih belum cukup efektif dan merata. Ketiadaan data capaian pada jenjang pendidikan kesetaraan serta satuan pendidikan luar biasa (SLB) turut membatasi ruang lingkup analisis dan pengambilan kebijakan yang inklusif.

Sebagai respons strategis terhadap situasi ini, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Dinas Pendidikan dan instansi terkait perlu memprioritaskan upaya perbaikan menyeluruh dalam proses pembelajaran numerasi, dimulai dari jenjang pendidikan dasar. Beberapa langkah penting yang direkomendasikan meliputi penguatan konsep dasar matematika sejak dini, implementasi metode

pembelajaran berbasis masalah yang kontekstual, peningkatan kapasitas pedagogi numerasi guru melalui pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi interaktif dalam pembelajaran. Di samping itu, dukungan dari orang tua dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem belajar yang kondusif di luar sekolah. Asesmen formatif internal juga perlu diperkuat guna mendeteksi secara dini kelemahan numerasi dan mengarahkan intervensi tepat sasaran. Terakhir, upaya pengumpulan dan validasi data capaian numerasi untuk seluruh jenis satuan pendidikan harus ditingkatkan agar perencanaan program dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan inklusif.

Secara keseluruhan, capaian numerasi yang masih rendah ini menuntut intervensi lintas sektor yang terintegrasi untuk mempercepat transformasi kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Seram Bagian Timur. Meskipun tren kenaikan merupakan indikasi awal yang positif, dibutuhkan konsistensi kebijakan, dukungan sumber daya yang memadai, dan komitmen jangka panjang untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik memiliki kemampuan numerasi yang memadai sebagai bekal menghadapi tantangan abad ke-21.

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah salah satu indikator utama yang menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam membaca, menulis, dan memahami informasi dasar. Indeks ini mencerminkan sejauh mana akses terhadap pendidikan dasar dan keterampilan literasi telah diperluas di wilayah tersebut, serta bagaimana masyarakat dapat mengaplikasikan pengetahuan untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Peningkatan indeks literasi sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Timur.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

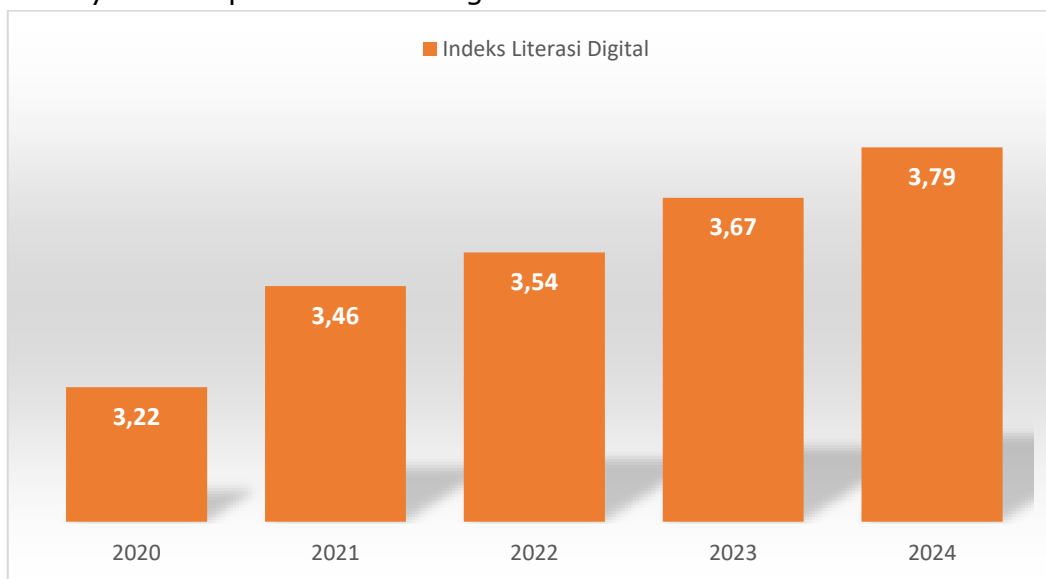
Gambar 2.33. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten SBT, 2023-2024

Kondisi eksisting Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan perkembangan yang tidak konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, IPLM mencapai 70,36, mencerminkan tingkat literasi masyarakat yang tinggi. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan menjadi 50,28, yang menempatkan kabupaten ini dalam kategori *sedang*.

Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya akses pendidikan di daerah terpencil, kurangnya program literasi yang terstruktur, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi pendukung literasi. Perbandingan dengan wilayah lain menunjukkan bahwa Seram Bagian Timur berada di posisi sedang jika dibandingkan dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memiliki IPLM lebih tinggi. Untuk meningkatkan IPLM, diperlukan peningkatan akses pendidikan, pengembangan program literasi masyarakat yang lebih merata, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung literasi di daerah-daerah terpencil.

5. Indeks Literasi Digital

Kondisi literasi digital di Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan tantangan besar dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Meskipun ada kemajuan dalam hal akses internet dan penggunaan perangkat digital, masih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang terbatas dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Rendahnya literasi digital ini mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, mengikuti pendidikan berbasis teknologi, serta berpartisipasi dalam ekonomi digital. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya pengetahuan tentang pemanfaatan digital secara efektif, serta kesenjangan antara wilayah urban dan rural dalam hal akses ke teknologi. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya peningkatan program pelatihan literasi digital yang inklusif dan memperluas infrastruktur pendukung di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.



Sumber: Komdigi RI dan *Expert Judgement PSP Unpatti 2025

Gambar 2.34. Indeks Literasi Digital Provinsi Maluku, 2020-2024

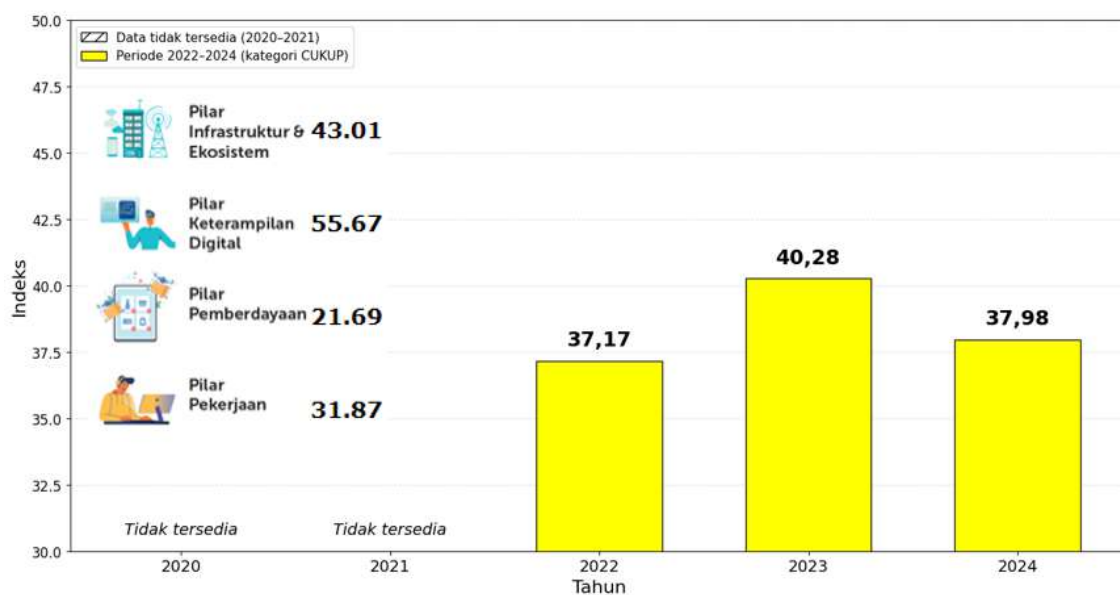
Gambar 2 menunjukkan perkembangan Indeks Literasi Digital di Provinsi Maluku dari tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan peningkatan stabil namun bertahap. Pada tahun 2020, indeks literasi digital berada pada 3,22, dan terus mengalami peningkatan hingga 3,79 pada proyeksi 2024. Meskipun ada lonjakan yang signifikan pada tahun 2021 ke 2022, perkembangan secara keseluruhan tetap bertahap, mencerminkan adanya kemajuan dalam pemahaman dan pemanfaatan teknologi digital di kalangan masyarakat. Namun, tantangan masih ada, terutama

dalam memastikan pemerataan akses teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil. Peningkatan literasi digital di Provinsi Maluku membutuhkan penguatan infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan untuk masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif agar dapat meningkatkan kemampuan digital secara menyeluruh dan inklusif.

Selain itu, Indeks Literasi Digital Maluku dapat digunakan sebagai indikator proxy untuk Indeks Literasi Digital Kabupaten Seram Bagian Timur. Mengingat kesamaan kondisi sosial, ekonomi, dan geografi, serta kebijakan yang diterapkan di tingkat provinsi, indeks ini memberikan gambaran yang relevan mengenai tingkat literasi digital di kabupaten tersebut. Dengan demikian, tren dan proyeksi yang ada pada tingkat provinsi dapat memberikan wawasan penting tentang potensi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Seram Bagian Timur dalam meningkatkan literasi digital masyarakatnya.

6. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan ukuran penting yang mencerminkan sejauh mana masyarakat di daerah ini dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi digital untuk berbagai kebutuhan kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan tingkat kemampuan individu dan rumah tangga dalam menggunakan perangkat digital, seperti ponsel pintar, komputer, serta akses internet untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Dengan meningkatnya peran teknologi digital dalam meningkatkan kualitas hidup, IMD juga menjadi indikator kunci untuk mengukur keberhasilan transformasi digital di kabupaten ini. Adanya perbaikan dalam IMD menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi dengan teknologi, meskipun tantangan akses dan pelatihan digital di daerah terpencil masih perlu perhatian lebih lanjut.



Sumber: Komdigi RI (2025)

Gambar 2.35. Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Seram Bagian Timur menggambarkan perkembangan transformasi digital yang terjadi antara tahun 2022 hingga 2024. Nilai IMD menunjukkan adanya fluktuasi yang mencerminkan dinamika dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat. Pada tahun 2022, IMD mencapai 37,17, yang menunjukkan tahap awal perkembangan digital. Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 40,28, menandakan kemajuan yang signifikan, meskipun pada tahun 2024, angka tersebut sedikit turun menjadi 37,98, tetap dalam kategori *CUKUP*, yang menunjukkan tantangan dalam menjangkau inklusi digital secara merata.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pilar Infrastruktur & Ekosistem memiliki nilai yang relatif tinggi (43,01), yang mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan jaringan dan layanan teknologi. Namun, pilar Keterampilan Digital lebih dominan (55,67), menunjukkan bahwa masyarakat mulai menguasai keterampilan dasar penggunaan teknologi. Meski demikian, pilar Pemberdayaan masih menunjukkan angka rendah (21,69), yang mengindikasikan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi untuk kegiatan produktif. Pilar Pekerjaan juga menjadi tantangan dengan nilai 31,87, menunjukkan adanya kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sektor pekerjaan.

Rekomendasi strategis untuk meningkatkan IMD di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi peningkatan keterampilan digital melalui pelatihan, fokus pada pemberdayaan untuk mendukung sektor UMKM digital, serta memperkuat infrastruktur agar akses teknologi digital lebih merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.

IV. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Urusan sosial merupakan aspek strategis yang mencakup berbagai elemen yang berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah secara berkelanjutan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan sosial, antara lain kerawanan sosial ekonomi, ketunaan sosial, keterlantaran, penyandang disabilitas, penyimpangan perilaku, keterpencilan wilayah, eksploitasi dan diskriminasi, serta berbagai bentuk kerentanan sosial yang masih dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, bencana alam dan bencana sosial juga menjadi permasalahan yang penanganannya memerlukan kesiapsiagaan, mengingat waktu dan dampak kejadiannya sulit diprediksi secara cepat dan tepat.

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen pemerintah yang diberikan secara langsung kepada masyarakat tanpa kewajiban kontribusi balik dari penerima. Bantuan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memberdayakan kelompok rentan, lemah, dan tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidupnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan terus berupaya menyalurkan bantuan sosial secara merata, tepat sasaran, dan berkualitas kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu agar

menjadi lebih berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, yang meliputi penerapan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB), pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, penyusunan struktur dan skala upah, serta pendaftaran tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 2.15 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	8.749	9.409	14.534	15.582	17.212

Sumber: Dinas tenaga Kerja Dan Transmigrasi, diolah 2025

Pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang telah memenuhi indikator tersebut tercatat sebanyak 8.749, kemudian meningkat menjadi 9.409 pada tahun 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 14.534, dan terus bertambah pada tahun 2023 menjadi 15.582. Hingga tahun 2024, jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 17.212.

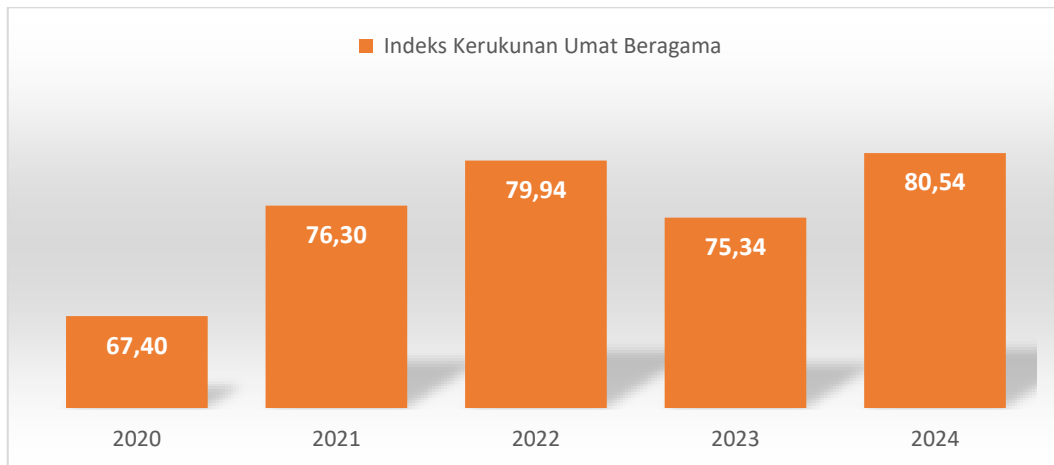
Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen yang semakin kuat dari pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait dalam mendorong perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, tren positif tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap pentingnya penerapan tata kelola ketenagakerjaan yang layak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur.

V. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator Kerukunan Umat Beragama merupakan ukuran penting yang mencerminkan tingkat harmoni sosial, toleransi, dan kohesi antar kelompok pemeluk agama di suatu wilayah. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, indikator ini berperan strategis dalam mencerminkan stabilitas sosial dan keberhasilan pembangunan berbasis kebhinekaan. Kerukunan umat beragama tidak hanya berdampak pada kualitas kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan inklusif, dan memperkuat partisipasi warga dalam berbagai aspek kehidupan publik. Oleh karena itu, pemantauan dan penguatan indikator ini menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah

yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai kebersamaan.



Sumber: Kemenag RI, 2025

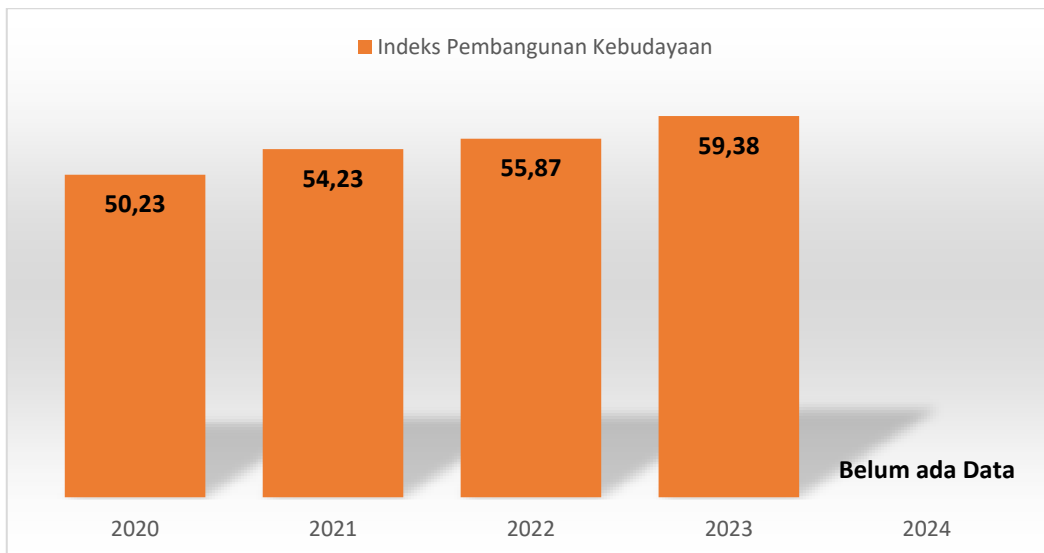
Gambar 2.36. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku, 2020-2024

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Provinsi Maluku menunjukkan dinamika yang relatif stabil namun fluktuatif sepanjang periode 2020 hingga 2024, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 80,54, yang masuk dalam kategori *tinggi*. Kinerja indeks ini menjadi cerminan penting bagi kondisi sosial di Kabupaten Seram Bagian Timur, mengingat belum tersedianya data khusus di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku dapat digunakan sebagai indikator *proxy* untuk mengestimasi capaian kerukunan di Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan asumsi bahwa dinamika sosial dan keagamaan di wilayah ini relatif sejalan dengan tren provinsi.

Kenaikan indeks dari 67,40 pada 2020 ke 80,54 pada 2024 mengindikasikan adanya penguatan nilai-nilai toleransi dan interaksi lintas agama yang harmonis, termasuk potensi efektivitas peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kohesi sosial. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2023, tren keseluruhan tetap positif. Untuk menjaga dan memperkuat capaian ini, diperlukan upaya konsisten dalam penguatan edukasi kebhinekaan, dialog lintas iman, serta sistem pencegahan konflik sosial berbasis komunitas.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator komprehensif yang dirancang untuk mengukur sejauh mana pembangunan kebudayaan berkontribusi terhadap kemajuan suatu daerah. Indeks ini mencerminkan integrasi nilai-nilai budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial. IPK tidak hanya menilai keberadaan dan pelestarian warisan budaya, tetapi juga mencerminkan bagaimana budaya berperan dalam membentuk identitas, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong inovasi dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, IPK menjadi alat strategis untuk melihat potensi budaya sebagai kekuatan pendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Kemendikdasmen RI

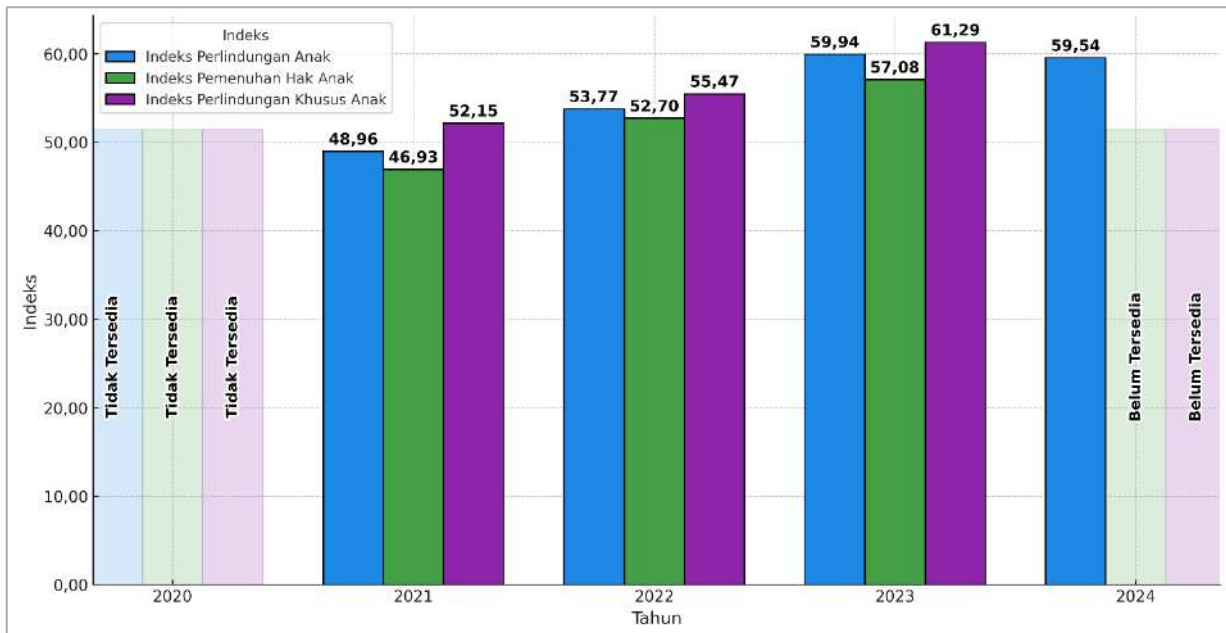
Gambar 2.37. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2020-2024

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Maluku yang meningkat dari 50,123 (2020) menjadi 59,38 (2023) mencerminkan tren positif pengarusutamaan budaya dalam pembangunan daerah. Sementara untuk data capaian di tahun 2024 dalam portal Kemendikdasmen RI belum di rilis. Tren ini merupakan proksi capaian Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menjadi dasar untuk merumuskan strategi berbasis budaya yang terintegrasi dalam kebijakan sektoral.

VI. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang ramah anak secara kuantitatif dan terstandar. Indeks Perlindungan Anak mencerminkan tingkat perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Sementara itu, Indeks Pemenuhan Hak Anak mengukur sejauh mana hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, dan partisipasi, telah terpenuhi. Adapun Indeks Perlindungan Khusus Anak berfokus pada kondisi kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, atau anak dalam situasi darurat. Ketiga indeks ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.



Sumber: Kementerian PPPA RI

Gambar 2.38. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Data perkembangan Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, Indeks Perlindungan Anak tercatat sebesar 48,96, Indeks Pemenuhan Hak Anak sebesar 46,93, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak sebesar 52,15. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2022, masing-masing menjadi 53,77 untuk Indeks Perlindungan Anak, 52,7 untuk Indeks Pemenuhan Hak Anak, dan 55,47 untuk Indeks Perlindungan Khusus Anak.

Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2023, di mana Indeks Perlindungan Anak mencapai 59,94, Indeks Pemenuhan Hak Anak sebesar 57,08, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak sebesar 61,29. Data ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait.

Adapun untuk tahun 2024, data Indeks Perlindungan Anak tercatat sebesar 59,54. Namun, hingga saat ini, data terkait Indeks Pemenuhan Hak Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak tahun 2024 belum tersaji di portal resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Sementara untuk data IPA, IPHA dan IPKA tidak tersaji pada portal resmi Kemen PPPA. Hal ini menandakan perlunya menunggu publikasi resmi berikutnya guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perlindungan dan pemenuhan hak anak di tahun tersebut.

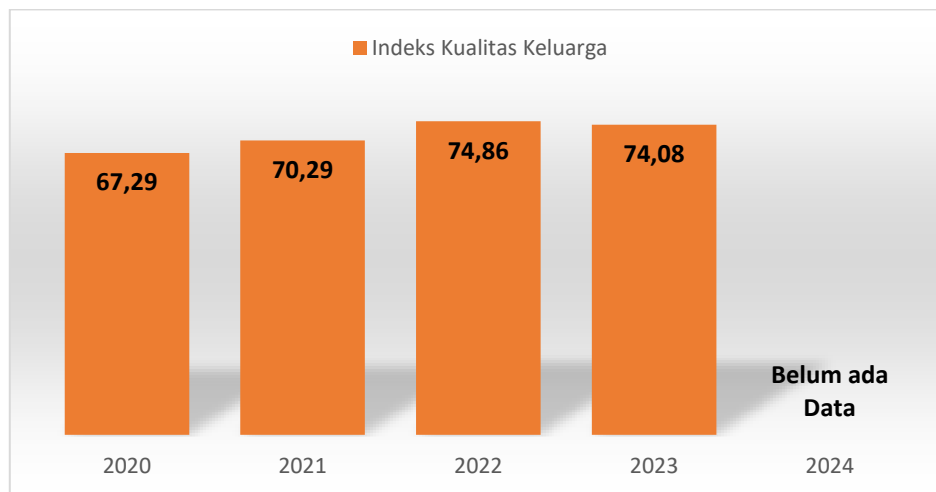
Secara umum, tren dari 2021 hingga 2023 memperlihatkan adanya kemajuan positif dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

a. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator komprehensif yang

mengukur kondisi dan kualitas keluarga dari berbagai dimensi, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kebahagiaan. IKK memberikan gambaran sejauh mana keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar, membangun relasi yang harmonis, dan mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Komponen utama IKK mencakup akses pendidikan dan layanan kesehatan, stabilitas ekonomi, partisipasi sosial, serta kualitas lingkungan tempat tinggal. Indeks ini menjadi acuan penting dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, IKK berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk memastikan bahwa kebijakan berbasis keluarga diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.



Sumber: Kementerian PPPA RI

Gambar 2.39. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Maluku, 2020-2024

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Maluku digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan capaian IKK di Kabupaten Seram Bagian Timur, mengingat ketersediaan data yang terbatas pada tingkat kabupaten/kota. Tren IKK Maluku menunjukkan peningkatan yang positif dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Nilai IKK naik dari 67,29 pada tahun 2020 menjadi 70,29 pada 2021, dan mengalami lonjakan signifikan menjadi 74,86 pada 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 74,08 pada 2023, secara umum tren ini mencerminkan perbaikan dalam kondisi dan ketahanan keluarga di wilayah tersebut.

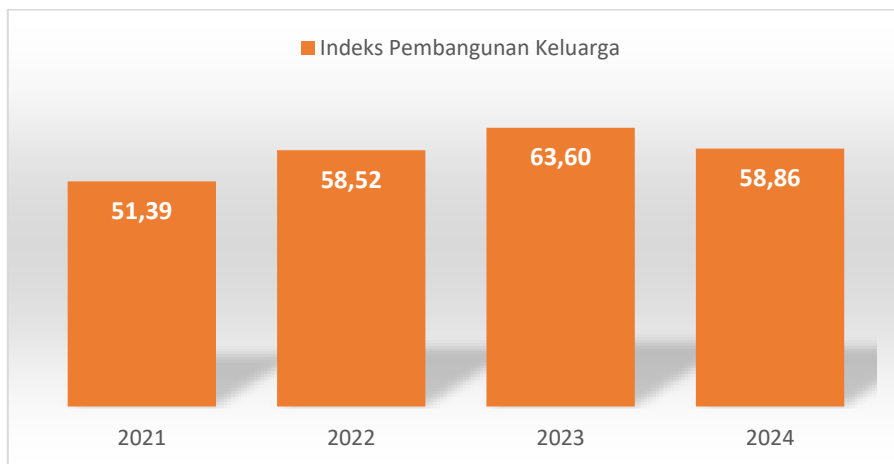
Peningkatan juga terlihat pada dua dimensi utama IKK, yaitu Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSBB). KKSP meningkat dari 61,05 pada 2020 menjadi 71,01 pada 2023, menunjukkan perbaikan dalam kohesi keluarga dan dukungan emosional antar anggota keluarga. Sementara itu, KKSBB naik dari 58,42 menjadi 68,66 dalam periode yang sama, mengindikasikan penguatan nilai-nilai budaya dan sosial yang mendasari kehidupan keluarga. Sementara itu data di tahun 2024 belum tersaji di portal resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan adanya keberhasilan program pembangunan keluarga yang dilaksanakan di tingkat provinsi, yang kemungkinan juga berkontribusi terhadap kondisi keluarga di Kabupaten Seram Bagian Timur. Namun, untuk menjaga dan memperkuat capaian ini, diperlukan strategi yang

berkelanjutan dan berbasis lokal, termasuk peningkatan akses layanan dasar keluarga, penguatan peran lembaga masyarakat, serta pelibatan aktif keluarga dalam kegiatan sosial dan budaya di tingkat komunitas.

b. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan keluarga secara menyeluruh. Indeks ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, yang masing-masing merepresentasikan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dalam kehidupan keluarga. IBANGGA bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi keluarga di suatu wilayah, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan keluarga. Sebagai alat ukur strategis, IBANGGA tidak hanya menilai kondisi internal keluarga, tetapi juga mengaitkannya dengan dukungan lingkungan dan efektivitas intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga secara berkelanjutan.



Sumber: BKKBN, 2025

Gambar 2.40. IBANGGA Kabupaten Seram Bagian Timur, 2021-2024

Indeks Pembangunan Keluarga menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 51,39, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 58,52. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian tertinggi sebesar 63,60. Namun, pada tahun 2024 indeks mengalami penurunan kembali menjadi 58,86. Untuk tahun 2020 tidak tersedia atau belum tersaji pada portal resmi BKKBN, sehingga analisis tren hanya dapat dilakukan mulai tahun 2021.

Penurunan IBANGGA Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024 dari 63,60 (2023) menjadi 58,86 mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

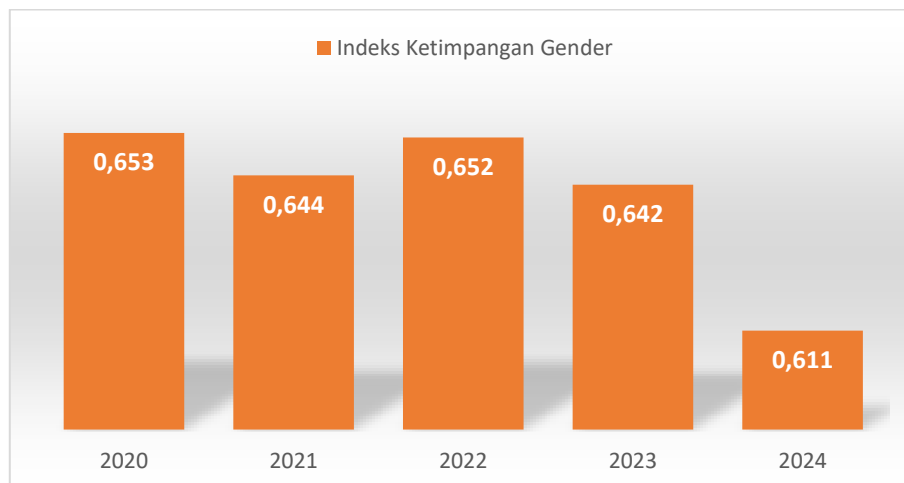
1. Reduksi cakupan atau efektivitas program akibat perubahan kebijakan atau alokasi anggaran.
2. Kesenjangan akses layanan di wilayah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau intervensi.
3. Tekanan eksternal sosial-ekonomi, seperti inflasi atau gangguan lingkungan.

4. Lemahnya integrasi lintas sektor yang menyebabkan intervensi menjadi tidak optimal.

Untuk mengembalikan tren positif, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dimensi yang mengalami penurunan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan komunitas dalam perencanaan program keluarga.

3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Seram Bagian Timur adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kesetaraan gender tercapai di wilayah tersebut. IKG mencakup berbagai dimensi, seperti partisipasi perempuan dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial dan politik. Indeks ini memberikan gambaran tentang kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan, serta membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender. Melalui pemantauan IKG, kebijakan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 2.41. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan tren fluktuatif yang mencerminkan adanya perbaikan, tetapi dengan tantangan yang signifikan dalam mencapai kemajuan yang konsisten. Penurunan IKG dari 0.653 pada tahun 2020 menjadi 0.611 pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa meskipun ada usaha untuk mengurangi ketimpangan gender, upaya tersebut belum optimal.

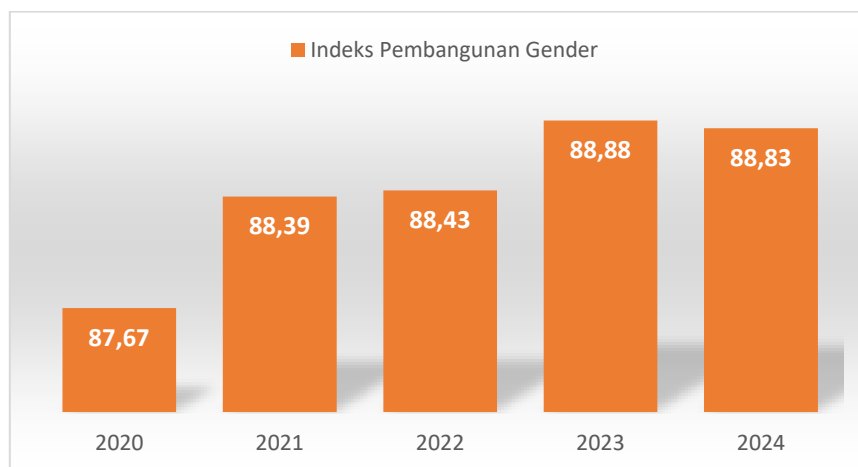
Berdasarkan tren ini, strategi yang diusulkan, seperti peningkatan akses pendidikan perempuan, pemberdayaan kepemimpinan perempuan, fokus pada kesehatan perempuan, dan peningkatan kesadaran kesetaraan gender, sangat relevan. Namun, sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar dalam konteks ini adalah partisipasi perempuan dalam ekonomi, mengingat tantangan besar dalam meningkatkan akses perempuan ke peluang kerja dan kewirausahaan. Program pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan untuk perempuan di

sektor-sektor ekonomi yang berkembang dapat membuka lebih banyak peluang, sementara pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan lokal dan pengambilan keputusan akan mempercepat proses perubahan struktural yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, integrasi strategi ini dengan kebijakan yang lebih terkoordinasi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sangat penting untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender yang lebih substansial di Kabupaten Seram Bagian Timur.

4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Seram Bagian Timur adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam berbagai dimensi pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. IPG memberikan gambaran tentang sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, peluang, dan layanan publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Indeks ini juga mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender. Dengan memantau IPG, Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai pembangunan yang adil dan setara, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam semua sektor kehidupan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 2.42. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Tren positif pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan kemajuan signifikan dari 2020 hingga 2023, meskipun terjadi penurunan kecil pada 2024. Untuk menjaga tren ini, langkah strategis yang relevan meliputi:

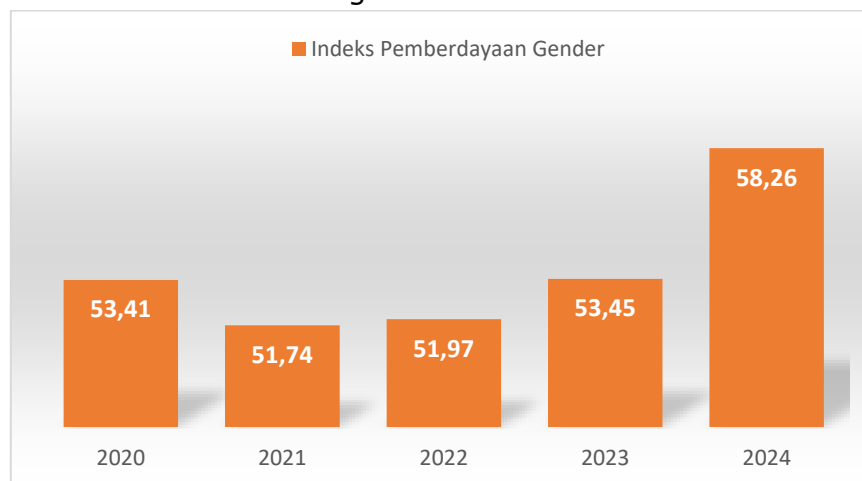
1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Meningkatkan akses perempuan pada pelatihan keterampilan dan peluang usaha, terutama di sektor agrikultur dan perikanan.
2. Pendidikan Anak Perempuan: Fokus pada pendidikan anak perempuan di daerah terpencil untuk mempercepat kesetaraan gender di masa depan.
3. Evaluasi Program Gender: Meninjau efektivitas program yang ada untuk memastikan pencapaian target kesetaraan yang optimal.

4. Monitoring Berbasis Data: Menggunakan data IPG untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti di area dengan skor rendah.
5. Kampanye Kesadaran Gender: Meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender melalui pendekatan berbasis budaya lokal.

Langkah-langkah ini akan mendukung peningkatan kesetaraan gender di SBT, khususnya dalam sektor ekonomi dan pendidikan.

5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Seram Bagian Timur adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, partisipasi politik, dan akses terhadap layanan dasar. IPG mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki kebebasan dan kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan wilayah. Dengan mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor, IPG memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Melalui pemantauan IPG, Kabupaten Seram Bagian Timur dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mengatasi ketimpangan gender dan memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan sosial-ekonomi di tingkat lokal.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Gambar 2.43. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

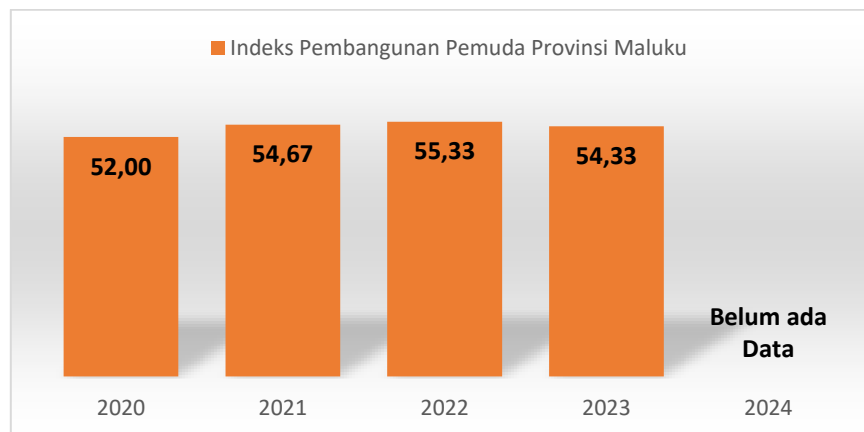
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang menarik dan memberikan indikasi perkembangan yang positif terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan. Pada awal periode, IPG cenderung stagnan dengan nilai berkisar antara 53,41 hingga 53,45. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan, di mana nilai IPG meningkat menjadi 58,26 angka tertinggi selama enam tahun terakhir. Peningkatan ini mengisyaratkan terjadinya kemajuan berarti dalam aspek pemberdayaan perempuan, baik dalam ranah politik, ekonomi, maupun pengambilan keputusan. Secara substansial, IPG mengukur sejauh mana perempuan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sehingga tren positif tersebut menjadi sinyal kuat bahwa berbagai inisiatif dan kebijakan afirmatif yang diimplementasikan mulai menunjukkan hasil konkret.

Meskipun demikian, capaian ini juga menggarisbawahi bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur masih memiliki ruang yang luas untuk meningkatkan kesetaraan gender secara menyeluruh. Nilai IPG sebesar 58,26 masih berada jauh dari nilai ideal 100, yang merepresentasikan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, peningkatan IPG tahun 2024 perlu ditindaklanjuti dengan kajian mendalam untuk mengidentifikasi faktor pendorongnya, seperti peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif daerah, peningkatan proporsi tenaga kerja perempuan di sektor formal dan profesional, serta peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Analisis ini penting guna memperkuat replikasi dan perluasan kebijakan yang terbukti efektif.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian ini, diperlukan strategi penguatan partisipasi perempuan di berbagai sektor strategis, termasuk melalui peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap permodalan serta pasar. Selain itu, edukasi dan advokasi tentang kesetaraan gender harus terus digalakkan di tingkat akar rumput hingga lembaga pemerintah. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap IPG juga harus dilakukan secara sistematis agar dapat memberikan umpan balik yang tepat dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kesenjangan gender. Peningkatan IPG bukan sekadar indikator statistik, tetapi mencerminkan komitmen daerah terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Momentum positif tahun 2024 ini seyogianya menjadi titik tolak untuk mengintensifkan agenda pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas hidup pemuda di suatu wilayah, mencakup aspek-aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dalam kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi. IPP bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi pemuda di suatu daerah dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan pemuda yang lebih efektif dan inklusif. Di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), penilaian IPP dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi pemuda, serta merancang program yang mendukung peningkatan kualitas hidup mereka secara holistik.



Sumber: Kemenpora RI (2025)

Gambar 2.44. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku, 2020-2024

Perkembangan pembangunan pemuda di Kabupaten Seram Bagian Timur diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tingkat Provinsi Maluku, karena data tersebut belum tersedia di tingkat kabupaten/kota. IPP ini memberikan gambaran umum yang dapat menjadi acuan awal penilaian kinerja pembangunan pemuda di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sebagai bagian dari Provinsi Maluku, kebijakan dan program pembangunan pemuda di tingkat provinsi memiliki pengaruh terhadap daerah ini, serta memberikan kontribusi terhadap indikator IPP. Analisis data IPP Provinsi Maluku dapat mengidentifikasi tren, kekuatan, dan tantangan yang relevan untuk Kabupaten Seram Bagian Timur. Penggunaan data provinsi juga dapat menyoroti perbedaan atau kesenjangan antara kabupaten/kota di Maluku, sehingga membuka peluang untuk kajian lebih mendalam terkait kebutuhan pemuda di wilayah ini. Hal ini penting untuk merancang kebijakan yang lebih terarah dan berbasis bukti guna mendukung pembangunan pemuda secara berkelanjutan di Tingkat kabupaten.

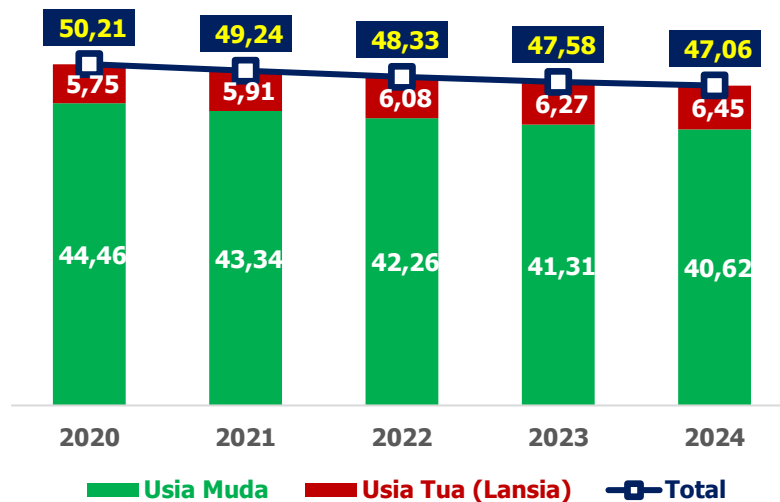
Perkembangan IPP pada periode 2020-2023 cenderung meningkat, untuk data di tahun 2024 belum tersaji di portal resmi Kemenpora RI. Dari data yang tersaji mencerminkan peningkatan akses pemuda terhadap pendidikan dan peluang kerja, meskipun ada penurunan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan pemuda di Maluku telah memberikan hasil positif, namun tetap memerlukan evaluasi dan penguatan agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

I. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Angka Ketergantungan

Dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data kependudukan, salah satu indikator penting yang perlu dianalisis secara saksama adalah angka ketergantungan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai proporsi penduduk usia tidak produktif—baik yang masih anak-anak maupun yang telah lanjut usia—terhadap penduduk usia produktif yang menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi dan sosial. Tingkat ketergantungan yang tinggi dapat menjadi tantangan serius bagi daerah, karena menunjukkan beban yang besar terhadap kelompok usia kerja dalam menopang kebutuhan hidup kelompok usia yang belum atau tidak lagi bekerja. Sebaliknya, tingkat ketergantungan yang rendah mencerminkan peluang strategis untuk memanfaatkan momentum bonus demografi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap angka ketergantungan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika struktur usia penduduk, khususnya dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Timur.



Sumber: BPS, (Data diolah 2025)

Gambar 2.45. Angka Ketergantungan Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Data tren angka ketergantungan di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pergeseran struktur demografi yang penting untuk dicermati dalam konteks perencanaan pembangunan. Angka ketergantungan total mengalami penurunan bertahap dari 50,21 pada tahun 2020 menjadi 47,06 pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan sinyal positif yang mencerminkan berkurangnya beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif terhadap kelompok usia non-produktif, sehingga menciptakan potensi bagi pemanfaatan bonus demografi.

Penurunan angka ketergantungan ini secara dominan ditopang oleh menurunnya rasio penduduk usia muda (0–14 tahun), dari 44,46 pada tahun 2020 menjadi 40,62 pada tahun 2024. Tren ini berpotensi terkait dengan keberhasilan pengendalian angka kelahiran dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga. Sebaliknya, angka ketergantungan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari 5,75 menjadi 6,45 dalam periode yang sama. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan harapan hidup dan kualitas layanan kesehatan, namun sekaligus menuntut perhatian terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh proses penuaan penduduk.

Perubahan dalam komposisi beban ketergantungan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur tengah bergerak menuju struktur penduduk yang lebih matang, dengan proporsi penduduk usia produktif yang semakin dominan dalam jangka pendek. Situasi ini menghadirkan peluang strategis yang harus segera dioptimalkan melalui kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan daya saing ekonomi lokal. Di sisi lain, kecenderungan peningkatan proporsi lansia juga perlu diantisipasi melalui penyediaan layanan kesehatan yang adaptif, penguatan jaminan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang inklusif bagi kelompok usia lanjut.

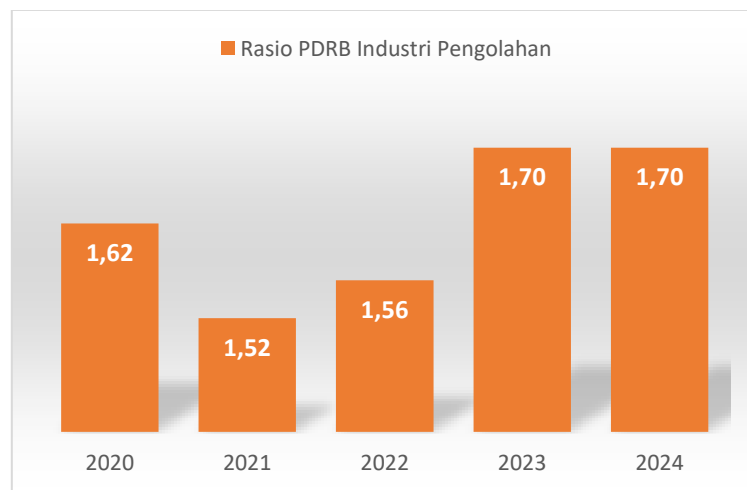
Secara keseluruhan, dinamika angka ketergantungan ini memberikan landasan penting bagi perumusan kebijakan kependudukan dan pembangunan sumber daya manusia yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis proyeksi jangka panjang, agar mampu mengakomodasi perubahan struktur usia penduduk yang semakin kompleks

di masa mendatang.

II. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten tersebut. Rasio ini mencerminkan sejauh mana sektor industri pengolahan, seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya, berperan dalam perekonomian daerah. Peningkatan rasio ini dapat menandakan adanya perkembangan di sektor industri yang mampu menciptakan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menganalisis rasio ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong diversifikasi ekonomi dan memperkuat sektor industri pengolahan di Kabupaten Seram Bagian Timur.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Gambar 2.46. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten SBT, 2020-2024

Berdasarkan data yang ada, sektor pengolahan hasil pertanian dan perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Terutama dengan melihat lonjakan rasio PDRB industri pengolahan pada tahun 2024, yang disebabkan oleh peningkatan pengolahan produk lokal seperti hasil perikanan dan agrikultur. Mengingat kekayaan alam daerah ini, kedua sektor tersebut dapat menjadi fokus utama untuk pengembangan industri pengolahan. Beberapa sektor yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah:

1. Pengolahan Perikanan: Dengan pesisir yang luas, pengolahan hasil laut seperti ikan, rumput laut, atau olahan produk perikanan lainnya dapat diperluas. Pengolahan ikan menjadi produk bernilai tambah seperti ikan kaleng, kering, atau olahan makanan laut lainnya dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun ekspor.
2. Pengolahan Agrikultur: Komoditas pertanian seperti kelapa, cokelat, kopi, dan hasil perkebunan lainnya memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Peningkatan kapasitas pengolahan produk-produk tersebut menjadi produk turunan yang bernilai tinggi dapat memperkuat ekonomi lokal.

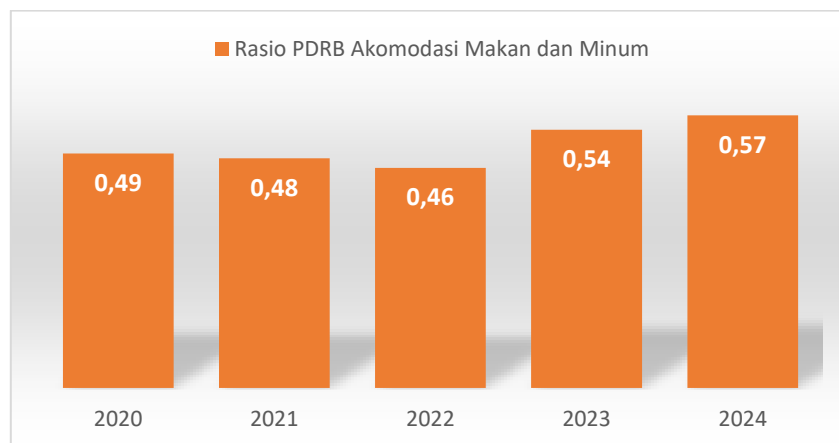
Selain itu, pengembangan sektor-sektor ini dapat difokuskan pada:

- Kolaborasi dengan UMKM lokal untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi produk pengolahan.
- Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi melalui pelatihan dan teknologi terbaru, agar produk olahan dapat memenuhi standar pasar yang lebih luas.

Strategi-strategi ini diharapkan dapat terus mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Seram Bagian Timur mengukur kontribusi sektor pariwisata, khususnya subsektor akomodasi, restoran, dan layanan makan dan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten. Rasio ini mencerminkan sejauh mana sektor ini berperan dalam perekonomian daerah, yang dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, konsumsi domestik, dan pertumbuhan layanan terkait. Peningkatan rasio ini dapat menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan layanan makan minum semakin berkembang, mendukung penciptaan lapangan kerja, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Dengan memahami tren dalam rasio ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan memperkuat sektor akomodasi dan restoran di Kabupaten Seram Bagian Timur.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Gambar 2.47. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten SBT, 2020-2024

Tren yang terlihat pada tahun 2024 dengan lonjakan rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Seram Bagian Timur memang menarik dan mencerminkan potensi pemulihan atau bahkan pertumbuhan sektor ini. Peningkatan tajam pada tahun 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Pemulihan Pariwisata Pascapandemi: Setelah masa pandemi, sektor pariwisata mulai pulih, yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas terkait layanan akomodasi dan makan-minum. Dengan bertambahnya jumlah wisatawan, baik domestik maupun internasional, maka kebutuhan akan akomodasi dan restoran meningkat.
2. Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata: Upaya pemerintah daerah

dalam mempromosikan potensi wisata dan kuliner lokal mungkin telah memberikan dampak yang positif, mengundang lebih banyak wisatawan untuk mengunjungi SBT.

3. Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat: Perubahan gaya hidup, termasuk kebiasaan makan di luar rumah yang semakin populer, bisa berkontribusi pada peningkatan permintaan di sektor restoran dan layanan makan-minum.

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Hingga saat ini, data terkait kontribusi atau proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Seram Bagian Timur belum tersedia secara resmi. Ketiadaan data ini disebabkan oleh belum adanya pengelompokan statistik sektoral yang secara spesifik mengidentifikasi subsektor ekonomi kreatif dalam struktur PDRB daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) maupun perangkat daerah terkait masih menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) yang bersifat umum, sehingga aktivitas ekonomi kreatif masih teragregasi ke dalam beberapa lapangan usaha lain seperti industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya. Akibatnya, belum dapat dilakukan pemetaan yang akurat mengenai besaran kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur.

Hasil pendataan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan terdapat 64 pelaku usaha ekonomi kreatif (Ekraf) pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan meningkatnya semangat kewirausahaan masyarakat di sektor ekonomi kreatif. Jenis usaha yang paling dominan adalah kuliner, meliputi olahan makanan, minuman, abon, kue, hingga makanan khas lokal. Selain itu, berkembang pula usaha di bidang kriya (kerajinan tangan dan bunga hias), pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta sebagian kecil pada fesyen dan jasa kreatif.

Secara umum, pelaku usaha Ekraf masih didominasi oleh usaha skala rumah tangga dengan tenaga kerja terbatas. Produk yang dihasilkan sederhana namun memiliki nilai jual, terutama berbasis potensi lokal. Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah akses pasar, kualitas kemasan, dan keterbatasan permodalan. Dengan potensi yang dimiliki, ekonomi kreatif di Kabupaten Seram Bagian Timur berpeluang berkembang lebih pesat apabila didukung melalui pelatihan peningkatan kapasitas, fasilitasi permodalan, dan strategi pemasaran yang lebih luas. Kondisi ini menandakan perlunya inisiatif pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral berbasis ekonomi kreatif di tingkat daerah, baik melalui survei khusus maupun integrasi data lintas instansi, sehingga potensi ekonomi kreatif dapat terukur dan dioptimalkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Rasio Kewirausahaan

Sampai dengan saat ini, data mengenai rasio kewirausahaan di Kabupaten Seram Bagian Timur belum tersedia secara resmi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi terkait. Ketiadaan data ini disebabkan oleh belum adanya instrumen pengukuran yang secara khusus menghitung jumlah pelaku usaha atau wirausaha dibandingkan dengan total angkatan kerja di wilayah tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan data sektoral, jumlah Usaha Mikro yang berkembang di Kabupaten Seram Bagian Timur diperlihatkan pada Tabel 2.15.

Tabel. 2.16 Jumlah UMKM di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020-2024

Jenis Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
UMKM yang memiliki INB	-	267	651	954	757
UMKM yang Belum memiliki INB	-	-	9.056	8.753	8.950
UMKM berdasarkan proyek	-	-	1.059	1.601	1.125
IKM (Industri Kecil Menengah)	-	-	205	227	308

Sumber: dinas Perindakop tahun 2025 diolah

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Seram Bagian Timur semakin menonjol sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah. Data menunjukkan bahwa perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup dinamis. Pada tahun 2020, data UMKM yang terklasifikasi belum tersedia secara rinci. Namun, sejak tahun 2021, jumlah UMKM mulai terdata dengan lebih baik. UMKM yang telah memiliki Izin Nomor Berusaha (INB) pada tahun 2021 tercatat sebanyak 267 unit usaha, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 651 unit pada tahun 2022 dan terus naik hingga 954 unit di tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah UMKM ber-INB menjadi 757 unit, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan legalitas usaha.

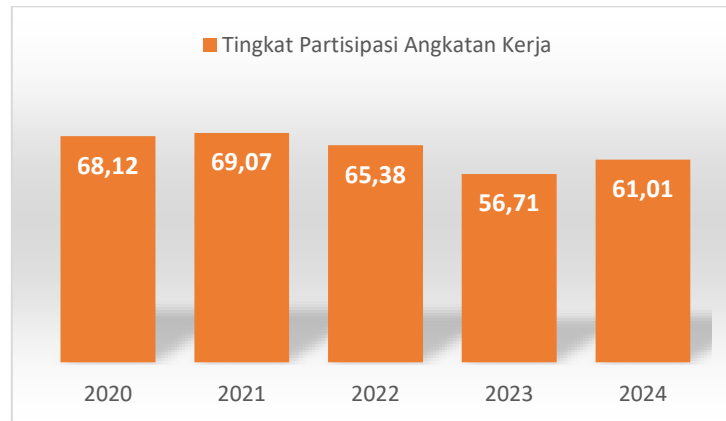
Sementara itu, jumlah UMKM yang belum memiliki INB baru terdata sejak tahun 2022 dengan angka 9.056 unit usaha. Pada tahun berikutnya, jumlah ini menurun menjadi 8.753 unit pada 2023, namun kembali meningkat menjadi 8.950 unit pada 2024. Hal ini menandakan masih cukup banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas formal.

Selain itu, UMKM berdasarkan proyek mulai tercatat sejak 2022 dengan jumlah 1.059 unit, kemudian meningkat menjadi 1.601 unit pada 2023, sebelum akhirnya turun menjadi 1.125 unit pada 2024. Untuk kategori Industri Kecil Menengah (IKM), jumlahnya terus mengalami peningkatan dari 205 unit pada tahun 2022, menjadi 227 unit pada 2023, dan mencapai 308 unit pada 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya pertumbuhan sektor UMKM dan IKM di Kabupaten Seram Bagian Timur, meskipun masih dihadapkan pada tantangan terkait perizinan usaha dan keberlanjutan jumlah UMKM di tiap kategori.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Seram Bagian Timur menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Indikator ini penting untuk mengukur seberapa besar potensi tenaga kerja yang tersedia dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah. TPAK yang tinggi mencerminkan tingkat partisipasi yang baik dalam perekonomian, sementara angka yang rendah bisa menunjukkan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja atau adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Analisis terhadap TPAK dapat

memberikan wawasan dalam merancang kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan keterampilan tenaga kerja di SBT.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2025

Gambar 2.48. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten SBT, 2020-2024

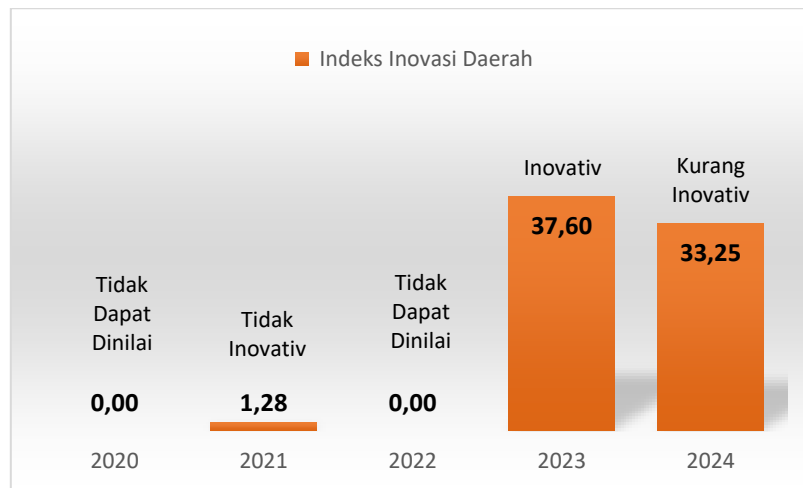
Penurunan signifikan pada TPAK di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, yang mungkin menyebabkan pengurangan aktivitas ekonomi dan sektor-sektor yang terdampak seperti pariwisata, perdagangan, dan sektor informal. Selain itu, kebijakan pembatasan atau pergeseran ekonomi juga bisa berperan dalam pengurangan lapangan kerja.

Sektor dengan potensi besar untuk mendukung pemulihan TPAK adalah sektor agrikultur dan perikanan, yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kedua sektor ini bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Selain itu, sektor teknologi dan digitalisasi juga menawarkan peluang besar, terutama dalam pelatihan keterampilan digital untuk membuka lapangan pekerjaan baru, baik di bidang jasa maupun perdagangan berbasis online.

Untuk mempercepat pemulihan, upaya lebih lanjut dalam meningkatkan infrastruktur, serta penguatan kebijakan yang memfasilitasi investasi dan keterampilan baru bagi tenaga kerja, akan sangat penting untuk merangsang kembali tingkat partisipasi angkatan kerja yang optimal.

6. Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI, 2025), perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022, daerah ini tercatat dalam kategori **"Tidak Dapat Dinilai"** dan **"Tidak Inovatif"**, dengan skor masing-masing 0,00 pada tahun 2020 dan 2022, serta 1,28 pada tahun 2021. Ketidakterersediaan skor pada tahun 2020 dan 2022 disebabkan oleh **ketidakterlaksanaan pelaporan inovasi daerah ke Kementerian Dalam Negeri**, sehingga penilaian tidak dapat dilakukan secara objektif.



Sumber: Kemendagri RI (2025)

Gambar 2.49. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

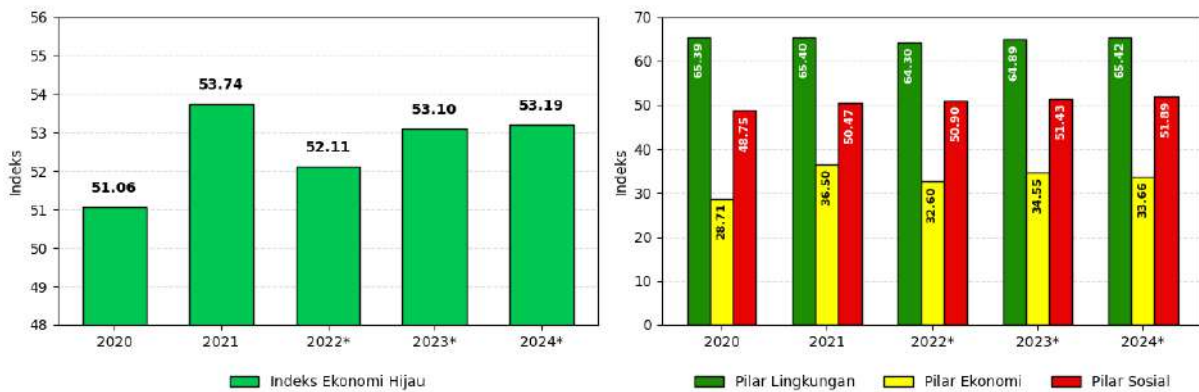
Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana Kabupaten Seram Bagian Timur mencatat skor **37,60**, dan berhasil masuk dalam kategori "**Inovatif**". mengindikasikan perbaikan dalam tata kelola inovasi termasuk pelaksanaan dan pelaporan program-program inovasi daerah, adopsi teknologi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Hal ini menjadi sinyal positif bagi peningkatan kinerja pelayanan publik dan daya saing daerah ke depan serta peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap agenda reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik melalui pendekatan inovatif.

Namun demikian, pada tahun 2024, skor Indeks Inovasi Daerah mengalami sedikit penurunan menjadi **33,25**, dan berada dalam kategori "**Kurang Inovatif**". Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kelembagaan inovasi serta kesinambungan pelaporan dan dokumentasi kegiatan inovatif, agar capaian positif yang telah diraih pada tahun sebelumnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

III. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Indeks Ekonomi Hijau

Transformasi menuju ekonomi hijau menjadi salah satu strategi utama Kementerian PPN/Bappenas dalam pembangunan nasional. Untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut, digunakan Indeks Ekonomi Hijau sebagai instrumen evaluasi berbasis data yang komprehensif. Indeks ini mencakup 15 indikator yang tersebar dalam tiga pilar utama: ekonomi (seperti intensitas emisi dan PDRB per kapita), sosial (antara lain tingkat kemiskinan dan harapan hidup), serta lingkungan (seperti tutupan lahan dan proporsi energi terbarukan). Indeks ini memungkinkan pemantauan capaian pembangunan hijau secara terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2023 dan *Expert Judgement PSP Unpatti 2024

Gambar 2.50. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Maluku, 2020-2024

Berdasarkan tren Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Maluku tahun 2020–2024, tercermin bahwa Pilar Lingkungan berada dalam kondisi stabil dengan nilai berkisar antara 64–65, sedangkan Pilar Sosial menunjukkan perbaikan bertahap, mencapai 51,89 pada tahun 2024. Di sisi lain, Pilar Ekonomi menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan titik terendah pada 2020 (28,71) dan berfluktuasi hingga 33,66 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau masih menghadapi tantangan dalam dimensi ekonomi, khususnya dalam peningkatan efisiensi sumber daya, produktivitas, dan penciptaan nilai tambah.

Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), capaian indeks ini merefleksikan pentingnya optimalisasi potensi sektoral yang berbasis sumber daya alam, seperti perikanan, pertanian, dan ekowisata, untuk memperkuat Pilar Ekonomi tanpa mengabaikan dimensi lingkungan dan sosial. Penguatan Pilar Ekonomi dapat diarahkan melalui:

- Diversifikasi ekonomi hijau di tingkat lokal, termasuk pengembangan agroindustri ramah lingkungan dan ekowisata berbasis kearifan lokal.
- Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan tenaga kerja lokal melalui pelatihan keterampilan hijau (green skills) dan adopsi teknologi bersih.
- Integrasi kebijakan pembangunan daerah dengan kerangka transformasi ekonomi hijau nasional, guna memastikan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.
- Peningkatan kualitas tata kelola lingkungan dan pengelolaan sampah terintegrasi untuk mempertahankan capaian Pilar Lingkungan.
- Penguatan program pemberdayaan sosial berbasis komunitas untuk mendukung akselerasi Pilar Sosial secara inklusif.

Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mendorong Kabupaten SBT berkontribusi secara lebih signifikan terhadap capaian Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Maluku, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi daerah berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan antar-generasi.

2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Capaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Provinsi Maluku pada tahun 2023, yang mencapai nilai 67,22 dan menempatkan Maluku pada peringkat kelima nasional, mencerminkan kemajuan awal dalam pengarusutamaan prinsip ekonomi biru dalam agenda pembangunan daerah. Nilai ini merefleksikan keberhasilan dalam

mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara produktif, berkelanjutan, dan inklusif, termasuk kontribusi dari wilayah pesisir seperti Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Sebagai kabupaten dengan garis pantai yang panjang dan keragaman ekosistem pesisir yang tinggi, SBT memiliki potensi strategis untuk mendorong peningkatan nilai IBEI melalui implementasi tiga pilar utama ekonomi biru:

- **Pilar Ekonomi:** Peningkatan kontribusi sektor perikanan tangkap dan budidaya terhadap PDRB daerah, dengan pengembangan usaha perikanan rakyat yang efisien, produktif, dan berbasis keberlanjutan.
- **Pilar Lingkungan:** Penguatan tata kelola wilayah pesisir dan laut, melalui penerapan prinsip konservasi, pengawasan terhadap praktik penangkapan berlebih (overfishing), serta perlindungan kawasan ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun.
- **Pilar Sosial:** Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan kewirausahaan kelautan, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan akses terhadap teknologi tepat guna, serta integrasi nelayan kecil ke dalam rantai pasok formal dan berorientasi pasar.

Potensi sektor perikanan di Kabupaten SBT, baik tangkap maupun budidaya, menjadi peluang konkret dalam mewujudkan ekonomi biru daerah. Langkah-langkah strategis seperti penguatan kelembagaan nelayan, pembangunan infrastruktur penunjang—seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Unit Pengolahan Ikan (UPI)—serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor, akan menjadi katalis dalam menjadikan perikanan sebagai pilar utama perekonomian lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang integratif, berbasis potensi lokal, dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi biru, Kabupaten Seram Bagian Timur dapat diarahkan menjadi simpul penting dalam pengembangan ekonomi kelautan Maluku sekaligus berkontribusi terhadap keberlanjutan sumber daya laut nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Pada tahun 2023, kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer Provinsi Maluku tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni hanya sebesar 0,17%. Kondisi ini turut mencerminkan tantangan struktural yang juga dirasakan di wilayah seperti Kabupaten Seram Bagian Timur, yang menghadapi keterbatasan dalam aspek infrastruktur, investasi, dan akses energi.

a. Daerah-Daerah yang belum Berlistrik

Sampai saat ini, masih banyak daerah-daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur yang belum berlistrik. Daerah-daerah yang belum berlistrik tersebut terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah daerah yang belum berlistrik namun bisa dijangkau jaringan PLN. Sedangkan kategori yang kedua adalah daerah-daerah yang belum berlistrik dan diprediksi 5–10 tahun yang akan datang sulit dijangkau jaringan PLN. Kategori yang kedua ini rata-rata adalah merupakan daerah pulau kecil berpenghuni.

**Tabel 2.17 Data Daerah-Daerah Yang Belum Berlistrik
Di Kabupaten Seram Bagian Timur**

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	KETERANGAN
1	Kilmury	Undur	Undur	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
			Wolok	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
		Taa	Taa	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
		Kumelang	Kumelang	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
		Afang Defol	Afang Defol	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
		Afang Kota	Afang Kota	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
			Liku Ratu	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
		Nekan	Nekan	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
		Kilmury	Walang Tengah	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
			Dawang	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
		Selor	Selor	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
		Mising	Mising	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
2	Werinama	Tum	Tum	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
		Gusalaut	Gusalaut	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
		Tobo	Tobo	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
		Osong	Osong	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
3	Tutuk Tolu	Bati Kilwou	Bati Kilwou	dapat dialiri jaringan PLN namun masih terkendala akses jalan
4	Teluk Waru	Namalena	Namalena	sulit dijangkau aliran listrik PLN karena merupakan daerah pulau kecil
		Namandan	Namandan	sulit dijangkau aliran listrik PLN karena merupakan daerah pulau kecil
5	Seram Timur	Kiltai	Kidan	sulit dijangkau aliran listrik PLN karena merupakan daerah pulau kecil
			Kirai	sulit dijangkau aliran listrik PLN karena merupakan daerah pulau kecil
6	Pulau Gorom	Kataloka	Garogos	sulit dijangkau aliran listrik PLN karena merupakan daerah pulau kecil

Sumber: Dinas Nakestrans

b. Potensi Energi Baru Terbarukan

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki banyak potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat dimaksimalkan pengelolaannya untuk kebutuhan energi dalam daerah maupun untuk mendukung peningkatan ketahanan energi nasional. Berikut adalah data potensi energi baru terbarukan di Kabupaten Seram Bagian Timur baik yang sudah dilakukan survey potensi maupun yang baru terindikasi.

**Tabel 2.18 Potensi Energi Baru Terbarukan
Di Kabupaten Seram Bagian Timur**

No	Jenis Energi	Lokasi	Cadangan/Potensi	Keterangan
1	Panas Bumi/Geothermal	Sungai Nif, Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru	Belum Diketahui	Belum Dilakukan Survey
2	Air	Sungai Masiwang, Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu	13,4 MW	Sudah Dilakukan Survey Potensi Tahun 2012
3	Air	Sungai Bobot, Desa Werinama, Kecamatan Werinama	10-30 MW	Sudah Dilakukan Survey Potensi Tahun 2012
4	Air	Sungai Yoti, Desa Werinama, Kecamatan Werinama	31 KW	Sudah Dilakukan Survey Potensi Tahun 2012
5	Arus Laut	Desa Geser, Kecamatan Seram Timur	Belum Diketahui	Belum Dilakukan Survey
6	Air Terjun	Desa Gusalaut, Kecamatan Werinama	Belum Diketahui	Belum Dilakukan Survey
7	Arus Laut	Desa Geser, Kecamatan Seram Timur	Belum Diketahui	Belum Dilakukan Survey

Sumber: Dinas Nakestrans

c. Lokasi Pengembangan Energi Terbarukan (PLTS of Grid)

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Nakestrans merencanakan pengembangan PLTS off-grid pada beberapa desa terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik. Di Kecamatan Teluk Waru, instalasi akan dilakukan di Desa Namalena yang melayani 50 rumah serta Desa Namandan untuk 75 rumah. Pada Kecamatan Seram Timur, PLTS direncanakan bagi 45 rumah di Dusun Kidan, Desa Kiltai (Pulau Kidan), dan 24 rumah di Desa Kiltai (Pulau Kirai). Sementara itu, di Kecamatan Pulau Gorom, pembangunan PLTS akan melayani 78 rumah di Dusun Garogos, Desa Kataloka. Setiap lokasi telah memiliki titik koordinat yang menunjukkan kesiapan wilayah untuk pengembangan fasilitas energi terbarukan.

**Tabel 2.19 Lokasi Pengembangan Energi Terbarukan (PLTS of Grid)
Kabupaten Seram Bagian Timur**

NO	KECAMATAN	DESA/LOKASI PEMASANGAN	JUMLAH RUMAH	TITIK KOORDINAT
1	Teluk Waru	Desa Namalena (Pulau Parang)	50	3° 17' 59,55" S 130° 46' 35,98" E
		Desa Namandan (Pulau Parang)	75	3° 19' 13,01" S 130° 48' 06,72" E
2	Seram Timur	Dusun Kidan, Desa Kiltai (Pulau Kidan)	45	3° 54' 40,80" S 131° 02' 53,66" E
		Desa Kiltai (Pulau Kirai)	24	3° 53' 58,10" S 130° 59' 34,41" E
3	Pulau Gorom	Dusun Garogos, Desa Kataloka (Pulau Garogos)	78	3° 55' 11,30" S 131° 10' 13,23" E

Sumber: Dinas Nakestrans

Kabupaten Seram Bagian Timur menyimpan potensi besar dalam pengembangan EBT, khususnya Energi laut, mengingat posisinya yang strategis di wilayah timur Indonesia, yang berpotensi mendukung pemanfaatan arus laut dan gelombang sebagai sumber energi bersih. Selain itu Energi surya, dengan seiring tingginya intensitas penyinaran matahari sepanjang tahun, sangat ideal untuk

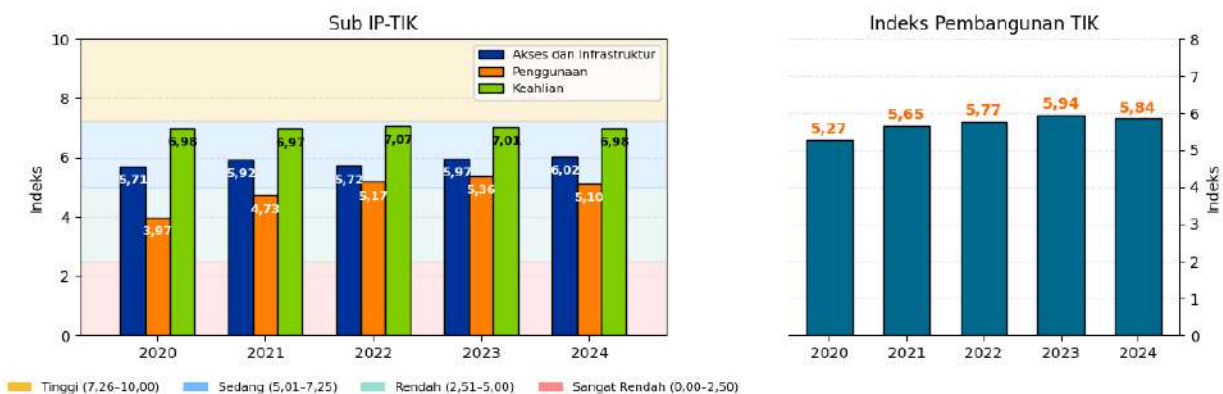
pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama untuk melistriki desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik utama.

Dengan perencanaan yang tepat dan intervensi kebijakan yang terfokus, Kabupaten Seram Bagian Timur dapat diarahkan menjadi salah satu wilayah prioritas dalam transformasi menuju energi bersih dan berkelanjutan di Maluku. Hal ini akan berkontribusi pada penguatan ketahanan energi daerah, pengurangan emisi, dan percepatan pencapaian target pembangunan rendah karbon secara nasional.

IV. Transformasi Digital

a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan instrumen pengukuran yang mencerminkan tingkat kemajuan suatu wilayah dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini mengakomodasi dimensi infrastruktur digital, kualitas layanan internet, tingkat literasi digital masyarakat, serta integrasi TIK dalam sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Peningkatan nilai indeks ini menjadi indikator kunci atas transformasi digital yang inklusif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan global berbasis teknologi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.51. Indeks Pembangunan TIK Provinsi Maluku Tahun 2020-2024

IP-TIK Provinsi Maluku dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, namun pada tahun 2024 IP-TIK mengalami penurunan. Kenaikan IP-TIK dari 4,77 (2019) menjadi 5,94 (2023) mencerminkan peningkatan ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, dan kapasitas pengguna. Pada level sub-indeks, peningkatan Akses dan Infrastruktur dari 5,25 ke 5,97 menandakan semakin membaiknya konektivitas digital, sementara lonjakan pada komponen Penggunaan dari 3,23 ke 5,36 mencerminkan adopsi TIK yang lebih luas di masyarakat.

Penurunan IP-TIK tahun 2024 menunjukkan bahwa belum konsisten pembangunan TIK di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sub Indeks Penggunaan TIK dan Keahlian TIK perlu penguatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur. Tren ini menjadi dasar strategis untuk mendorong transformasi digital yang merata hingga ke wilayah kepulauan dan perdesaan melalui peningkatan literasi digital,

infrastruktur penunjang, serta kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan TIK secara berkelanjutan.

V. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Dalam perspektif makroekonomi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator utama yang mencerminkan akumulasi aset tetap produktif dalam suatu perekonomian. PMTB merepresentasikan investasi riil dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pengadaan mesin dan peralatan, serta konstruksi bangunan yang secara langsung meningkatkan kapasitas produksi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat capaian PMTB menggambarkan sejauh mana suatu entitas ekonomi mampu mengkonversi sumber daya menjadi modal fisik yang strategis, sekaligus mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi. Analisis terhadap tren PMTB, baik secara agregat maupun sektoral, memberikan landasan penting untuk menilai dinamika investasi, arah ekspansi sektor produktif, serta efektivitas instrumen fiskal dan moneter dalam mendorong pembentukan modal dan peningkatan produktivitas nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

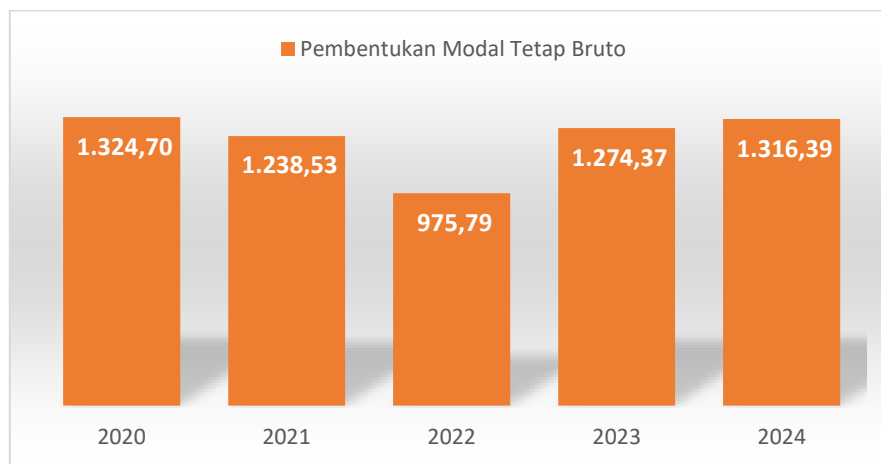
Gambar 2.52. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Selama periode 2020 hingga 2024, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, mencerminkan peningkatan akumulasi aset tetap produktif di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, PMTB tercatat sebesar 1.140,32 miliar rupiah, kemudian mengalami kenaikan pertumbuhan pada tahun 2021, dengan nilai PMTB mencapai 1.195,55 miliar rupiah, dan terus meningkat signifikan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 1.318,17 miliar rupiah.

Konsistensi pertumbuhan PMTB ini mengindikasikan adanya investasi yang berkelanjutan dalam bentuk modal fisik, seperti infrastruktur, peralatan, dan bangunan, yang menjadi fondasi utama bagi peningkatan kapasitas produksi daerah. Tren ini sekaligus merefleksikan optimisme pelaku ekonomi terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang di Kabupaten SBT, serta efektivitas kebijakan pembangunan dalam mendorong ekspansi sektor-sektor produktif.

2. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam perspektif makroekonomi, ekspor barang dan jasa merupakan komponen krusial dalam neraca pembayaran yang mencerminkan kemampuan suatu entitas ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan menembus pasar global. Kinerja ekspor tidak hanya mencerminkan daya saing produk dan jasa domestik di tingkat internasional, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor-sektor pendukung. Oleh karena itu, analisis yang komprehensif terhadap struktur, volume, dan dinamika ekspor—baik secara agregat maupun berdasarkan komoditas unggulan dan negara tujuan—menjadi landasan penting dalam memahami posisi suatu wilayah dalam rantai nilai global. Selain itu, analisis ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap efektivitas kebijakan perdagangan, industrialisasi, dan strategi diversifikasi ekspor dalam memperkuat ketahanan dan kinerja ekonomi jangka panjang.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.53. Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Selama periode 2020–2024, kinerja Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan tren defisit yang persisten, dengan fluktuasi nominal yang mencerminkan dinamika tekanan eksternal terhadap neraca perdagangan daerah. Pada tahun 2020, defisit mencapai titik tertinggi sebesar Rp1.324,70 miliar, menandakan dominasi impor atas ekspor yang signifikan. Meskipun terjadi perbaikan relatif pada tahun-tahun berikutnya—terutama pada 2022 yang mencatat defisit terendah sebesar Rp975,79 miliar—kondisi ini kembali memburuk pada 2023 dan 2024, masing-masing mencatat defisit sebesar Rp1.274,37 miliar dan Rp1.316,39 miliar.

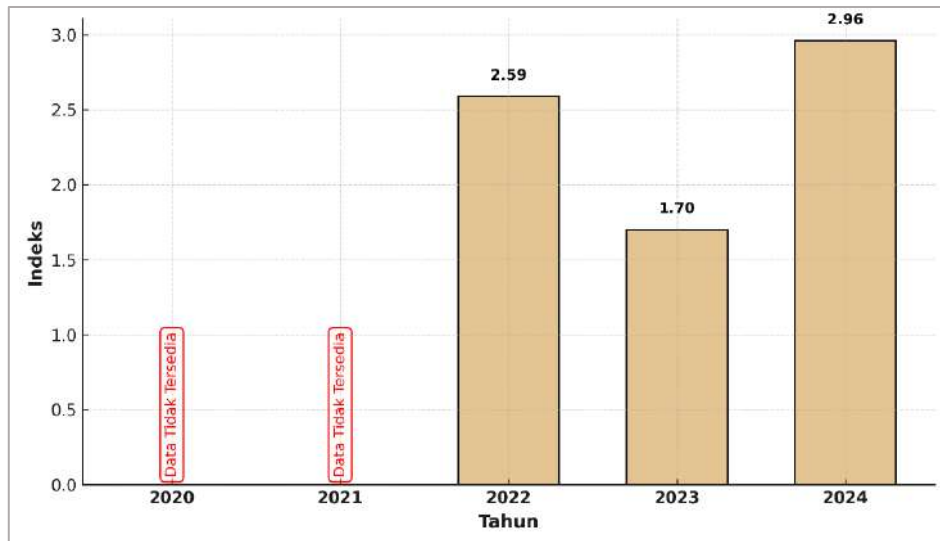
Kinerja ekspor yang belum optimal ini mencerminkan terbatasnya kapasitas produksi dan rendahnya daya saing komoditas lokal di pasar domestik dan global. Ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar wilayah mencerminkan tantangan struktural dalam basis produksi daerah, termasuk kurangnya industrialisasi dan inefisiensi sistem logistik. Oleh karena itu, upaya strategis yang terintegrasi diperlukan, mencakup penguatan sektor produktif lokal, hilirisasi komoditas unggulan, diversifikasi pasar ekspor, serta peningkatan infrastruktur penunjang perdagangan, guna menurunkan defisit dan memperkuat posisi

perdagangan daerah secara berkelanjutan.

VI. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Sebagai salah satu pilar utama dalam kerangka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Indeks Infrastruktur—atau Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur—merupakan metrik evaluatif yang mengukur kualitas, aksesibilitas, dan efektivitas penyediaan infrastruktur dasar di suatu wilayah. Indeks ini merefleksikan kemampuan daerah dalam menyediakan fondasi fisik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, mencakup sektor-sektor strategis seperti transportasi, energi, telekomunikasi, serta utilitas publik. Secara empiris, capaian indeks infrastruktur memberikan insight penting mengenai kontribusi infrastruktur terhadap produktivitas sektor riil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya tarik investasi. Di sisi lain, analisis terhadap indeks ini juga berperan dalam mengidentifikasi kesenjangan layanan dan menetapkan area prioritas bagi intervensi kebijakan pembangunan, guna memperkuat konektivitas dan meningkatkan daya saing regional secara berkelanjutan.



Sumber: BRIN, 2025

Gambar 2.54. Pilar Infrastruktur IDSD Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

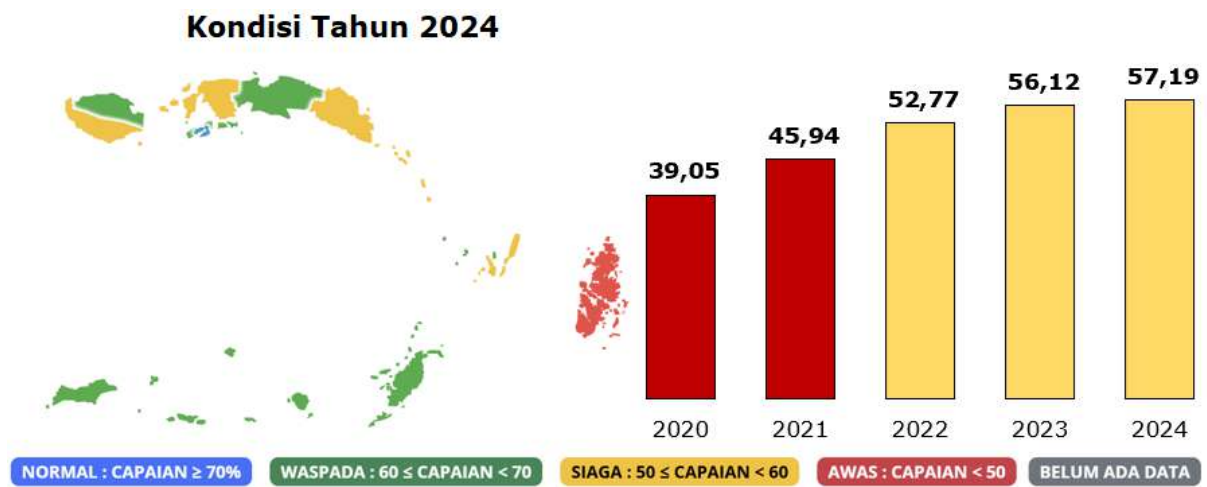
Berdasarkan Gambar 2.54, Pilar Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, indeks tercatat sebesar 2,59, sebelum mengalami penurunan tajam menjadi 1,70 pada tahun 2023, yang mengindikasikan kemunduran dalam kualitas, aksesibilitas, maupun efektivitas layanan infrastruktur dasar. Namun, pada tahun 2024 terjadi pemulihan signifikan, dengan nilai indeks melonjak menjadi 2,96—merupakan capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Dinamika ini mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam penyediaan layanan infrastruktur, baik dari sisi kebijakan, pengelolaan sumber daya, maupun implementasi proyek strategis daerah. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 menandakan adanya intervensi atau investasi infrastruktur yang berhasil meningkatkan persepsi dan kinerja layanan publik. Oleh karena itu, tren ini perlu direspons dengan upaya konsolidasi dan penguatan kelembagaan, guna menjaga

keberlanjutan perbaikan dan memastikan infrastruktur tetap menjadi pendorong utama daya saing regional.

2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Akses terhadap hunian layak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, persentase rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak mencerminkan sejauh mana masyarakat menikmati kondisi tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Data ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan perumahan yang berkelanjutan, serta dalam mengidentifikasi kebutuhan intervensi untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap tempat tinggal yang layak dan manusiawi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Susenas, (2025)

Gambar 2.55. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Berdasarkan data tahun 2020-2024, persentase rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak di Kabupaten Seram Bagian Timur meningkat signifikan, dari 39,05% menjadi 57,19%. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, termasuk dari sisi struktur bangunan, sanitasi, dan akses air bersih.

Meskipun tren ini positif, capaian tersebut masih berada di bawah target nasional, sehingga memerlukan penguatan kebijakan sektoral di bidang perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, diperlukan optimalisasi pendataan, terutama pada wilayah yang belum tercakup, guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih terarah dan berbasis bukti.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat intervensi program rumah layak huni berbasis kebutuhan lokal.
2. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman.
3. Mendorong insentif dan subsidi perumahan bagi kelompok rentan.
4. Menyempurnakan sistem data dan pemetaan kebutuhan hunian.

Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan hak dasar atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Tabel 2.20 Data Perumahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH EKSISTING (UNIT)	RLH (UNIT)	RTLH (UNIT)	BACKLOG
1	Kecamatan Pulau Gorom	6.214	4.927	4.776	151	1.287
2	Kecamatan Pulau Panjang	749	618	540	78	131
3	Kecamatan Seram Timur	3.23	2.485	2.37	115	745
4	Kecamatan Siritaun Wida Timur	2.014	1.508	1.401	107	506
5	Kecamatan Kian Darat	1.737	1.16	1.055	105	577
6	Kecamatan Tutuk Tolu	1.991	1.555	1.469	86	436
7	Kecamatan Bula	7.799	6.037	5.904	133	1.762
8	Kecamatan Bula Barat	2.672	2.296	1.992	304	376
9	Kecamatan Kilmuri	1.883	1.489	1.34	149	394
10	Kecamatan Werinama	1.818	1.403	1.237	166	415
11	Kecamatan Siwalalat	1.951	1.63	1.46	170	321
12	Kecamatan Kesu Watubela	2.68	2.204	1.977	227	476
13	Kecamatan Gorom Timur	2.723	1.912	1.74	172	811
14	Kecamatan Teor	914	676	599	77	238
15	Kecamatan Teluk Waru	1.513	1.201	1.071	130	312
16	Ukar Sengan	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah		39.888	31.101	28.931	2.17	8.787

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Kab SBT Tahun 2024

Berdasarkan tabel Data Perumahan Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat bahwa kondisi perumahan di Kabupaten Seram Bagian Timur masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Jumlah rumah tangga tercatat sebanyak 39.888 KK, sementara jumlah rumah eksisting hanya 31.101 unit. Dari rumah eksisting tersebut, rumah layak huni (RLH) berjumlah 28.931 unit, sedangkan rumah tidak layak huni (RTLH) masih ada 2.170 unit.

Kondisi backlog atau kekurangan rumah mencapai 8.787 unit, yang menunjukkan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah layak. Kecamatan dengan backlog tertinggi adalah Kecamatan Bula dengan 1.762 unit, disusul Kecamatan Pulau Gorom (1.287 unit) dan Kecamatan Seram Timur (745 unit). Sementara backlog terendah terdapat di Kecamatan Teor (238 unit) dan Kecamatan Teluk Waru (312 unit).

Secara umum, meskipun sebagian besar rumah di Kabupaten Seram Bagian Timur tergolong layak huni, namun masih terdapat ribuan rumah yang perlu ditingkatkan kualitasnya maupun tambahan unit baru untuk mengatasi backlog. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

3. Persentase Desa Mandiri

Dalam konteks pembangunan perdesaan, persentase desa mandiri yang diukur melalui Indeks Desa (ID) menjadi indikator strategis untuk mengevaluasi tingkat kemandirian dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa. ID merupakan indeks komposit yang mencakup tiga dimensi utama—ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi—yang secara holistik merefleksikan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya, meningkatkan kualitas layanan dasar, serta mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal.

Peningkatan proporsi desa mandiri mencerminkan keberhasilan implementasi program pembangunan desa, khususnya dalam membangun kapasitas internal yang

memungkinkan desa bergerak menuju otonomi fungsional, tanpa ketergantungan penuh pada intervensi eksternal. Indikator ini juga berperan sebagai tolok ukur efektivitas kebijakan desentralisasi, terutama dalam konteks pemanfaatan dana desa untuk membangun masyarakat yang berdaya, inklusif, dan resilien terhadap berbagai tantangan pembangunan.



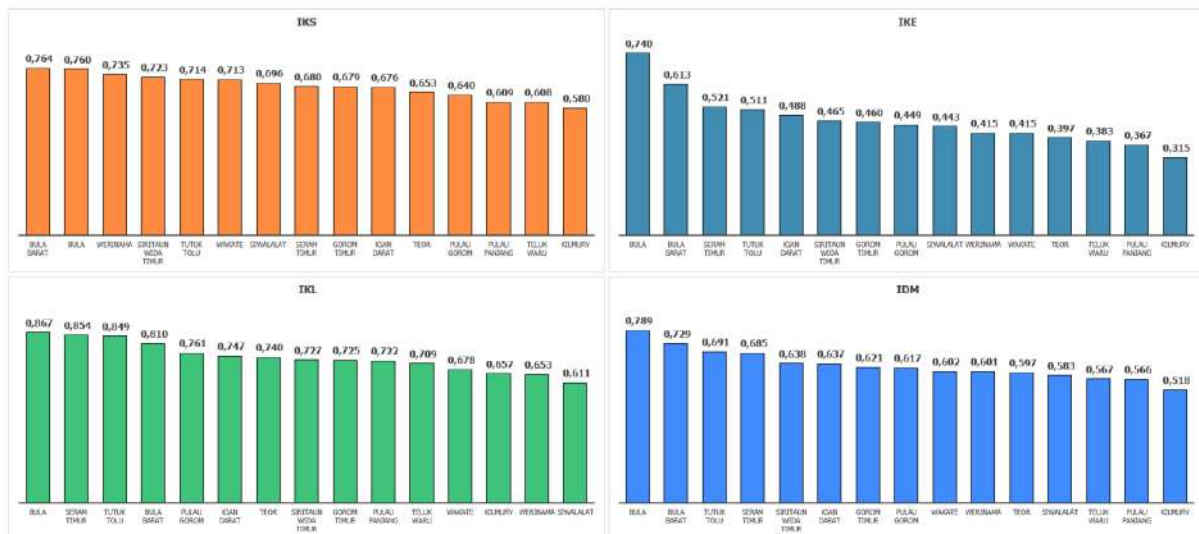
Sumber: KemenDesa PDTT, (Data diolah, 2025)

Gambar 2.56. Capaian Indeks Desa Kabupaten Seram Bagian Timur, 2022-2024

Berdasarkan Gambar 2., capaian Indeks Desa (ID) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan tren positif dalam peningkatan kemandirian desa selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, komposisi Desa Mandiri adalah 2,02% (4 Desa dari 198 Desa) meningkat menjadi 3,03% (6 Desa) sejak 2021 hingga 2024. Dalam 5 tahun terakhir terjadi pengurangan proporsi Desa berstatus Sangat Tertinggal dan Tertinggal. Sementara itu, Desa berstatus Berkembang dan Maju mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, Indeks Desa menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Seram Bagian Timur masih dalam kategori Tertinggal, sejak tahun

2021 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan pada kategori Berkembang. Dimensi yang menjadi tantang terbesar dalam pengembangan Indeks Desa adalah Ketahanan Ekonomi (IKL) yang masih dalam kategori Sangat Tertinggal. Dimensi yang menjadi penopang utama adalah Ketahanan Lingkungan yang berada pada kategori Maju dalam 4 tahun terakhir.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kemajuan bertahap dalam pembangunan perdesaan, khususnya dalam mengurangi ketertinggalan dan mendorong desa ke arah berkembang dan maju. Peningkatan skor pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan menunjukkan bahwa intervensi pembangunan desa yang dilakukan telah memberi dampak terhadap peningkatan kapasitas lokal dan kemandirian desa.



Sumber: KemenDesa PDTT, (Data diolah, 2025)

Gambar 2.57. Capaian IDM di setiap Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024

Gambar 2.57 menyajikan distribusi capaian Indeks Desa (ID) beserta komponen penyusunnya—Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)—pada level kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024. Data ini menunjukkan adanya variasi signifikan dalam kapasitas pembangunan desa antar wilayah.

Pada dimensi sosial, Kecamatan Bula Barat mencatat IKS tertinggi sebesar 0,764, diikuti oleh Bula (0,760) dan Werinama (0,735). Sebaliknya, Kecamatan Kilmury menunjukkan IKS terendah, yaitu 0,580, menandakan lemahnya aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan modal sosial komunitas.

Di sektor ekonomi, Kecamatan Bula kembali mencatat skor tertinggi dengan IKE sebesar 0,740, menunjukkan kapasitas ekonomi lokal yang relatif kuat, termasuk akses terhadap pasar, produktivitas, dan aktivitas kewirausahaan. Sementara itu, Kecamatan Kilmury berada di posisi paling rendah (0,315), mencerminkan keterbatasan signifikan dalam ketahanan ekonomi lokal.

Untuk dimensi lingkungan, skor tertinggi tercatat di Kecamatan Bula Barat (0,867), diikuti oleh Seram Timur (0,854) dan Bula (0,849), yang mengindikasikan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya alam, sanitasi, dan mitigasi risiko lingkungan. IKL terendah tercatat di Werinama (0,611), mengisyaratkan tantangan

keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan setempat.

Secara agregat, capaian ID tertinggi diperoleh Kecamatan Bula (0,729), Bula Barat (0,691), dan Tutuk Tolu (0,685), menunjukkan kemajuan relatif dalam kemandirian desa. Sementara itu, Kecamatan Kilmury kembali menempati posisi terendah dengan ID sebesar 0,518, yang mencerminkan konsistensi rendahnya capaian pada semua dimensi ketahanan.

Temuan ini menunjukkan adanya disparitas spasial dalam pencapaian ID di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang merefleksikan perbedaan kapasitas kelembagaan, akses infrastruktur, dan basis ekonomi antar kecamatan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa ke depan perlu lebih kontekstual, dengan pendekatan berbasis wilayah (*place-based policy*), guna memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan dalam mendorong kemandirian desa secara merata.

4. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indikator komprehensif yang mengukur sejauh mana pembangunan ekonomi suatu daerah mampu menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menyeluruh. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, IPEI mencerminkan kinerja daerah dalam memastikan akses yang merata terhadap peluang ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Capaian indeks ini menjadi landasan penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi lokal, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta pemerataan infrastruktur ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan dan peningkatan IPEI perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Bappenas RI (2025)

Gambar 2.58. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten SBT, 2020-2024

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2020–2023 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, namun dengan kecenderungan tren yang mengarah positif. Pada tahun 2020, nilai IPEI berada pada level 4,12. Nilai ini secara umum dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi, memperdalam ketimpangan, serta mengganggu akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar. Namun demikian, pemulihan mulai terlihat sejak tahun 2021 dengan peningkatan

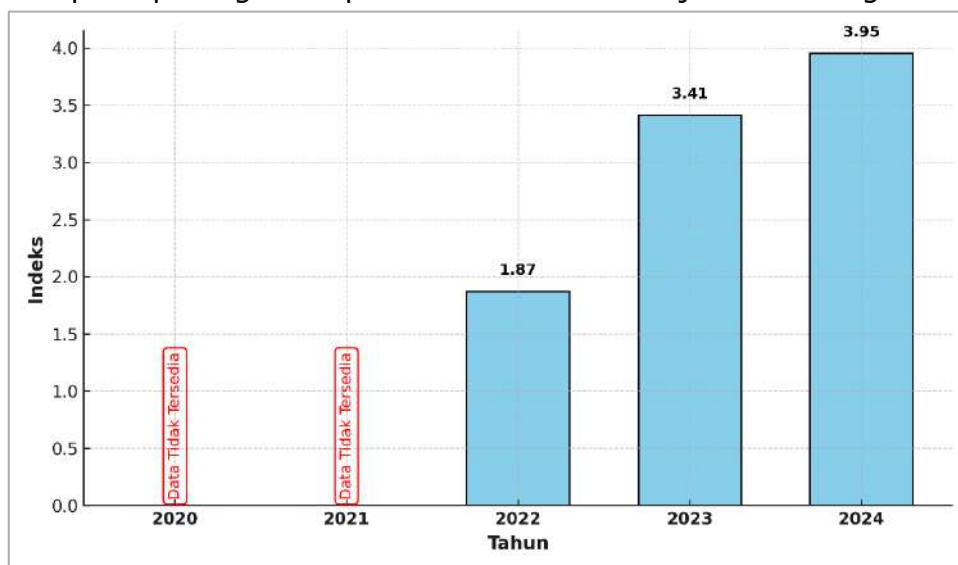
nilai IPEI menjadi 4,53, dan berlanjut mencapai 4,76 pada tahun 2023, yang merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan.

Peningkatan IPEI pasca-pandemi merefleksikan arah kebijakan yang semakin selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang inklusif, seperti pemberdayaan UMKM, penguatan jaring pengaman sosial, serta peningkatan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi dasar. Kinerja ini juga mengindikasikan mulai tumbuhnya kesadaran institusional terhadap pentingnya pertumbuhan yang berkualitas—tidak hanya ekspansif secara agregat, tetapi juga merata secara spasial dan sosial.

VII. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Stabilitas Ekonomi Makro

Dalam kerangka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Stabilitas Ekonomi Makro memegang peranan fundamental sebagai pilar yang merefleksikan kapabilitas suatu daerah dalam menjaga keseimbangan dan prediktabilitas kondisi ekonomi, esensial bagi penciptaan lingkungan investasi yang kondusif dan pertumbuhan berkelanjutan. Pilar ini secara komprehensif mengukur kinerja ekonomi makro daerah, meliputi indikator-indikator krusial seperti tingkat inflasi, pertumbuhan PDRB, akumulasi kapital, kinerja sektor-sektor kunci, serta tingkat biaya hidup. Capaian stabilitas ekonomi makro mengindikasikan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter di tingkat lokal maupun nasional dalam mitigasi gejolak ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kesinambungan aktivitas bisnis, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan regional.



Sumber: BRIN, 2025

Gambar 2.59. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro IDSD Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

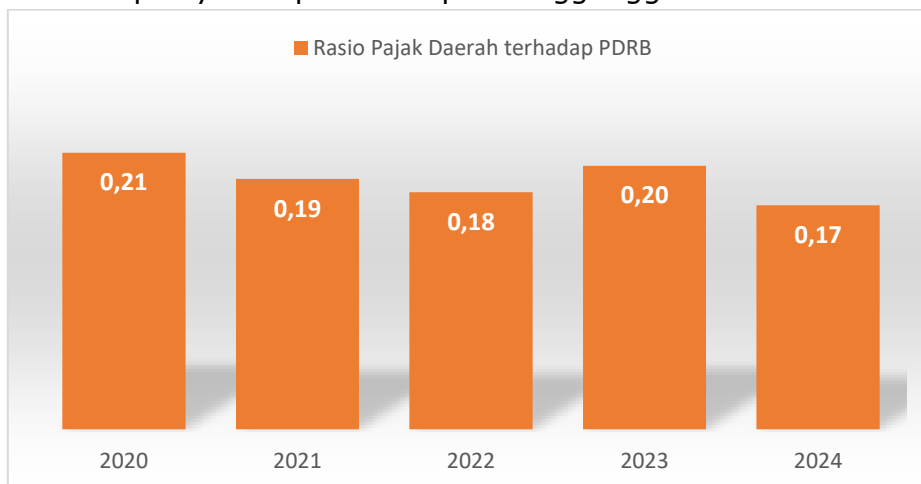
Berdasarkan Gambar 2.59, Pilar Stabilitas Ekonomi Makro dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, nilai pilar ini tercatat sebesar 1,87, kemudian mengalami lonjakan tajam menjadi 3,41 pada tahun 2023, dan kembali meningkat secara substansial menjadi 3,95 pada tahun 2024.

Kenaikan progresif ini merefleksikan adanya perbaikan struktural dan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif, yang memperkuat kapasitas daerah dalam menjaga keseimbangan makroekonomi. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek krusial seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penguatan investasi daerah (PMTB), dan pengelolaan sektor-sektor strategis semakin menunjukkan kinerja positif.

Lebih jauh, peningkatan nilai pilar ini mempertegas bahwa pengelolaan fiskal dan koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat lokal telah mampu menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan prediktabel, sehingga mendukung iklim usaha yang kondusif, memperkuat daya beli masyarakat, serta menarik arus investasi baru. Dengan demikian, penguatan Pilar Stabilitas Ekonomi Makro tidak hanya berdampak langsung terhadap daya saing daerah, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Dalam kajian fiskal daerah, Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makroekonomi esensial yang merefleksikan kapasitas dan kemandirian finansial suatu daerah dalam memobilisasi sumber daya domestik melalui instrumen perpajakan. Capaian rasio ini tidak hanya mengukur efektivitas administrasi pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memberikan gambaran mengenai potensi ekonomi daerah yang telah termonetisasi dan direfleksikan dalam penerimaan pajak. Analisis tren rasio ini memberikan wawasan mendalam terhadap keberlanjutan fiskal daerah, ketergantungan pada transfer pusat, serta ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik tanpa mengganggu iklim investasi lokal.



Sumber: BPS dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, (Data diolah, 2025)

Gambar 2.60. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten SBT, 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2., Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2020 hingga 2024, mencerminkan tantangan dalam optimalisasi potensi pendapatan asli daerah berbasis pajak. Pada tahun 2020, rasio ini berada pada level tertinggi sebesar 0,21 persen. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2022 terjadi penurunan berturut-turut menjadi 0,19 persen, dan mencapai titik terendah 0,18 persen pada tahun 2022.

Meskipun terdapat sedikit rebound pada tahun 2023 dengan rasio meningkat menjadi 0,20 persen, tren tersebut tidak berlanjut pada tahun 2024, di mana rasio kembali menurun menjadi 0,17 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak daerah tidak sejalan dengan pertumbuhan PDRB, sehingga kontribusi pajak daerah terhadap total output ekonomi semakin mengecil.

Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya stagnasi atau bahkan kontraksi pada basis pajak daerah, lemahnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, atau tingginya dominasi sektor-sektor non-pajak seperti pertanian subsisten atau aktivitas informal dalam struktur PDRB. Selain itu, hal ini juga dapat mengindikasikan kurang optimalnya strategi pemungutan pajak dan lemahnya kepatuhan fiskal wajib pajak.

Secara makro-fiskal, tren penurunan rasio ini berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang fiskal daerah untuk membiayai program pembangunan secara mandiri, dan memperkuat ketergantungan terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik untuk memperkuat kapasitas kelembagaan perpajakan, memperluas basis pajak, serta mendorong formalitas ekonomi sebagai bagian dari strategi peningkatan kemandirian fiskal jangka panjang.

3. Indeks Akses Keuangan Daerah

Data inklusi keuangan saat ini hanya tersedia pada tingkat provinsi melalui Sistem Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), sehingga menyulitkan pemantauan kinerja secara detail di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, dikembangkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) sebagai indikator komposit yang mengukur dimensi akses, penggunaan, dan kedalaman layanan keuangan dengan memanfaatkan data sisi suplai maupun permintaan.

IAKD berfungsi sebagai instrumen pemantauan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), analisis ketimpangan antarwilayah, serta dasar perumusan kebijakan inklusi keuangan berbasis bukti. Pada tahun 2024, IAKD Kabupaten Seram Bagian Timur tercatat 2,347, menempatkan daerah ini pada peringkat ke-427 dari 461 kabupaten/kota nasional dan peringkat ke-9 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Capaian ini menggambarkan keterbatasan akses dan pemanfaatan layanan keuangan, sekaligus menunjukkan ruang perbaikan yang masih luas.

Ke depan, arah kebijakan penguatan inklusi keuangan perlu difokuskan pada peningkatan indikator IAKD yang masih berada dalam kategori sedang, melalui penguatan peran TPAKD, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Upaya ini menjadi kunci untuk mendorong Kabupaten Seram Bagian Timur menuju kategori "Unggul" dalam pemeringkatan IAKD nasional.

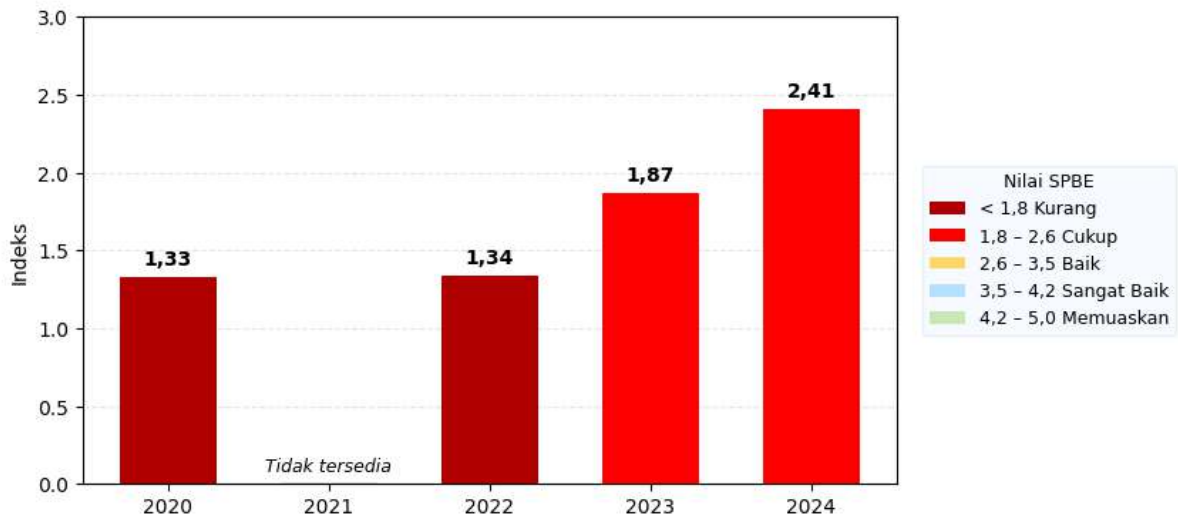
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

I. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan arah positif dalam transformasi digital pemerintahan. Peningkatan nilai indeks SPBE selama beberapa tahun terakhir mencerminkan penguatan tata kelola TIK, penyederhanaan layanan berbasis digital, dan integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan

kebijakan reformasi birokrasi nasional dan menjadi landasan penting dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang responsif, terbuka, dan terukur. Melalui penguatan SPBE, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data, memperluas akses layanan masyarakat secara daring, serta mendorong efisiensi penggunaan sumber daya publik secara optimal.



Sumber: KemenPANRB, 2025

Gambar 2.61. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten SBT, 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2., capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020–2024, meskipun belum mencapai level optimal. Nilai Indeks SPBE meningkat menjadi 1,87 pada tahun 2023, yang mengangkatnya ke kategori “Cukup”, dan kembali naik menjadi 2,41 pada tahun 2024. Meskipun masih berada dalam kategori “Cukup” dan belum menyentuh ambang batas “Baik”, tren ini mengindikasikan adanya komitmen dan kemajuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mengembangkan sistem pemerintahan digital. Namun demikian, upaya peningkatan integrasi sistem, interoperabilitas data, serta kapasitas SDM dan infrastruktur digital masih diperlukan agar transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan dapat tercapai secara menyeluruh.

2. Indeks Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) merupakan instrumen evaluasi krusial untuk mengukur kualitas dan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah. IPP merefleksikan sejauh mana unit-unit pelayanan telah memenuhi standar kualitas, kemudahan akses, kepastian waktu, kepastian biaya, dan efektivitas penanganan pengaduan.

Capaian IPP Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024 adalah **1,96**,

yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih dalam kategori **cukup** dan memerlukan perbaikan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Nilai ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terdapat upaya peningkatan, berbagai aspek pelayanan—termasuk integrasi sistem, kejelasan prosedur, dan kepuasan pengguna—belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, capaian ini sekaligus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memperkuat kapasitas aparatur, mempercepat transformasi digital layanan, serta meningkatkan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, guna mendorong loncatan kinerja pelayanan ke level yang lebih baik di masa mendatang.

Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif dalam aspek kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagaimana dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini tercermin dari meningkatnya skor kepatuhan layanan publik dari 73,00 poin pada tahun 2023 menjadi 75,88 poin pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten dalam memperbaiki mutu pelayanan melalui pemenuhan aspek-aspek fundamental yang diukur dalam penilaian, yaitu: Dimensi Input (kompetensi pelaksana layanan dan ketersediaan sarana prasarana), Dimensi Proses (pemenuhan standar pelayanan), Dimensi Output (tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan), serta Dimensi Pengaduan (mekanisme dan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat).

Capaian 75,88 poin ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur mulai membangun fondasi sistemik pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif. Namun demikian, untuk dapat mencapai predikat kualitas layanan yang lebih tinggi dalam IPP secara nasional, dibutuhkan penguatan konsistensi implementasi standar pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta digitalisasi proses layanan publik secara lebih terintegrasi dan inklusif. Dengan demikian, peningkatan skor kepatuhan ini diharapkan menjadi batu loncatan menuju tata kelola layanan publik yang lebih profesional, transparan, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berintegritas, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menjadi salah satu instrumen evaluatif strategis yang dikembangkan oleh Kementerian PANRB guna menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat instansi pemerintah. Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024 memperoleh nilai IRB kategori **"CC"**, yang menandakan bahwa implementasi reformasi birokrasi masih berada pada tahap awal dengan sejumlah capaian yang perlu ditingkatkan. Nilai ini mencerminkan progres yang masih terbatas dalam delapan area perubahan utama, yaitu: penataan kelembagaan, penyempurnaan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembinaan mental dan budaya kerja birokrasi.

Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan adanya komitmen awal dalam membangun fondasi birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan responsif. Untuk mempercepat akselerasi reformasi birokrasi ke arah yang lebih substansial, dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan, peningkatan kompetensi aparatur, serta integrasi antara reformasi struktural dan digitalisasi

layanan. Nilai IRB yang masih berada pada level CC dapat dijadikan titik tolak untuk mengidentifikasi area lemah secara lebih tajam dan merancang intervensi kebijakan yang lebih terukur dan berdampak.

4. Indeks SAKIP

Dalam upaya mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas kinerja, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting yang dikembangkan oleh Kementerian PANRB untuk mengevaluasi sejauh mana instansi pemerintah menerapkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis hasil. Pada tahun 2024, Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh nilai SAKIP kategori **"CC"**, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja telah dimulai namun masih berada pada tahap awal penguatan. Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan kinerja belum sepenuhnya selaras dengan penganggaran dan pelaporan, serta masih terdapat ruang perbaikan dalam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai outcome yang diharapkan.

Nilai tersebut juga mengindikasikan bahwa mekanisme evaluasi kinerja belum optimal dalam memberikan umpan balik terhadap pengambilan keputusan, dan pelaporan kinerja masih bersifat administratif, belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata dari pembangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai SAKIP ke jenjang yang lebih tinggi, diperlukan langkah-langkah penguatan pada aspek perencanaan berbasis kinerja, integrasi pengukuran dan evaluasi hasil, serta peningkatan kapasitas SDM dalam menyusun laporan kinerja yang akurat, transparan, dan berdampak. Reformasi dalam tata kelola kinerja ini akan menjadi kunci dalam mendorong efisiensi anggaran dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah.

5. Opini BPK

Dalam ranah akuntabilitas keuangan daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tolok ukur fundamental atas kualitas penyajian informasi finansial dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Opini BPK, yang berkisar dari Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), Tidak Wajar (Adverse), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hingga Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), secara eksplisit merefleksikan tingkat keandalan, relevansi, dan daya saing laporan keuangan entitas daerah. Capaian opini WTP secara konsisten mengindikasikan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola aset, kewajiban, ekuitas, dan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, opini BPK pada LKPD menjadi indikator krusial bagi para pemangku kepentingan dalam menilai integritas dan kinerja fiskal pemerintah daerah.

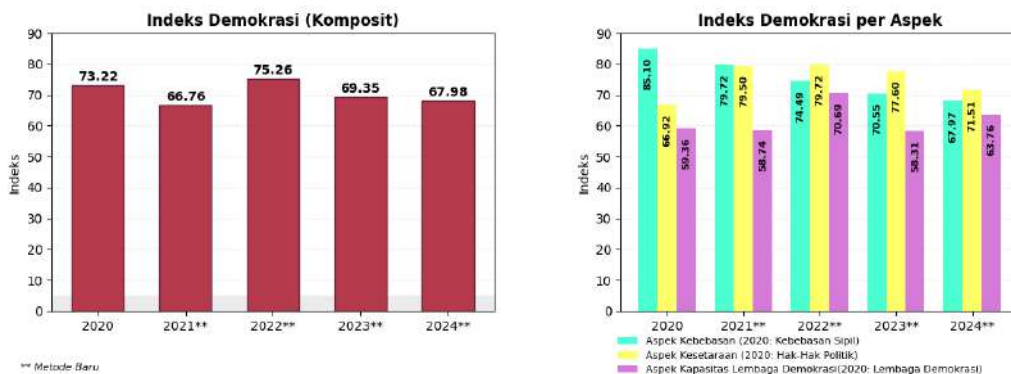
Capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas tata kelola keuangan daerah. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang mencerminkan masih adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Namun, melalui upaya perbaikan sistem pengendalian intern, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas fiskal, opini BPK pada tahun 2024 berhasil meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian WTP ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara andal, bebas dari salah saji material, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sekaligus mencerminkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara substansial.

II. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator strategis yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan tiga dimensi utama: kebebasan sipil, partisipasi politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Dengan rentang nilai 0 hingga 100, indeks ini memberikan gambaran kuantitatif terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi substantif di daerah. IDI berfungsi sebagai alat evaluatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan partisipasi publik dan perlindungan hak-hak sipil secara berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 2.62. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku, 2020-2024

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Maluku selama periode 2020–2024 mencerminkan dinamika yang kompleks dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi di tingkat regional, termasuk di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada tahun 2020, nilai IDI Provinsi Maluku tercatat sebesar 73,22, merupakan hasil perhitungan menggunakan metode lama. Perubahan metodologi pengukuran IDI pada tahun 2021 menyebabkan penurunan nilai menjadi 69,35, yang lebih mencerminkan penyesuaian sistemik daripada kemunduran substansial.

Pada tahun 2022, nilai IDI kembali meningkat signifikan ke angka 75,26, yang mengindikasikan perbaikan dalam tata kelola demokrasi, termasuk peningkatan kualitas pemilihan umum dan penguatan kapasitas lembaga demokrasi lokal. Namun dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan hingga 67,98 pada tahun 2024 menyoroti adanya tantangan struktural dalam menjaga konsistensi kebebasan sipil dan efektivitas lembaga demokrasi, termasuk di kabupaten-kabupaten seperti Seram

Bagian Timur.

Sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Timur turut berkontribusi terhadap capaian IDI provinsi, dengan dinamika lokal yang khas. Tantangan dalam menjaga ruang sipil yang inklusif, menjamin kebebasan berekspresi, serta mendorong partisipasi politik masyarakat secara aktif tetap menjadi isu utama. Fluktuasi IDI selama lima tahun terakhir menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah, transparansi proses politik, serta keberfungsian lembaga demokrasi lokal. Oleh karena itu, IDI dapat menjadi rujukan strategis untuk merancang intervensi kebijakan yang terarah dalam mendorong kualitas demokrasi yang lebih substansial dan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban

Ditengah dinamika global yang semakin kompleks, stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman menjadi prasyarat utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam menekan tingkat kriminalitas, menyelesaikan konflik sosial secara efektif, serta memperkuat kapasitas kelembagaan penegak hukum telah berperan signifikan dalam memitigasi risiko disrupsi sosial-ekonomi. Kondisi ini menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, peningkatan produktivitas sektor riil, dan percepatan program pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, keamanan bukan sekadar tujuan, melainkan katalisator strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang di tingkat daerah.

Tabel 2.21. Indikator Kriminalitas di Kabupaten SBT Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	77	67	110	141	168
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	111	67	150	123	192
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	58	62	61	21	54

Sumber: Kabupaten SBT dalam angka (2025)

Di Kabupaten Seram Bagian Timur, dinamika indikator kriminalitas sepanjang 2020–2024 memperlihatkan perkembangan yang perlu dicermati untuk memastikan lingkungan sosial yang aman dan produktif.

1. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan

Jumlah tindak pidana menunjukkan tren fluktuatif, dari 77 kasus (2020) menurun menjadi 67 kasus (2021), kemudian meningkat tajam menjadi 168 kasus pada 2024. Kenaikan ini dapat diinterpretasikan sebagai peningkatan kriminalitas atau sebagai hasil dari meningkatnya pelaporan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

2. Risiko Tindak Pidana per 100.000 Penduduk

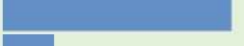
Risiko kriminalitas juga meningkat signifikan, dari 67 kasus (2021) menjadi 192 kasus (2024). Hal ini mengindikasikan bertambahnya kerentanan masyarakat dan mendesak perlunya penguatan strategi pencegahan serta sistem deteksi dini.

3. Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana

Persentase penyelesaian perkara sempat berada pada kisaran 61–62 persen (2021–2022), turun signifikan menjadi 21 persen (2023), dan membaik menjadi 54 persen (2024). Capaian ini masih di bawah standar optimal, menandakan pentingnya peningkatan kapasitas penegakan hukum, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga manajemen perkara.

III. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indikator komprehensif yang digunakan untuk mengukur kapasitas suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya, pembangunan kelembagaan, serta inovasi kebijakan. Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek strategis seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, stabilitas ekonomi, efisiensi pemerintahan, hingga dinamika sosial dan inovasi. Pencapaian IDSD mencerminkan sejauh mana suatu kabupaten atau kota mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, IDSD menjadi instrumen penting dalam menyusun strategi pembangunan yang berbasis daya saing, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan lintas sektor dan dalam memperkuat posisi daerah di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.

		2020	2021	2022	2023	2024	GRAFIK 2024
	Indeks Daya Saing Daerah	-	-	-	-	2.88	
LINGKUNGAN PENDUKUNG	Pilar 1 : Institusi	-	-	-	-	4.11	
	Pilar 2 : Infrastruktur	-	-	2.59	1.70	2.96	
	Pilar 3 : Adopsi TIK	-	-	1.65	2.49	3.08	
	Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro	-	-	1.87	3.41	3.95	
SUMBER DAYA MANUSIA	Pilar 5 : Kesehatan	-	-	3.08	3.07	2.96	
	Pilar 6 : Keterampilan	-	-	2.81	3.05	3.76	
	Pilar 7 : Pasar Produk	-	-	2.45	2.41	2.37	
PASAR	Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja	-	-	2.91	3.33	2.95	
	Pilar 9 : Sistem Keuangan	-	-	1.51	0.29	1.76	
EKOSISTEM INOVASI	Pilar 10 : Ukuran Pasar	-	-	0.13	3.40	3.41	
	Pilar 11 : Dinamisme Bisnis	-	-	5.00	2.66	2.68	
	Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi	-	-	0.77	0.61	0.60	

Sumber: BRIN (2025)

Gambar 2.63. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Seram Bagian Timur, ada beberapa area yang menunjukkan potensi penguatan dan membutuhkan perhatian strategis. Pada tahun 2024, IDSD Kabupaten Seram Bagian Timur mencapai skor 2,88, mencerminkan tren perbaikan daya saing daerah di berbagai aspek.

Pilar-pilar yang mencatat kemajuan signifikan:

- Institusi (4,11) dan Stabilitas Ekonomi Makro (3,95): menunjukkan penguatan kelembagaan dan kondisi ekonomi yang lebih stabil.
- Adopsi TIK (3,08) dan Keterampilan SDM (3,76): mencerminkan peningkatan pemanfaatan teknologi dan kualitas tenaga kerja.
- Ukuran Pasar (3,41): mengalami lonjakan besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Pilar yang perlu perhatian lebih lanjut:

- Dinamisme Bisnis (2,68) dan Kapabilitas Inovasi (0,60): menunjukkan penurunan, menandakan tantangan dalam pengembangan kewirausahaan dan inovasi lokal.
- Pasar Produk (2,37) dan Kesehatan (2,96): cenderung menurun.

Secara umum, capaian IDSD 2024 menggambarkan arah pembangunan yang positif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek inovasi, bisnis, dan optimalisasi sektor pasar daerah.

IV. Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.22. Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
1,01	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-	-0,06	-	1,61	-	4,1	-	3,91	-	2,58
1,02	Laju inflasi (%)	2,7	2,7	3,5	2,2	3,5	4,77	3,5	5,12	-	-
1,03	PDRB per kapita (Rp. 000.000.)	-	21,25	-	22,67	-	25,53	-	24,23	-	24,23
1,04	Indeks Gini	-	0,277	-	0,266	-	0,242	-	0,244	-	0.201
1,05	Rasio Penduduk miskin (%)	-	23,04	-	23,25	-	20,73	-	21,08	-	-
1,06	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	-	68,12	-	69,07	-	65,38	-	56,71	-	61,01
1,07	Tingkat pengangguran terbuka (%)	-	3,61	-	3,88	-	3,38	-	3,31	-	3,24%
1,08	Rasio penduduk yang bekerja (%)	-	96,39	-	96,12	-	96,62	-	96,69	-	-
2	Kesejahteraan Sosial										
2,01	Pendidikan										
2.01.01	Angka melek huruf (%)	-	95,4	-	92,35	-	-	-	7,439	-	-
2.01.02	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	-	12,76	-	12,77	-	12,9	-	12,91	-	-
2.01.03	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	-	8,43	-	8,46	-	8,72	-	8,82	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.01.04	Angka Partisipasi Kasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SD/MI	-	109,64	-	110,33	-	113,13	-	87,30	-	-
	- SLTP/MTs	-	90,91	-	90,01	-	90,01	-	70,70	-	-
	- SMA/SMK/MA	-	87,21	-	87,19	-	91,93	-	103,91	-	-
2.01.05	Angka Partisipasi Murni										
	- SD/MI	-	98,42	-	98,65	-	98,55	-	98,41	-	-
	- SLTP/MTs	-	71,51	-	72,72	-	79,00	-	73,02	-	-
	- SMA/SMK/MA	-	64,50	-	64,41	-	64,87	-	68,01	-	-
2.01.06	Rasio Angka Pendidikan yang ditamatkan :										
2.01.06.01	Tidak Tamat SD	-	-	-	-	-	-	-	22.270	-	-
2.01.06.02	SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	26.690	-	-
2.01.06.03	SMP/MTS	-	-	-	-	-	-	-	17.550	-	-
2.01.06.04	SMA/SMK/MA	-	-	-	-	-	-	-	29.600	-	-
2.01.06.05	D1/D2/D3	-	-	-	-	-	-	-	2.140	-	-
2.01.06.06	D4/S1/S2/S3	-	-	-	-	-	-	-	7.116	-	-
2,03	Kesehatan										
2.03.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup	-	17,50	-	5,75	-	0,55	-	31,91	-	-
2.03.02	Angka Usia Harapan Hidup (Th)	-	67,23	-	67,45	-	67,91	-	68,33	-	-
2.03.03	Persentase Gizi buruk (%)	-	NA	-	5,60	-	0,12	-	0,30	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2,04	Kesempatan Kerja										
2.04.01	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	-	96,39	-	96,12	-	96,62	-	96,69	-	-
2.04.02	Angka Partisipasi Kerja (%)	-	68,12	-	69,07	-	65,38	-	56,71	-	-
2,05	Angka Kriminalitas										
2.05.01	Rasio Kriminalitas (%)	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		
3	Fokus Seni dan Budaya										
3,01	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	-	6	-	6	-	6	-	10	-	-
3,02	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit)	-	18	-	18	-	18	-	20	-	-
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Pelayanan Urusan Wajib										
1	Pendidikan										
1,01	Pendidikan dasar:										
1.01.01	SD/MI										
	a. Angka Partisipasi Sekolah (%)	85	95	90	95	90	96	95	96	-	-
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah	105	113	105	117	110	120	110	121	-	-
	c. Rasio guru/ murid	01:18	1 : 13	01:18	1 : 13	01:18	1 : 12	01:18	1 : 10	-	-
	d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per-1.000)	-	0.07	-	0.07	-	0.08	-	0.10	-	-
1.01.02	SMP/MTs										

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	a. Angka Partisipasi Sekolah (%)	80	95	85	90	90	91	95	92	-	-
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	-	177	-	174	-	198	-	180	-	-
	c. Rasio guru/ murid	-	1 : 9	-	1 : 9	-	1 : 9	-	1 : 8	-	-
	d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per-10.000)	-	0.11	-	0.11	-	0.11	-	0.12	-	-
1,02	Pendidikan Menengah										
	1. Angka Partisipasi Sekolah (%)	23	22	23	21	25	30	25	29	-	-
	2. Rasio ketersediaan sekolah (%)	120	144	-	163	-	113	-	118	-	-
	3. Rasio guru terhadap murid	01:20	1 : 9	01:20	1 : 9	01:20	1 : 11	01:20	1 : 9	-	-
	4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (per-10.000)	-	0.11	-	0.11	-	0.09	-	0.11	-	-
	5. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (%)	-	92.50	-	93.00	-	93.50	-	94.00		
1,03	Fasilitas Pendidikan										
	1. Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI (%)	-	23.80	-	21.91	-	15.96	-	13.15		
	2. Sekolah kondisi bangunan baik SMP/Mts (%)	-	22.20	-	20.25	-	30.17	-	19.86		
	3. Sekolah kondisi bangunan baik SMA/SMK/MA (%)	-	29.70	-	27.90	-	30.43	-	26.56		
1,04	PAUD										
	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA (siswa)	4.640	3.365	4.800	5.292	5.000	5.495	5.000	5.786		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1,05	Angka Putus Sekolah										
1.05.01	SD/MI	0	95	0	139	0	60	0	181		
1.05.02	SMP/MTs	0	28	0	8	0	36	0	18		
1.05.03	SMA/SMK/MA	0	11	0	3	0	16	0	4		
1,06	Angka Kelulusan										
	1. Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	99.86	100	100	100	100	100	100		
	2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100	98.40	100	97.90	100	97.80	100	98.45		
	3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	100	97.86	100	98.02	100	98.48	100	99.72		
	4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	99.85	100	99.95	100	99.79	100	99.80		
	5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100	98.40	100	97.80	100	97.80	100	98.43		
	6. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	100	83	100	83	100	86	100	83		
2	Kesehatan										
2,01	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000)	-	23,40	-	15,70	-	19,09	-	35,88		
2,02	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (/1.000)	-	0,15	-	0,73	-	1,35	-	0,61		
2,03	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)	-	0,002	-	0,01	-	0,01	-	0,01		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2,04	Rasio dokter per satuan penduduk (/1000)	-	0,34	-	0,30	-	0,43	-	0,35		
2,05	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1000)	-	9,18	-	6,64	-	8,15	-	8,28		
2,06	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	-	13	-	10,21	-	93,78	-	NA		
2,07	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	-	15,80	-	16,18	-	20,56	-	24,79		
2,08	Cakupan kelurahan UCI (%)	-	37,70	-	83,84	-	79,80	-	22,73		
2,09	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	-	100	-	100	-	100	-	100		
2,1	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)	-	-	-	37,97	-	41,73	-	10,44		
2,11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2,12	Cakupan kunjungan bayi (%)	-	15	-	13,15	-	73,40	-	68,33		
2,13	Cakupan puskesmas (%)	-	-	-	55,60	-	54,85	-	45,17		
2,14	Cakupan pembantu puskesmas (%)	-	43,49	-	34,93	-	44,62	-	46,26		
2,15	PHBS	-	-	-	70,00	-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Pekerjaan Umum										
3,01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	-	293.147	-	269.023	-	324.981	-	3.315.584		
3,02	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk	-	2,22	-	2,26	-	2,28	-	2,28		
3,03	Rasio tempat ibadah mesjid per 1000 penduduk umat Islam	-	2,15	-	2,22	-	2,23	-	2,23		
3,04	Rasio tempat ibadah gereja per 1000 penduduk umat Kristen	-	4,11	-	2,65	-	2,88	-	3,24		
3,05	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	-	57,34	-	65,25	-	71,81	-	72,91		
3,06	Persentase rumah tangga pengguna Air Bersih (%)	-	80,70	-	84,43	-	79,02	-	80,05		
3,07	Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-		
3,08	Panjang jalan dilalui roda 4 (Km)	-	647,54	-	647,54	-	645,97	-	641,93		
3,09	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) (Km)	-	45,27	-	41,55	-	50,19	-	50,57		
3,1	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
3,11	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3,12	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Perumahan										
4,01	Rasio rumah layak huni	20.1	16,67	20.2	17,51	20	17,15	21.08	18,6		
4,02	Rasio permukiman layak huni	1.5	0,94	1.5	0,94	1.5	0,94	1.5	0,94		
4,03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	-	39,05	-	45,94	-	52,77	-	56,12		
4,04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	12	14,2	10	5,428	14	13,48	8	2,89		
4,05	Persentase permukiman yang tertata (%)	93	94,94	90	94,94	87	94,93	84	94,94		
4,06	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	2	1,24	2	1,54	2	1,09	2	1,28		
4,07	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	78	81.95	76	80.23	74	79.89	72	79.1		
4,08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	3	0,13	3	0,52	3	2,47	3	1,33		
4,09	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	10	9,09	20	12,12	50	39,89	30	22,72		
5	Penataan Ruang										
5,01	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	34	38,23%	34	38,23%	321	-	-	-		
5,02	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	-	-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Perencanaan Pembangunan Daerah										
6,01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada		
6,02	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada		
6,03	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada		
6,04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	-	-	-	-	-	-	-	-		
6,05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd (%)	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada		
6,06	Penjabaran Konsistensi Program RKPd ke dalam APBD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
6,07	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Perhubungan										
7,01	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	908	99%	908	99%	908	99%	908	99%		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7,02	Rasio ijin trayek	56	-	58	-	51	-	59	-		
7,03	Jumlah uji kir angkutan umum	162	-	162	-	162	-	162	-		
7,04	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	13	11	-	11	-	11	-	11		
7,05	Persentase layanan angkutan darat (%)	276	57%	276	50%	300	60%	286	50%		
7,06	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
7,07	Pemasangan Rambu rambu (%)	1	-	150	50%	55	-	65	-		
7,08	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	0,63	-	0,63	-	0,63	-	0,63		
7,09	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	8.064	-	8.064	-	8.064	-	9	-		
7,1	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very (orang)	-	36992	-	68938	-	72610	6,72	50%		
7,11	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	5760	6311	-	1688	-	4235	-	6443		
8	Lingkungan Hidup										
8,01	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-		
8,02	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-		
8,03	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
8,04	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
8,05	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina) / (Org.)	-	-	-	-	-	-	-	-		
8,06	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (ada/tidak ada)	-	-	-	-	-	-	-	-		
8,07	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
8,08	Timbulan sampah yang ditangani (ton)	-	24.586	-	24.871	-	25.156	-	25.441		
8,09	Presentase cakupan area pelayanan (%)	-	17.63	-	18.30	-	19.06	-	19.50		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
8,10	Presentase jumlah sampah yang tertangani (%)	-	4.007	-	4.024	-	4.036	-	4.052		
8,11	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota (%)	-	95	-	95	-	95	-	95		
9	Pertanahan										
9,01	Luas Lahan bersertifikat (%)	2.070 Ha	100%	3.295 Ha	100%	3.126 Ha	100%	2.424 Ha	100%		
9,02	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	0	-	2	-	4	-	3	-		
10	Kependudukan dan Catatan Sipil										
10,01	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	62,30	66,45	82,7	86,65	90,20	90,09	91,50	95,30		
10,02	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	70,08	24,50	70,50	88,04	77,64	92,02	96,50	85,75		
10,03	Rasio pasangan berakte nikah (%)	50,00	11,84	50,00	79,55	75,00	82,48	83,20	100,00		
10,04	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak ada)	-	13,20	-	79,56	-	82,84	-	57,32		
10,05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	-	-	-	-	-	-	-	-		
10,06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	-	82,70	-	86,65	-	90,09	-	71,23		
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-		
11,02	Partisipasi perempuan di lembaga swasta / partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	-	25	-	25	-	25	-	25		
11,03	Rasio KDRT (%)	-	6,60	-	6,60	-	6,60	-	6,60		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
11,04	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	-	100	-	100	-	100	-	100		
11,05	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
12,01	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	-	20,31	-	1,67	-	2,26	-	0,96		
12,02	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	-	3	-	3	-	3	-	2		
12,03	Rasio akseptor KB (%)	-	45,07	-	56,58	-	65	-	73,6		
12,04	Cakupan peserta KB aktif/Angka pemakaiankontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	-	45,07	-	56,58	-	65	-	73,6		
12,05	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	-	-	13,184	-	14,052	16,18	14,407	13,4		
13	Sosial										
13,01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	511	2,45%	124	2,63%	634	3,09%	1.745	3,26%		
13,02	Persentase PMKS yang tertangani (%)	511	2,45%	124	2,63%	634	3,09%	1.745	3,26%		
13,03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	400	2,45%	100	2,63%	563	8.07%	1.674	9,50		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
13,04	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
13,05	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
13,06	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	20	100	45	100	45	100	45		
13,07	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
13,08	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Ketenagakerjaan										
14,01	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-	0	-	1	-	1	-	0		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
14,02	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	-	0	-	0	-	0	-	0		
14,03	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	-	0	-	0	-	53	-	89		
14,04	Keselamatan dan perlindungan (%)	-	0	-	0	-	0	-	0		
14,05	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	-	305	-	355	-	8.326	-	8.281		
14,06	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	-	0	-	0	-	0	-	0		
14,07	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
15,01	Persentase koperasi aktif (%)	-	140	-	86	-	21	-	119		
15,02	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	-	700	-	900	-	1200	-	1140		
15,03	Persentase BPR/LKM aktif (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
15,04	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	-	700	-	900	-	1200	-	1140		
16	Penanaman Modal										
16,01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	1.926	-	271	-	649	-	954		
16,02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	-	38,3 M	20 M	19,6 M	21 M	7,8 M	25 M	23 M		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
16,03	Rasio daya serap tenaga kerja	-	260	-	589	-	3.025	-	3.398		
16,04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-100		
17	Kebudayaan										
17,01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Keg)										
17,02	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100		
17,03	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	8	8	8	8	8	8	8	8		
17,04	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	8	8	8	8	8	8	8	8		
18	Pemuda dan Olah Raga										
18,01	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	-	-	-	11	-	11	-	14		
18,02	Persentase wirausaha muda (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
18,03	Cakupan pembinaan olahraga (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
18,04	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
18,05	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	-	-	-	-	50	23	50	23		
18,06	Jumlah atlet berprestasi	-	-	-	-	-	-	-	-		
18,07	Jumlah prestasi olahraga	65	-	65	12	65	12	65	12		
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
19,01	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Keg)	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		
19,02	Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
20,01	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	100	0.028	100	0.015	100	0.015	100	0.015		
20,02	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	100	0	100	0	100	0.015	100	0.34		
20,03	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	100	0	100	0	100	0	100	0		
20,04	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (Ada/tidak)	100	0	100	0	100	0	100	0		
20,05	Penegakan PERDA (%)	100	0,04	100	0,04	100	0,04	100	0.37		
20,06	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
20,07	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	80	100	90	100	90	100	100		
20,08	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	100	0	100	0	100	0	100	29		
20,09	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	100	0	100	0	100	75	100	100		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
20,1	Tingkat waktu tanggap/response time rate (%)	100	0	100	0	100	75	100	100		
20,11	Indeks Resiko Bencana (%)	-	114,73	-	125,19	-	125,19	-	125,19		
20,12	Desa Rawan Bencana (desa)	-	-	-	-	-	-	-	-		
20,13	Desa Tangguh Bencana (desa)	-	-	-	-	-	-	-	-		
20,14	Tingkat Fasilitasi Penanganan Pasca Bencana (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
20,15	Tingkat Penanganan Bencana (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
20,16	Jumlah Sistim Informasi Manajemen / SIM (ada/tidak)	-	-	-	-	-	-	-	-		
20,17	Maturitas SPIP (Level)	-	-	-	-	-	-	-	-		
20,18	Kapabilitas APIP (Level)	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Ketahanan Pangan										
21,01	Ketersediaan pangan utama Beras / Non Beras	9.700 Ton	9.349 Ton	4.900 Ton	6.364,22 Ton	7.600 Ton	10.089.226 Ton	7,777 Ton	15.447 Ton		
21.01.01	Ketersediaan pangan utama (%)	9.700 Ton	96	4.900 Ton	130	7.600 Ton	133	7,777 Ton	198		
21.01.02	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (kkal/kap/hr)	96,32	96,32	85.2	72	90.2	77,44	90.2	75.33		
21.01.03	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100		
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan										
22,01	Cakupan sarana prasarana perkantoran	-	60	-	60	-	60	-	60		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	pemerintahan desa yang baik (%)										
22,02	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat /LPM (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
22,03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
22,04	Persentase LSM aktif (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
22,05	Persentase LPM Berprestasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
22,06	Persentase PKK aktif (%)	-	100	-	100	-	100	-	100		
22,07	Persentase Posyandu aktif (%)	-	100	-	100	-	100	-	100		
22,08	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
22,09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Statistik										
23,01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (ada/tidak ada)	-	-	-	-	-	-	-	-		
23,02	Buku "kabupaten dalam angka" (ada/tidak ada)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA		
23,03	Buku "PDRB" (ada/tidak ada)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA		
24	Kearsipan										

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
24,01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	71,40	71,40	85,70	85,70	85,70	85,70	94,60	94,60		
24,02	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kali)	7	7	7	5	7	7	10	10		
25	Komunikasi dan Informatika										
25,01	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	-	30	-	37	-	42	-	55		
25,02	Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	23	-	27	-	30	-	35		
25,03	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon(%)	-	59	-	64	-	70	-	78		
25,04	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	54	-	60	-	68	-	76		
26	Perpustakaan										
26,01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (pengunjung)	760	760	926	926	962	962	3.256	3.256		
26,02	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	11.000	11.000	13.000	13.000	14.500	14.500	13.500	13.500		
26,03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk /1.000	0,162	0,162	0,171	0,171	2,048	2.048	0.188	0.188		
26,04	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (buku)	16.300	16.300	18.300	18.300	21.901	21.901	21.901	21.901		
26,05	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	URUSAN PILIHAN										
1	Pertanian										
1,01	Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	-	29,32	-	27,82	-	27,17	-	31,26		
1,02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,05	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,06	Cakupan bina kelompok petani (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,07	Nilai tukar petani (%)	-	97,36	-	103,97	-	104,34	-	106,10		
2	Kehutanan										
2,01	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	-	-	-	-	101,2	100	118	100		
2,02	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	373	-	344	-	325	-	246	-		
2,03	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	21,02	-	21,02	-	21,02	-	21,02	-		
3	Energi dan Sumber Daya Mineral										

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3,01	Persentase rumah tangga pengguna listrik(%)	-	73	-	74	-	74	-	74		
3,02	Rasio ketersediaan daya listrik	-	0	-	0	-	0	-	0		
3,03	Persentase pertambahan tanpa ijin (%)	-	0	-	0	-	0	-	0		
4	Pariwisata										
4,01	Kunjungan wisata (%)	7.500	1.878 (10%)	9.000	11535 (100%)	11.000	12.164 (100%)	12.000	13.172 (100%)		
4,02	Lama kunjungan Wisata (hari)		5-6 Jam		5-6 Jam		5-6 Jam		5-6 Jam		
4,03	PAD sektor pariwisata (%)	50.000.000	16.250.000 (31%)	36.000.000	41.133.000(100%)	50.000.000	51000000 (100%)	50.000.000	52.861.000 (100%)		
5	Kelautan dan Perikanan										
5,01	Produksi perikanan (%)	7,30	8,60	4,00	1,50	29,00	0,88	7,10	0,12		
5,02	Konsumsi ikan (%)	30,75	30,95	41,75	41,88	42,00	41,97	42,97	43,15		
5,03	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	3,50	3,95	4,50	4,55	5,50	459,00	6,50	5,02		
5,04	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	0,27	0,28	0,32	0,30	0,37	34,00	0,40	0,37		
5,05	Nilai tukar nelayan (%)	0,15	0,14	0,19	0,15	0,23	0,19	0,26	0,21		
5,06	Produksi perikanan tangkap (ton)	22,74	19,676,00	20,463,04	19,857,60	25,378,92	20,032,89	27,163,24	21,666,30		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5,07	Produksi perikanan budidaya (ton)	135,5	124,29	140,5	130,2	157,21	152,1	175,24	110,63		
6	Perdagangan										
6,01	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
6,02	Ekspor Bersih Perdagangan (Poin)	-	-	-	-	-	-	-	-		
6,03	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Perindustrian										
7,01	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	-	1,62	-	1,52	-	1,56	-	1,70		
7,02	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Transmigrasi										
8,01	Transmigran swakarsa (%)		0		0		0		0		
C.	ASPEK DAYA SAING										
1	Kemampuan Ekonomi Daerah										
1,01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	-	1.752,02	-	1.825,24	-	-	-	-		
1,02	Presentase konsumsi pangan perkapita (%)	-	57,86	-	53,52	-	56,20	-	54,23		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1,03	Presentase konsumsi non pangan perkapita (%)	-	42,14	-	46,48	-	43,8	-	45,58		
1,04	Produktivitas total daerah (Juta/Kapita/Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,05	Nilai Tukar Petani (Rp)	-	-	-	102,43	103,23	-	103,55	-		
2	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur										
2,01	Aksesibilitas Daerah										
2.01.01	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,02	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum										
1.02.01	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.02.02	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,03	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun										
1.03.01	Jumlah orang melalui dermaga per tahun (Orang)	4.416	-	4.416	-	4.416	-	4.416	-		
1.03.02	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	-	1.381.534	-	1.807.025	-	2.456.922	-	2.348.380		
1.03.03	Jumlah orang melalui lapangan terbang per tahun (Orang)	5760	100%	5760	100%	5760	100%	5760	100%		
1.03.04	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	-	43.204	-	9.785	-	15.982	-	47.209		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.03.05	Jumlah orang melalui terminal per tahun (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.03.06	Jumlah barang melalui terminal per tahun (Kg)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2,02	Penataan Wilayah										
2.02.01	Ketaatan terhadap RTRW (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.02	Luas wilayah produktif (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.03	Luas wilayah industry (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.04	Luas wilayah kebanjiran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.05	Luas wilayah kekeringan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.02.06	Luas wilayah perkotaan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2,03	Fasilitas Perbankan dan lembaga keuangan non bank										
2.03.01	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	-	6	-	6	-	6	-	6		
2.03.02	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2,04	Hotel dan Restoran										
2.04.01	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (unit)	-	73	-	78	-	50	-	65		
2.04.02	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (unit)	-	24	-	24	-	24	-	24		
2.04.02.01	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel berbintang (unit)	-	0	-	0	-	0	-	0		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.04.02.02	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel melati (unit)	-	22	-	21	-	23	-	23		
2,05	Air Bersih, Listrik, Komunikasi dan Informasi										
2.05.01	Persentase RT pengguna air bersih (%)	-	80,70	-	84,43	-	79,02	-	80,05		
2.05.02	Rasio ketersediaan daya listrik	-	0,00027	-	0,00023	-	0,00025	-	0,00025		
2.05.03	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.05.04	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Iklim Berinvestasi										
3,01	Angka kriminalitas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
3,02	Jumlah demo (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-		
3,03	Lama proses perijinan (Hari)	-	-	-	-	-	-	-	-		
3,04	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.04.01	Jumlah dan macam pajak daerah (Jenis)	-	6	-	6	-	6	-	6		
3.04.02	Jumlah dan macam retribusi daerah (Jenis)	-	11	-	11	-	11	-	11		
3,05	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Buah)	-	-	-	-	-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET DAN REALISASI /CAPAIAN SETIAP TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3,06	Presentase Index Desa Membangun/ID (%)	-	0,57	-	0,60	-	0,62	-	0,63		
4	Sumber Daya Manusia										
4,01	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,02	Rasio ketergantungan (%)	-	49,24	-	48,33	-	47,58	-	47,06		

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Pembangunan daerah harus didukung oleh aspek keuangannya. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan dengan baik, mencari sumber pendanaan alternatif serta memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara efisien untuk kesejahteraan Masyarakat. Dengan keuangan yang kuat, pembangunan daerah, terutama dibidang infrastruktur, layanan publik dan sektor ekonomi dapat berjalan dengan optimal, lancar dan berkelanjutan. Keuangan daerah dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Lebih lanjut melalui analisis yang dilakukan dapat diketahui efisiensi dan efektivitas anggaran, mengukur kemandirian keuangan daerah, membantu pengambilan Keputusan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mengidentifikasi resiko keuangan dan meningkatkan kapasitas investasi daerah. Dasar dari analisis pelaksanaan kinerja keuangan daerah pada tahun 2019 – 2024 masih mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

**Tabel 2.23 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten SBT 2020-2024**

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN	909.584.453.043,17	983.280.410.513,25	950.159.289.436,39	1.005.658.326.265,22	990.361.660.942,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.474.681.327,17	34.530.112.971,87	32.089.143.351,39	37.209.421.570,22	15.894.885.394,63
4.1.1	Pendapatan Pajak daerah	6.217.589.533,64	6.153.168.689,54	6.645.109.774,90	7.192.790.536,22	6.349.520.889,08
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	364.381.800,00	277.149.900,00	540.652.000,00	809.769.500,00	1.358.914.500,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.403.748.092,00	4.661.954.377,42	2.582.575.052,00	5.473.186.825,00	4.786.600.370,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang SAH	15.488.961.901,53	23.437.840.004,91	22.320.806.524,49	23.733.674.709,00	3.399.849.635,55
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	852.918.521.716,00	921.653.356.305,00	894.124.370.025,00	968.448.904.695,00	920.977.587.040,00
4.2.1	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	677.197.142.572,00	745.232.049.607,00	722.985.658.730,00	776.190.247.727,00	726.296.709.468,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	23.223.506.022,00	48.845.965.053,00	38.934.349.982,00	50.952.160.521,00	29.999.363.000,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	23.223.506.022,08				
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	504.379.471.000,00	500.895.943.000,00	499.601.146.344,00	521.224.728.640,00	538.829.091.592,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	138.801.439.464,00	195.490.141.554,00	184.450.162.404,00		
	DAK Fisik				92.957.790.002,00	44.809.728.325,00
	DAK Non Fisik				111.055.568.564,00	112.658.526.551,00

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4.2.2	Pedapatan tranfer Pemerintah Pusat-Lainya	161.378.367.000,00	161.378.367.000,00	153.130.379.000,00	173.773.812.000,00	175.105.987.000,00
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus					
4.2.2.2	Dana Penyesuaian/Dana Desa	161.378.367.000,00	161.378.367.000,00	152.051.538.000,00	160.981.079.000,00	164.054.309.000,00
	Dana Insentif Daerah/Fiskal (DID)			1.078.841.000,00	12.792.733.000,00	11.051.678.000,00
4.2.3	Pendapatan Tranfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.343.012.144,00	15.042.939.698,00	18.008.332.295,00	18.484.844.968,00	19.574.890.572,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.343.012.144,00	14.722.539.698,00	18.008.332.295,00	18.484.844.968,00	19.574.890.572,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	320.400.000,00		0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.191.250.000,00	27.096.941.236,38	23.945.776.060,00	0,00	53.489.188.507,55
4.3.1	Pendapatan Hibah	30.191.250.000,00	0,00	9.997.100,00	0,00	31.170.344.000,00
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	27.096.941.236,38	23.935.778.960,00	0,00	22.318.844.507,55
5	BELANJA	874.812.529.562,40	686.984.635.028,31	764.396.738.356,35	794.437.070.104,24	790.941.234.041,96
5.1	BELANJA OPERASI	753.758.525.588,20	527.172.479.598,66	580.033.857.984,14	635.563.553.523,11	694.087.144.718,29
5.1.1	Belanja Pegawai	273.263.356.223,00	277.322.539.158,40	277.705.404.573,20	271.276.190.931,16	361.178.182.517,35
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.330.586.138,20	203.842.106.293,26	213.485.315.396,14	295.177.800.748,95	264.476.140.376,13
5.1.3	Belanja Subsidi	9.193.558.500,00	1.053.830.000,00	2.387.930.000,00	2.053.367.415,00	1.808.641.395,00
5.1.4	Belanja Hibah	52.299.400.000,00	10.191.651.242,00	44.829.249.134,00	36.920.961.543,00	55.318.332.643,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	19.117.000.000,00	34.762.352.905,00	41.625.958.880,80	30.135.232.885,00	11.305.847.786,81
5.1.6	Balanza Bantuan Keuangan	209.554.624.727,00				
5.2	BELANJA MODAL	105.552.798.708,20	156.018.853.429,65	171.837.680.372,21	158.873.516.581,13	96.854.089.323,67
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.619.926.809,00	42.269.135.665,80	27.045.2279.051,00	35.228.133.370,02	12.830.305.448,39
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.426.150.713,61	42.244.032.294,58	40.662.045.372,25	37.046.407.492,44	14.813.318.179,85
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.278.646.845,59	70.741.114.709,27	103.857.355.948,96	86.221.075.718,67	68.723.365.698,43
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	228.074.340,00	564.570.760,00	23.000.000,00	377.900.000,00	487.099.997,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	15.501.205.266,00	3.793.320.000,00	12.525.200.000,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.501.205.265,00	3.793.320.000,00	12.525.200.000,00	0,00	0,00
6	TRANSFER					
5.1	BELANJA TRANSFER KE DESA		223.163.111.933,00	207.404.884.667,50	215.429.247.863,50	223.731.494.442,00
6.2	Transfer Pendapatan Lainnya ke Desa		223.163.111.933,00	207.404.884.667,50	215.429.247.863,50	223.731.494.442,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	34.771.923.480,77	73.132.645.551,94	(21.642.333.587,46)	(4.207.991.702,52)	(24.311.067.541,78)
7	PEMBIAYAAN DAERAH					
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.622.250.575,29	56.232.293.301,41	127.847.972.292,43	103.455.638.704,97	95.854.827.130,45
7.1.1	Penggunaan SILPA	22.622.250.575,29	56.232.293.301,41	127.847.972.292,43	103.455.638.704,97	95.854.827.130,45
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	1.518.000.000,00	2.750.000.000,00	2.445.500.000,00	2.445.500.000,00
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1.518.000.000,00	2.750.000.000,00	2.445.500.000,00	2.445.500.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	22.622.250.575,29	54.714.293.301,41	125.097.972.292,43	101.010.138.704,97	93.409.327.130,45
	SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	57.394.174.056,06	127.846.938.853,35	103.455.638.704,97	96.802.147.002,45	69.098.259.588,67

2.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang masuk ke kas daerah yang berasal dari sumber-sumber sah, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan ini menjadi bagian penting dari

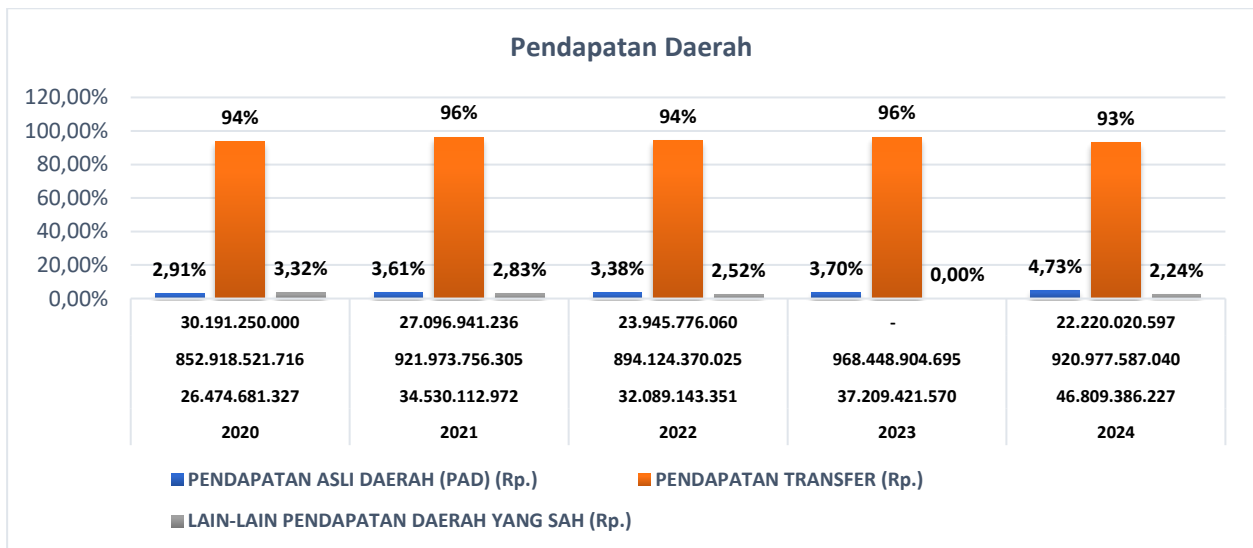
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencerminkan kemampuan fiskal daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 2019 – 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun, seperti pada Gambar berikut Terlihat bahwa di Tahun 2020 pendapatan daerah sebesar Rp.909.58 Miliar mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi Rp. 983.28 Miliar. Di tahun 2022 pendapatan daerah Kabupaten SBT mengalami penurunan menjadi Rp.950.15 Miliar dan mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2023 yaitu mencapai Rp.1.005 Triliun serta mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi Rp. 990 Miliar. Dengan laju pertumbuhan pendapatan tertinggi di tahun 2023 yaitu 0,055% (naik), sedangkan laju pertumbuhan setiap tahunnya adalah 0,02%.



Gambar 2.64. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2020 - 2024

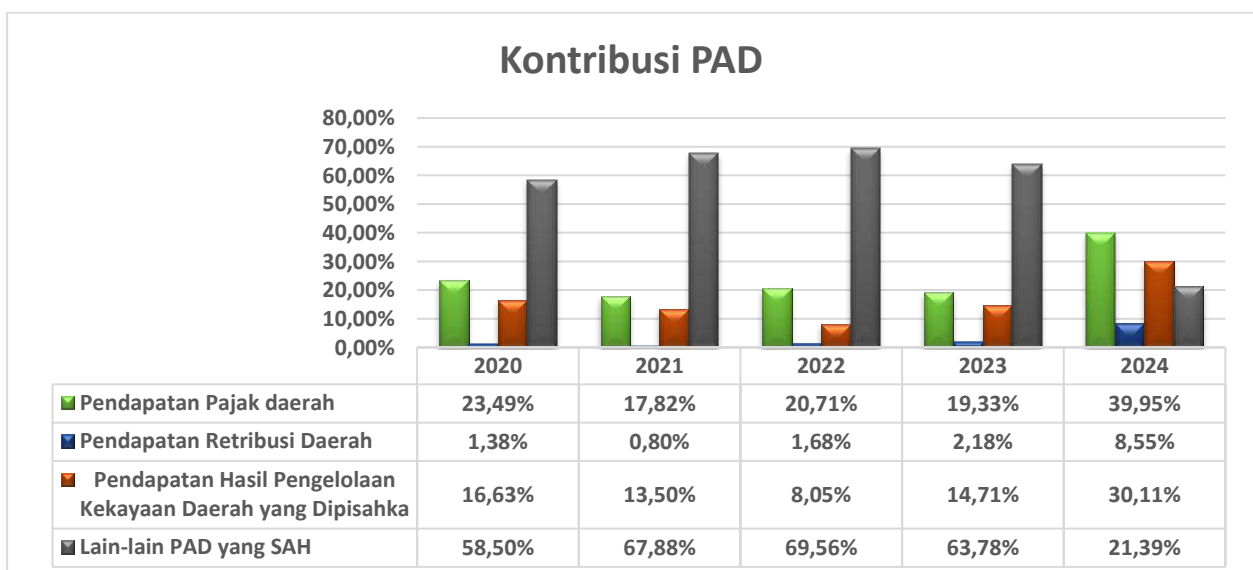
Berdasarkan sumber pendapatan yang ada, kontribusi tertinggi diberikan dari pendapatan transfer, kemudian posisi kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD, sedangkan kontribusi ketiga dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Gambaran kontribusi PAD Kabupaten Seram Bagian Timur belum mencapai 5% atau < 10%, angka ini menunjukkan rasio kemandirian daerah yang masih rendah atau ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat masih tinggi. Gambaran kontribusi dari sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, seperti tersaji pada Gambar berikut.



Gambar 2.65. Perkembangan Masing-masing Unsur Pendapatan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 - 2024

Gambar di atas menjelaskan bahwa Pendapata Asli Daerah (PAD) selama tahun 2020 – 2024 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kontribusi PAD tertinggi di tahun 2024 yaitu 4,73 %. Sedangkan untuk sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah, di tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 3,32% dan mengalami penurunan untuk tahun-tahun berikutnya dan tidak ada pendapat sumber ini di tahun 2023. Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, berdasarkan data tersaji terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar Rp.852.91 Miliar di tahun 2024 meningkat menjadi Rp.920.98 Miliar atau mengalami fluktuasi rata-rata sebesar 4.91%.

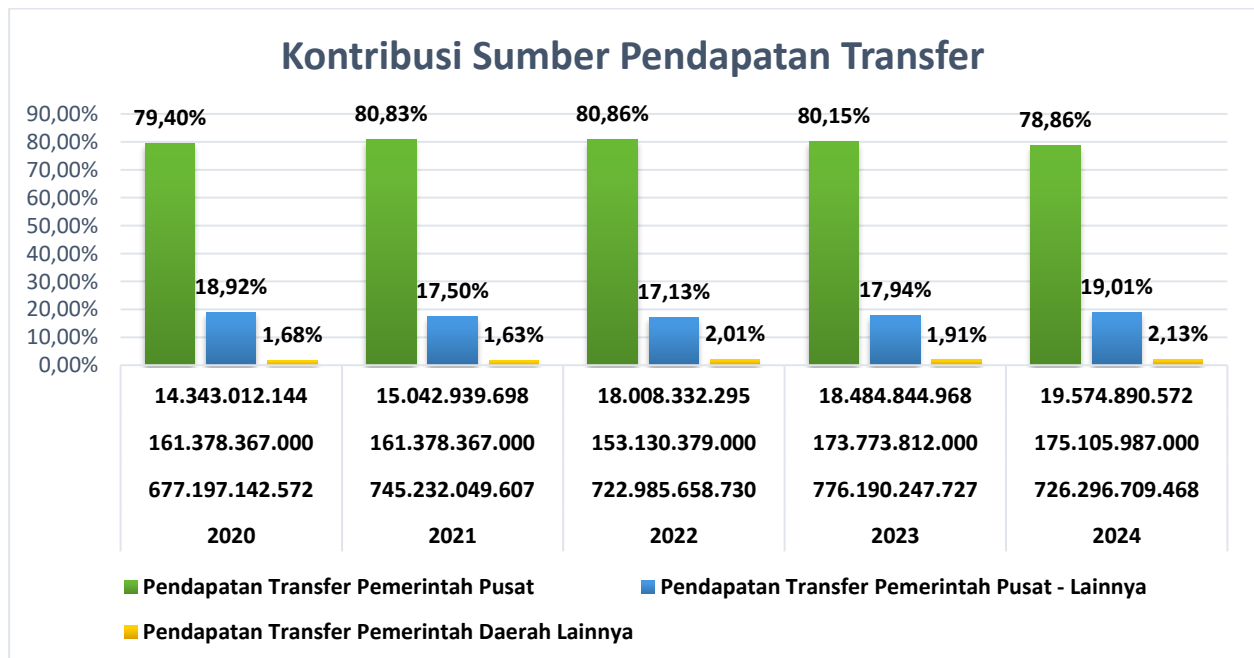
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Selama periode tahun 2020 - 2024 kontribusi dari masing-masing sumber PAD dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.66. Kontribusi Sumber PAD Terhadap PAD Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020 - 2024

Data pada gambar di atas memperlihatkan Kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari tahun 2020 sampai tahun 2024, kontribusi PAD terbesar berasal dari Lain-lain PAD yang Sah. Lain-lain PAD yang Sah adalah kontributor terbesar setiap tahunnya yaitu dengan capaian tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 69,56% atau sebesar Rp.23.43 Miliar. Pajak Daerah memiliki kontribusi yang cukup fluktuatif, dari 23,49% di tahun 2020 dan mengalami fluktuasi pada tahun selanjutnya sedangkan di tahun 2024 meningkat menjadi turun hingga 39,95%. Retribusi Daerah sangat kecil kontribusinya yaitu pada tahun 2020 - 2023 tidak lebih dari 3% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 8,55 %. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah memiliki kontribusi tertinggi pada 2024 yaitu sebesar 30,11%.

Komposisi Sumber Pendapatan Transfer yang diterima oleh pemerintah daerah antara lain pendapatan transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat lainnya dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Selama tahun 2020 – 2024 kontribusi sumber pendapatan transfer pemerintah daerah SBT dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 2.67. Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer

Penerimaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dari sumber Pendapatan Transfer rata-rata selama 5 tahun (2020 – 2024) berada diatas 70% (dilihat pada Gambar 2.67). Rinciannya dapat dilihat pada gambar di atas, bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Transfer Kabupaten Seram Bagian Timur sangat dominan, yaitu mencapai diatas 80,86 % pada tahun 2022, kontribusi dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya paling sedikit 17,13% di tahun 2022 dan meningkat sampai 19,01% di tahun 2024. Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya diatas 1,63 % di tahun 2021 dan mencapai 2,13 % di tahun 2024.

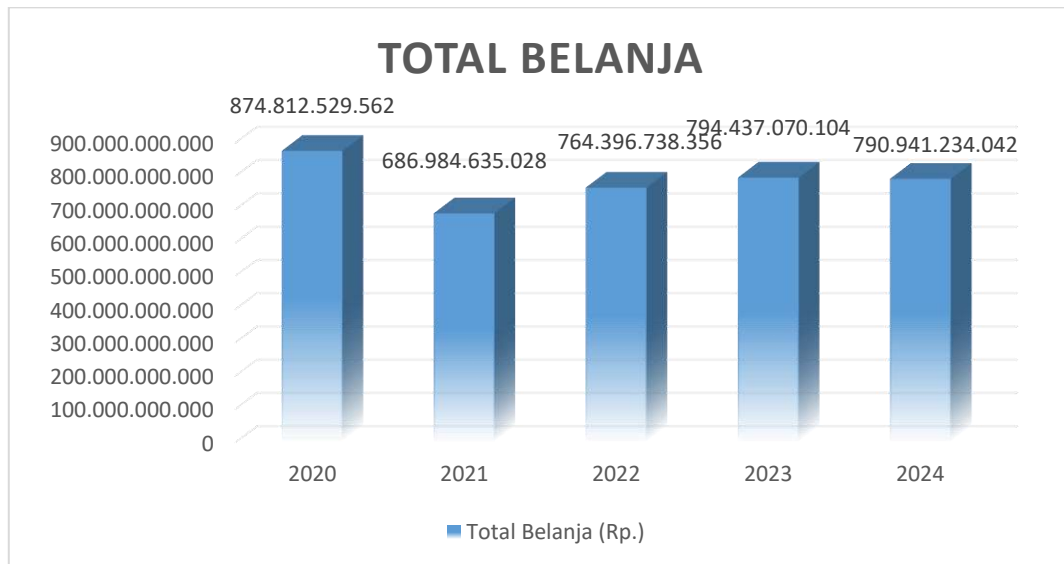
Untuk data perkembangan pendapatan daerah secara lengkap dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.24. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 – 2024 (Rp.)

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN	909.584.453.043,17	983.280.410.513,25	950.159.289.436,39	1.005.658.326.265,22	990.361.660.942,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.474.681.327,17	34.530.112.971,87	32.089.143.351,39	37.209.421.570,22	15.894.885.394,63
4.1.1	Pendapatan Pajak daerah	6.217.589.533,64	6.153.168.689,54	6.645.109.774,90	7.192.790.536,22	6.349.520.889,08
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	364.381.800,00	277.149.900,00	540.652.000,00	809.769.500,00	1.358.914.500,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahka	4.403.748.092,00	4.661.954.377,42	2.582.575.052,00	5.473.186.825,00	4.786.600.370,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang SAH	15.488.961.901,53	23.437.840.004,91	22.320.806.524,49	23.733.674.709,00	3.399.849.635,55
4.2	PENDAPATAN TRANFER	852.918.521.716,00	921.653.356.305,00	894.124.370.025,00	968.448.904.695,00	920.977.587.040,00
4.2.1	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	677.197.142.572,00	745.232.049.607,00	722.985.658.730,00	776.190.247.727,00	726.296.709.468,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	23.223.506.022,00	48.845.965.053,00	38.934.349.982,00	50.952.160.521,00	29.999.363.000,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	23.223.506.022,08				
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	504.379.471.000,00	500.895.943.000,00	499.601.146.344,00	521.224.728.640,00	538.829.091.592,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	138.801.439.464,00	195.490.141.554,00	184.450.162.404,00		
	DAK Fisik				92.957.790.002,00	44.809.728.325,00
	DAK Non Fisik				111.055.568.564,00	112.658.526.551,00
4.2.2	Pedapatan tranfer Pemerintah Pusat-Lainya	161.378.367.000,00	161.378.367.000,00	153.130.379.000,00	173.773.812.000,00	175.105.987.000,00
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus					
4.2.2.2	Dana Penyesuaian/Dana Desa	161.378.367.000,00	161.378.367.000,00	152.051.538.000,00	160.981.079.000,00	164.054.309.000,00
	Dana Insentif Daerah/Fiskal (DID)			1.078.841.000,00	12.792.733.000,00	11.051.678.000,00
4.2.3	Pendapatan Tranfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.343.012.144,00	15.042.939.698,00	18.008.332.295,00	18.484.844.968,00	19.574.890.572,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.343.012.144,00	14.722.539.698,00	18.008.332.295,00	18.484.844.968,00	19.574.890.572,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	320.400.000,00		0	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.191.250.000,00	27.096.941.236,38	23.945.776.060,00	0	53.489.188.507,55
4.3.1	Pendapatan Hibah	30.191.250.000,00	0	9.997.100,00	0	31.170.344.000,00
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	0	27.096.941.236,38	23.935.778.960,00	0	22.318.844.507,55

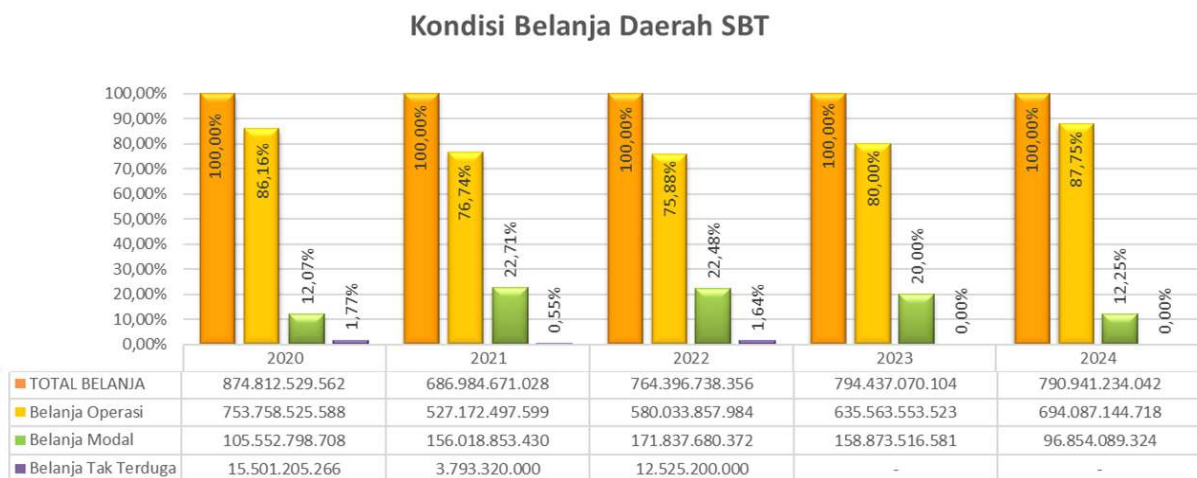
2.2.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. Data di gambar berikut memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan belanja daerah meningkat, dengan total belanja tertinggi di tahun 2020 yaitu sebesar Rp.874.81 Miliar dan di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.790.94 Miliar atau mengalami penurunan sebesar 9,5% paling rendah dari data total belanja selama 5 tahun terakhir.



Gambar 2.68. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2020 - 2024

Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Alokasi dari perkembangan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) dapat dilihat pada Tabel 2.15 dan Gambar berikut.



Gambar 2.69. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020 – 2024

Data pada Gambar tersebut memperlihatkan bahwa belanja daerah didominasi oleh belanja operasi, dalam kurun waktu tahun 2020-2024 perkembangannya sebagai berikut pada tahun 2020 Rp.753.75 Miliar dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya dan pada tahun 2024 belanja operasi sebesar Rp.790.94 Miliar. Selanjutnya, perkembangan belanja modal di Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, tahun 2020 sebesar 12,07 % (Rp.105.55 Miliar) dari total belanja, dan di tahun 2024 mengalami peningkatan proporsi sebesar menjadi 12.25% atau sebesar Rp.96.85 Miliar. Perkembangan Belanja Tak Terduga mengalami fluktuasi, dengan realisasi tertinggi di tahun 2020 yaitu sebesar 1,77% dari total belanja atau sebesar Rp.15.5 Miliar dan turun signifikan hingga mencapai Rp.3,7 Miliar di tahun 2021 kemudian meningkat menjadi Rp. 12,52 Miliar di tahun 2022 sedangkan tahun 2023 dan 2024 tidak tersedia. Untuk Belanja Transfer realisasi juga mengalami fluktuasi selama tahun 2020 – 2025 dengan kontribusi tertinggi adalah di tahun 2024 yaitu sebesar Rp.223.73 Miliar.

a. Belanja Operasi



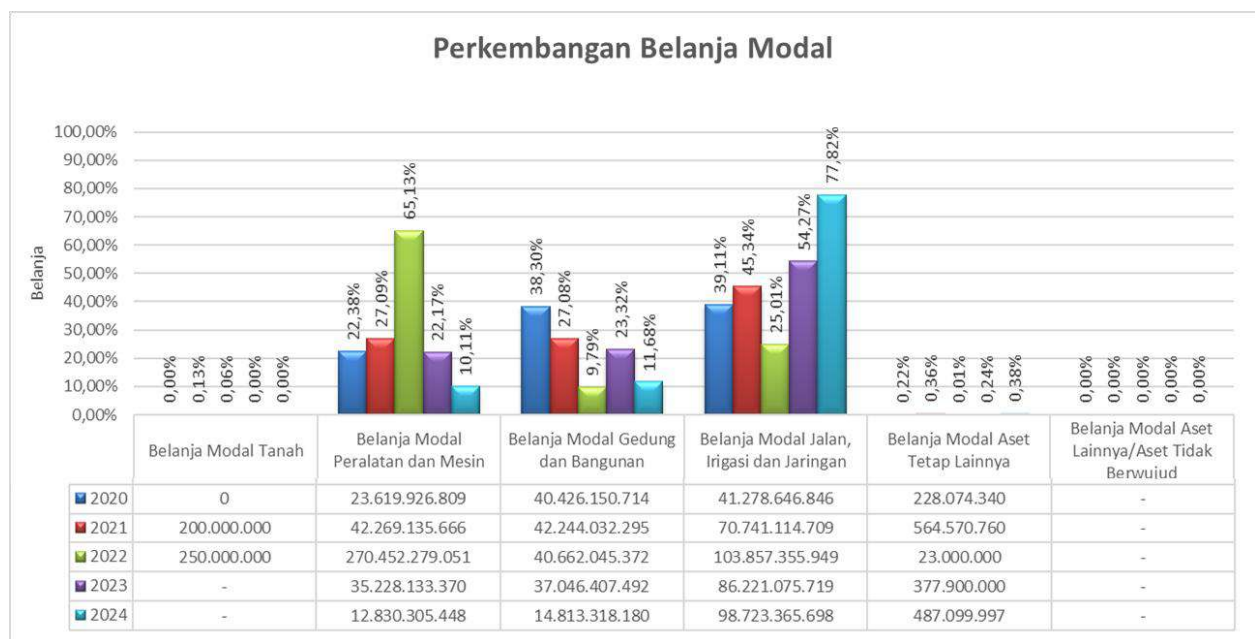
Gambar 2.70. Perkembangan Belanja Operasi Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020 - 2024

Data pada Gambar 2.70 menunjukkan bahwa dominasi belanja operasi di Kab. SBT adalah belanja pegawai, yang mengalami peningkatan setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir, tercatat di tahun 2020 sebesar Rp. 273,26 Miliar dengan proporsi 36 % dari total belanja operasi dan di tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 361.17 Miliar (52%) atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1.77% per tahun. Dominasi kedua dari belanja operasi adalah belanja barang dan jasa, dan perkembangan belanja ini dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, tercatat di tahun

2020 sebesar Rp. 190,33 Miliar dari total belanja operasi pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 264,47Miliar.

Perkembangan belanja hibah tahun 2020 sebesar Rp. 52.29 Miliar atau 6,94% dari total belanja operasi dan mengalami fluktuasi pada tahun berikutnya yaitu di tahun 2021 tercatat sebesar 1,93% meningkat menjadi 0,32.% di tahun 2023 dari total belanja operasi dan pada tahun 2024 turun menjadi 0.26%. Selanjutnya belanja bantuan sosial tahun 2020 sebesar Rp. 19.11 Miliar, pada tahun 2021 – 2023 mengalami fluktuasi, dan tahun 2024 tercatat sebesar 4.84% dari total belanja operasi. Selanjutnya proporsi paling kecil dari belanja operasi adalah belanja subsidi yaitu 1,22% di tahun 2020 dan mengalami fluktuasi pada tahun – tahun selanjutnya. Di tahun 2024 pendapatan ini hanya sebesar Rp. 1,8 Miliar.

b. Belanja Modal



Gambar 2.71. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020 - 2024

Selama 5 tahun terakhir perkembangan belanja modal Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami fluktuatif, dan perkembangan besaran belanja ini masih berada dibawah Rp.200 Miliar, di tahun 2024 besarnya tercatat sebesar kurang lebih Rp.175.29 Miliar. Secara rata-rata, dari tahun 2020 – 2024 postur terbesar dari belanja ini diperuntukan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan perkembangan yang terus meningkat, tercatat di tahun 2020 sebesar 40,76% dan meningkat di tahun 2021 sebesar 51.42% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 76.62%. Postur terbesar kedua dari belanja modal adalah belanja bangunan dan gedung, selama 5 tahun terakhir perkembangan belanja ini mengalami penurunan, tercatat di tahun 2020 sebesar 39.92% dan di tahun 2024 hanya sebesar 18.76%.

Postur terbesar ketiga dari belanja modal adalah belanja peralatan dan mesin, perkembangan belanja ini juga mengalami penurunan, tercatat di tahun 2020

sebesar 23,32% dari total belanja modal pada tahun 2024 menurun menjadi 23,81%. Belanja asset tetap lainnya menempati dominasi ke empat dari postur belanja modal, perkembangannya selama 5 tahun mengalami fluktuasi, tercatat di tahun 2020 sebesar 0.23% mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 0,24% dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,90% atau sebesar Rp.487 juta.

c. Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer

Seperti telah dijelaskan dan tersaji pada Gambar 2.81 bahwa belanja tak terduga pada APBD Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) terus mengalami penurunan, tahun 2020 sebesar Rp.15.58 Miliar, tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi Rp.4.15 Miliar dan di tahun 2024 belanja ini tercatat sebesar Rp.5 Miliar. Selanjutnya belanja bantuan keuangan dijelaskan dan tersaji pada Gambar 2.71, bahwa perkembangan belanja tersebut mengalami fluktuatif, di tahun 2020 realisasinya tercatat sebesar Rp.223.21 Miliar dan di tahun 2024 realisasinya tercatat sebesar Rp.216.67 Miliar.

Tabel 2.25. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 – 2024

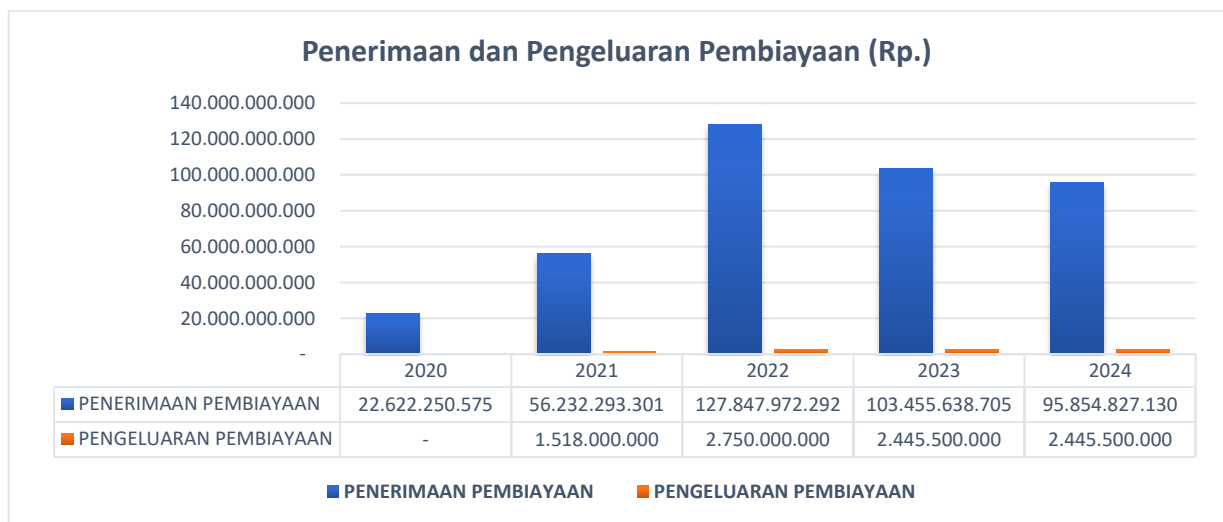
KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	TOTAL BELANJA	874.812.529.562,40	686.984.635.028,31	764.396.738.356,35	794.437.070.104,24	790.941.234.041,96
5.1	BELANJA OPERASI	753.758.525.588,20	527.172.479.598,66	580.033.857.984,14	635.563.553.523,11	694.087.144.718,29
5.1.1	Belanja Pegawai	273.263.356.223,00	277.322.539.158,40	277.705.404.573,20	271.276.190.931,16	361.178.182.517,35
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.330.586.138,20	203.842.106.293,26	213.485.315.396,14	295.177.800.748,95	264.476.140.376,13
5.1.3	Belanja Subsidi	9.193.558.500,00	1.053.830.000,00	2.387.930.000,00	2.053.367.415,00	1.808.641.395,00
5.1.4	Belanja Hibah	52.299.400.000,00	10.191.651.242,00	44.829.249.134,00	36.920.961.543,00	55.318.332.643,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	19.117.000.000,00	34.762.352.905,00	41.625.958.880,80	30.135.232.885,00	11.305.847.786,81
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	209.554.624.727,00				
5.2	BELANJA MODAL	105.552.798.708,20	156.018.853.429,65	171.837.680.372,21	158.873.516.581,13	96.854.089.323,67
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	200.000.000,00	250.000.000,00	0	0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.619.926.809,00	42.269.135.665,80	270.452.279.051,00	35.228.133.370,02	12.830.305.448,39
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.426.150.713,61	42.244.032.294,58	40.662.045.372,25	37.046.407.492,44	14.813.318.179,85
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.278.646.845,59	70.741.114.709,27	103.857.355.948,96	86.221.075.718,67	98.723.365.698,43
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	228.074.340,00	564.570.760,00	23.000.000,00	377.900.000,00	487.099.997,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	15.501.205.266,00	3.793.320.000,00	12.525.200.000,00	0	0
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.501.205.265,00	3.793.320.000,00	12.525.200.000,00	0	0
5.4	TRANSFER					
5.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA		223.163.111.933,00	207.404.884.667,50	215.429.247.863,50	223.731.494.442,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		223.163.111.933,00	207.404.884.667,50	215.429.247.863,50	223.731.494.442,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya					
	SURPLUS / (DEFISIT)	34.771.923.480,77	73.132.645.551,94	-21.642.333.587,46	-4.207.991.702,52	-24.311.067.541,78
7	PEMBIAYAAN DAERAH					
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.622.250.575,29	56.232.293.301,41	127.847.972.292,43	103.455.638.704,97	95.854.827.130,45
7.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	22.622.250.575,29	56.232.293.301,41	127.847.972.292,43	103.455.638.704,97	95.854.827.130,45
7.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	1.518.000.000,00	2.750.000.000,00	2.445.500.000,00	2.445.500.000,00
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	1.518.000.000,00	2.750.000.000,00	2.445.500.000,00	2.445.500.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri/Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	22.622.250.575,29	54.714.293.301,41	125.097.972.292,43	101.010.138.704,97	93.409.327.130,45

2.2.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun-tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, di tahun 2020 tercatat sebesar 22,62 Miliar naik di tahun 2021 menjadi Rp. 54,71 Miliar, di tahun 2022 naik signifikan menjadi 125,09 Miliar dan mengalami penurunan di tahun berikutnya yaitu sebesar Rp. 101,10 Miliar dan turun lagi menjadi Rp. 93,40 Miliar di tahun 2024.

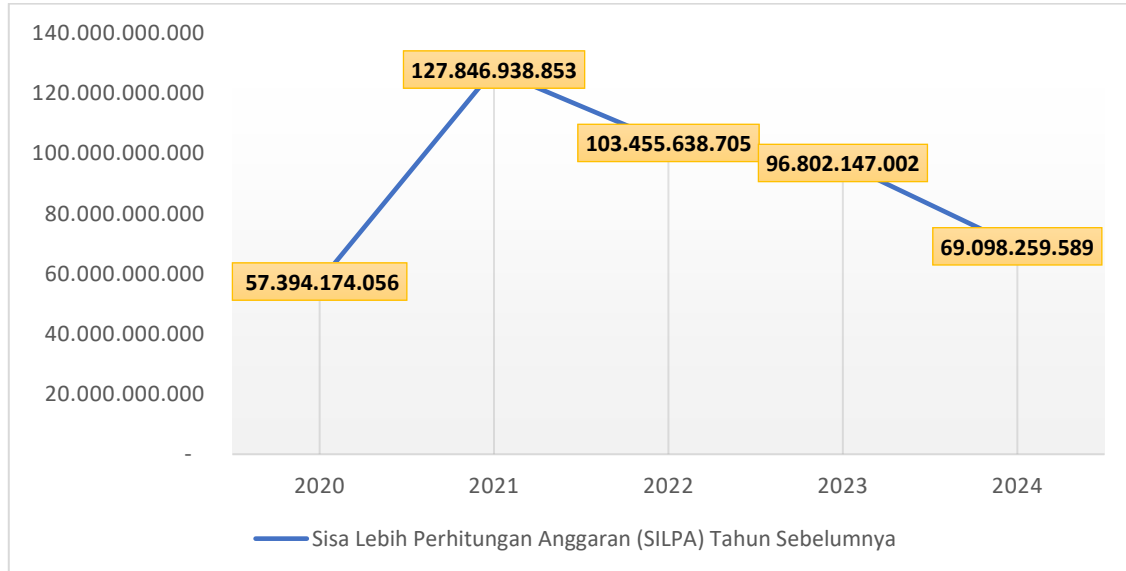
Pengeluaran pembiayaan daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 – 2024) pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan perkembangan yang flutiatif. Terlihat pada gambar berikut bahwa pengeluaran pembiayaan hanya dalam bentuk pernyataan modal yang dialokasikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 4,6 Miliar, turun pada tahun 2021 menjadi Rp. 1,5 Miliar dan naik menjadi Rp.2,7 Miliar di tahun 2022 serta mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 yaitu sebesar Rp. 2,4 Miliar.



Gambar 2.72. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020 - 2024

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun berjalan di Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan

perkembangan yang cenderung menurun, di tahun 2020 sebesar Rp. 22,4 Miliar, mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi Rp. 57,3 Miliar, selanjutnya meningkat dan tercatat mencapai titik tertinggi yaitu pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 127,84 Miliar, selanjutnya di tahun 2024 tercatat mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 96,94 Miliar. Kondisi ini menggambarkan bahwa di tahun 2024 pengelolaan keuangan mengalami perbaikan.



Gambar 2.73. Perkembangan SiLPA Tahun Berjalan Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020 – 2024 (Rp.)

Gambaran rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) seperti tersaji pada Tabel berikut.

Data di Tabel 2.19. memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan daerah sejak lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan dengan rata-rata per tahun sebesar 0.02%. Perkembangan kinerja realisasi pendapatan daerah uraiannya terinci sebagai berikut

a. Pendapatan:

- Pertumbuhan realisasi pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.16%, kondisi ini didukung oleh pertumbuhan realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah yaitu sebesar 0.47%,
- Pertumbuhan realisasi Pendapatan Transfer secara rata-rata menunjukkan perkembangan yang meningkat tetapi tidak signifikan, tercatat sebesar 0.02% per tahun,
- Pertumbuhan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan perkembangan negatif, yaitu rata-rata tercatat -0.30% per tahun.

b. Belanja:

- Pertumbuhan realisasi Belanja menunjukkan perkembangan yang negatif, rata-rata menurun sebesar -0.01% per tahun, disumbangkan dari belanja operasi sebesar 0.06%, belanja modal sebesar -0,25% dan belanja transfer sebesar -0,38%, sedangkan belanja tak terduga mengalami peningkatan sebesar 1,73% pertumbuhan realisasi Belanja menunjukkan perkembangan yang negatif, rata-rata menurun sebesar -0.01% per tahun, disumbangkan dari belanja

operasi sebesar 0.06%, belanja modal sebesar -0,25% dan belanja transfer sebesar -0,38%, sedangkan belanja tak terduga mengalami peningkatan sebesar 1,73%.

c. Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan:

Pertumbuhan realisasi penerimaan pembiayaan menunjukkan perkembangan yang meningkat, rata-rata per tahun tercatat sebesar 0.32%. Demikian halnya dengan pertumbuhan pengeluaran pembiayaan yang meningkat sebesar 0.55% per tahun.

Tabel 2.26. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 5 Tahun Terakhir (2020 – 2024)

KODE	URAIAN	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata-rata Pertumbuhan
4	PENDAPATAN	-0,07	0,03	-0,06	0,02	-0,02
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-0,23	0,08	-0,14	1,34	0,26
4.1.1	Pendapatan Pajak daerah	0,01	-0,07	-0,08	0,13	0,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,31	-0,49	-0,33	-0,40	-0,23
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-0,06	0,81	-0,53	0,14	0,09
4.1.4	Lain-lain PAD yang SAH	-0,34	0,05	-0,06	5,98	1,41
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	-0,07	0,03	-0,08	0,05	-0,02
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-0,09	0,03	-0,07	0,07	-0,02
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	-0,52	0,25	-0,24	0,70	0,05
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,01	0,00	-0,04	-0,03	-0,02
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-0,29	0,06	0,00	0,00	-0,06
	DAK Fisik	0,00	0,00	-1,00	1,07	0,02
	DAK Non Fisik	0,00	0,00	-1,00	-0,01	-0,25
4.2.2	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	0,05	-0,12	-0,01	-0,02
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Dana Penyesuaian/Dana Desa	0,00	0,06	-0,06	-0,02	0,00
	Dana Insentif Daerah/Fiskal (DID)	0,00	-1,00	-0,92	0,16	-0,44
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-0,05	-0,16	-0,03	-0,06	-0,07
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-0,03	-0,18	-0,03	-0,06	-0,07
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-1,00	0,00	0,00	0,00	-0,25
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,11	0,13	0,00	-1,00	-0,19
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	-1,00	0,00	-1,00	-0,50
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	-1,00	0,13	0,00	-1,00	-0,47
5	BELANJA	0,27	-0,10	-0,04	0,00	0,03
5.1	BELANJA OPERASI	0,43	-0,09	-0,09	-0,08	0,04
5.1.1	Belanja Pegawai	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	-0,07	-0,05	-0,28	0,12	-0,07
5.1.3	Belanja Subsidi	7,72	-0,56	0,16	0,14	1,87
5.1.4	Belanja Hibah	4,13	-0,77	0,21	-0,33	0,81
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-0,45	-0,16	0,38	1,67	0,36
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	-0,32	-0,09	0,08	0,64	0,08
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-1,00	-0,20	0,00	0,00	-0,30
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-0,44	-0,84	6,68	1,75	1,78
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-0,04	0,04	0,10	1,50	0,40
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-0,42	-0,32	0,20	-0,13	-0,16

KODE	URAIAN	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata-rata Pertumbuhan
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-0,60	23,55	-0,94	-0,22	5,45
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3,09	-0,70	0,00	0,00	0,60
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3,09	-0,70	0,00	0,00	0,60
6	TRANSFER					
6.1	BELANJA TRANSFER KE DESA	-1,00	0,00	0,00	-0,04	-0,26
6.2	Transfer Pendapatan Lainnya ke Desa	-1,00	0,08	-0,04	-0,04	-0,25
	SURPLUS / (DEFISIT)	-0,52	-4,38	4,14	-0,83	-0,40
7	PEMBIAYAAN DAERAH					
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-0,60	-0,56	0,24	0,08	-0,21
7.1.1	Penggunaan SILPA	-0,60	-0,56	0,24	0,08	-0,21
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-1,00	-0,45	0,12	0,00	-0,33
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-1,00	-0,45	0,12	0,00	-0,33
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	-0,59	-0,56	0,24	0,08	-0,21
	SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-0,55	0,24	0,07	0,40	0,04

2.2.4. Neraca Keuangan Daerah

Neraca keuangan daerah adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu pemerintah daerah pada periode tertentu. Neraca dapat menggambarkan aset, kewajiban (liabilitas), dan ekuitas dana pemerintah daerah, yang digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan serta kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Penyusunan neraca keuangan daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Neraca keuangan pemerintah daerah disusun dengan tujuan antara lain;

2. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan daerah secara menyeluruh
3. Menjadi dasar penilaian kesehatan keuangan daerah
4. Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan keuangan dan kebijakan publik
5. Menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Kondisi neraca keuangan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang tersedia adalah tahun 2023 dan 2024, yang terdiri dari komponen Aset (aktiva) yaitu aset lancar antara lain kas, piutang, beban di bayar dimuka dan persediaan. Sedangkan untuk Investasi tidak tersedia pada data neraca. Untuk komponen Aset tidak lancar terdiri dari dana bergulir dan penyertaan modal pemerintah daerah sedangkan investasi jangka Panjang tidak tersedia. Komponen aset tetap yang berkontribusi besar terhadap neraca adalah jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 55%. Kewajiban pemerintah daerah yang tergambar pada neraca keuangan adalah kewajiban jangka pendek sedangkan kewajiban jangka panjang tidak tersedia. Jumlah ekuitas yang tergambar pada neraca keuangan tahun 2023 sebesar Rp. 1,95 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp. 1,59 miliar. Berikut rincian data Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.27. Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 dan 2024.

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	ASET LANCAR					
5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	49.795.185.610,51	123.040.644.708,07	100.514.430.937,98	91.893.243.571,74	64.606.269.284,74
5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	10.712.900,00	0,00	0,00	4.275.100,00	11.875.000,00
5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	599.095.411,41	416.539.851,19	86.176.971,00	45.051.285,00	163.466.476,22
5.3.1.1.4	Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran	169.216.209,00	104.772.720,00	363.845.048,00	44.346.568,00	9.184.867,00
5.3.1.1.5	Kas Lainnya BOS	4.913.500.325,00	4.704.152.049,00	2.808.907.957,00	2.807.851.121,00	1.862.766.649,00
5.3.1.1.6	Kas Lainnya JKN	2.075.685.315,65	271.202,60	35.800,40	0.00	0.00
	Kas Lainnya di Bendahara (Kas Bank) BOK Salur			119.396.812,10	2.147.909.667,68	2.452.080.945,00
5.3.6	Kas Lainnya	0,00	70.757.727,72	70.757.727,72	0.00	1.801.233,71
5.3.7	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
5.3.1.2.1	Piutang Pendapatan Pajak PAD	2.870.088.660,71	4.620.665.006,17	4.982.586.523,17	4.598.800.138,97	5.602.895.831,89
5.3.1.2.2	Penyisihan Piutang Pajak	(1.391.164.731,26)	(1.764.758.009,42)	(2.038.408.332,92)	(2.325.999.643,67)	(2.507.424.766,34)
5.3.1.2.3	Piutang Pajak Netto	1.478.923.929,46	2.855.906.996,75	2.944.178.190,25	2.632.800.495,31	3.095.471.065,55
	Piutang Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	Piutang Retribusi Netto	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
5.3.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	421.184.006,00	421.184.006,00	1.293.629.169,82	1.090.691.006,00	1.014.931.506,00
5.3.1.2.5	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(421.184.006,00)	(421.184.006,00)	(421.184.006,00)	(421.184.006,00)	(480.558.756,00)
5.3.1.2.6	Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	872.445.163,82	669.507.482,00	534.372.750,00
5.3.1.2.7	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	593.547.590,00	1.177.889.851,00	4.522.164.667,00	5.305.738.482,00	4.542.357.738,00
	Piutang Lainnya	0,00	405.951.400,00	0,00	0.00	0.00
	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
5.3.1.3	Beban Dibayar Dimuka	13.333.333,33	13.333.333,33	145.000.000,00	116.666.666,67	208.333.333,33
5.3.1.4	Persediaan	8.410.017.903,92	11.367.887.536,44	12.076.828.788,39	26.735.033.196,41	23.192.812.785,63
	JUMLAH ASET LANCAR	68.064.218.528,28	144.158.107.376,10	124.524.168.063,66	132.402.417.155,80	100.680.792.128,19
	ASET TIDAK LANCAR					

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.3.1.5	INVESTASI JANGKA PANJANG					
	Investasi Jangka Panjang Non Parmanen					
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00	0.00	0.00
	Investasi Dalam Obligasi		0,00	0,00	0.00	0.00
	Investasi dalam Pembangunan		0,00	0,00	0.00	0.00
5.3.1.5.1	Dana Bergulir	3.001.957.272,28	3.001.957.272,28	3.001.957.272,28	3.001.957.272,28	3.001.957.272,28
5.3.1.5.2	Penyisihan Dana Bergulir	(3.001.957.272,28)	(3.001.957.272,28)	(3.001.957.272,28)	(3.001.957.272,28)	(3.001.957.272,28)
	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	Investasi Non Parmanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Parmanen	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	Investasi Jangka Panjang Parmanen					
5.3.1.5.3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.390.549.280,00	26.908.549.280,00	29.658.549.280,00	32.104.049.280,00	34.549.549.280,00
	Investasi Parmanen Lainnya		0,00	0,00	0.00	0.00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Parmanen	25.390.549.280,00	26.908.549.280,00	29.658.549.280,00	32.104.049.280,00	34.549.549.280,00
	JUMLAH INVSETASI JANGKA PANJANG	25.390.549.280,00	26.908.549.280,00	29.658.549.280,00	32.104.049.280,00	34.549.549.280,00
5.3.1.6	ASET TETAP					
5.3.1.6.1	Tanah	22.504.417.180,00	22.704.417.180,00	24.230.025.650,00	24.576.682.550,00	24.966.963.402,25
5.3.1.6.2	Peralatan dan Mesin	402.544.092.480,50	434.018.431.781,43	460.467.160.196,46	488.199.815.154,88	435.436.867.861,45
5.3.1.6.3	Gedung dan Bangunan	818.558.150.845,74	850.721.887.020,48	923.280.781.436,69	959.968.093.812,41	894.269.383.462,23
5.3.1.6.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.593.965.566.987,27	1.647.510.463.248,35	1.764.795.185.880,35	1.883.854.365.124,41	1.666.302.647.656,53
5.3.1.6.5	Aset Tetap Lainnya	14.232.844.310,00	14.818.782.510,00	13.859.838.561,08	14.022.732.705,20	16.352.935.923,08
5.3.1.6.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	26.748.617.162,70	60.889.693.736,94	23.071.552.478,27	50.438.893.705,20	29.465.447.542,27
5.3.1.6.7	Akumulasi Penyusutan	(1.189.246.211.629,82)	(1.426.160.993.417,61)	(1.511.556.999.532,65)	(1.700.783.351,84)	(1.742.775.299.569,23)
	JUMLAH ASET TETAP	1.689.307.477.136,39	1.604.502.682.059,59	1.698.147.544.670,20	1.720.887.376.858,37	1.324.018.946.278,58
5.3.1.7	ASET LAINNYA					
5.3.1.7.1	Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	71.092.727,72	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00	0.00	0.00
	Ketitaan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00		

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0.00	166.178.865,60
5.3.1.7.2	Aset Lain-lain	84.213.849.744,00	80.445.233.644,00	92.184.484.436,16	89.569.545.999,18	170.084.466.571,27
	JUMLAH ASET LAINNYA	84.284.942.471,72	80.445.568.644,00	92.184.484.436,16	89.569.545.999,18	170.250.980.436,87
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.798.982.968.888,11	1.711.856.799.983,59	1.819.990.913.386,36	1.842.341.306.935,53	1.531.037.047.160,45
	JUMLAH ASET	1.867.047.187.416,39	1.856.014.907.359,69	1.944.515.081.450,01	1.974.743.724.091,33	1.631.717.839.288,64
	KEWAJIBAN					
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
5.3.2.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	169.221.715,51	419.441.677,51	437.154.821,51	140.524.310,97	9.184.867.00
5.3.2.2	Utang Bunga		0,00	0,00	0.00	0.00
5.3.2.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00	0.00	0.00
5.3.2.4	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00	0.00	0.00
5.3.2.2	Utang Beban	4.367.508.431,07	3.057.403.718,00	305.839.115,00	16.458.836.815,00	5.496.893.863.00
5.3.2.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	267.905.946,95	315.733.210,00	5.544.665,00	4.410.142.829,07	4.646.473.500.29
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.804.636.093,53	3.792.578.605,51	748.538.601,51	21.019.502.955,04	10.152.552.230,29
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.804.636.093,63	3.792.578.605,51	748.538.601,51	21.019.502.955,04	10.152.552.230,29
	EKUITAS					
5.3.3	EKUITAS	1.862.242.551.322,66	1.852.222.328.754,18	1.943.766.542.848,51	1.953.724.221.136,29	1.621.565.287.058.35
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.867.047.187.416.39	1.856.014.907.359,69	1.944.515.081.450,02	1.974.743.724.091,33	1.631.717.839.288,64

2.2.5. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berbasis kinerja. Hal ini mencakup seluruh siklus keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri namun tetap dalam koridor peraturan yang berlaku. Melalui kebijakan ini, setiap program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat didanai secara efektif, sesuai prioritas, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga menjadi landasan dalam menyusun strategi pendanaan dan pengendalian anggaran, guna menjaga kesinambungan fiskal serta meningkatkan kualitas belanja daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan PAD, dan optimalisasi penggunaan dana transfer menjadi fokus utama dalam kebijakan pengelolaan keuangan selama periode perencanaan ini.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pendapatan Daerah yang berasal berbagai sumber yang sah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan dijadikan sebagai pemasukan ke berbagai rekening kas daerah serta dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai strategi dan mekanisme, diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah;

- a. Nilai besaran pajak/retribusi yang dikenakan saat ini relatif masih kecil serta regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi sudah kurang sesuai sehingga perlu penyesuaian,
- b. Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak/retribusi belum merata,
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan update sistem informasi database wajib pajak sehingga kevalidan data masih terbatas,
- d. Belum optimalnya pemanfaatan dan pelestarian Obyek wisata dengan baik yang menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata,
- e. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka strategi yang akan dilakukan kedepan untuk meningkat pendapatan daerah adalah:

- a. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas,
- b. Meningkatkan kedisiplinan bagi wajib pajab/retribusi melalui kegiatan sosialisasi,
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi,
- d. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata melalui peningkatan daya tarik pada obyek wisata,
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan kapasitas dan pengawasan,
- f. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi.
- g. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah,
- h. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan,
- i. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD,
- j. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan,
- k. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada 5 tahun sebelumnya disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

- a. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Kedepan kebijakan belanja daerah tersebut diatas akan terus diterapkan dan lebih diperkuat sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Untuk itu, secara ringkas disampaikan, bahwa arah kebijakan belanja daerah kedepan difokuskan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas belanja publik untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Belanja diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan mengedepankan prinsip

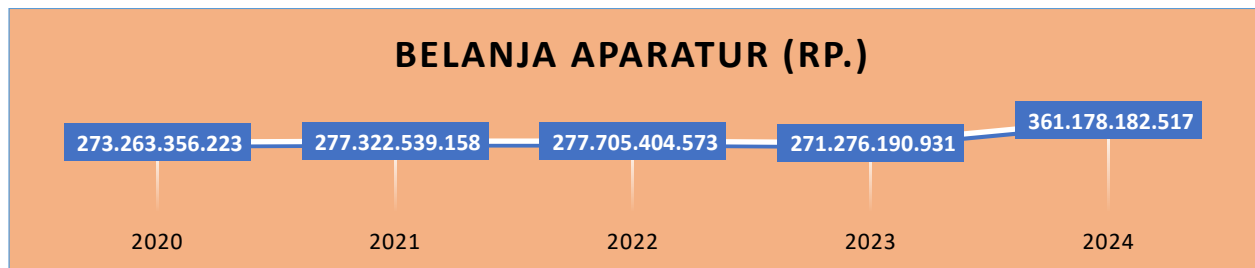
anggaran berbasis kinerja. Pemerintah daerah juga mendorong belanja yang produktif dan *pro-growth*, seperti belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Selain itu, pengendalian belanja rutin dan peningkatan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan.

2.2.6. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

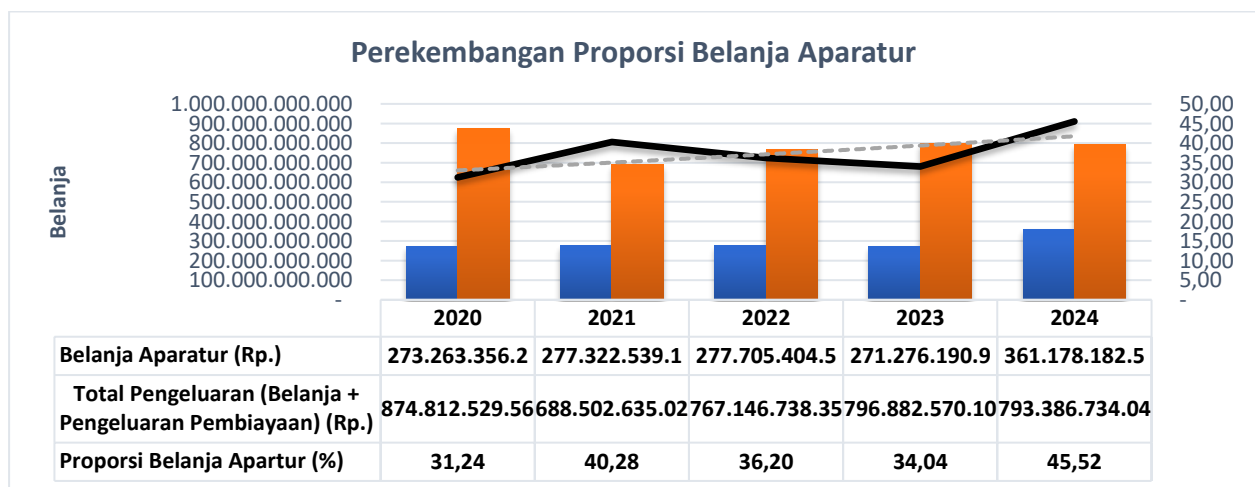
A. Analisis Belanja untuk Pemenuhan Aparatur:

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Seram Bagian Timur relatif besar dan terus meningkat. Di tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 273.263.356.223 dan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 361.178.182.517. Perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (pegawai) seperti terlihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.74. Perkembangan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Pegawai) Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020 - 2024

Dibandingkan dengan total pengeluaran (belanja dan pengeluaran pembiayaan), proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami peningkatan, di tahun 2020 tercatat sebesar 31,24% dan meningkat pada tahun 2024 mencapai 45,52%. Secara rinci perkembangan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 tahun terakhir tersaji pada Gambar berikut.



Gambar 2.75. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020–2024

B. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, Bungan atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah, yaitu pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu untuk belanja pegawai dengan kecenderungan yang meningkat dari sebesar Rp.307,00 Miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.370,37 Miliar pada tahun 2024. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan hanya diperuntukan untuk penyertaan modal (investasi) sedangkan lainnya tidak ada. Penyertaan modal yang dibiayai 4 tahun terakhir antara lain tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp.1.51 Miliar dan di tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 2.44 Miliar. Perkembangan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.28. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020 – 2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
A	BELANJA					
1	Belanja Pegawai (Rp.)	273.263.356.223	277.322.539.158	277.705.404.573	271.276.190.931	361.178.182.517
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
1	Pembentukan Dana Cadangan					
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	1.518.000.000	4.750.000.000	2.445.500.000	2.445.500.000
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri/Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
	TOTAL	273.263.356.223	278.840.539.158	282.455.404.573	273.721.690.931	363.623.682.517

Berdasarkan data pada tabel diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun kedepan untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan daerah, hasil proyeksinya untuk tahun 2025 – 2029 seperti tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.29. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2025 – 2030

NO.	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	BELANJA						
1	Belanja Aparatur (Rp.)	387.263.472.907	413.348.763.296	439.434.053.686	465.519.344.075	491.604.634.465	517.689.924.854
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
1	Pembentukan Dana Cadangan						
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.866.814.764	3.288.129.527	3.709.444.291	4.130.759.055	4.552.073.818	4.973.388.582
	TOTAL	390.130.287.671	416.636.892.823	443.143.497.977	469.650.103.130	496.156.708.283	522.663.313.436

2.2.7. Analisis Pembiayaan

Analisis ini dilakukan untuk memberi Gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran dalam menutup defisi riil anggaran Pemerintah Daerah. Selama kurun waktu 5 tahun, 2020 – 2024, kondisi surplus dan defisit secara rinci terlihat pada Tabel berikut. Terlihat bahwa, selama 5 tahun, Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami Surplus anggaran setiap tahunnya, yaitu di tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 34.77 Miliar, selanjutnya di tahun 2021 tercatat Rp.294.77 Miliar, tahun 2022 tercatat Rp.181.01 Miliar, tahun 2023 yaitu Rp.208.77 Miliar dan di tahun 2024 tercatat Rp.196.97 Miliar.

Tabel 2.30. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020 - 2024

No.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	909.584.453.043	983.280.410.513	950.159.289.436	1.005.658.326.265	990.361.660.942
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	874.812.529.562	686.984.635.028	764.396.738.356	794.437.070.104	790.941.234.042
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	1.518.000.000	4.750.000.000	2.445.500.000	2.445.500.000
	Surplus/Defisit	34.771.923.481	294.777.775.485	181.012.551.080	208.775.756.161	196.974.926.900

Penerimaan pembiayaan daerah sebagai sumber penutup defisit riil berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Gambaran secara jelas tentang hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.31. Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020 - 2024

No.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	57.394.174.056	127.846.938.853	103.455.638.705	96.802.147.002	69.098.259.589
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	1.518.000.000	4.750.000.000	2.445.500.000	2.445.500.000
	SiLPA Neto	57.394.174.056	126.328.938.853	98.705.638.705	94.356.647.002	66.652.759.589

Berdasarkan data di Tabel tersebut, dari SiLPA yang ada selama 5 tahun terakhir dapat dialokasikan untuk mendanai program atau kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya dan perlu dilanjutkan pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

2.2.8. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode 2025 - 2029 disusun berdasarkan berbagai asumsi makro dan sektoral yang mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, tren nasional, serta proyeksi indikator pembangunan. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi ini antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi positif setiap tahun yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi lokal, yang pada gilirannya mendorong peningkatan PAD.
- Inflasi Tahunan stabil pada kisaran 3-4% per tahun, yang memengaruhi proyeksi belanja operasional dan modal.
- PAD meningkat seiring dengan perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan lokal.
- Pendapatan Transfer mengacu pada tren dan proyeksi alokasi dana dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta Dana Bagi Hasil (DBH).
- Pendapatan Lain-lain yang Sah termasuk bantuan keuangan, hibah, dan penerimaan lainnya dengan asumsi tren pertumbuhan moderat.
- Belanja Operasi mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan biaya pelayanan publik, gaji pegawai, dan belanja barang/jasa.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 - 2030 tersaji pada Tabel berikut dibawah ini.

Tabel 2.32. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2025 - 2030

No.	URAIAN	TARGET (Rp.)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	PENDAPATAN	1.019.735.281.592	1.049.108.902.241	1.078.482.522.890	1.107.856.143.540	1.137.229.764.189	1.166.603.384.839
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.199.775.358	22.504.665.320	25.809.555.282	29.114.445.244	32.419.335.207	35.724.225.169
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	938.824.555.416	956.671.523.792	974.518.492.169	992.365.460.546	1.010.212.428.912	1.028.059.397.298
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.710.950.818	69.932.713.129	78.154.475.440	86.376.237.750	94.598.000.061	102.819.762.372
2.	BELANJA	1.030.973.002.849	1.034.748.077.213	1.038.523.151.579	1.042.298.225.943	912.199.397.990	1.049.848.374.672
2.1	BELANJA OPERASI	679.922.544.822	665.757.944.926	651.593.345.030	637.428.745.133	623.264.145.237	609.099.545.341
2.2	BELANJA MODAL	113.953.941.235	131.053.793.146	148.153.645.058	165.253.496.969	182.353.348.880	199.453.200.792
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	13.175.239.999	13.825.279.997	14.475.319.996	15.125.359.994	15.425.439.991	16.425.439.991
2.4	TRANSFER	223.921.276.793	224.111.059.144	224.300.841.495	224.490.623.846	91.156.463.882	224.870.188.548
	Surplus/Defisit	(11.237.721.257)	14.360.825.028	39.959.371.312	65.557.917.597	225.030.366.199	116.755.010.167
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	82.506.333.962	86.255.571.524	90.004.809.085	93.754.046.647	97.503.264.208	101.252.521.769
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.261.461.078	89.320.325.755	93.379.190.432	97.438.055.109	101.496.919.786	105.555.784.463
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.755.127.116	3.064.754.231	3.374.381.347	3.684.008.462	3.993.655.578	4.303.262.694

	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	74.023.739.821	103.681.150.783	133.338.561.744	162.995.972.706	326.527.285.985	222.310.794.630
	Rataan Surplus SILPA 5 Tahun	148.167.267.225					

2.2.9. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama kurun waktu 5 tahun kedepan, 2025 – 2030, tersaji secara lengkap pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.33. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2025 - 2030

No	URAIAN	TARGET (Rp.)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	1.019.735.281.592	1.049.108.902.241	1.078.482.522.890	1.107.856.143.540	1.137.229.764.189	1.166.603.384.839
2	PENERIMAAN PENDAPATAN	85.261.461.078	89.320.325.755	93.379.190.432	97.438.055.109	101.496.919.786	105.555.784.463
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	1.104.996.742.670	1.138.429.227.996	1.171.861.713.322	1.205.294.198.649	1.238.726.683.975	1.272.159.169.302

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama kurun waktu periode tahun 2025 – 2030, selanjutnya ditentukan pengalokasian untuk prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan mencakup:

- Prioritas I, yaitu program/kegiatan strategis yang sesuai dengan prioritas utama pembangunan daerah, seperti: Pembangunan infrastruktur dasar, Pendidikan dan kesehatan, Penanggulangan kemiskinan dan Pelayanan publik prioritas lainnya.
- Prioritas II, yaitu Program yang dilakukan oleh perangkat daerah di luar prioritas utama (misalnya fungsi pendukung, pengawasan, atau tugas pokok yang bukan program prioritas I).

Perincian belanja prioritas pembangunan tahun 2025 – 2030 selanjutnya tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.34. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2025 - 2030

No.	URAIAN	TARGET (Rp.)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.104.996.742.670	1.138.429.227.996	1.171.861.713.322	1.205.294.198.649	1.238.726.683.975	1.272.159.169.302
1	Belanja Operasi	679.922.544.822	665.757.944.926	651.593.345.030	637.428.745.133	623.264.145.237	609.099.545.341
2	Belanja Prioritas I	297.551.938.493	330.869.898.149	364.187.857.805	397.505.817.461	430.823.777.117	464.141.736.772
2.1	Pendidikan 20% dari Total Belanja Daerah	85.014.839.569	94.534.256.614	104.053.673.659	113.573.090.703	123.092.507.748	132.611.924.792
2.2	Kesehatan 10% dari Total Belanja Daerah	42.507.419.785	47.267.128.307	52.026.836.829	56.786.545.352	61.546.253.874	66.305.962.396
2.3	Infrastruktur Pelayanan Publik 40% dari Total Belanja Daerah	170.029.679.139	189.068.513.228	208.107.347.317	227.146.181.406	246.185.015.495	265.223.849.584

No.	URAIAN	TARGET (Rp.)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Belanja Prioritas II (Program perangkat daerah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diluar Prioritas I)	127.522.259.354	141.801.384.921	156.080.510.488	170.359.636.055	184.638.761.621	198.917.887.188
	TOTAL PRIORITAS I + II	425.074.197.847	472.671.283.070	520.268.368.293	567.865.453.516	615.462.538.738	663.059.623.960
	PROPORSI BELANJA PRIORITAS I + II TERHADAP KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN (%)	38,47	41,52	44,40	47,11	49,69	52,12

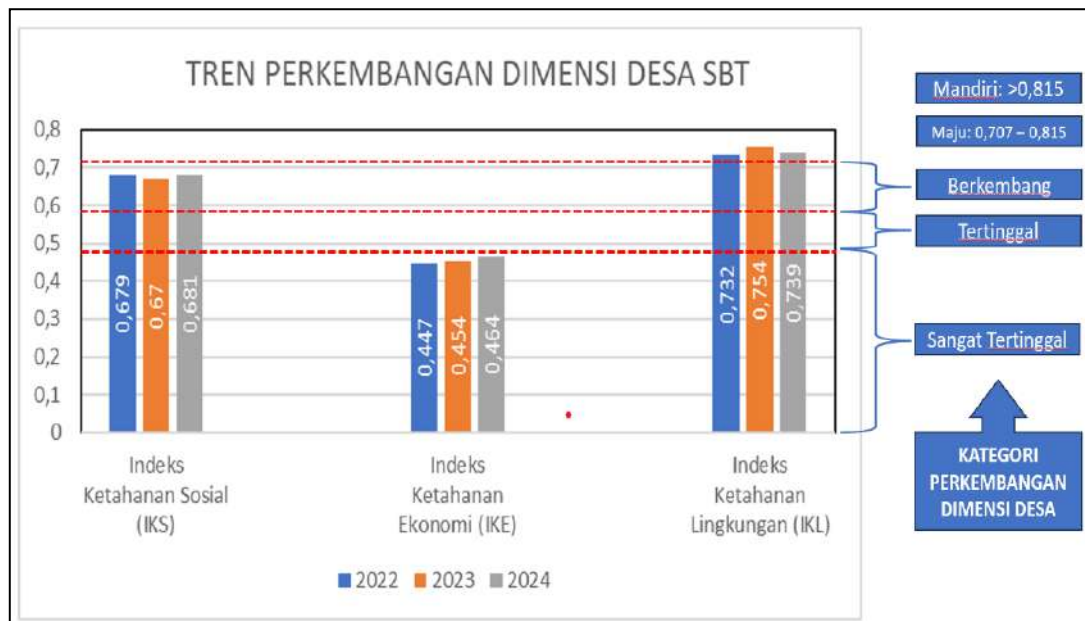
Berdasarkan rencana penggunaan anggaran seperti terlihat pada Tabel atas, menunjukkan bahwa belanja modal pembangunan untuk prioritas I dan II mencapai 38,47 % di tahun 2025 dan terus mengalami peningkatan dan di tahun 2030 mencapai 52,12%. Gambaran ini cukup baik dan kedepan perlu terus ditingkatkan melalui usaha efisiensi pada belanja operasi.

2.2.10. Rencana Penguatan Pembiayaan Pembangunan Daerah

Rencana penguatan pembiayaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Kebijakan Pengelolaan Keuangan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan yang relatif sama dalam upayanya menyediakan pelayanan publik, membangun ekonomi dan infrastruktur Daerah, yaitu:

1. Kurangnya kapasitas fiskal Daerah dan ketergantungan Daerah pada dana yang bersumber dari Transfer Ke Daerah; dan
2. Lemahnya inovasi Daerah dalam mencari alternatif pembiayaan APBD khususnya melalui Pembiayaan Utang Daerah.

Mengacu dari hasil analisis kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan daerah (Tabel 2.23), maka sulit untuk dilakukan terobosan atau dilaksanakan inovasi terkait hilirisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam di Seram Bagian Timur, seperti sagu dan lainnya dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial dasar. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini tergolong rendah (masuk kategori sangat tertinggal) dan pergerakannya lambat, dibandingkan dengan bidang sosial dan lingkungan, seperti terlihat pada data di Gambar berikut.



Gambar 2.76. Perkembangan dan Tren Pembangunan Ekonomi Desa di Seram Bagian Timur Selama 3 Tahun Terakhir (2022 – 2024)

Seirama dengan adanya poin kebijakan yang terkait dengan Pembiayaan Daerah, maka untuk mendorong pembangunan ekonomi, Kabupaten Seram Bagian Timur dapat memanfaatkan mekanisme pembiayaan ini. Data terkait Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Kode 7.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah, memperlihatkan bahwa selama 5 tahun terakhir realisasinya tidak ada. Terkait hal ini, maka daerah harus mampu dan mau menciptakan jalan keluar melalui inovasi pembiayaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ruang tersebut terbuka lebar, seperti uraian berikut.

A. Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pasal 155,
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN) Pasal 43 sampai dengan Pasal 44.

B. Pengertian Pembiayaan, Pembiayaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan

Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas:

- a. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah.

Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

C. Usulan Pembentukan Unit Pengelola Utang Daerah

Dalam Pasal 63 ayat (3) PP HKFN (Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional) dijelaskan bahwa dalam pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh unit yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan utang pada perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu perlu dibentuk Unit Pengelola Utang Daerah (UPUD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal ini, dijelaskan sebagai berikut.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang telah meletakkan dasar-dasar penyempurnaan dan penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan bernegara. Upaya tersebut dimanifestasikan dalam berbagai redesain instrumen utama desentralisasi fiskal yang tidak hanya melalui TKD, pajak daerah, dan retribusi daerah, melainkan juga melalui sinergi kebijakan fiskal nasional, Pembiayaan Utang Daerah, DAD, dan Sinergi Pendanaan.
- Dalam rangka mendukung Daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Daerah dapat mengakses sumber-sumber Pembiayaan Utang Daerah baik yang berskema konvensional maupun syariah, yang meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah.
- Sebagai dasar pelaksanaan Pembiayaan Utang Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN) telah mengatur seluruh aspek mengenai Pembiayaan Utang Daerah, antara lain mulai dari prinsip umum, prosedur dan tahapan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi, hingga kewajiban dan sanksi atas pelaksanaan Pembiayaan Utang Daerah.

Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi Daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan Pembiayaan Utang Daerah.

- Selain itu, dengan terbatasnya pendanaan pembangunan Infrastruktur Daerah, melalui PP HKFN ini, Pemerintah juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan adanya sinergi antar-sumber pendapatan dan/atau Pembiayaan Utang Daerah, baik dari PAD, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, kerja sama antar-Daerah, dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha, sehingga diharapkan setiap program dan kegiatan pembangunan terlaksana secara tersinergi, sehingga alokasi sumberdaya dapat dimanfaatkan secara lebih efisien.
- Untuk itu, peningkatan kapasitas fiskal Daerah dalam lima tahun ke depan akan diarahkan pada kebijakan pembiayaan Daerah melalui optimalisasi Penerimaan Pinjaman Daerah. Hal tersebut akan dilaksanakan melalui pembentukan Unit Pengelola Utang Daerah (UPUD) sebagaimana diamanatkan Pasal 63 ayat (3) PP-HKFN.

Melalui mekanisme pembiayaan dengan skema yang dibangun ini, maka terdapat 5 proyek strategis daerah yang perlu diprioritaskan dan difokuskan untuk dicapai dalam pembangunan Seram Bagian Timur 5 tahun kedepan, 2025 – 2030, yaitu:

1. Proyek SPAM dan Hidrant Umum Kota Bula **(pembiayaannya pada Dinas PUPR);**
2. Pembangunan SPBE **(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (pembiayaannya pada Dinas Infokom);**
3. Pembangunan kawasan industri East Seram Agroindustrial Park (ESAP) **(pembiayaannya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);**
4. Proyek Strategis Nasional Hilirisasi Sagu SBT **(PSN Hilirisasi Sagu SBT) (pembiayaannya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan);**
5. Pinjaman Daerah dalam rangka penyertaan modal kepada BUMD berupa penugasan dari Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai PSN Hilirisasi Sagu SBT **(pembiayaan pendukungnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).**

Proyek tersebut perlu dimasukkan dalam daftar indikasi kegiatan prioritas dan pembiayaan pendukungnya dimasukkan pada masing-masing OPD terkait seperti telah disebutkan diatas. Terkait pembiayaan dalam bentuk mekanisme Pinjaman Daerah, Unit Pengelola Utang Daerah (UPUD) yang dibentuk akan mengusulkan dalam bentuk proposal/usulan dengan format dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan

Penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tidak terlepas dari identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Permasalahan yang terjadi merupakan cerminan dari masih adanya kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

Permasalahan tersebut muncul baik dalam aspek pembangunan manusia, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim, geografi wilayah kepulauan, serta dinamika global dan nasional juga turut memengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah.

2.3.1.1. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi

Dari aspek geografis dan demografis, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Degradasi fungsi daerah aliran sungai (DAS)
- b. Meningkatnya risiko banjir dan longsor
- c. Pengelolaan kawasan konservasi belum optimal
- d. Adanya kesenjangan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah
- e. Ketersediaan air bersih belum merata
- f. Sistem irigasi pertanian belum memadai
- g. Nilai ekonomi sektor kelautan/perikanan belum maksimal
- h. Pariwisata belum dikembangkan sebagai sektor strategis
- i. Kerentanan terhadap perubahan iklim

2.3.1.2. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi
- b. Persentase prevalensi stunting sebesar 35% dengan kategori **"awas"**
- c. Infrastruktur dan mutu layanan pendidikan belum merata
- d. Akses dan pemanfaatan layanan kesehatan belum inklusif
- e. Tingkat pengangguran belum terserap secara optimal
- f. Numerasi siswa masih pada kategori **"Kurang"** di semua jenjang
- g. Keterampilan digital dan akses teknologi belum merata
- h. Menurunnya Kualitas keluarga
- i. Ketimpangan gender belum terselesaikan secara menyeluruh
- j. Erosi budaya dan bahasa lokal
- k. Literasi digital masyarakat masih rendah
- l. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam UMKM

2.3.1.3. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing

- a. Kinerja sektor industri pengolahan belum maksimal
- b. Rendahnya nilai ekspor komoditas unggulan

- c. Investasi sektor produktif belum optimal
- d. Kapasitas inovasi daerah tergolong rendah (Indeks Inovasi Daerah 2024: **61,01**, kategori *kurang inovatif*)
- e. Ekonomi kreatif belum berkembang signifikan
- f. Produktivitas tenaga kerja masih rendah
- g. Jumlah desa tertinggal masih tinggi (> 37%)
- h. Ketahanan ekonomi lokal antarwilayah timpang
- i. Akses hunian layak masih terbatas
- j. Daya saing lingkungan belum kuat (Pilar lingkungan Indeks Ekonomi Hijau stagnan di **64-65**)
- k. Pengelolaan ekonomi biru belum maksimal
- l. Ketimpangan kualitas infrastruktur antarwilayah
- m. Literasi dan pemanfaatan TIK belum merata
- n. SPBE belum merata antar perangkat daerah

2.3.1.4. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

- a. Keterbatasan dan Ketidakmerataan Sumber Daya Pendidik
- b. Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Tidak Memadai
- c. Rendahnya Mutu dan Standar Layanan Pendidikan
- d. Tata Kelola dan Sistem Manajemen Pendidikan yang Lemah
- e. Keterbatasan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
- f. Pelestarian dan Pengembangan Budaya yang Belum Maksimal
- g. Pembinaan Olahraga yang Belum Sistematis
- h. Integrasi dan Penyelarasan Program Lintas Bidang yang Lemah
- i. Sarana atraksi seni dan budaya relatif kurang baik secara kualitas maupun kuantitas
- j. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya
- k. Pencapaian SPM belum 100%
- l. Belum meratanya sarana prasarana pendidikan dasar
- m. Mutu Pendidikan Belum Optimal
- n. Penguatan Pendidikan Karakter belum optimal
- o. Tata Kelola Pendidikan belum memadai
- p. Tenaga pendidik dan kependidikan belum memiliki kompetensi sesuai standar
- q. Belum meratanya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan

A2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- a. Kesenjangan Ketersediaan dan Kualitas SDM Kesehatan
- b. Tingginya angka kematian ibu dan anak dan stunting
- c. Belum tercapainya SPM Kesehatan dan masih banyaknya fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi menunjukkan adanya kesenjangan dalam standar pelayanan

- d. Peningkatan Beban Penyakit Ganda (Double Burden of Disease)
- e. Adanya Kesenjangan Infrastruktur dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- f. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
- g. Penanganan HIV/AIDS yang Belum Optimal
- h. Pelayanan Kesehatan bagi Kelompok Rentan (Balita dan Lansia) belum optimal
- i. Angka kesakitan akibat penyakit berbasis lingkungan masih cukup tinggi (TBC, Diare, DBD, Pneumonia, COVID 19 dll)
- j. Angka Kejadian Penyakit Tidak Menular cukup tinggi

A3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Ketidakselarasan Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- b. Kerentanan Terhadap Bencana Banjir dan Permasalahan Drainase
- c. Defisiensi Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik
- d. Lemahnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- e. Keterbatasan Sistem Informasi dan Teknologi Penataan Ruang
- f. Belum semua jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap
- g. Belum semua jaringan irigasi yang ada dalam kondisi baik
- h. Belum semua penduduk memiliki akses air minum dan sanitasi (limbah domestik)
- i. Masih kurangnya ketaatan terhadap IMB/PBG

A4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanian

- a. Tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- b. Belum Terintegrasinya Penanganan Kawasan Kumuh
- c. Keterbatasan Akses Infrastruktur Dasar (Air Bersih, Sanitasi, Drainase)
- d. Masih Terbatasnya Akses Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- e. Masih adanya kawasan kumuh yang belum ditangani
- f. Belum Tersedianya Database Infrastruktur dan Perumahan yang Komprehensif
- g. Masih Belum Jelasnya Status Hukum Aset Tanah (Sertifikasi, Batas Wilayah)

A5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- a. Ancaman Konflik Sosial Masih Berpotensi Terjadi
- b. Penegakan Peraturan Daerah Belum Optimal
- c. Distribusi Informasi Rawan Bencana Belum Merata
- d. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Belum Menjangkau Semua Wilayah
- e. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Belum Merata

A6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- a. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
- b. Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- c. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Belum Optimal
- d. Data Fakir Miskin Belum Terupdate Secara Komprehensif
- e. Belum Optimalnya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalangan Perusahaan

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

B1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi

- a. Belum Tercukupinya Tenaga Kerja Terampil dan Berkualitas
- b. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
- c. Rendahnya Kompetensi Pencari Kerja
- d. Ketidaksesuaian Kualifikasi Tenaga Kerja dengan Kebutuhan Dunia Usaha
- e. Penempatan Kerja Masih Belum Optimal

B2. Urusan Perlindungan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya Optimalisasi Peran Jejaring Penanganan Anak dan Perempuan
- b. Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi Belum Maksimal
- c. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik dan Pengambilan Keputusan
- d. Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO
- e. Implementasi Kabupaten Layak Anak Belum Optimal
- f. Lemahnya Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
- g. Belum optimalnya pencapaian Indeks Desa
- h. Masih ditemukannya desa dengan status desa tertinggal
- i. Belum optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)
- j. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa

B3. Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan

- a. Ketahanan Pangan Masyarakat Belum Optimal
- b. Belum Optimalnya Pemanfaatan Pangan Lokal
- c. Masih Lemahnya Penerapan Pola Pangan Harapan (PPH)
- d. Masih Ditemukan Desa Rawan Pangan
- e. Tingginya Ketergantungan terhadap Beras
- f. Belum Optimalnya Ketersediaan dan Fasilitasi Pengembangan Pangan Pokok di Masyarakat

B4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- a. Meningkatnya Risiko Bencana dan Alih Fungsi Lahan di Kawasan Rawan
- b. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Belum Optimal
- c. Pengelolaan Sampah Belum Mengadopsi Teknologi Efektif

- d. Rendahnya Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan
- e. Belum Terbangunnya Sistem Manajemen Pengelolaan Lingkungan Terpadu
- f. Belum Meratanya Layanan Pengelolaan Sampah
- g. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah (Indeks IKLH)
- h. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan RTH Belum Optimal

B5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Ketidaksesuaian Domisili dengan Data Kependudukan
- b. Akses Terbatas terhadap Layanan Digital Adminduk
- c. Kurangnya Pengawasan Terhadap SOP Pelayanan Adminduk
- d. Kualitas dan Kuantitas SDM serta Sarpras Masih Terbatas
- e. Belum Seluruh Penduduk Memiliki KTP Elektronik
- f. Masih Banyak Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran
- g. Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

B6. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
- b. Tingginya Total Fertility Rate (TFR)

B7. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- a. Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum
- b. Belum terkonsepnya pelayanan sarana prasarana dan perlengkapan jalan baik dari ketersediaan dan fungsinya
- c. Belum terbangunnya beberapa terminal tipe C

B8. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Persandian

- a. Ketersediaan Data Statistik Sektorial Belum Optimal
- b. Minimnya Kesadaran Pentingnya Data bagi Perangkat Daerah
- c. Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Satu Data Daerah
- d. Kurangnya Validasi dan Akurasi Data Digital
- e. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Belum Merata
- f. Diseminasi dan Distribusi Informasi Belum Terstruktur
- g. Penanganan Persandian Masih Lemah

B9. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

- a. Belum berkembangnya ekosistem kewirausahaan dan regenerasi pelaku usaha baru.
- b. Lemahnya promosi, branding, dan akses pasar produk lokal.
- c. Kurangnya inovasi dan teknologi dalam pengembangan UMKM dan IKM.
- d. Belum tersusunnya kebijakan induk industri daerah (RPIK) sebagai amanat UU.

- e. Kondisi fisik pasar tradisional yang tidak layak pakai dan tidak menarik.
- f. Rendahnya literasi manajerial dan akses pendanaan UMKM/IKM

B10. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Masih kurangnya optimalisasi pengolahan data investasi serta data potensi investasi Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai dorongan atau penunjang investasi daerah
- b. Masih perlunya peningkatan sistim pelayanan investasi yang berbasis TIK yang terintegrasi secara nasional

B11. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat
- b. Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal
- c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib system tata kearsipan

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

C1. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- a. Rendahnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder utama pariwisata.
- b. Belum tersedianya amenities dan infrastruktur dasar yang layak di lokasi-lokasi wisata unggulan.
- c. Lemahnya branding dan promosi destinasi wisata, baik secara lokal maupun digital.
- d. Tata kelola pariwisata belum berbasis sistem manajemen destinasi yang profesional dan partisipatif.
- e. Sektor ekonomi kreatif belum terintegrasi sebagai penguat produk dan pengalaman wisata.
- f. Belum ada strategi terpadu untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor wisata ke masyarakat sekitar

C2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- a. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Terdata dan Terpantau
- b. Kualitas Komoditas, SDM, dan Sarpras Masih Rendah
- c. Minimnya Penggunaan Benih/Bibit Unggul Bersertifikat
- d. Kemitraan Kelembagaan Petani Masih Lemah
- e. Pemanfaatan Sarpras Produksi Belum Maksimal
- f. Produktivitas dan Produksi Pertanian Masih Belum Stabil
- g. Rendahnya Kompetensi Penyuluh Pertanian
- h. Standarisasi Keamanan Pangan Asal Hewan Belum Terpenuhi

C3. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

- a. Rendahnya Nilai Tambah Produk Perikanan
- b. Belum Optimalnya SDM, Sarpras, dan Mutu Produk
- c. Produksi dan Alokasi Jenis Ikan Budidaya dan Tangkap Belum Terarah
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Wisata Bahari Belum Optimal
- e. Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Inovasi Masih Rendah
- f. Belum Maksimalnya Perencanaan Pembangunan Berbasis Gugus Pulau
- g. Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Masih Terbatas
- h. Kualitas Produksi Garam Belum Optimal
- i. Konsumsi Ikan Masih Rendah (AKI 29 kg/kapita/tahun)

D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

D1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- a. Pengawasan Pelayanan Publik Belum Maksimal
- b. Kualitas Dokumen Perencanaan Masih Lemah
- c. Ketidaktepatan Antar-Perangkat Daerah dalam Penyusunan Indikator
- d. Pelanggaran Tata Kelola Administrasi
- e. Inkonsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan
- f. Data Tidak Lengkap dan Tidak Akurat

D2. Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

- a. Belum optimalnya manajemen aset daerah
- b. Potensi Pendapatan masih bisa ditingkatkan
- c. Kurangnya pemahaman penyusun Laporan Keuangan Pada OPD tentang penyusunan laporan keuangan
- d. Terdapat beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang pelaksanaannya terlambat
- e. Pelaksanaan Program/Kegiatan sangat tergantung pada OPD yang melaksanakannya

D3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

- a. Pengelolaan pendapatan dari retribusi Daerah belum optimal
- b. Pendapatan Sektor Retribusi Daerah belum optimal
- c. Masih belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan
- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak

D4. Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BPKSDM)

- a. Rendahnya Partisipasi ASN dalam Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
- b. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi

D5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Masih rendahnya kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana

D6. Pengawasan Inspektorat

- Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan di masyarakat.
- Penyelesaian Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum optimal
- Pelaksanaan Pengawasan yang belum optimal.

D7. Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam proses pelayanan anggota DPRD.
- Dukungan yang belum optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, termasuk dalam penyediaan dan pembaruan informasi, data, dan analisis.

2.3.1.4. Unsur Kewilayahan

Permasalahan yang teridentifikasi di wilayah kecamatan sebagai berikut:

PULAU GOROM - Terbatasnya akses layanan dasar - Tingkat Pendidikan dan Ketrampilan tenaga kerja rendah; - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	KESUI WATUBELA - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	TEOR - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	GOROM TIMUR - Terbatasnya akses layanan dasar - Tingkat Pendidikan dan Ketrampilan tenaga kerja rendah; - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal
PULAU PANJANG - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	SERAM TIMUR - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	TUTUK TOLU - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	KILMURY - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal
WERINAMA - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	SIWALALAT - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	BULA - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	BULA BARAT - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur belum memadai (Jalan dan Jaringan Internet) - Bendungan dan Saluran Irigasi tidak berfungsi (rusak) - Jalan tanir rusak dan tidak berfungsi optimal - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal
KIAN DARAT - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	SIRITAUN WIDA TIMUR - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	TELUK WARU - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	UKAR SENGAN - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal

Berdasarkan uraian permasalahan pada berbagai aspek, maka secara ringkas permasalahan pembangunan Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian permasalahan pada berbagai aspek, maka secara ringkas permasalahan pembangunan Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
2. Adanya keterbatasan dan belum meratanya akses pelayanan dasar
3. Persentase penduduk miskin yang masih tinggi
4. Angka stunting masih tinggi dengan laju penurunan yang fluktuatif dan belum signifikan
5. Pergerakan laju pertumbuhan ekonomi rendah
6. Kondisi ketahanan pangan masih rentan dan belum stabil
7. Kesenjangan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah masih tinggi
8. Belum meratanya akses dan masih rendahnya kualitas jaringan informasi dan telekomunikasi
9. Pergerakan hilirisasi potensi unggulan daerah rendah dan berjalan lambat
10. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sangat rendah dan fluktuatif

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pasal 164 ayat 2 dan 3 Permendagri 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis perangkat daerah. Rumusan isu strategis harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun panjang.

Dari analisis dan penelaahan terhadap dokumen evaluasi pembangunan, kondisi makro daerah, serta aspirasi masyarakat, telah diidentifikasi sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus utama pembangunan daerah kabupaten Seram Bagian Timur dalam periode RPJMD 2025–2029. Isu-isu strategis tersebut bersifat lintas sektor dan memerlukan pendekatan terpadu serta dukungan kebijakan yang konsisten.

1. Isu Strategis Global, Nasional dan Regional

Perkembangan dinamika global, nasional, dan regional menunjukkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur harus merespons berbagai isu strategis yang berpengaruh terhadap arah pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis pada setiap level menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap perubahan dan mampu mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tabel berikut menyajikan Isu Strategis Global, RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045.

Tabel 2.35. Isu Strategis Global, RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045

Isu Strategis		
Global	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045
1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Produktivitas Rendah	1. Tingkat Perekonomian rendah
	2. IPTEKIN dan Riset Lemah	2. Infrastruktur Dan Literasi Digital Rendah
	3. Deindustrialisasi Dini	3. IPTEKIN dan Riset Lemah
	4. Ekonomi Laut Belum Optimal	4. SDM berdaya saing terbatas
	5. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	5. Kemitraan dalam pembangunan belum optimal
	6. Integrasi Domestik Terbatas	6. Pelestarian budaya belum optimal dan potensi instabilitas sosial
	7. Kualitas SDM yang makin rendah	7. Risiko bencana, ancaman perubahan iklim dan kerentanan daya dukung wilayah
	8. Kemiskinan	8. Kesenjangan antar wilayah
	9. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	
	10. Pembangunan belum berkelanjutan	
	11. Tata kelola pemerintahan belum optimal	
	12. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	
	13. Kapasitas dan Penegakan Hukum masih lemah	

Sementara itu, isu strategis jangka menengah mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Maluku sebagai berikut:

Tabel 2.36. Isu Strategis RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029

Isu Strategis	
RPJMN WILAYAH MALUKU 2025-2029	RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029
1. Masih minimnya hilirisasi komoditas unggulan pada sektor perikanan,	1. Belum Optimalnya Infrastruktur Dasar Serta Infrastruktur Transportasi Dan

pertanian, (cengkih) dan pertambangan (minyak)	Telekomunikasi Untuk Meningkatkan Konektivitas Antar Pulau
2. Belum optimalnya diversifikasi ekonomi khususnya pada pengembangan sektor pariwisata	2. Kesenjangan Antar Wilayah
3. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan (tenaga pendidik dan kesehatan, serta sarana prasarana dan pengembangan kurikulum yang relevan)	3. SDM Yang Berdaya Saing Terbatas
4. Belum optimalnya penguatan ketahanan bencana dan perencanaan penanggulangan bencana	4. Belum Optimalnya Pengembangan IPTEKIN dan Riset
5. Masih minimnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekologis, pemberdayaan masyarakat lokal untuk pengelolaan SDA	5. Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Khususnya Hilirisasi Komoditas Unggulan
6. Belum optimalnya infrastruktur transportasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan konektivitas antar pulau	6. Resiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim Dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah
	7. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting
	8. Pelestarian Budaya Belum Optimal Dan Potensi Instabilitas Sosial
	9. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

2. Isu Strategis Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029

Isu Strategis jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2045 sebagai berikut:

- 1) SDM berdaya saing rendah
- 2) Kemiskinan dan pengangguran masih tinggi
- 3) Pertumbuhan ekonomi wilayah masih rendah
- 4) Tata Kelola dan penegakan hukum belum optimal
- 5) Penurunan Kualitas Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana Alam
- 6) Ancaman Terhadap Nilai-nilai Budaya Lokal
- 7) Aksesibilitas, infrastruktur dan konektivitas antar wilayah masih terbatas

3. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029

Adapun isu pembangunan berkelanjutan paling strategis berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029 antara lain:

- 1) Penurunan kualitas lingkungan dan pencemaran lingkungan

- 2) Ancaman perubahan iklim dan kebencanaan masih tinggi
- 3) Akses air minum dan sanitasi layak belum merata
- 4) Kemiskinan dan pengangguran masih tinggi
- 5) Pertumbuhan ekonomi wilayah masih rendah
- 6) Aksesibilitas, infrastruktur dan konektivitas antar wilayah masih terbatas
- 7) Tata kelola dan penegakan hukum belum optimal

4. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029

Dari hasil analisa dan sintesa keterkaitan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka teridentifikasi sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus utama pembangunan di kabupaten Seram Bagian Timur dalam periode 2025-2029. Adapun isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) **Kualitas SDM Belum Kompetitif.** Kualitas SDM Kabupaten Seram Bagian Timur masih menunjukkan kesenjangan signifikan dibandingkan kebutuhan pembangunan. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah, tercermin dari rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal dalam mengakses pekerjaan yang lebih produktif di sektor industri, jasa, maupun pengolahan hasil perikanan dan pertanian. Kondisi kesehatan masyarakat pun belum optimal, sebagaimana terlihat dari masih tingginya kasus stunting dan keterbatasan layanan kesehatan dasar. Distribusi fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak merata mengikuti pola sebaran permukiman yang tersebar pada 16 kecamatan dan 198 desa, termasuk 62 pulau kecil berpenghuni. Tantangan geografis dan kendala aksesibilitas membuat peningkatan kualitas SDM bergerak lambat, sehingga menghambat produktivitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi.

Tingginya stunting menjadi indikator penting lemahnya kualitas SDM di SBT. Masih terdapat desa-desa yang mengalami keterbatasan akses terhadap air minum layak dan sanitasi aman, padahal KLHS RPJMD menegaskan bahwa akses air minum dan sanitasi merupakan isu berkelanjutan paling strategis. Ketidacukupan gizi rumah tangga, rendahnya literasi kesehatan, dan terbatasnya jangkauan tenaga kesehatan memperburuk kondisi perkembangan anak. Dalam kondisi tersebut, kualitas SDM berada pada posisi yang rentan terhadap kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat menjadi agenda strategis pembangunan lima tahun mendatang.

- 2) **Rendahnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Ekonomi Daerah.** Struktur ekonomi Kabupaten SBT masih sangat mengandalkan sektor primer (perikanan, pertanian, dan perkebunan), namun belum mampu mendorong nilai tambah melalui hilirisasi dan industrialisasi lokal. Produksi hasil perikanan walaupun meningkat, namun hasil tangkapan masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Hal ini belum berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, karena belum terintegrasinya rantai pasok, pengolahan maupun distribusi.

Rendahnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi daerah, terlihat pada sektor perkebunan yang menunjukkan potensi besar, namun keterbatasan infrastruktur pengolahan pasca panen, minimnya teknologi budidaya, dan lemahnya akses pasar membuat sektor ini belum berkembang secara optimal. Sementara itu, sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan pariwisata alam yang potensial belum mampu menjadi pendorong diversifikasi ekonomi karena keterbatasan investasi dan kapasitas usaha lokal. Rendahnya nilai tambah ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi bergerak lambat dan berimplikasi pada tingginya kemiskinan.

- 3) **Terbatasnya konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar.** Terbatasnya konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar menjadi isu strategis pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Karakteristik geografis maupun fisiografis di daerah ini menciptakan tantangan besar bagi konektivitas karena wilayah kepulauan tersebar di puluhan pulau kecil. Kondisi jaringan jalan antar-kecamatan tidak merata, dengan wilayah timur dan selatan pulau memiliki topografi pegunungan hingga kemiringan lebih dari 45%. Pola aliran sungai dan bentang geomorfologi yang kompleks semakin mempengaruhi efektifitas pembangunan infrastruktur dasar.

Akses air minum dan sanitasi layak menjadi isu utama sebagaimana ditegaskan dalam KLHS. Daerah perbukitan dan pulau-pulau kecil memiliki keterbatasan sumber air tanah, sementara mandala air tanah di SBT (CAT Wahai dan CAT Waru) belum ditetapkan secara resmi, sehingga perencanaan infrastruktur air bersih sering tidak terintegrasi. Ketidakstabilan pasokan energi, lemahnya jaringan telekomunikasi, serta keterbatasan pelabuhan dan dermaga juga menghambat layanan publik dan mobilitas ekonomi. Ketergantungan terhadap cuaca memperlihatkan bahwa kerentanan geografis menjadi faktor utama terhambatnya konektivitas wilayah.

- 4) **Tingginya Kemiskinan dan Stunting.** Kemiskinan struktural masih menjadi tantangan utama Kabupaten SBT, dipicu oleh terbatasnya lapangan pekerjaan produktif, rendahnya keterampilan masyarakat, dan ketergantungan pada sektor primer tradisional. Belum berkembangnya industri pengolahan menyebabkan pendapatan rumah tangga tetap rendah, di tengah biaya logistik yang tinggi akibat konektivitas yang terbatas. Sebaran penduduk yang tidak merata di daratan pulau besar (seram timur) dan pulau-pulau kecil dengan akses pelayanan dasar rendah semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Stunting muncul sebagai salah satu indikator kesejahteraan yang paling krusial. Masalah gizi kronis dialami oleh rumah tangga yang menghadapi keterbatasan akses air minum layak dan sanitasi yang merata, sebagaimana ditekankan dalam KLHS bahwa isu ini merupakan isu keberlanjutan yang paling strategis. Wilayah-wilayah seperti Werinama, Kilmury, Teluk Waru, dan kecamatan-kecamatan yang tersebar di pulau-pulau kecil menjadi daerah dengan risiko tertinggi akibat minimnya layanan kesehatan dan ketergantungan terhadap sumber air permukaan yang rentan terhadap pencemaran. Tingginya kemiskinan dan stunting menciptakan lingkaran kerentanan sosial yang harus diputus melalui kebijakan

berbasis bukti dan intervensi lintas sektor.

- 5) **Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup serta Tingginya risiko bencana alam dan perubahan iklim.** Hasil KLHS menunjukkan bahwa penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten SBT menjadi isu paling strategis. Tekanan terhadap ekosistem pesisir, hutan, dan DAS semakin meningkat akibat konversi lahan permukiman, pertanian, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Kerusakan vegetasi ini semakin meningkat akibat penebangan, pertambahan permukiman, serta intrusi air laut yang mengancam zona pesisir. Secara hidroklimatologi, Kabupaten SBT rentan terhadap banjir, longsor, abrasi, dan kekeringan. Dengan 132 sungai besar dan kecil, serta DAS utama Masiwang, Bobot, Matakabu, dan Wai Bubi, dan di dorong dengan perubahan tutupan lahan yang masif terjadi sangat mempengaruhi dinamika banjir permukaan. Debit sungai di musim hujan meningkat drastis sehingga memicu banjir di wilayah dataran rendah. Wilayah pesisir juga menghadapi risiko perubahan iklim berupa kenaikan muka air laut, gelombang tinggi, dan intrusi air laut. Penguatan sistem mitigasi bencana dan pengendalian pencemaran menjadi prioritas untuk melindungi keberlanjutan sumber daya alam dan keselamatan masyarakat.
- 6) **Belum optimalnya pengembangan budaya dan pariwisata Lokal.** Potensi pariwisata Kabupaten SBT sangat besar, mencakup ekowisata bahari, wisata pegunungan, hutan karst, dan danau unik seperti Danau Sole di Pulau Manawaku yang merupakan danau asin satu-satunya di Maluku. Wilayah pesisir Pulau Gorom, pulau Panjang, dan Watubela juga memiliki terumbu karang dan pantai pasir putih yang cocok untuk wisata bahari. Namun, pengembangan sektor pariwisata masih berjalan lambat akibat minimnya infrastruktur destinasi, fasilitas pendukung, promosi, dan kelembagaan pariwisata. Selain itu, budaya lokal yang kaya termasuk seni tradisional, ritual adat, dan kuliner khas belum dimanfaatkan optimal sebagai daya tarik wisata berkelanjutan. Pariwisata memiliki peluang besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama karena sektor primer mengalami stagnasi nilai tambah. Namun, tanpa manajemen destinasi, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, dan investasi fasilitas pendukung, potensi ini masih jauh dari optimal. Pengembangan pariwisata juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan mengingat kerentanan ekologis wilayah yang tinggi.
- 7) **Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Layanan Publik.** Tata kelola pemerintahan di Kabupaten SBT masih menghadapi masalah mendasar berupa keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Dalam dokumen KLHS menegaskan bahwa "tata kelola dan penegakan hukum" merupakan salah satu isu strategis keberlanjutan dalam pembangunan daerah. Pada level pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan masih sangat terbatas, sehingga berbagai layanan administrasi berjalan lambat, mahal, dan kurang efisien. Selain itu, perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis data dan belum responsif terhadap risiko perubahan iklim serta kerentanan wilayah

kepulauan. Keterbatasan inovasi pelayanan publik berdampak pada rendahnya tingkat akses layanan dasar di wilayah terpencil dan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan penguatan sistem monitoring–evaluasi berbasis data menjadi fondasi penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.1. Visi dan Misi RPJMD 2025-2029

3.1.1. Visi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, terencana, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan lima tahunan. RPJMD ini disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih dengan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menjawab tantangan dan potensi yang berkembang di tingkat lokal, regional, maupun global.

Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai bagian integral dari Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang kaya, yang apabila dikelola dengan tepat dan berkelanjutan akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan kualitas hidup. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 hadir sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi modern, sejalan dengan semangat pembangunan nasional dan prinsip Industry 4.0.

Visi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai cerminan dari harapan masyarakat dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kemajuan yang berkeadilan dan merata. Visi ini menjadi arah sekaligus panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang partisipatif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.

Visi RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029

"Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045"

Visi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2045

Seram Bagian Timur Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan

Visi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur disusun berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029, maka Visi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Timur Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berbudi Luhur"

Sehat Mengandung makna sehat yang holistik mencakup kesehatan fisik, mental, sosial dan ekonomi yang berkembang secara harmonis dan berkelanjutan.

Cerdas Mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang baik terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai melalui Pendidikan formal maupun non formal secara berkelanjutan.

Sejahtera Mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian di tengah lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan.

Budi Luhur Mengandung makna memiliki karakter yang baik, moral yang kuat, kepemimpinan yang positif, respek terhadap sesama, penghargaan terhadap kebudayaan, kemampuan untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan perilaku yang mulia serta memegang teguh nilai-nilai agama.

Sasaran Visi RPJMD 2025-2030

Sasaran Visi RPJMD 2025-2030 terdiri atas 7(tujuh) indikator, yaitu (1) meningkatnya inklusifitas perekonomian daerah; (2) kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang; (3) meningkatnya daya saing daerah; (4) meningkatnya layanan publik; (5) daya saing SDM meningkat; (6) kesejahteraan sosial dan budaya meningkat; dan (7) intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Lebih lanjut proyeksi setiap indikator untuk kurun waktu lima tahun (2025-2030) dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029

Indikator Sasaran Visi RPJMD	Target 2025	Target 2029	Keterangan
1. Meningkatnya inklusifitas perekonomian daerah			
a. PDRB per kapita meningkat (xRp.Juta)	15,50	19,33	Selaras RPJMD Provinsi
b. Kontribusi PDRB industri pengolahan produk kelautan dan perikanan meningkat	1,71	1,77	
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,40	6,40	Selaras RPJMD Provinsi
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang			
a. Tingkat kemiskinan menurun	15,76	12,04	Selaras RPJMD Provinsi
b. Prevalensi stunting menurun	33,25	27,08	
c. Rasio Gini menurun	0,1833	0,1127	Selaras RPJMD Provinsi
d. Kontribusi PDRB Kabupaten SBT Terhadap Provinsi Maluku	5,91	5,91	Selaras RPJMD Provinsi
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,99	2,70	Selaras RPJMD Provinsi

Indikator Sasaran Visi RPJMD	Target 2025	Target 2029	Keterangan
3. Meningkatkan daya saing daerah			
a. Indeks daya saing daerah meningkat	3,00	3,19	
4. Meningkatkan layanan publik			
a. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat	CC	BB	
b. Indeks Layanan Publik meningkat	2,09 Cukup	2,71 Baik	
c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meningkat	2,57 Cukup	3,33 Baik	
5. Daya Saing SDM Meningkat			
a. Indeks Modal Manusia/IPM Meningkat	70,88	73,44	Selaras RPJMD Provinsi
b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Meningkat	52,68	63,50	
6. Kesejahteraan Sosial dan Budaya Meningkat			
a. Indeks Pembangunan Kebudayaan Meningkat	63,51	72,66	
7. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission			
a. Penurunan intensitas Emisi GRK Meningkat	na	na	
b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	84,47	85,16	Selaras RPJMD Provinsi

3.1.2. Misi

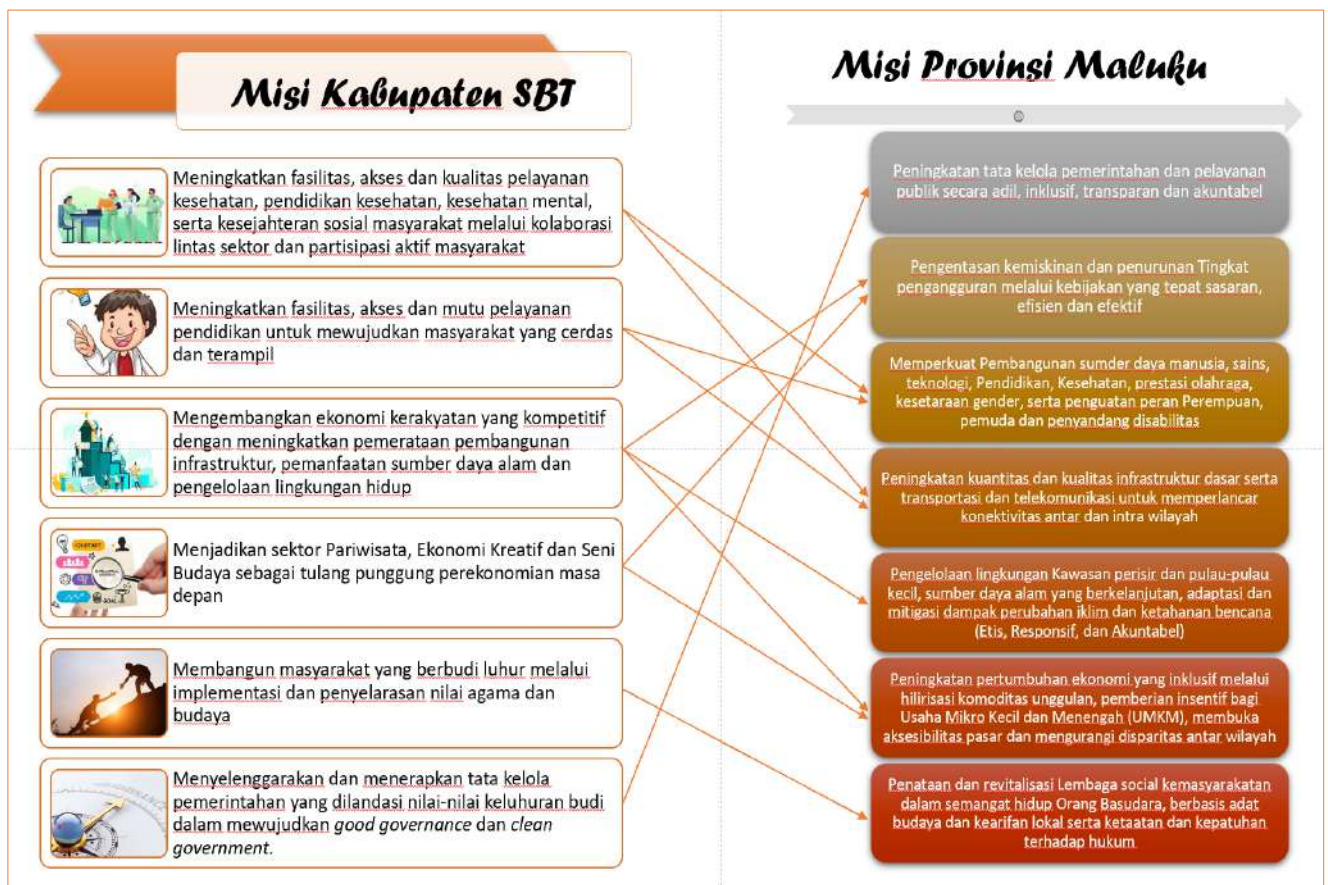
Untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025–2029, dibutuhkan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan berkesinambungan. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui misi pembangunan yang menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, serta langkah strategis pemerintah daerah selama lima tahun ke depan.

Misi pembangunan daerah tidak hanya berperan sebagai penjabaran dari visi, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pembangunan ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Misi ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara potensi daerah, aspirasi masyarakat, dan kebijakan nasional, agar seluruh elemen pembangunan berjalan harmonis dan memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Timur.

Selain itu, misi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur 2025–2029 juga disusun dengan mempertimbangkan tantangan global seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi digital, transformasi ekonomi, dan dinamika sosial yang semakin kompleks. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif, responsif, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

1. Meningkatkan fasilitas, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat
2. Meningkatkan fasilitas, akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kompetitif dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Menjadikan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya sebagai tulang punggung perekonomian masa depan
5. Membangun masyarakat yang berbudi luhur melalui implementasi dan penyalarsan nilai agama dan budaya
6. Menyelenggarakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilandasi nilai-nilai keluhuran budi dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur ini telah diselaraskan dengan rumusan Misi RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029 seperti terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Penyalarsan Misi RPJMD Kabupaten SBT Dengan Misi RPJMD Provinsi Maluku

3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.2.1. Tujuan

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025–2029 menetapkan tujuan pembangunan sebagai kompas arah pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan daerah disusun sebagai bentuk penjabaran konkret dari visi dan misi, yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan program serta mengukur capaian pembangunan dalam skala yang lebih terstruktur, terukur, dan realistis. Tujuan ini menjadi landasan penting bagi perencanaan program prioritas yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta tantangan yang dihadapi, baik dari aspek lokal, nasional, maupun global.

Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan letak geografis yang strategis, dituntut untuk mampu mengelola potensi tersebut secara optimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan RPJMD 2025–2029 dirancang untuk memperjelas sasaran pembangunan di tiap sektor sehingga setiap kebijakan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang nyata, berkeadilan, dan berdampak luas bagi masyarakat.

3.2.2. Sasaran

Sebagai tindak lanjut dari perumusan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025–2029 menetapkan sasaran pembangunan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil. Sasaran pembangunan ini disusun untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran pembangunan merupakan bagian penting dalam kerangka perencanaan strategis, yang menjadi alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di berbagai sektor. Penetapan sasaran ini tidak hanya mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi juga tantangan pembangunan yang terus berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, termasuk isu ketahanan ekonomi, ketimpangan sosial, perubahan iklim, transformasi digital, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2030

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
	Visi: <i>Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Timur Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berbudi Luhur</i>									
	Misi 1: Meningkatkan fasilitas, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat									
		Tujuan 1.1 Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Thn)	68.73	69.69	70.67	71.66	72.66	73.68	74.71
			2. Prevalansi stunting (%)	35.00	33.25	31.59	30.01	28.51	27.08	25.73
		Sasaran 1.1.1 Terpenuhinya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Thn)	68.73	69.69	70.67	71.66	72.66	73.68	74.71

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
		di seluruh wilayah secara merata								
			2. Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)	5.46	5.16	4.74	4.32	3.9	3.48	3.06
			3. Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk							
		Sasaran 1.1.2 Terselenggaranya program kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	1. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	56.11	59.67	63.46	67.49	71.78	76.34	81.19
			2. Cakupan penemuan & pengobatan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)(%)							
			3. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate (%))							
		Sasaran 1.1.3 Meningkatnya partisipasi	1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	40.41	40.83	41.24	41.64	42.05	42.45	42.86

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
		masyarakat dalam program kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial	Ketenagakerjaan Provinsi (%)							
			2. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22.91	22.97	23.03	23.09	23.15	23.21	23.27
			3. Indeks Ketahanan Sosial	0.681	0.683	0.685	0.687	0.689	0.691	0.693
			4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.24	3.17	3.11	3.04	2.98	2.91	2.85
			5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52.53	54.39	56.1	57.81	59.52	61.23	62.94
			6. Tingkat Kemiskinan (%)	21.03	20.40	19.79	19.19	18.62	18.06	17.52
Misi 2: Meningkatkan fasilitas, akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil										
		Tujuan 2.1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.28	71.97	73.69	75.46	77.27	79.13	81.03

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
		pendidik dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang moderen dan inovatif								
		Sasaran 2.1.1 Tersedianya akses pendidikan yang mudah dan merata di seluruh wilayah	1. Angka Literasi/Numerasi							
			2. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)	9.00	9.17	9.33	9.49	9.66	9.82	9.98
			3. Harapan lama sekolah	12.92	12.96	13.00	13.04	13.08	13.11	13.15
			4. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)	63.00	63.32	63.63	63.95	64.26	64.58	64.89
		Sasaran 2.1.2 Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan relevansi kurikulum berbasis kebutuhan lokal	1. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71.25	71.61	71.96	72.32	72.68	73.03	73.39

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
		Sasaran 2.1.3 Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang modern, aman, dan mendukung proses belajar mengajar	1. Indeks Literasi Digital	3.79	3.92	4.05	4.19	4.33	4.48	4.63
			2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	50.28	52.68	55.20	57.84	60.61	63.50	66.54
			3. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	37.98	38.39	38.80	39.22	39.63	40.04	40.46
Misi 3: Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kompetitif dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam lokal unggulan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup										
		Tujuan 3.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam unggulan daerah yang bertanggung jawab dan	1. PDRB per kapita	14.98	15,084.23	15,280.94	15,477.65	15,674.36	15,871.07	16,067.78

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
		pengelolaan lingkungan hidup yang efektif								
			2. Pertumbuhan ekonomi	3.58	3.78	3.98	4.20	4.43	4.68	4.94
		Sasaran 3.1.1 Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata	1. Indeks Infrastruktur	2.96	2.99	3.02	3.05	3.08	3.11	2.99
			2. Gambaran Indeks Desa (Indeks)	0.6281 Berkembang	0.6450 Berkembang	0.662 Berkembang	0.6790 Berkembang	0.6970 Berkembang	0.7160 Maju	0.7340 Maju
			3. Konsumsi Listrik per kapita (Kwh)	2023.71	2116.03	2199.05	2282.06	2365.08	2448.09	2531.11
		Sasaran 3.1.2 Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal	1. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi							
			2. Indeks Ekonomi Hijau (proxy Maluku)	53,40*	53.71	54.01	54.32	54.63	54.94	55.26
			3. Indeks ekonomi biru	67,60*	67.99	68.38	68.77	69.16	69.55	69.95
			4. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.17	0.185	0.198	0.213	0.229	0.246	0.264
			5. Tingkat Inflasi							
			6. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)							

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
			7. Total Kredit/PDRB (%)							
			8. Inklusi Keuangan (%)	2.35	2.49	2.56	2.63	2.70	2.77	2.80
			9. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.464	0.482	0.499	0.517	0.535	0.552	0.570
			10. Rasio Gini	0.201	0.2002	0.1994	0.1986	0.1978	0.1970	0.1962
			11. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	1.70	1.71	1.73	1.74	1.76	1.77	1.79
			12. Pembentukan modal tetap bruto (PDRB)	1.318.17	1,361.40	1,406.04	1,452.15	1,499.77	1,548.96	1,599.75
			13. Ekspor barang dan jasa (PDRB)	-1316.39	-1230.76	-1150.70	-1075.85	-1005.87	-940.44	-879.26
		Sasaran 3.1.3 Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82.62	84.47	84.64	84.81	84.98	85.16	85.33
			2. Indeks Risiko Bencana	125.19	121.81	118.52	115.32	112.21	109.18	106.23
			3. Indeks Ketahanan Lingkungan	0.739	0.746	0.753	0.760	0.767	0.774	0.781
			4. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	76.11	76.87	77.64	78.42	79.20	79.99	80.79
			5. Rumah tangga dengan akses hunian layak	57.19	58.33	59.50	60.69	61.90	63.14	64.41
			5. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	33.34	30.01	27.01	24.30	21.87	19.69	17.72

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
			(Prevalence of Undernourishment)(%)							
			6. Indeks Ketahanan Pangan	70.57	72.69	74.87	77.11	79.43	81.81	84.26
			7. Kapasitas air baku (m3/detik)							
			8. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)							
			9. Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum (%)	80.48	80.85	81.26	81.66	82.07	82.48	82.89
			10. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	21230.0	22087.69	22529.45	22980.03	23439.64	23908.43	24386.6
Misi 4: Menjadikan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya sebagai tulang punggung perekonomian masa depan										
		Tujuan 4.1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi pariwisata unggulan,	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan	61.41*	63.51	65.68	67.93	70.25	72.66	75.14

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
		peningkatan daya saing dan inovasi kolaboratif yang berbasis kearifan lokal								
		Sasaran 4.1.1 Tumbuhnya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mandiri dan inovatif	1. Indeks Kewirausahaan							
			2. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB							
			3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah							
		Sasaran 4.1.2 Terbangunnya destinasi wisata unggulan yang berstandar nasional dan internasional	1. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	36	43	48	54	59	65	72
			2. Kontribusi PDRB Penyediaan Makan Minum (%)	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.69

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
		Sasaran 4.1.3 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah	1. Kontribusi PDRB Pariwisata Bahari (%)	0,25	0,57	0,77	0,96	1,16	1,35	1,67
			2. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)							
Misi 5: Membangun masyarakat yang berbudi luhur melalui implementasi dan penyelarasan nilai agama dan budaya										
		Tujuan 5.1 Membangun masyarakat yang harmonis, berbudi luhur dan toleran melalui penguatan karakter, moral dan etik sosial yang berlandaskan nilai agama dan budaya	1. Indeks Modal Sosial							
		Sasaran 5.1.1 Terbentuknya masyarakat yang berkarakter dan beretika berdasarkan nilai agama dan budaya	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	80.54	81.35	82.16	82.98	83.81	84.65	85.49

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
			2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	61.41*	63.51	65.68	67.93	70.25	72.66	75.14
		Sasaran 5.1.2 Meningkatnya peran aktif keluarga dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter peserta didik	1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	74.78	75.57	76.32	77.09	77.86	78.64	80.21
			2. Indeks Pembangunan Keluarga (Proxy)	58.86	61.82	64.94	68.20	71.64	75.24	79.03
			3. Indeks Pembangunan Pemuda	55.49*	56.67	57.88	59.12	60.38	61.67	62.98
			4. Indeks Ketimpangan Gender	0.611	0.605	0.599	0.593	0.587	0.581	0.575
			5. Indeks Pembangunan Gender	88.83	89.06	89.29	89.52	89.75	89.99	90.22
			6. Indeks Pemberdayaan Gender	58.26	59.46	60.69	61.95	63.23	64.54	65.87
		Sasaran 5.1.3 Terpeliharanya harmoni sosial antar kelompok masyarakat yang beragam	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)							
			2. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman							

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
			Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)							
			3. Indeks Pembangunan Hukum							
			4. Indeks Demokrasi Indonesia	70,10*	73.60	77.28	81.15	85.20	89.46	93.94
Misi 6: Menyelenggarakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilandasi nilai-nilai keluhuran budi dalam mewujudkan good governance dan clean government										
		Tujuan 6.1 Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal	1. Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	B	BB	BB	A
			2. Indeks Layanan Publik	1.96	2.09	2.23	2.38	2.54	2.71	2.89
			2.1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	72.65	73.44	74.21	74.98	75.75	76.52	77.29

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
			3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.41	2.57	2.74	2.92	3.12	3.33	3.55
			4. Indeks Daya Saing Daerah	2.88	3.00	3.05	3.10	3.14	3.19	3.24
		Sasaran 6.1.1 Terwujudnya sistem pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	1. Nilai SAKIP	CC	B	B	B	BB	BB	A
			2. Indeks Merit							
			3. Indeks Inovasi Daerah	33.25	37.74	42.83	48.62	55.18	62.63	71.08
			4. Indeks Reformasi Hukum							
			5. Indeks Integritas Nasional	71.55	72.16	72.75	73.35	73.94	74.54	75.13
			6. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Sasaran 6.1.2 Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang cepat, tepat, dan profesional	1. Indeks Kepuasan Masyarakat							

No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2030)
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	
			2. Indeks Pelayanan Publik	1.96	2.09	2.23	2.38	2.54	2.71	2.89
			2.1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	72.65	73.44	74.21	74.98	75.75	76.52	77.29
		Sasaran 6.1.3 Terbentuknya budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah	1. Indeks Persepsi Korupsi							

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, terukur, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat, adaptif, dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen kebijakan yang memuat strategi pembangunan dan arah kebijakan pemerintah daerah selama lima tahun mendatang.

Strategi pembangunan daerah merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Strategi ini bertujuan untuk mengarahkan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar bersinergi dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dengan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan daerah disusun sebagai panduan dalam perumusan program, kegiatan, dan penganggaran yang berorientasi pada hasil, guna memastikan setiap langkah pembangunan berjalan selaras dengan prioritas nasional, provinsi, dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Arah kebijakan ini juga mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, termasuk perkembangan teknologi digital, ketahanan ekonomi, perubahan iklim, penguatan infrastruktur, dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Tabel 3.3. Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
<i>Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Timur Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berbudi Luhur</i>	1. Meningkatkan fasilitas, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan social masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat	1.1.Penguatan kapasitas dan kualitas layanan fasilitas kesehatan yang merata	1.1.1.Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal
			1.1.2.Meningkatkan kualitas tenaga medis dan tenaga sosial yang profesional dan berkompeten
		1.2. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam sistem kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan so	1.2.1.Pengembangan program kesehatan berbasis masyarakat, termasuk kesehatan mental dan rehabilitasi sosial
		1.3.Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan sosial	1.3.1.Penguatan kerjasama pemerintah dengan swasta, akademisi, dan komunitas dalam penyelenggaraan layanan sosial dan kesehatan
	2.Meningkatkan fasilitas, akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil	2.1.Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah	2.1.1.Peningkatan anggaran dan alokasi sumber daya pendidikan yang berkeadilan dan proporsional

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
		2.2.Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan relevansi kurikulum berbasis kebutuhan lokal	2.2.1.Pengembangan pelatihan dan sertifikasi profesional untuk guru dan tenaga pendidik
			2.2.2.Revitalisasi kurikulum berbasis keunggulan lokal dan kebutuhan pasar kerja
		2.3.Modernisasi sarana dan prasarana pendidikan	2.3.1.Pembangunan, rehabilitasi, dan digitalisasi sarana prasarana pendidikan
	3.Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kompetitif dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup	3.1.Pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan wilayah	3.1.1.Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan telekomunikasi
		3.2.Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan	3.2.1.Pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal
			3.2.2.Penguatan regulasi dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan
		3.3.Penguatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana dan ekonomi hijau	3.3.1.Mendorong implementasi program lingkungan hidup berbasis mitigasi perubahan iklim

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
	4. Menjadikan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya sebagai tulang punggung perekonomian masa depan	4.1. Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal	4.1.1. Pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung destinasi wisata yang berkualitas
		4.2. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan seni budaya	4.2.1. Fasilitasi pelatihan, inkubasi usaha, dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif
		4.3. Peningkatan promosi destinasi wisata unggulan dan produk kreatif daerah	4.3.1. Optimalisasi promosi pariwisata berbasis digital marketing dan event pariwisata unggulan
			4.3.2. Pelestarian warisan budaya dan pengembangan seni budaya lokal sebagai daya tarik ekonomi
	5. Membangun masyarakat yang berbudi luhur melalui implementasi dan penyelarasan nilai agama dan budaya	5.1. Penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	5.1.1. Penguatan program pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan formal dan non-formal
		5.2. Peningkatan peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam pembentukan karakter	5.2.1. Penyediaan ruang dialog lintas agama, budaya, dan generasi
		5.3. Pemeliharaan harmoni sosial, toleransi, dan keberagaman	5.3.1. Pengembangan dan pelestarian kearifan lokal yang mendorong toleransi dan kerukunan hidup bermasyarakat

Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
			5.3.2.Penguatan peran lembaga keagamaan dan adat dalam membina masyarakat
	6.Menyelenggarakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilandasi nilai-nilai keluhuran budi dalam mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	6.1.Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	6.1.1.Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendukung efisiensi dan transparansi layanan publik
		6.2.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan berbasis teknologi informasi	6.2.1.Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan prima
		6.3.Penguatan pengawasan internal untuk pencegahan korupsi dan mal-administrasi	6.3.1.Penguatan sistem audit, pengendalian internal, dan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas korupsi
			6.3.2.Optimalisasi peran pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipatif

3.4. Program Prioritas Daerah

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, terarah, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan program prioritas sebagai bagian penting dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Program prioritas ini disusun untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, memperkuat fondasi pembangunan, dan mendorong akselerasi pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah dirumuskan.

Program prioritas merupakan upaya nyata pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya berjalan sesuai rencana, namun juga mampu menghasilkan dampak langsung dan positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penetapan program-program prioritas ini berlandaskan pada potensi unggulan daerah, isu strategis yang berkembang, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan provinsi yang menjadi pedoman pembangunan.

Dalam menghadapi dinamika perubahan global, termasuk perkembangan teknologi, ekonomi digital, perubahan iklim, dan tantangan ketahanan pangan, Kabupaten Seram Bagian Timur berkomitmen untuk mengarahkan program prioritas pada sektor-sektor strategis, seperti penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan inovatif.

Program-Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur dirumuskan sebagai berikut:

1. Pusat Kesehatan Keliling. Bantuan fasilitas dan layanan pengobatan keliling sekaligus sebagai upaya edukasi kesehatan masyarakat dari kecamatan hingga pedesaan
2. Sehat Bersama Spesialis. Mendatangkan tenaga dokter dengan berbagai spesialisasi yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sekaligus sebagai langkah mempersiapkan RSUD Bula menjadi Rumah Sakit rujukan utama di Pulau Seram
3. SBT Pintar. Meningkatkan fasilitas, memperluas akses dan kesempatan belajar kepada tenaga pendidik dan peserta didik di seluruh desa
4. SBT Terampil. Mendorong penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan latihan keterampilan masyarakat berbasis sumber daya local dengan orientasi kebutuhan pasar
5. SBT Kuat. Meningkatkan konektifitas infrastruktur ekonomi dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup
6. SBT Kreatif. BUMD Perseroda berbentuk PT hasil revitalisasi direncanakan untuk menjalankan bisnis aneka usaha termasuk didalamnya ekonomi kreatif.
7. Masyarakat Berbudi Luhur. Mendorong implementasi nilai-nilai keluhuran budi di tengah masyarakat dengan meningkatkan pembangunan fasilitas dan penyelenggaraan event keagamaan dan kebudayaan
8. Aparatur Berbudi Luhur. Melakukan pembinaan dan pelatihan aparatur untuk mewujudkan prinsip good governance dan clean government berbasis nilai agama dan budaya

Berdasarkan program-program prioritas di atas, kemudian dijabarkan indikasi kegiatan prioritas untuk masing-masing program sebagai berikut;

Tabel 3.4. Program dan Indikasi Kegiatan Prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Kode				
			Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pusat Kesehatan Keliling	1. Peningkatan akses dan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan; Pengadaan dan optimalisasi ambulans laut dan Ambulans darat (mobile health service)	1	02	02	2.01	0007
		2. Implementasi dan optimalisasi program telemedicine (Jangka pendek kerjasama RSUD dengan RS Haulusi atau RS Leimena, telekonsultasi rutin dari kota besar, kunjungan lapangan dan praktek daring)	1	02	02	2..01	0025
		3. Pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu)	1	02	02	2.01	0001
		4. Pembangunan Puskesmas Baru (Desa Kampung Gorom, Amar Watu, Tamher Warat dan Kep. Watubela)	1	02	02	2.01	0001
		5. Peningkatan Kualitas RS Melalui Transformasi RSUD Bula Dari Tipe C ke Tipe B	1	02	02	2.04	0002
		6. Pengembangan RSUD Pulau Gorom	1	02	02	2.01	0022
		7. Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui Penanganan pneumonia, malaria dan Penyuluhan kesehatan keliling di	1	02	05	2.01	0001

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Kode				
			Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		masyarakat dan sekolah					
		8. Dialog interaktif di media	1	02	05	2.01	0001
		9. Pelatihan kader kesehatan desa	1	02	03	3.03	0002
2	Sehat Bersama Spesialis	1. Pelaksanaan skema insentif dan kontrak khusus dokter spesialis (Rumah Dinas, Insentif, kontrak jangka pendek dan menengah serta akses cuti rutin)	1	02	02	2.01	0004
		2. Program Magang tenaga dokter dengan biaya Pemda	1	02	03	3.03	0002
		3. Beasiswa Ikatan Dinas Spesialis Dasar Putra Daerah untuk penyakit dalam, anak, bedah, kandungan dan anestesi	1	02	03	3.03	0002
		4. Penguatan SDM kesehatan	1	02	03	3.03	0002
		5. Penguatan kolaborasi dan pendampingan	1	02	05	2.01	0001
		6. Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Lembaga Pendidikan (Program Wajib Kerja Dokter Spesialis secara Bergilir)	1	02	03	3.03	0002
		7. Kerjasama dengan PT. Unpatti agar RSUD Bula Jadi RS Pendidikan Satelit	1	02	02	2.01	0022
		8. Evaluasi dan monitoring kinerja serta kepuasan spesialis	1	02	02	3.02	0045
3	SBT Pintar	1. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah	1	01	02	2.01	0001
			1	01	02	2.02	0001
			1	01	02	2.03	0040
			1	01	02	2.04	0044
		2. Penyediaan transportasi sekolah di wilayah terpencil	X	XX	01	2.01	0002
		3. Pengadaan asrama siswa bagi pelajar di pulau-pulau yang melanjutkan pendidikan di pusat kecamatan/kabupaten	1	01	02	4.06	0009(Kewenangan Provinsi dan Pusat)
		4. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru (pelatihan dan	1	01	02	2.01	0049
			1	01	02	2.02	0060
			1	01	02	2.03	0039

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Kode				
			Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		workshop, sertifikasi, insentif dan penghargaan bagi guru berprestasi di daerah terpencil)	1	01	02	2.04	0042
		5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1	01	02	2.01	0014
			1	01	02	2.01	0011
			1	01	02	2.01	0010
			1	01	02	2.01	0032
			1	01	02	2.01	0033
			1	01	02	2.02	0016
			1	01	02	2.02	0017
			1	01	02	2.02	0018
			1	01	02	2.02	0025
		6. Integrasi teknologi dalam pendidikan (penggunaan TIK, pengadaan perangkat komputer dan akses internet sekolah)	1	01	02	2.03	0031
			1	01	02	2.04	0033
			1	01	02	2.01	0042
			1	01	02	2.02	0068
		7. Pengembangan platform pembelajaran daring untuk mendukung pembelajaran jarak jauh)	1	01	02	2.01	0035
			1	01	02	2.01	0036
			1	01	02	2.01	0037
			1	01	02	2.02	0048
			1	01	02	2.02	0049
			1	01	02	2.02	0050
		8. Program beasiswa dan dukungan pendidikan lanjutan	1	01	02	3.07	0001
			1	01	02	3.07	0002
			1	01	02	3.07	0003
		9. Program Sekolah Rakyat	1	01	02	2.01; 2.02	0001; 0001 (Menunggu Juknis)
4	SBT Terampil	1. Pelatihan pengolahan sagu dan produk turunannya	2	09	03	2.01	0009
		2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan pertanian	2	09	03	2.01	0009
			3	25	06	4.07	0001
		3. Pelatihan menjahit dan ecoprint bagi perempuan nelayan (pembuatan jilbab ecoprint, busana muslim khas SBT, dll)	3	26	05	2.02	0001
		4. Pelatihan pertanian berkelanjutan dan teknologi tepat guna	7	01	03	2.03	0005
		5. Pelatihan kewirausahaan dan manajemen UMKM	2	17	07	2.01	0015
		6. Pengolahan anyaman dan kerajinan alam/ekonomi kreatif	3	26	05	2.02	0001

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Kode				
			Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		(souvenir khas daerah)					
		7. Fasilitasi perizinan usaha UMKM	2	17	07	2.01	0003
5	SBT Kuat	1. Peningkatan dan pembangunan jalan penghubung antar kecamatan dan desa	1	03	10	2.01	0032;0034;0038;0040
		2. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas ruang terbuka hijau (smart and green development); dan pengelolaan risiko bencana serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut)	2	11	04	2.01	0004
		3. Penguatan infrastruktur penyediaan air untuk pemadaman kebakaran	1	03	03	2.01	0022
			1	05	04	2.01	0002
		4. Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan dermaga (terutama mendukung sektor perikanan dan perdagangan)	2	15	03	2.12	0001;0002
		5. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi, akses internet dan energy (Penguatan Implementasi transisi energy berkeadilan); Penyediaan Starlink untuk melayani wilayah kecamatan yang masih mengalami "blank spot"	2	16	03	2.02	0024
		6. Peningkatan ketahanan air melalui peningkatan jaringan irigasi dan perpipaan air bersih melalui Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Hidrant Umum Kota Bula	1	03	03	2.01	0028
		7. Proyek Strategis Nasional Hilirisasi Sagu SBT yang mencakup tahap-tahap: Penataan dan Pemetaan Kawasan Budidaya Sagu; Peningkatan kapasitas produksi dan teknologi pengolahan;	2	18	02	3.04;4.04	0001;0001

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Kode				
			Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Penguatan kelembagaan petani dan industri UMKM Sagu; Fasilitasi intervensi dan insentif hilirisasi; Promosi dan Diversifikasi Pasar; Riset dan inovasi produk turunan sagu					
		8. Pencanaan dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis Sumber Daya Lokal	2	18	02	3.03;3.04	0001;0001
		9. Optimasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah melalui pembentukan kawasan industri East Seram Agroindustrial Park (ESAP) yang akan fokus menggarap Proyek Strategis Nasional Hilirisasi Sagu SBT, kelapa, pala, cengkeh dan produk unggulan daerah lainnya menjadi produk akhir dan/atau produk antara bagi industri lanjutan. Tahapan-tahapannya sebagai berikut;	2	18	02	2.02;3.03; 3.04;4.04	0004;0001; 0001;0001
		a. Kawasan Peruntukan Industri yang tercantum dalam Perda RTRW yang sedang dalam tahap penyusunan oleh Dinas PUPR SBT harus mencakup kawasan industri ESAP yang direncanakan tersebut;	1	03	12	2.01	0005
		b. Memfokuskan APBD secara bertahap untuk pembangunan fasilitas dasar dan/atau fasilitas penunjang yang harus ada di dalam kawasan industri ESAP dan dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	3	27	03	2.01	0003
			3	31	02	2.01	0004
			2	15	03	2.12	0001

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Kode				
			Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		dan Dinas Perhubungan;					
		c. Penyusunan Master Plan kawasan industri ESAP yang dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	3	31	02	2.01	0001;0002;0003
		d. Kajian Kelayakan atau Feasibility Studies PSN Sagu di Kabupaten SBT yang diprioritaskan untuk memenuhi proposal teknis Kesiapan SBT sebagai lokasi PSN Sagu, yang dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian;	3	27	06	2.01	0002
		10. Program Hilirisasi Garam (Program ini selaras dengan Program Bangkit yang telah dilaksanakan)	2	18	02	3.04;4.04	0001;0001
			3	25	05	2.01	0012
		11. Program Hilirisasi Pala dan Cengkeh	2	18	02	3.04;4.04	0001;0001
		12. Pembangunan jalan akses ke sentra produksi dan pasar	3	27	03	2.02	0003
			1	03	10	2.01	0032
		13. Peningkatan fasilitas pendukung logistic	2	15	02	2.02	0001
			2	15	03	2.12	0001
			2	15	04	3.02	0003;0006
		14. Pengembangan transportasi laut dan sungai (Ferry)	2	15	03	2.11	0001
		15. Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan, serta penguatan diversifikasi pangan melalui Pengembangan SBT sebagai daerah penyangga pangan di Maluku (pertanian, peternakan dan perikanan); Kerjasama Antar Desa	2	09	03	2.01	0009;0005
			3	27	03	3.02	0005;0006
			3	25	03; 04	2.01;2.02	0004;0003
		16. Penguatan dan sinergitas kegiatan Makan Bergisi Gratis (MBG)	2	09	03	2.01	002; 003(Menunggu Juknis)
		17. Penguatan dan sinergitas kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis	1	02	02	2.01;2.02	0024;0025;0029
			3;2	28	04	2.01	0013

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Kode				
			Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		18. Pengembangan penataan dan intensifikasi hutan sagu untuk penguatan pangan lokal	3	27	03	2.01	0005
			2	09	03	2.01	0003
		19. Program Perumahan Rakyat	1	04	02	2.06	0003
		20. Kerjasama Graduasi Kemiskinan Untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin; Pengentasan kemiskinan melalui kartu usaha afirmatif dan Kartu Kesejahteraan; Kerjasama Antar Desa	1	06	02	3.03	0007
		21. Penataan Kota Bula	1	03	12	2.01	0003;0005(PUPR)
		22. Perencanaan Pembangunan Bandar Udara di Gorom	2	15	04	3.02;3.03	0003;0001;0002;0003;0004
6	SBT Kreatif	1. Pengembangan potensi pariwisata (melalui penataan dan promosi, pelatihan dan sertifikasi SDM pengelola, penyusunan dan promosi paket wisata tematik, festival pariwisata daerah tahunan)	3	26	02; 03; 05	2.01;2.01; 2.01 ;2.02	0005;0008;0003;0004;0007; 0006;0008;0009;0010;0001
		2. Pembangunan ekonomi kreatif berbasis lokal (pelatihan produksi dan branding produk, pengembangan sentra UMKM dan Galery, digitalisasi dan pemasaran produk kreatif, inkubasi ekraf muda)	3	26	04	2.01;2.02	0001;0002;0003;0004;0005; 0011;0012;0013;0017;0018 S
		3. Revitalisasi manajemen dan tata kelola BUMD untuk pengelolaan pariwisata (audit, pelatihan, penyusunan rencana bisnis, rekrutmen SDM berbasis kompetensi)	4	01	03	2.01	0001;0005
		4. Pembentukan unit usaha pariwisata di BUMD	4	01	03	2.01	0001
			3	26	03	2.01	0007
		5. Pengelolaan destinasi wisata strategis oleh BUMD	4	01	03	2.02	0001
			3	26	02	2.02	0004
			4	01	03	2.02	0001

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Kode				
			Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		6. Pengembangan produk pariwisata lokal oleh BUMD	3	26	04	2.01	0001
		7. Pengembangan paket wisata terintegrasi	3	26	03	201	0004;0006;0007
		8. Mobilisasi investasi dan kemitraan publik-swasta (BUMD sebagai mitra)	2	18	02	201	0001;0003;0004
		9. Optimasi Pengelolaan Aset Daerah melalui penyertaan modal daerah dan/atau hibah kepada BUMD yang meliputi tanah, bangunan, dan barang milik Daerah lainnya.	5	02	02	2.04	0002;0005;0011
		10. Pinjaman Daerah dalam rangka penyertaan Modal kepada BUMD berupa penugasan dari Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hilirisasi Sagu SBT.	5	02	02	2.04	0003;0005;0006
		11. Koperasi Desa Merah Putih	2	17	02	2.01;2.02	0001;0001 (menunggu Juknis)
		12. Penyusunan Dashboard Indikator RPJMD Sebagai Tools Monitoring Capaian RPJMD	5	01	02	2.03;2.04	0003;0001;0002
		13. Penguatan Data Statistik Sektor	2	20	02	2.01	0007;0008;0009;0010
		14. Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	16	03	2.02	0015;0019;0020
7	Masyarakat Berbudhi Luhur	1. Gerakan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal (integrasi nilai budaya lokal, gotong royong, saling menghargai, adat pela gandong dalam pendidikan formal dan non formal)	1	01	03	2.01;2.02	0002;0003;0002;0003
		2. Sekolah orang tua dan remaja (pencegahan kekerasan, perundungan dan pernikahan dini)	1	01	03	2.01;2.02	0006;0005
			2	08	07;03	2.01;2.01	0003;0006;0001
		3. Gerakan desa berintegritas (sosialisasi nilai kejujuran, tanggung jawab sosial melalui kelompok pemuda, PKK dan BUMDes)	2	13	05	2.01	0002;0003;0004;0005

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas	Kode				
			Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		*Forum warga, lomba kampung jujur, pengawasan anggaran berbasis komunitas. Perubahan perilaku dan tata kelola persampahan					
		4. Festival budaya dan moralitas lokal (festival tahunan kesenian, kisah tokoh panutan daerah dan pameran karya masyarakat yang berbasis etika dan kejujuran)	4	01	02	2.02	0001
			2	22	02	2.01;2.02	0001;0001
8	Aparatur Berbudi Luhur	1. Pelatihan etika dan kepemimpinan luhur ASN (diklat etika pelayanan publik, antikorupsi dan netralitas ASN)	5	04	02	2.01	0003
		2. Program Role Model dan Agen Perubahan Etika (pemilihan dan pembinaan Aparatur Teladan Berbudi Luhur tiap tahun dari semua OPD)	5	03	02	2.04	0002
		3. Integritas sistem kinerja dan penilaian berbasis nila (revisi indikator kinerja ASN agar memasukkan etika kerja, kepedulian sosial dan inovasi melayani masyarakat dengan empati)	5	03	02	2.04	0001;0002
		4. Penerapan Reward and Punishment Etis	5	03	02	2.04	0004;0007

3.4.1 Pembangunan Kewilayahan Kabupaten

Berdasarkan Peraturan presiden Nomor 12/2025 RPJMN Tahun 2025-2029. Kabupaten Seram Bagian Timur masuk dalam indikasi lokasi prioritas Provinsi Maluku yang telah dibagi dalam fokus pembangunan spesifik kawasan swasembada pangan, air dan energi dengan lokus indikasi sebagai kawasan rendah elektrifikasi. Highlight indikasi intervensi sebagai berikut:

Tabel 3.5 Indikasi Intervensi Pusat Terhadap arah Kewilayahan Seram Bagian Timur Dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi		Indikasi Intervensi Daerah
	C2	Kawasan Potensial			
	C4	Swasemba da Energi		Peningkatan ketahanan energi terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui :	• Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Listrik • Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
1		Kawasan Rendah elektrifikasi :		Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan output : pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T	• Penyusunan RUKD Kabupaten/Kota: • Pemberian Izin Usahan Pemberian tenaga Listrik (IUPTL) dalam Satu wilayah Kabupaten/Kota • Penetapan Lokasi dan Pemanfaatan Ruang
				Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) melalui :	
				Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:	

			1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output : peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i>	
			2	Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan output : penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis	
			2	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i> , dengan output : pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i>	
			3	Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan output : penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting	
			4	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan	

		Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/Kota		Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui :	Telah dijabarkan dalam program Prioritas
		Penanganan Penyakit Pneumonia	1	Pencegahan dan pengendalian penyakit pneumonia dengan output : peningkatan layanan intensifikasi penemuan kasus dan deteksi dini pneumonia dan peningkatan alat dan bahan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan pneumonia	Telah dijabarkan dalam program Prioritas

Seram Bagian Timur juga menjadi kawasan strategis pengembangan sagu sebagai komoditas unggulan daerah. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pengembangan terintegrasi berbasis hilirisasi sagu, dengan strategi sebagai berikut :

- Pemetaan dan Penataan Kawasan Budidaya Sagu
Menetapkan zona kawasan budidaya dan konservasi sagu berbasis tata ruang dan daya dukung lingkungan, serta memberikan kepastian hukum atas lahan bagi petani sagu rakyat.
- Peningkatan Kapasitas Produksi dan Teknologi Pengolahan
Mendorong penggunaan teknologi tepat guna untuk panen dan pengolahan sagu, mulai dari pengolahan pati hingga produk turunan seperti sagu instan, makanan olahan, bioetanol, dan bioplastik.
- Penguatan Kelembagaan Petani dan Industri UMKM Sagu
Pengembangan koperasi petani sagu, BUMDes, dan kemitraan dengan sektor swasta untuk memperkuat rantai nilai (value chain) sagu dari hulu ke hilir.
- Fasilitasi Investasi dan Insentif Hilirisasi
Mendorong investasi sektor hilir dengan memberikan kemudahan perizinan, insentif fiskal, serta dukungan infrastruktur dasar dan penunjang industri pengolahan sagu.
- Promosi dan Diversifikasi Pasar
Menyusun strategi branding dan pemasaran sagu Maluku sebagai produk sehat, alami, dan berkelanjutan ke pasar domestik dan ekspor.
- Riset dan Inovasi Produk Turunan Sagu
Mendorong perguruan tinggi dan lembaga riset lokal untuk melakukan inovasi produk turunan sagu yang bernilai tambah tinggi, serta mendukung riset keberlanjutan budidaya sagu di lahan marginal

3.4.2 Penaahapan Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang sehat, cerdas, sejahtera dan berbudi luhur, penetapan tahap-tahap pembangunan tahunan dalam dokumen RPJMD 2025–2029 menjadi instrumen strategis yang sangat penting. Tahapan-tahapan ini bukan sekadar slogan, melainkan arah kebijakan makro yang disusun secara terstruktur untuk memandu

pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam mengonsolidasikan sumber daya dan menyelaraskan program kegiatan lintas sektor.

Penetapan tahap-tahap pembangunan dimaksudkan untuk: (1). Menerjemahkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam agenda pembangunan tahunan yang realistis, terukur, dan berorientasi hasil, (2) Menjadikan 8 program prioritas sebagai penggerak utama pembangunan daerah yang sistematis dan berkelanjutan, mulai dari peningkatan layanan dasar hingga penguatan karakter sosial masyarakat dan aparatur, (3) Mengarahkan fokus pembangunan secara bertahap agar capaian indikator makro dan sektoral dapat dicapai secara efektif sesuai kemampuan fiskal, kapasitas kelembagaan, dan dinamika lokal, (4) Meningkatkan sinergi antar-perangkat daerah dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, serta mitra pembangunan dan (5) Menjadi acuan konsistensi dan kesinambungan pembangunan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi tahunan.

Tahapan RPJMD Kabupaten SBT 2025–2029 disusun untuk mencerminkan skenario pembangunan bertahap dari penguatan fondasi layanan dasar di tahun awal, menuju pengembangan kapasitas dan inovasi daerah, hingga mencapai kemandirian daerah yang berdaya dan bermartabat di akhir periode. Setiap tema tahunan telah dikaitkan langsung dengan indikasi kegiatan prioritas dari 8 program unggulan, yaitu: (1). *Pusat Kesehatan Keliling*, (2). *Sehat Bersama Spesialis*, (3) *SBT Pintar*, (4) *SBT Terampil*, (5) *SBT Kuat*, (6) *SBT Kreatif*, (7) *Masyarakat Berbudhi Luhur*, dan (8) *Aparatur Berbudhi Luhur*.

Dengan pendekatan tematik tahunan ini, diharapkan arah pembangunan daerah menjadi lebih fokus, adaptif, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta transformasi kualitas layanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Tabel 3.6. Penahapan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029

Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029/2030)
<i>Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar Untuk SBT Yang Unggul dan Sejahtera</i>	<i>Peningkatan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Iklim Investasi</i>	<i>Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Untuk SBT Yang Mandiri dan Berdaya Saing</i>	<i>Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Berakhlak Menuju SBT yang Melayani</i>	<i>Pemantapan Pembangunan Sosio Ekonomi dan Budaya Untuk SBT Yang Tangguh dan Berkelanjutan</i>
Pada tahap ini, aksentuasi program pembangunan diarahkan pada; • Pusat Kesehatan Keliling: Pengadaan ambulans laut, pembangunan Puskesmas baru di Kampung Gorom dan Amar Watu, pelatihan kader kesehatan desa. • Sehat Bersama Spesialis: Skema insentif dasar dan kontrak dokter spesialis, kerja sama awal dengan RS Haulussy dan Kemenkes.	Pada tahap ini, aksentuasi program pembangunan diarahkan pada • Pusat Kesehatan Keliling: Optimalisasi telemedicine, rehabilitasi Pustu, penyuluhan keliling dan media interaktif, Transformasi RSUD Bula Dari Tipe C ke Tipe B tahap 1 • Sehat Bersama Spesialis: Magang dokter, beasiswa ikatan dinas spesialis, kunjungan dokter spesialis bergilir.	Pada tahap ini, aksentuasi program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada • Pusat Kesehatan Keliling: Integrasi layanan digital, monitoring dan dialog publik via media sosial, Transformasi RSUD Bula Dari Tipe C ke Tipe B tahap 2 • Sehat Bersama Spesialis: Kerjasama Unpatti - RSUD Bula sebagai RS Pendidikan Satelit. • SBT Pintar: Digitalisasi sekolah, penguatan	Pada tahap ini, aksentuasi pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut; • Pusat Kesehatan Keliling & Sehat Bersama Spesialis: Integrasi layanan keliling dan spesialis dalam sistem informasi terpadu, Transformasi RSUD Bula Dari Tipe C ke Tipe B tahap 3 • SBT Pintar: Kolaborasi antar sekolah dalam platform	Pada tahap ini, agenda-agenda pembangunan difokuskan memantapkan aspek-aspek sebagai berikut; • Kesehatan: RS Bula Tipe B beroperasi secara berkelanjutan, layanan spesialis stabil, layanan keliling terjadwal penuh. • Pendidikan: Sekolah digital merata, siswa dari kepulauan memiliki akses penuh terhadap pendidikan lanjutan. • Ketenagakerjaan: lulusan pelatihan

Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029/2030)
Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar Untuk SBT Yang Unggul dan Sejahtera	Peningkatan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Iklim Investasi	Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Untuk SBT Yang Mandiri dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Berakhlak Menuju SBT yang Melayani	Pemantapan Pembangunan Sosio Ekonomi dan Budaya Untuk SBT Yang Tangguh dan Berkelanjutan
• SBT Pintar: Rehabilitasi sekolah, pengadaan transportasi sekolah, beasiswa pendidikan lanjut. • SBT Terampil: Pelatihan pengolahan sagu & ecoprint, fasilitasi izin usaha UMKM awal. • SBT Kuat: Peningkatan jalan akses antar desa, pembangunan dermaga strategis, program perumahan rakyat tahap awal. • SBT Kreatif: Penyusunan rencana pengembangan destinasi wisata,	• SBT Pintar: Pengadaan asrama siswa, pelatihan guru daerah terpencil, platform pembelajaran daring. • SBT Terampil: Pelatihan pertanian berkelanjutan dan manajemen UMKM, penguatan produk nelayan. • SBT Kuat: Pembangunan jalan sentra produksi, infrastruktur telekomunikasi & internet di pulau kecil, program perumahan rakyat tahap 1; Pembentukan ESAP	• kurikulum kearifan lokal, Program Sekolah Rakyat. • SBT Terampil: Inkubasi UMKM dan pelatihan lanjutan ekonomi kreatif (souvenir, kuliner khas). • SBT Kuat: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis sumber daya lokal dimulai, program perumahan rakyat tahap 2, Pembentukan ESAP (<i>East Seram Agroindustrial Park</i>)- (Penyusunan Master Plan kawasan industri ESAP dan Kajian Kelayakan	• pembelajaran, peningkatan beasiswa untuk bidang vokasi dan inovasi. • SBT Terampil & Kreatif: Kolaborasi UMKM dan pariwisata, digitalisasi dan promosi produk daerah via platform e-commerce. • SBT Kuat: Optimalisasi pelabuhan-pasar, sinergi logistik dan transportasi laut, program perumahan rakyat tahap 3, Pembentukan ESAP (<i>East Seram Agroindustrial Park</i>)-	• terserap pasar kerja, UMKM lokal tumbuh mandiri. • Ekonomi: Produk kreatif dan wisata SBT tembus pasar regional, KEK aktif berjalan, ESAP aktif berjalan. • Karakter dan Etika: ASN dan warga menunjukkan etika pelayanan dan kehidupan sosial tinggi. • Penghargaan & Evaluasi: Kabupaten meraih penghargaan atas inovasi layanan publik dan tata kelola etis.

Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029/2030)
Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar Untuk SBT Yang Unggul dan Sejahtera	Peningkatan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Iklim Investasi	Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Untuk SBT Yang Mandiri dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Berakhlak Menuju SBT yang Melayani	Pemantapan Pembangunan Sosio Ekonomi dan Budaya Untuk SBT Yang Tangguh dan Berkelanjutan
pembentukan unit usaha BUMD pariwisata (Revitalisasi BUMD) - Masyarakat Berbudi Luhur: Gerakan pendidikan karakter, sekolah orang tua dan remaja. - Aparatur Berbudi Luhur: Pelatihan etika ASN dan pembentukan Role Model Etika di OPD	(East Seram Agroindustrial Park)- (Kawasan Peruntukan Industri yang tercantum dalam Perda RTRW dan Memfokuskan APBD secara bertahap untuk pembangunan fasilitas dasar dan/atau fasilitas penunjang yang harus ada di dalam kawasan industri ESAP) SBT Kreatif: Festival wisata pertama, pelatihan branding & pemasaran produk lokal, Koperasi Desaa Merah Putih Tahap 1.	atau <i>Feasibility Studies</i> PSN Sagu) - SBT Kreatif: Pembentukan galeri daerah & koperasi Desa Merah Putih tahap 2, inkubasi ekraf muda; - Masyarakat Berbudi Luhur: Festival budaya & moralitas, promosi tokoh panutan daerah. - Aparatur Berbudi Luhur: Agen Perubahan Etika, pembinaan ASN muda berbudi luhur.	Kajian model kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem sagu Daerah unuk mendukung PSN Sagu. Masyarakat & Aparatur Berbudi Luhur: Kolaborasi antar komunitas dalam kampanye etika sosial dan birokrasi, sinergi Pemda-masyarakat sipil.	

Tahun I (2025)	Tahun II (2026)	Tahun III (2027)	Tahun IV (2028)	Tahun V (2029/2030)
<i>Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar Untuk SBT Yang Unggul dan Sejahtera</i>	<i>Peningkatan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Iklim Investasi</i>	<i>Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Untuk SBT Yang Mandiri dan Berdaya Saing</i>	<i>Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Berakhlak Menuju SBT yang Melayani</i>	<i>Pemantapan Pembangunan Sosio Ekonomi dan Budaya Untuk SBT Yang Tangguh dan Berkelanjutan</i>
	• Masyarakat Berbudi Luhur: Desa berintegritas tahap 1, lomba kampung jujur, pengawasan anggaran komunitas. • Aparatur Berbudi Luhur: Revisi indikator kinerja ASN, pelaksanaan reward-punishment berbasis etika.			

Tabel 3.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2025 – 2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
<i>Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Timur Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berbudi Luhur</i>						
Misi 1: Meningkatkan fasilitas, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat	Tujuan 1.1 Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat			1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Thn)	P1. Pusat Kesehatan Keliling P2. Sehat Bersama Spesialis	
				2. Prevalansi stunting (%)		
		Sasaran 1.1.1 Terpenuhinya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan di seluruh wilayah secara merata	O.1.1.1.1.Berkurangnya kematian ibu melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan persalinan.	O.1.1.1.1Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			O.1.1.1.2. Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas	O.1.1.1.2. Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk		
		Sasaran 1.1.2 Terselenggaranya program kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	O.1.1.2.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui kepesertaan program jaminan kesehatan	O.1.1.2.1. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)		
			O.1.1.2.2. Meningkatnya deteksi dan pengobatan kasus tuberkulosis untuk mencegah penyebaran penyakit	O.1.1.2.2. Cakupan penemuan & pengobatan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)(%)		
			O.1.1.2.3. Meningkatnya keberhasilan pengobatan tuberkulosis sehingga menurunkan angka sakit dan komplikasi.	O.1.1.2.3. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate (%))		
		Sasaran 1.1.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan,	O.1.1.3.1. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	O.1.1.3.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial				
			O.1.1.3.2. Meningkatnya akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan formal.	O.1.1.3.2. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		
			O.1.1.3.3. Meningkatnya kemampuan masyarakat menghadapi risiko sosial dan ekonomi	O.1.1.3.3. Indeks Ketahanan Sosial		
			O.1.1.3.4. Berkurangnya pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja dan keterampilan tenaga kerja	O.1.1.3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			O.1.1.3.5. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja untuk mendukung pembangunan ekonomi kabupaten	O.1.1.3.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
			O.1.1.3.6. Berkurangnya kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan dan akses ekonomi masyarakat	O.1.1.3.6. Tingkat Kemiskinan (%)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Misi 2: Meningkatkan fasilitas, akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil	Tujuan 2.1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang moderen dan inovatif			1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	P3. SBT Pintar	
		Sasaran 2.1.1 Tersedianya akses pendidikan yang mudah dan merata di seluruh wilayah	O.2.1.1.1. Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi masyarakat di seluruh kabupaten	O.2.1.1.1. Angka Literasi/Numerasi		
			O.2.1.1.2. Meningkatnya partisipasi pendidikan formal masyarakat dewasa sehingga lama sekolah rata-rata meningkat	O.2.1.1.2. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)		
			O.2.1.1.3. Meningkatnya peluang anak menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi	O.2.1.1.3. Harapan lama sekolah		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			O.2.1.1.4. Meningkatnya proporsi penduduk dewasa dengan pendidikan tinggi sebagai modal peningkatan kualitas SDM kabupaten	O.2.1.1.4. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)		
		Sasaran 2.1.2 Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan relevansi kurikulum berbasis kebutuhan lokal	O.2.1.2.1. Meningkatnya kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan di bidang menengah-tinggi	O.2.1.2.1. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
		Sasaran 2.1.3 Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang modern, aman, dan mendukung proses belajar mengajar	O.2.1.3.1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan aman	O.2.1.3.1. Indeks Literasi Digital		
			O.2.1.3.2. Meningkatnya budaya literasi masyarakat melalui partisipasi dan pemanfaatan layanan literasi.	O.2.1.3.2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
			O.2.1.3.3. Meningkatnya kemampuan masyarakat memanfaatkan	O.2.1.3.3. Indeks Masyarakat Digital Indonesia		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			teknologi digital untuk pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik			
Misi 3: Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kompetitif dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam lokal unggulan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup	Tujuan 3.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam unggulan daerah yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif			1. PDRB per kapita	P4. SBT Terampil P5. SBT Kuat	
				2. Pertumbuhan ekonomi		
		Sasaran 3.1.1 Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata	O.3.1.1.1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung pembangunan kabupaten	O.3.1.1.1. Indeks Infrastruktur		
			O.3.1.1.2. Meningkatnya kualitas pembangunan dan	O.3.1.1.2. Gambaran Indeks Desa (Indeks)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			kesejahteraan masyarakat di tingkat desa			
			O.3.1.1.3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan listrik untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan produktivitas	O.3.1.1.3. Konsumsi Listrik per kapita (Kwh)		
		Sasaran 3.1.2 Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal	O.3.1.2.1. Meningkatnya peran kabupaten dalam pertumbuhan ekonomi provinsi	O.3.1.2.1. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi		
			O.3.1.2.2. Meningkatnya pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	O.3.1.2.2. Indeks Ekonomi Hijau (proxy Maluku)		
			O.3.1.2.3. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk ekonomi kabupaten	O.3.1.2.3. Indeks ekonomi biru		
			O.3.1.2.4. Meningkatnya penerimaan pajak daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan	O.3.1.2.4. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		
			O.3.1.2.5. Terjaganya stabilitas harga untuk mendukung daya beli	O.3.1.2.5. Tingkat Inflasi		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			masyarakat dan perekonomian			
			O.3.1.2.6. Meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan kabupaten	O.3.1.2.6. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
			O.3.1.2.7. Meningkatnya akses masyarakat dan dunia usaha terhadap pembiayaan produktif	O.3.1.2.7. Total Kredit/PDRB (%)		
			O.3.1.2.8. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal	O.3.1.2.8. Inklusi Keuangan (%)		
			O.3.1.2.9. Meningkatnya kemampuan kabupaten menghadapi guncangan ekonomi dan menjaga stabilitas	O.3.1.2.9. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)		
			O.3.1.2.10. Berkurangnya ketimpangan pendapatan antar warga kabupaten	O.3.1.2.10. Rasio Gini		
			O.3.1.2.11. Meningkatnya peran industri pengolahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten	O.3.1.2.11. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			O.3.1.2.12. Meningkatnya investasi dalam aset tetap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	O.3.1.2.12. Pembentukan modal tetap bruto (PDRB)		
			O.3.1.2.13. Meningkatnya volume ekspor sebagai indikator daya saing ekonomi kabupaten	O.3.1.2.13. Ekspor barang dan jasa (PDRB)		
		Sasaran 3.1.3 Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana	O.3.1.3.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	O.3.1.3.1. Indeks Kualitas Lingkungan Daerah		
			O.3.1.3.2. Berkurangnya kerentanan masyarakat dan infrastruktur terhadap risiko bencana melalui mitigasi dan kesiapsiagaan	O.3.1.3.2. Indeks Risiko Bencana		
			O.3.1.3.3. Meningkatnya kemampuan kabupaten menjaga kelestarian lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan	O.3.1.3.3. Indeks Ketahanan Lingkungan		
			O.3.1.3.4. Meningkatnya akses rumah tangga terhadap	O.3.1.3.4. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			sanitasi yang aman dan layak			
			O.3.1.3.5. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki hunian layak, aman, dan terjangkau	O.3.1.3.5. Rumah tangga dengan akses hunian layak		
			O.3.1.3.6. Berkurangnya jumlah penduduk dengan asupan pangan tidak mencukupi	O.3.1.3.6. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)(%)		
			O.3.1.3.7. Meningkatnya ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan bagi masyarakat kabupaten	O.3.1.3.7. Indeks Ketahanan Pangan		
			O.3.1.3.8. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan pertanian	O.3.1.3.8. Kapasitas air baku (m3/detik)		
			O.3.1.3.9. Meningkatnya akses masyarakat perkotaan terhadap air minum yang aman dan layak	O.3.1.3.9. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		
			O.3.1.3.10. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan air minum bagi seluruh rumah tangga	O.3.1.3.10. Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum (%)		
			O.3.1.3.11. Meningkatnya	O.3.1.3.11. Timbulan sampah terolah di		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			pengelolaan sampah melalui pengolahan yang ramah lingkungan	fasilitas pengolahan sampah		
Misi 4: Menjadikan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya sebagai tulang punggung perekonomian masa depan	Tujuan 4.1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi pariwisata unggulan, peningkatan daya saing dan inovasi kolaboratif yang berbasis kearifan lokal			1. Indeks Pembangunan Kebudayaan	P6. SBT Kreatif	
		Sasaran 4.1.1 Tumbuhnya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mandiri dan inovatif	O.4.1.1.1. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten	O.4.1.1.1. Indeks Kewirausahaan		
			O.4.1.1.2. Meningkatnya kontribusi koperasi dalam mendukung perekonomian lokal.	O.4.1.1.2. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			O.4.1.1.3. Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di kabupaten	O.4.1.1.3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah		
		Sasaran 4.1.2 Terbangunnya destinasi wisata unggulan yang berstandar nasional dan internasional	O.4.1.2.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	O.4.1.2.1. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)		
			O.4.1.2.2. Meningkatnya peran sektor makanan dan minuman dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten	O.4.1.2.2. Kontribusi PDRB Penyediaan Makan Minum (%)		
		Sasaran 4.1.3 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah	O.4.1.3.1. Meningkatnya peran sektor pariwisata bahari dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten	O.4.1.3.1. Kontribusi PDRB Pariwisata Bahari (%)		
			O.4.1.3.2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi lokal	O.4.1.3.2. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		
Misi 5: Membangun	Tujuan 5.1			1. Indeks Modal Sosial	P7. Masyarakat Berbudhi Luhur	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
masyarakat yang berbudi luhur melalui implementasi dan penyelarasan nilai agama dan budaya	Membangun masyarakat yang harmonis, berbudi luhur dan toleran melalui penguatan karakter, moral dan etik sosial yang berlandaskan nilai agama dan budaya					
		Sasaran 5.1.1 Terbentuknya masyarakat yang berkarakter dan beretika berdasarkan nilai agama dan budaya	O.5.1.1.1. Meningkatnya kerukunan, toleransi, dan harmoni antarumat beragama di kabupaten	O.5.1.1.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama		
			O.5.1.1.2. Meningkatnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan untuk pembangunan kabupaten	O.5.1.1.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan		
		Sasaran 5.1.2 Meningkatnya peran aktif keluarga dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter peserta didik	O.5.1.2.1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan anggota keluarga di kabupaten	O.5.1.2.1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			O.5.1.2.2. Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan keluarga dalam mendukung pembangunan lokal	O.5.1.2.2. Indeks Pembangunan Keluarga (Proxy)		
			O.5.1.2.3. Meningkatnya kualitas hidup, kompetensi, dan partisipasi pemuda dalam pembangunan kabupaten	O.5.1.2.3. Indeks Pembangunan Pemuda		
			O.5.1.2.4. Berkurangnya kesenjangan gender dalam akses, kesempatan, dan hasil pembangunan	O.5.1.2.4. Indeks Ketimpangan Gender		
			O.5.1.2.5. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta laki-laki di kabupaten	O.5.1.2.5. Indeks Pembangunan Gender		
			O.5.1.2.6. Meningkatnya kemampuan perempuan dan kelompok rentan untuk berperan aktif dalam pembangunan	O.5.1.2.6. Indeks Pemberdayaan Gender		
		Sasaran 5.1.3 Terpeliharanya harmoni sosial antar kelompok	O.5.1.3.1. Meningkatnya efektivitas penanganan gangguan ketertiban	O.5.1.3.1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		masyarakat yang beragam	dan keamanan masyarakat			
			O.5.1.3.2. Meningkatnya rasa aman masyarakat di lingkungan tempat tinggal	O.5.1.3.2. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		
			O.5.1.3.3. Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat di kabupaten	O.5.1.3.3. Indeks Pembangunan Hukum		
			O.5.1.3.4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi di kabupaten	O.5.1.3.4. Indeks Demokrasi Indonesia		
Misi 6: Menyelenggarakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilandasi nilai-nilai keluhuran budi dalam mewujudkan good governance dan clean government	Tujuan 6.1 Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan		O.6.1.1. Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan di kabupaten	O.6.1.1. Indeks Reformasi Birokrasi	P8. Aparatur Berbudi Luhur	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	pengendalian internal					
			O.6.1.2.Meningkatnya kualitas, akses, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	O.6.1.2. Indeks Layanan Publik		
			O.6.1.3.Meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah terhadap standar pelayanan publik	O.6.1.3. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik		
			O.6.1.4.Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan digital untuk transparansi dan efisiensi	O.6.1.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
			O.6.1.5.Meningkatnya kemampuan kabupaten dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi	O.6.1.5. Indeks Daya Saing Daerah		
		Sasaran 6.1.1 Terwujudnya sistem pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	O.6.1.1.1.Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten	O.6.1.1.1. Nilai SAKIP		
			O.6.1.1.2.Meningkatnya penerapan manajemen aparatur berbasis kompetensi dan kinerja	O.6.1.1.2.Indeks Merit		
			O.6.1.1.3.Meningkatnya inovasi pemerintah	O.6.1.1.3. Indeks Inovasi Daerah		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan			
			O.6.1.1.4.Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat di kabupaten	O.6.1.1.4. Indeks Reformasi Hukum		
			O.6.1.1.5.Meningkatnya integritas dan akuntabilitas pejabat serta institusi pemerintahan	O.6.1.1.5. Indeks Integritas Nasional		
			O.6.1.1.6.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga memperoleh opini WTP atau setara	O.6.1.1.6. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		
		Sasaran 6.1.2 Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang cepat, tepat, dan profesional	O.6.1.2.1.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja pemerintah kabupaten.	O.6.1.2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat		
			O.6.1.2.2.Meningkatnya kualitas, akses, dan efektivitas layanan publik di kabupaten	O.6.1.2.2. Indeks Pelayanan Publik		
			O.6.1.2.3.Meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah terhadap standar pelayanan publik	O.6.1.2.3. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		Sasaran 6.1.3 Terbentuknya budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah	O.6.1.3.1.Meningkatnya integritas pemerintah daerah dan berkurangnya praktik korupsi di kabupaten.	O.6.1.3.1. Indeks Persepsi Korupsi		

BAB 4

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur disusun sebagai instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Penyusunan program ini berlandaskan pada visi dan misi kepala daerah, yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dengan demikian, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan program prioritas yang berorientasi pada hasil, efisiensi sumber daya, dan akuntabilitas publik. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk konkret pelaksanaan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui sinergi antar perangkat daerah dan dukungan masyarakat, diharapkan pelaksanaan program-program pembangunan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Seram Bagian Timur. Oleh karena itu, dokumen ini menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, Program Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur berlandaskan pada prinsip-prinsip yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perangkat daerah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan tokoh adat. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan program yang lebih inklusif serta sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Melalui pelaksanaan Program Perangkat Daerah yang terencana dan terintegrasi, diharapkan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Program ini diharapkan menjadi pedoman yang jelas bagi perangkat daerah dalam mengalokasikan sumber daya, menentukan prioritas pembangunan, serta melakukan evaluasi dan pengendalian program secara berkesinambungan.

4.1.1. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

4.1.1.1. Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;

A. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;

Pendidikan;

Perencanaan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Kebudayaan;

Perencanaan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Pemuda dan Olahraga;

Perencanaan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

B. Kesehatan;

Perencanaan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

C. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

Perencanaan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

D. Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

Perencanaan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

E. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;

Penanggulangan Bencana Daerah;

Perencanaan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja;

Perencanaan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

F. Sosial;

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

4.1.1.2. Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;**A. Tenaga Kerja & Transmigrasi;****Tenaga Kerja;**

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial

Transmigrasi;

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

B. Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;**

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
6. Program Perlindungan Khusus Anak

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Program Penataan Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

C. Ketahanan Pangan;

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

D. Lingkungan Hidup

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6. Program Pengelolaan Persampahan
7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup
9. Program Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengendalian B3 dan Limbah B3

E. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

F. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

G. Dinas Perhubungan;

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)
2. Program Pengelolaan Pelayaran
3. Program Pengelolaan Penerbangan

H. Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian;

Komunikasi Dan Informatika;

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Statistik;

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

I. Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan;

Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Perdagangan;

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Perindustrian;

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

J. Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

K. Perpustakaan & Kearsipan;

Perpustakaan;

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Kearsipan;

1. Program Pengelolaan Arsip
2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

4.1.1.3. Urusan Pilihan;

A. Perikanan;

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

B. Pariwisata;

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

C. Pertanian;

Pertanian;

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Kehutanan;

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

D. Sekretariat Daerah;

1. Program Perekonomian Dan Pembangunan
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

E. Sekretariat DPRD;

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

F. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Perencanaan;

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

G. Keuangan dan Aset Daerah;

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

H. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

I. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

J. Inspektorat Daerah;

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

K. Kecamatan;

1. Program Penyeleggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyeleggaran urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

L. Kesatuan Bangsa dan Politik;

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- G. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

4.1.2. Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025

Penjelasan kerangka pendanaan pembangunan untuk penyusunan program perangkat daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat penting untuk disampaikan secara komprehensif karena akan:

1. Menjamin keterpaduan antara rencana dan anggaran. Kerangka pendanaan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMD memiliki dasar pembiayaan yang realistis, sehingga rencana tidak hanya menjadi dokumen formal tetapi dapat diimplementasikan secara nyata,
2. Menggambarkan kapasitas fiskal daerah. Penjelasan ini memberikan Gambaran tentang kemampuan keuangan daerah selama periode RPJMD, sehingga perencanaan tidak melebihi kemampuan pendanaan yang dimiliki,
3. Menentukan prioritas pembangunan. Dengan mengetahui keterbatasan dan potensi sumber dana, pemerintah daerah dapat memfokuskan alokasi anggaran pada program-program prioritas dan strategis,
4. Mendukung akuntabilitas dan transparansi. Kerangka pendanaan yang jelas dalam RPJMD menunjukkan kepada publik bagaimana rencana pembangunan akan dibiayai, sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah,
5. Sebagai dasar penyusunan dokumen tahunan. RPJMD menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, seperti RKPD dan KUA-PPAS. Oleh karena itu, kerangka pendanaan yang dijelaskan dengan baik akan memudahkan sinkronisasi antar dokumen tersebut.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka kerangka pendanaan menjadi salah satu elemen kunci untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai arah, kemampuan dan kebutuhan yang telah dirumuskan.

Tabel 4.1. Indikasi Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					86.114.664.762		92.968.645.034		99.822.625.306		106.676.605.578		113.530.585.850	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.050.000.000		18.050.000.000		18.050.000.000		18.050.000.000		18.050.000.000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	18.050.000.000	100	18.050.000.000	100	18.050.000.000	100	18.050.000.000	100	18.050.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					61.447.266.799		67.634.887.878		73.822.508.957		80.010.130.035,94		86.197.751.115	
peningkatan kualitas belajar peserta didik, pemerataan pendidikan yang bermutu, peningkatan kompetensi dan kinerja guru, serta mutu dan relevansi pembelajaran	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)		97	98	61.447.266.799	99	67.634.887.878	100	73.822.508.957	100	80.010.130.036	100	86.197.751.115	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/ MI(Angka)		124	127		129		132		134		137		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio guru/ murid SD/ MI (Angka)		01:10	01:10		01:09		01:09		01:08		01:08		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per- 1.000) SD/MI		0,11	0,12		0,13		0,14		0,15		0,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Partisipasi Sekolah (%)SMP/MTs		97	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Ketersediaan Sekolah (%)		184	187		191		194		198		201		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio guru/ murid SMP/MTs		01:08	01:08		01:08		01:07		01:07		01:07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per-10.000) SMP/MTs		0,12	0,13		0,13		0,13		0,13		0,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI (%)		14,5	15,22		15,98		16,78		17,62		18,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Sekolah kondisi bangunan baik SMP/Mts (%)		21,11	21,37		21,63		21,89		22,16		22,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA (siswa)		5.902	5.961		6.021		6.081		6.142		6.203		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SD/MI		146,6	132		118,75		106,88		96,19		86,57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMP/ MTS		16,25	15,43		14,66		13,93		13,23		12,57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Kelulusan SD/MI (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					945.342.566		1.040.536.737		1.135.730.907		1.230.925.077		1.326.119.248	
meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	100	945.342.566	100	1.040.536.737	100	1.135.730.907	100	1.230.925.077	100	1.326.119.248	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					4.726.712.831		5.202.683.683		5.678.654.535		6.154.625.387		6.630.596.240	
Peningkatan kompetensi dan kualitas PTK sesuai standar nasional	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)		88,04	88,95	4.726.712.831	90	5.202.683.683	91	5.678.654.535	92	6.154.625.387	93	6.630.596.240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					425.404.155		468.241.531		511.078.908		553.916.285		596.753.662	
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					519.938.411		572.295.205		624.651.999		677.008.793		729.365.586	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					209.506.363.296		231.453.068.102		254.637.797.857		279.959.831.201		307.931.876.986	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					136.317.941.825		150.894.713.956		166.709.511.035		184.661.611.703		205.263.724.812	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	60	70	70	136.317.941.825	80	150.894.713.956	90	166.709.511.035	100	184.661.611.703	100	205.263.724.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					44.865.958.189		49.383.873.518		53.901.788.848		58.419.704.177		62.937.619.506	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)		27,33	28,7	44.865.958.189	30,13	49.383.873.518	31,64	53.901.788.848	33,22	58.419.704.177	34,88	62.937.619.506	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kelurahan UCI (%)		25,06	26,31		27,63		29,01		30,46		31,98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)		12,06	13,26		14,59		16,05		17,65		19,42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					14.180.138.492		15.608.051.049		17.035.963.605		18.463.876.162		19.891.788.719	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (/1.000)		0,7	0,78		0,85		0,94		1,03				Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)		0,012	0,013		0,014		0,015		0,017				Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					9.415.611.959		10.363.745.896		11.311.879.834		12.260.013.772		13.208.147.709	
Meningkatnya kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP IRT sesuai standar (Persentase)	0	0	0	9.415.611.959	0	10.363.745.896	0	11.311.879.834	0	12.260.013.772	0	13.208.147.709	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pangan industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Sarana IRT yang memenuhi ketentuan (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Apotik dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yg ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.726.712.831		5.202.683.683		5.678.654.535		6.154.625.387		6.630.596.240	
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Proporsi Penduduk dengan aktifitas Fisik Cukup (Persentase)	0	0	0	4.726.712.831	0	5.202.683.683	0	5.678.654.535	0	6.154.625.387	0	6.630.596.240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					174.561.553.985		192.375.521.658		209.204.489.331		227.118.457.004		244.077.424.677	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.425.000.000		4.020.000.000		3.630.000.000		4.325.000.000		4.065.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	3.425.000.000	100	4.020.000.000	100	3.630.000.000	100	4.325.000.000	100	4.065.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					23.633.564.154		26.013.418.415		28.393.272.676		30.773.126.937		33.152.981.198	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	2	2,6	2,98	23.633.564.154	3,5	26.013.418.415	4	28.393.272.676	4,85	30.773.126.937	6,15	33.152.981.198	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.781.370.265		4.162.146.946		4.542.923.628		4.923.700.310		5.304.476.992	
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga pengguna Air Bersih (%)		80,85	81,26	3.781.370.265	81,66	4.162.146.946	82,07	4.542.923.628	82,48	4.923.700.310	82,89	5.304.476.992	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 -PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					5.908.391.038		6.503.354.604		7.098.318.169		7.693.281.734		8.288.245.300	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sampah (%)	20	20	22,21	5.908.391.038	23,07	6.503.354.604	23,76	7.098.318.169	24,09	7.693.281.734	24,45	8.288.245.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					11.816.782.077		13.006.709.207		14.196.636.338		15.386.563.468		16.576.490.599	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	20	25	25,3	11.816.782.077	25,7	13.006.709.207	31,12	14.196.636.338	31,6	15.386.563.468	33,18	16.576.490.599	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					614.472.668		676.348.879		738.225.090		800.101.300		861.977.511	
Meningkatnya pengembangan permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	25,03	25,43	25,9	614.472.668	26	676.348.879	27	738.225.090	33	800.101.300	40	861.977.511	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					120.058.505.900		132.148.165.546		144.237.825.193		156.327.484.839		168.417.144.486	
Terlaksananya penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	42,92	43,44	46,86	120.058.505.900	50,28	132.148.165.546	53,7	144.237.825.193	57,12	156.327.484.839	60,54	168.417.144.486	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					407.686.540		434.587.031		461.487.521		488.388.012		515.288.502	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	23,03	23,9	25,03	407.686.540	25,89	434.587.031	27,05	461.487.521	27,79	488.388.012	28,55	515.288.502	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					4.915.781.344		5.410.791.030		5.905.800.717		6.400.810.403		6.895.820.089	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Terselenggaranya penyelenggaraan penataan ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan		> 0,5	> 0,6	4.915.781.344	> 0,7	5.410.791.030	> 0,8	5.905.800.717	> 0,9	6.400.810.403	> 1,0	6.895.820.089	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					11.602.213.197		13.020.642.771		13.454.072.346		14.972.501.920		15.535.931.495	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.425.000.000		4.020.000.000		3.630.000.000		4.325.000.000		4.065.000.000	
Meningkatnya Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	3.425.000.000	100	4.020.000.000	100	3.630.000.000	100	4.325.000.000	100	4.065.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					614.472.668		676.348.879		738.225.090		800.101.300		861.977.511,15	
Meningkatnya Program Pengembangan Perumahan	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)		3,76	4,66	614.472.668	5,78	676.348.879	7	738.225.090	8,87	800.101.300	11	861.977.511	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)		58,33	59,5		60,69		62		63,14		64,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3.781.370.265		4.162.146.946		4.542.923.628		4.923.700.310		5.304.476.991,68	
Persentase Pemukiman Tertata	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)		26,24	28,87	3.781.370.265	31,75	4.162.146.946	35	4.542.923.628	38,42	4.923.700.310	42,26	5.304.476.992	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase permukiman yang tertata (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					3.781.370.265		4.162.146.946		4.542.923.628		4.923.700.310		5.304.476.991,68	
Meningkatkan kualitas hunian dan fungsi infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman	Persentase permukiman yang tertata (%)		100	100	1.512.548.106	100	1.664.858.779	100	1.817.169.451	100	1.969.480.124	100	2.121.790.797	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
Meningkatnya Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)		26,24	28,87	2.268.822.159	31,75	2.497.288.168	35	2.725.754.177	38,42	2.954.220.186	42,26	3.182.686.195	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					34.868.651.608		37.061.957.977		38.286.114.745		39.420.668.921		41.464.168.453	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.171.500.000		27.489.020.000		27.837.390.400		28.096.158.208		29.263.871.372	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)		100	100	26.171.500.000	100	27.489.020.000	100	27.837.390.400	100	28.096.158.208	100	29.263.871.372	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.654.349.491		1.820.939.289		1.987.529.087		2.154.118.886		2.320.708.684	
meningkatnya ketentrman dan ketertiban umum	Penegakan PERDA (%)		0,43	0,47	1.654.349.491	0,52	1.820.939.289	0,57	1.987.529.087	0,63	2.154.118.886	0,69	2.320.708.684	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.316.089.287		2.549.315.005		2.782.540.722		3.015.766.440		3.248.992.157,40	
Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Terencana dan Terpadu serta Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Tingkat waktu tanggap/response time rate (%)		100	100	2.316.089.287	100	2.549.315.005	100	2.782.540.722	100	3.015.766.440	100	3.248.992.157	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					4.726.712.831		5.202.683.683		5.678.654.535		6.154.625.387		6.630.596.239,60	
meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)		100	100	4.726.712.831	100	5.202.683.683	100	5.678.654.535	100	6.154.625.387	100	6.630.596.240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					13.014.946.069		13.844.115.935		14.662.785.800		15.492.480.666		16.311.150.532	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.885.000.000		4.895.500.000		4.895.500.000		4.906.525.000		4.906.525.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	4.885.000.000	100	4.895.500.000	100	4.895.500.000	100	4.906.525.000	100	4.906.525.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2.836.027.698		3.121.610.210		3.407.192.721,10		3.692.775.232		3.978.357.743,76	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)		10,97	12,07	2.836.027.698	13,28	3.121.610.210	15	3.407.192.721	16,06	3.692.775.232	17,67	3.978.357.744	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.363.356.415		2.601.341.841		2.839.327.267,58		3.077.312.694		3.315.298.119,80	
Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		3,37	4,06	2.363.356.415	4,41	2.601.341.841	4,80	2.839.327.268	5,23	3.077.312.694	5,69	3.315.298.120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.843.418.004		2.029.046.636		2.214.675.268,71		2.400.303.901		2.585.932.533,44	
Meningkatkan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani (%)		3,37	4,06	1.843.418.004	4,41	2.029.046.636	4,80	2.214.675.269	5,23	2.400.303.901	5,69	2.585.932.533	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.087.143.951		1.196.617.247		1.306.090.543,09		1.415.563.839		1.525.037.135,11	
Meningkatnya Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)		50,56	54,1	1.087.143.951	57,88	1.196.617.247	61,94	1.306.090.543	66,27	1.415.563.839	70,91	1.525.037.135	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.648.441.100		1.814.435.934		1.980.430.769		2.146.425.604		2.312.420.439	
2.07.03 - Program Peatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					1.488.914.542		1.638.845.360		1.788.776.178,58		1.938.706.997		2.088.637.815,47	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Keselamatan dan perlindungan (%)		0	0	1.488.914.542	0	1.638.845.360	0	1.788.776.179	0	1.938.706.997	0	2.088.637.815	
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		77,02	72,74		78,77		82,27		93,92		100		

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					159.526.558		175.590.574		191.654.590,56		207.718.607		223.782.623,09	
Meningkatnya persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan dan terserap ke dunia kerja (formal maupun informal)	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)		0	0	159.526.558	0	175.590.574	0	191.654.591	0	207.718.607	0	223.782.623	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.607.965.413		3.959.250.717		4.310.536.022		4.661.821.327		5.013.106.632	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					850.808.310		936.483.063		1.022.157.816		1.107.832.570		1.193.507.323	
Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Gender	Partisipasi perempuan di lembaga swasta / partisipasi angkatan kerja perempuan (%)		26,25	27,56	850.808.310	28,94	936.483.063	30,39	1.022.157.816	31,91	1.107.832.570	33,5	1.193.507.323	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		89,06	89,29		89,52		89,75		89,99		90,22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		0,605	0,599		0,593		0,587		0,581		0,575		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					283.602.770		312.161.021		340.719.272		369.277.523		397.835.774	
Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)		100	100	283.602.770	100	312.161.021	100	340.719.272	100	369.277.523	100	397.835.774	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio akseptor KB (%)		80,67	84,21	346.533.559	87,91	369.398.976	91,77	392.264.393	95,80	415.129.810	100	437.995.227	
2.08.05 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (%)		61,95	66,28	236.335.642	70,92	260.134.184	75,89	283.932.727	81,20	307.731.269	86,88	331.529.812	
2.08.06 -Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)		2	2	1.418.013.849	2	1.560.805.105	2	1.703.596.361	2	1.846.387.616	2	1.989.178.872	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					472.671.283		520.268.368		567.865.454		615.462.539		663.059.624	
Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)		100	100	472.671.283	100	520.268.368	100	567.865.454	100	615.462.539	100	663.059.624	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					5.081.423.005		5.191.897.685		5.357.372.365		5.387.847.045		5.768.321.725	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.743.000.000		2.618.000.000		2.548.000.000		2.343.000.000		2.488.000.000	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	2.743.000.000	100	2.618.000.000	100	2.548.000.000	100	2.343.000.000	100	2.488.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					649.923.014		715.369.006		780.814.999		846.260.991		911.706.982,95	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Ketersediaan pangan utama Beras / Non Beras		17.193	18.224	649.923.014	19.318	715.369.006	20.477	780.814.999	21.705	846.260.991	#####	911.706.983	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.559.815.234		1.716.885.615		1.873.955.997		2.031.026.378		2.188.096.759	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		81	82	1.559.815.234	84	1.716.885.615	86	1.873.955.997	87	2.031.026.378	89	2.188.096.759	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					85.789.838		94.428.709		103.067.580		111.706.451		120.345.322	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)		100	100	85.789.838	100	94.428.709	100	103.067.580	100	111.706.451	100	120.345.322	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					42.894.918,94		47.214.354,42		51.533.789,91		55.853.225,39		60.172.660,87	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)		100	100	42.894.919	100	47.214.354	100	51.533.790	100	55.853.225	100	60.172.661	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					6.050.562.563		6.981.442.415		7.942.501.204		8.339.014.974		8.795.164.351	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.805.373.968		4.510.167.666		5.245.140.300		5.415.567.915		5.645.631.137	
terwujudnya dukungan administratif dan operasional yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)		100	100	3.805.373.968	100	4.510.167.666	100	5.245.140.300	100	5.415.567.915	100	5.645.631.137	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					709.006.925		780.402.552		851.798.180		923.193.808		994.589.436	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tercapainya peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan indikator seperti penurunan tingkat polusi udara, perbaikan kualitas air, dan pelestarian keanekaragaman hayati	Presentase cakupan area pelayanan (%)		20,19	20,7	709.006.925	21,23	780.402.552	21,76	851.798.180	22,31	923.193.808	22,88	994.589.436	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					118.167.821		130.067.092		141.966.363		153.865.635		165.764.906	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragam Hayati	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota		100	100	118.167.821	100	130.067.092	100	141.966.363	100	153.865.635	100	165.764.906	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					709.006.925		780.402.552		851.798.180		923.193.808		994.589.436	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengatahuan Tradisional dan Hak MHA Yang terkait PPLH	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota		100	100	709.006.925	100	780.402.552	100	851.798.180	100	923.193.808	100	994.589.436	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					118.167.821		130.067.092		141.966.363		153.865.635		165.764.906	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota (%)		96,14	96,33	59.083.910	96,53	65.033.546	96,72	70.983.182	96,91	76.932.817	97,11	82.882.453	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)		0	0	59.083.910	0	65.033.546	0	70.983.182	0	76.932.817	0	82.882.453	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					590.839.104		650.335.460		709.831.817		769.328.173		828.824.530	
Meningkatnya Tata Kelolaan Persampahan	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota (%)		96,14	96,33	590.839.104	96,53	650.335.460	96,72	709.831.817	96,91	769.328.173	97,11	828.824.530	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Penanganan Sampah (Ton)		22088	22529		22980		23440		23908		24387		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL					7.445.377.189		8.110.049.499		8.706.221.808		9.476.394.118		10.031.566.428	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.955.000.000		3.167.500.000		3.311.500.000		3.629.500.000		3.732.500.000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	2.955.000.000	100	3.167.500.000	100	3.311.500.000	100	3.629.500.000	100	3.732.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					2.363.356.415		2.601.341.841		2.839.327.268		3.077.312.694		3.315.298.120	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (persen)		61,95	66,28	2.363.356.415	70,92	2.601.341.841	75,89	2.839.327.268	81,2	3.077.312.694	86,88	3.315.298.120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					1.654.349.491		1.820.939.289		1.987.529.087		2.154.118.886		2.320.708.684	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)		78,5	82,4	1.654.349.491	86,48	1.820.939.289	90,77	1.987.529.087	95,27	2.154.118.886	100	2.320.708.684	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					472.671.283		520.268.368		567.865.454		615.462.539		663.059.624	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (persen)		61,95	66,28	472.671.283	70,92	520.268.368	75,89	567.865.454	81,2	615.462.539	86,88	663.059.624	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.677.995.922		7.775.476.634		7.872.957.346		7.970.438.058		8.067.918.771	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.698.000.000		6.698.000.000		6.698.000.000		6.698.000.000		6.698.000.000	
Terwujudnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada perangkat daerah dengan Baik	Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Persentase)	100	100	100	6.698.000.000	100	6.698.000.000	100	6.698.000.000	100	6.698.000.000	100	6.698.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					34.653.355,94		36.939.897,62		39.226.439,31		41.512.981,00		43.799.522,69	
Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)		64	64	34.653.356	65	36.939.898	66	39.226.439	66	41.512.981	67	43.799.523	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					236.335.641,54		260.134.184,15		283.932.726,76		307.731.269,37		331.529.811,98	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Desa)		100	100	236.335.642	100	260.134.184	100	283.932.727	100	307.731.269	100	331.529.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					709.006.924,61		780.402.552,44		851.798.180,27		923.193.808,11		994.589.435,94	
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase Posyandu aktif (%)		100	100	709.006.925	100	780.402.552	100	851.798.180	100	923.193.808	100	994.589.436	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.088.606.599		4.500.321.386		4.912.036.173		5.323.750.960		5.735.465.747	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					408.860.660		450.032.139		491.203.617		532.375.096		573.546.575	
Terwujudnya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Rasio akseptor KB (%)		80,67	84,21	408.860.660	87,91	450.032.139	91,77	491.203.617	95,8	532.375.096	100	573.546.575	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.635.442.639		1.800.128.554		1.964.814.469		2.129.500.384		2.294.186.299	
Terkendalinya Angka Kelahiran dan Terpenuhinya Kebutuhan ber-KB	Cakupan peserta KB aktif/Angka pemakaiankontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)		80,67	84,21	1.635.442.639	87,91	1.800.128.554	91,77	1.964.814.469	95,8	2.129.500.384	100	2.294.186.299	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.044.303.299		2.250.160.693		2.456.018.086		2.661.875.480		2.867.732.874	
Terciptanya Keluarga Yang Mandiri dan Berkualitas	Keluarga Prasejahtra dan Keluarga Sejahtera I (%)		14,77	15,51	2.044.303.299	16,9	2.250.160.693	17,1	2.456.018.086	17,96	2.661.875.480	18,86	2.867.732.874	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)		67,5	68,7		69,8		70,8		71,8		72,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Keluarga (BANGGA) (Indeks)	58,86	61,58	64,31		67,03		69,76		72,48		75,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					8.723.698.981		9.869.128.578		11.136.395.675		12.543.775.896		14.112.286.212	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.415.000.000		6.227.250.000		7.161.337.500		8.235.538.125		9.470.868.844	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	5.415.000.000	100	6.227.250.000	100	7.161.337.500	100	8.235.538.125	100	9.470.868.844	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.323.479.593		1.456.751.431		1.590.023.270		1.723.295.108		1.856.566.947	
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Layanan Angkutan Darat (Persentase)		55,13	57,88	1.323.479.593	60,78	1.456.751.431	63,81	1.590.023.270	67	1.723.295.108	70,36	1.856.566.947	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Rasio)		0,63	0,63		0,63		0,63		0,63		0,63		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kepemilikan KIR (Persentase)		>50%	>55%		>60%		>65%		>70%		>75%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Pemasangan Rambu rambu (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.985.219.389		2.185.127.147		2.385.034.905		2.584.942.663		2.784.850.421	
Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran	Jumlah arus Penumpang Angkutan Laut (Orang)		84055	88257	1.985.219.389	92670	2.185.127.147	97304	2.385.034.905	102169	2.584.942.663	1E+05	2.784.850.421	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					2.894.061.189		3.278.031.810		3.576.502.432		3.914.973.053		4.251.443.674	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					724.500.000		890.000.000		970.000.000		1.090.000.000		1.208.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan		100	100	100	724.500.000	100	890.000.000	100	970.000.000	100	1.090.000.000	100	1.208.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					964.249.417		1.061.347.471		1.158.445.525		1.255.543.579		1.352.641.633	
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		2,09	2,23	964.249.417	2,38	1.061.347.471	2,54	1.158.445.525	2,71	1.255.543.579	2,89	1.352.641.633	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.205.311.772		1.326.684.339		1.448.056.906		1.569.429.474		1.690.802.041	
Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Presentase Pengguna System Informasi Daerah (%)	34,2	45,67	52,82	1.205.311.772	64,08	1.326.684.339	72,93	1.448.056.906	84,64	1.569.429.474	98,64	1.690.802.041	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Presentase Peningkatan System Elektronik Sesuai Peraturan (Persentase)	25,9	34,9	46,74		61,73		73,97		89,75		98,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya System Yang Terkoneksi Server Pemerintah Daerah (Laporan)	4	5	8		12		14		16		19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.414.162.560		4.857.230.580		5.320.778.301		5.806.853.694		6.317.709.526	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.047.970.117		2.252.767.128		2.478.043.841		2.725.848.225		2.998.433.048	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	2.047.970.117	100	2.252.767.128	100	2.478.043.841	100	2.725.848.225	100	2.998.433.048	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					614.472.668		676.348.879		738.225.090		800.101.300		861.977.511	
Meningkatnya Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	0	0	0	614.472.668	0	676.348.879	0	738.225.090	0	800.101.300	0	861.977.511	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					123.367.205		135.790.044		148.212.883		160.635.723		173.058.562	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Koperasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel	Persentase koperasi aktif (%)	0	0	0	123.367.205	0	135.790.044	0	148.212.883	0	160.635.723	0	173.058.562	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					189.068.513		208.107.347		227.146.181		246.185.015		265.223.850	
Tercapainya SDM Koperasi yang Profesional	Pelaksana Koperasi Merah Putih yang Profesional	100	100	100	189.068.513	100	208.107.347	100	227.146.181	100	246.185.015	100	265.223.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.439.284.057		1.584.217.181		1.729.150.306		1.874.083.430		2.019.016.555	
Terjadi peningkatan rata-rata volume penjualan dan keuntungan bersih UMKM yang menjadi sasaran program secara signifikan dan berkelanjutan	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	0	0	0	1.439.284.057	0	1.584.217.181	0	1.729.150.306	0	1.874.083.430	0	2.019.016.555	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.296.716.831		5.967.683.683		6.336.654.535		7.015.125.387		7.401.096.240	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					520.004.000		715.000.000		608.000.000		810.500.000		720.500.000	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	520.004.000	100	715.000.000	100	608.000.000	100	810.500.000	100	720.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					472.671.283		520.268.368		567.865.454		615.462.539		663.059.624	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (Investor)		1052	1104	472.671.283	1160	520.268.368	1218	567.865.454	1278	615.462.539	1342	663.059.624	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN (%)		25,36	26,63		27,96		29,35		30,82		32,36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					236.335.642		260.134.184		283.932.727		307.731.269		331.529.812	
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal (Investor)	0	0	0	236.335.642	0	260.134.184	0	283.932.727	0	307.731.269	0	331.529.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					3.308.698.981		3.641.878.578		3.975.058.175		4.308.237.771		4.641.417.368	
Jumlah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin Usaha (Perusahaan/UKM/IKM)	0	0	0	3.308.698.981	0	3.641.878.578	0	3.975.058.175	0	4.308.237.771	0	4.641.417.368	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					709.006.925		780.402.552		851.798.180		923.193.808		994.589.436	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terkendalinya pelaksanaan penanaman modal di Daerah	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMA/PMDN (%)	0	0	0	709.006.925	0	780.402.552	0	851.798.180	0	923.193.808	0	994.589.436	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Jumlah Pemanfaatan Data dan Informasi (Data)	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					14.091.610.891		15.326.623.052		16.561.635.213		17.796.647.374		19.031.659.535	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					5.299.925.025		5.649.631.401		5.999.337.777		6.349.044.154		6.698.750.530	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	0	50	100	5.299.925.025	100	5.649.631.401	100	5.999.337.777	100	6.349.044.154	100	6.698.750.530	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					4.395.842.933		4.838.495.825		5.281.148.718		5.723.801.610		6.166.454.503	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan atlet muda (%)		25	25	4.395.842.933	26	4.838.495.825	27	5.281.148.718	27	5.723.801.610	28	6.166.454.503	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					4.395.842.933		4.838.495.825		5.281.148.718		5.723.801.610		6.166.454.503	
Meningkatnya Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	100	100	100	4.395.842.933	100	4.838.495.825	100	5.281.148.718	100	5.723.801.610	100	6.166.454.503	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					120.531.177		132.668.434		144.805.691		156.942.947		169.080.204	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					120.531.177		132.668.434		144.805.691		156.942.947		169.080.204	
Meningkatkan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah	Presentase Pengamanan Informasi (Persentase)	23,44	32,32	43,45	120.531.177	53,35	132.668.434	65,66	144.805.691	73,54	156.942.947	87,34	169.080.204	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					8.226.870.893		9.004.350.978		9.781.831.062		10.559.311.146		11.336.791.231	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					4.395.842.933		4.838.495.825		5.281.148.718		5.723.801.610		6.166.454.503	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya aktualisasi kesenian daerah, sarana prasarana lembaga adat, dan tersedianya dokumen PPKD	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	40	50	100	4.395.842.933	100	4.838.495.825	100	5.281.148.718	100	5.723.801.610	100	6.166.454.503	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					709.006.925		780.402.552		851.798.180		923.193.808		994.589.436	
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya					709.006.925		780.402.552		851.798.180		923.193.808		994.589.436	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					1.654.349.491		1.820.939.289		1.987.529.087		2.154.118.886		2.320.708.684	
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu					1.654.349.491		1.820.939.289		1.987.529.087		2.154.118.886		2.320.708.684	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.467.671.546		1.564.513.311		1.661.355.077		1.758.196.843		1.855.038.608	
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	1.467.671.546	100	1.564.513.311	100	1.661.355.077	100	1.758.196.843	100	1.855.038.608	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.676.991.378		1.717.207.611		1.757.423.844		1.797.640.078		1.837.856.311	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.067.500.000		1.067.500.000		1.067.500.000		1.067.500.000		1.067.500.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	100	100	100	1.067.500.000	100	1.067.500.000	100	1.067.500.000	100	1.067.500.000	100	1.067.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					609.491.378		649.707.611		689.923.844		730.140.078		770.356.311	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (pengunjung)		3590	3769	609.491.378	3958	649.707.611	4156	689.923.844	4363	730.140.078	4582	770.356.311	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					326.143.185,32		358.985.174,12		391.827.162,93		424.669.151,73		457.511.140,53	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					163.071.593		179.492.587		195.913.581		212.334.576		228.755.570	
Jumlah arsip statis yang dikelola	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	100	100	100	163.071.593	100	179.492.587	100	195.913.581	100	212.334.576	100	228.755.570	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					163071592,7		179492587,1		195913581,5		212.334.576		228755570,3	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
Jumlah arsip akuisisi	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kali)	10	10	10	163071592,7	10	179492587,1	10	195913581,5	10	212.334.576	10	228755570,3	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					13.388.069.246		13.508.025.524		15.885.981.803		15.872.938.081		18.763.894.359	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.298.000.000		5.704.000.000		7.368.000.000		6.641.000.000		8.818.000.000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	6.298.000.000	100	5.704.000.000	100	7.368.000.000	100	6.641.000.000	100	8.818.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					3.545.034.623		3.902.012.762		4.258.990.901		4.615.969.041		4.972.947.180	
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	0	0,24	0,25	3.545.034.623	0,27	3.902.012.762	0,29	4.258.990.901	0,31	4.615.969.041	0,33	4.972.947.180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.127.020.774		2.341.207.657		2.555.394.541		2.769.581.424		2.983.768.308	
Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		124,3	133	2.127.020.774	142,3	2.341.207.657	152,26	2.555.394.541	162,92	2.769.581.424	174,3	2.983.768.308	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.418.013.849		1.560.805.105		1.703.596.361		1.846.387.616		1.989.178.872	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jumlah UMKM perikanan yang aktif dan bersertifikat	Jumlah UMKM perikanan yang aktif dan bersertifikat (Unit)	0	0	0	1.418.013.849	0	1.560.805.105	0	1.703.596.361	0	1.846.387.616	0	1.989.178.872	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					7.017.705.906		7.522.281.130		8.026.856.355		8.631.431.579		9.136.006.804	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.000.000.000		3.100.000.000		3.200.000.000		3.400.000.000		3.500.000.000	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	3.000.000.000	100	3.100.000.000	100	3.200.000.000	100	3.400.000.000	100	3.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.406.197.067		1.547.798.396		1.689.399.724		1.831.001.053		1.972.602.381	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD (%)		100	100	1.406.197.067	100	1.547.798.396	100	1.689.399.724	100	1.831.001.053	100	1.972.602.381	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					Rp 401.770.591		Rp 442.228.113		Rp 482.685.635		523.143.158		Rp 563.600.680	
Jumlah Event Promosi Pariwisata					Rp 401.770.591		Rp 442.228.113		Rp 482.685.635		Rp 523.143.158		Rp 563.600.680	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya promosi dan kerjasama pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)		100	100	Rp 401.770.591	100	Rp 442.228.113	100	Rp 482.685.635	100	Rp 523.143.158	100	Rp 563.600.680	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					803.541.181		884.456.226		965.371.271		1.046.286.316		1.127.201.361	
Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata					803.541.181		884.456.226		965.371.271		1.046.286.316		1.127.201.361	
Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	0	0	803.541.181	0	884.456.226	0	965.371.271	0	1.046.286.316	0	1.127.201.361	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.406.197.067		1.547.798.396		1.689.399.724		1.831.001.053		1.972.602.381	
Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0	0	1.406.197.067	0	1.547.798.396	0	1.689.399.724	0	1.831.001.053	0	1.972.602.381	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					4.286.836.008		4.658.093.273		5.529.350.537		5.400.607.802		6.671.865.067	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					600.000.000		600.000.000		1.100.000.000		600.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat (%)	100	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	1.100.000.000	100	600.000.000	100	1.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.225.981.507		3.550.831.614		3.875.681.720		4.200.531.827		4.525.381.934	
Tersedianya Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Persentase)		34,14	35,51	3.225.981.507	36,94	3.550.831.614	38,42	3.875.681.720	39,96	4.200.531.827	41,57	4.525.381.934	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					460.854.501		507.261.659		553.668.817		600.075.975		646.483.133	
Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%)	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	0	0	0	460.854.501	0	507.261.659	0	553.668.817	0	600.075.975	0	646.483.133	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					378.137.026		416.214.695		454.292.363		492.370.031		530.447.699	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					378.137.026		416.214.695		454.292.363		492.370.031		530.447.699	
Meningkatnya Kelestarian Sumber daya Alam Hayati	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	0	0	0	378.137.026		416.214.695		454.292.363		492.370.031		530.447.699	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.997.481.619		3.293.465.279		3.612.528.642		3.956.979.675		4.329.357.147	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.007.970.117		2.208.767.128		2.429.643.841		2.672.608.225		2.939.869.048	
Peningkatan kualitas layanan Publik Urusan Dinas Perdagangan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	2.007.970.117	100	2.208.767.128	100	2.429.643.841	100	2.672.608.225	100	2.939.869.048	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					189.068.513		208.107.347		227.146.181		246.185.015		265.223.850	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	0	0	189.068.513	0	208.107.347	0	227.146.181	0	246.185.015	0	265.223.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					141.801.385		156.080.510		170.359.636		184.638.762		198.917.887	
Peningkatan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, serta mengurangi disparitas harga	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	0	0	0	141.801.385	0	156.080.510	0	170.359.636	0	184.638.762	0	198.917.887	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	
Peningkatan daya saing produk nasional, penyerapan tenaga kerja	Persentase peningkatan investasi di kabupaten (%)	0	0	0	300.000.000	0	330.000.000	0	363.000.000	0	399.300.000	0	439.230.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					236.335.642		260.134.184		283.932.727		307.731.269		331.529.812	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepercayaan konsumen, berkurangnya kasus peredaran barang berbahaya, dan meningkatnya keadilan bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik yang adil	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat (%)	0	0	0	236.335.642	0	260.134.184	0	283.932.727	0	307.731.269	0	331.529.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					122.305.962		130.376.109		138.446.256		146.516.404		154.586.551	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan kemandirian bangsa, serta wujud nyata nasionalisme melalui peningkatan penggunaan produk lokal	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	0	0	122.305.962	0	130.376.109	0	138.446.256	0	146.516.404	0	154.586.551	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.118.131.877		2.293.310.871		2.476.489.865		2.668.468.859		2.870.127.853	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.081.796.235		1.153.176.686		1.224.557.138		1.295.937.589		1.367.318.041	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kontribusi industri terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, dan terwujudnya industri yang berkelanjutan dan terintegrasi	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))		1,71	1,73	1.081.796.235	1,74	1.153.176.686	1,76	1.224.557.138	1,77	1.295.937.589	1,79	1.367.318.041	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					236.335.642		260.134.184		283.932.727		307.731.269		331.529.812	
Meningkatnya target persentase pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah izin yang diterbitkan (disebut juga IKK Outcome) dan penggantian izin tradisional dengan sistem perizinan usaha berbasis risiko, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB)	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	0	0	0	236.335.642	0	260.134.184	0	283.932.727	0	307.731.269	0	331.529.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					800.000.000		880.000.000		968.000.000		1.064.800.000		1.171.280.000	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pemenuhan target persentase pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah izin yang diterbitkan (disebut juga IKK Outcome) dan penggantian izin tradisional dengan sistem perizinan usaha berbasis risiko, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri dikeluarkan Besaryang oleh instansi terkait (%)	0	0	0	800.000.000	0	880.000.000	0	968.000.000	0	1.064.800.000	0	1.171.280.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					332.051.576		365.488.529		398.925.481		432.362.433		465.799.386	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					142.983.063		157.381.181		171.779.300		186.177.418		200.575.536	
Kawasan transmigrasi memiliki dokumen legalitas lahan yang sah dan tuntas (sertifikat hak atas tanah) serta kepastian hukum tata ruang yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (Persentase)				142.983.063		157.381.181		171.779.300		186.177.418		200.575.536	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRAS					189.068.513		208.107.347		227.146.181		246.185.015		265.223.850	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)				189.068.513		208.107.347		227.146.181		246.185.015		265.223.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					109.490.554.134		110.430.587.325		113.327.546.015		116.205.026.481		119.086.992.311	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					83.477.081.000		81.814.591.000		82.109.026.500		82.383.983.775		82.663.426.414	
Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP (Nilai)	CC	C	B	83.477.081.000	B	81.814.591.000	B	82.109.026.500	B	82.383.983.775	A	82.663.426.414	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelolah pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					20.584.834.378		22.657.687.439		24.730.540.501		26.803.393.562		28.876.246.623	
Meningkatnya capaian program pemerintahan untuk Kesejahteraan Masyarakat.	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	40	40	42,86	20.584.834.378	55,55	22.657.687.439	63,63	24.730.540.501	70,42	26.803.393.562	70,42	28.876.246.623	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					5.428.638.757		5.958.308.886		6.487.979.015		7.017.649.144		7.547.319.273	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah	Persentase kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat (%)	0	0	0	5.428.638.757	0	5.958.308.886	0	6.487.979.015	0	7.017.649.144	0	7.547.319.273	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Proses Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Nilai)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Evaluasi Pengawasan, Pengendalian Program dan Percepatan Penyerapan APBD (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					84.855.662.775		93.371.326.037		102.404.376.028		112.056.551.422		122.285.764.758	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					51.768.672.960		56.952.540.256		62.653.794.282		68.974.173.710		75.871.591.081	
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	51.768.672.960	100	56.952.540.256	100	62.653.794.282	100	68.974.173.710	100	75.871.591.081	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					33.086.989.815		36.418.785.781		39.750.581.746		43.082.377.712		46.414.173.677	
Meningkatnya Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100	33.086.989.815	100	36.418.785.781	100	39.750.581.746	100	43.082.377.712	100	46.414.173.677	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					13.534.657.419		14.244.706.297		14.996.102.387		16.033.498.477		16.920.894.567	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.711.347.212		7.835.000.000		8.000.000.000		8.451.000.000		8.752.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	7.711.347.212	100	7.835.000.000	100	8.000.000.000	100	8.451.000.000	100	8.752.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					4.915.781.344		5.410.791.030		5.905.800.717		6.400.810.403		6.895.820.089	
Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	4.915.781.344	100	5.410.791.030	100	5.905.800.717	100	6.400.810.403	100	6.895.820.089	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					907.528.863		998.915.267		1.090.301.671		1.181.688.074		1.273.074.478	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Sosial dan Budaya	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	907.528.863	100	998.915.267	100	1.090.301.671	100	1.181.688.074	100	1.273.074.478	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					100.000.000									

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Presentase Laporan Hasil Riset dan Inovasi	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02 - KEUANGAN					18.885.596.944		20.064.325.734		21.246.638.324		22.432.606.389		23.622.303.040	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.959.500.000		9.138.690.000		9.321.463.800		9.507.893.076		9.698.050.937	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan					8.959.500.000		9.138.690.000		9.321.463.800		9.507.893.076		9.698.050.937	
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	8.959.500.000	100	9.138.690.000	100	9.321.463.800	100	9.507.893.076	100	9.698.050.937	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,96	2,09	2,23		2,38		2,54		2,71		2,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					6.451.963.014		7.101.663.227		7.751.363.440		8.401.063.654		9.050.763.867	
Meningkatnya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)				6.451.963.014		7.101.663.227		7.751.363.440		8.401.063.654		9.050.763.867	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Indeks Akses Keuangan Daerah		2,49	2,56		2,63		2,7		2,77		2,8		

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					744.457.270,84		819.422.680,06		894.388.089,29		969.353.499		1.044.318.907,74	
Tersedianya dokumen barang milik daerah, dan kartu inventarisasi barang milik daerah	Persentase Penurunan Masalah Penilaian dan Pengakuan Aset (Persentase)	0	0	0	744.457.271	0	819.422.680	0	894.388.089	0	969.353.499	0	1.044.318.908	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.729.676.660		3.004.549.827		3.279.422.994		3.554.296.161		3.829.169.328	
Meningkatnya Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	4,73	5,21	5,7	2.729.676.660	6,18	3.004.549.827	6,66	3.279.422.994	7,14	3.554.296.161	7,63	3.829.169.328	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					6.871.050.158		7.795.278.788		8.745.392.065		9.648.192.621		10.219.654.023	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.744.029.384		5.454.071.131		6.189.997.524		6.878.611.197		7.235.885.715	
Meningkatnya Tata Kelolah Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	4.744.029.384	100	5.454.071.131	100	6.189.997.524	100	6.878.611.197	100	7.235.885.715	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.127.020.774		2.341.207.657		2.555.394.541		2.769.581.424		2.983.768.308	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sub Indikator Pengelolaan Manajemen ASN (Persentase)	0	0	0	2.127.020.774	0	2.341.207.657	0	2.555.394.541	0	2.769.581.424	0	2.983.768.308	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase ASN yang berkinerja minimal Baik (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase ASN yang berpendidikan Minimal D3 (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase ASN yang disiplin (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.418.013.849		1.560.805.105		1.703.596.361		1.846.387.616		1.989.178.872	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.418.013.849		1.560.805.105		1.703.596.361		1.846.387.616		1.989.178.872	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatus Sipil Negara	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0	0	1.418.013.849	0	1.560.805.105	0	1.703.596.361	0	1.846.387.616	0	1.989.178.872	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.748.883.747		1.924.992.963		2.101.102.178		2.277.211.393		2.453.320.609	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.748.883.747		1.924.992.963		2.101.102.178		2.277.211.393		2.453.320.609	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAK TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	0	0	1.748.883.747	0	1.924.992.963	0	2.101.102.178	0	2.277.211.393	0	2.453.320.609	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					14.237.824.052		14.980.384.703		15.662.945.353		16.465.506.004		17.518.922.242	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.856.761.731		7.956.761.731		7.996.761.731		8.156.761.731		8.567.617.319	
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	7.856.761.731	100	7.956.761.731	100	7.996.761.731	100	8.156.761.731	100	8.567.617.319	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.785.796.741		5.267.717.229		5.749.637.717		6.231.558.205		6.713.478.693	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Nilai)	0	0	0	4.785.796.741	0	5.267.717.229	0	5.749.637.717	0	6.231.558.205	0	6.713.478.693	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Peningkatan Kebahlitan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.595.265.580		1.755.905.743		1.916.545.906		2.077.186.068		2.237.826.231	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	100	100	100	1.595.265.580	100	1.595.265.580	100	1.595.265.580	100	1.595.265.580	100	1.595.265.580	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					42.510.454.808		50.194.897.650		60.422.514.808		74.099.002.507		91.320.157.415	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.743.505.456		44.948.633.344		54.696.935.548		67.894.108.292		84.635.948.246	
Meningkatnya Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,96	2,09	2,23	37.743.505.456	2,38	44.948.633.344	2,54	54.696.935.548	2,71	67.894.108.292	2,89	84.635.948.246	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata kelolah Pemerintahan.	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,96	2,09	2,23		2,38		2,54		2,71		2,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.996.894.370		2.197.977.776		2.399.061.181		2.600.144.587		2.801.227.993	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	0	0	1.996.894.370	0	2.197.977.776	0	2.399.061.181	0	2.600.144.587	0	2.801.227.993	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tingat Prtisipasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,96	2,09	2,23			2,38		2,54		2,71		2,89	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.656.074.741		1.822.838.269		1.989.601.796		2.156.365.324		2.323.128.851	
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan (Persentase)	100	100	100	1.656.074.741	100	1.822.838.269	100	1.989.601.796	100	2.156.365.324	100	2.323.128.851	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan (Persentase)	100	100	100			100			100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan (Persentase)	100	100	100			100		100			100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Telaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarkat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					273.653.039		301.209.372		328.765.704		356.322.037		383.878.369	
Meningkatnya Kelancaran Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Persentase)	100	100	100	273.653.039	100	301.209.372	100	328.765.704	100	356.322.037	100	383.878.369	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di tingkat Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,96	2,09	2,23		2,38		2,54		2,71		2,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahah yang baik	Persentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					840.327.202		924.238.890		1.008.150.578		1.092.062.267		1.175.973.955	
Meningkatnya Pelayanan dalam Memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa (Angka)	0	0	0	840.327.202	0	924.238.890	0	1.008.150.578	0	1.092.062.267	0	1.175.973.955	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,96	2,09	2,23		2,38		2,54		2,71		2,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan untuk urusan pemerintahan desa (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.550.000.000		12.570.000.000		11.055.000.000		15.505.000.000		10.155.000.000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.925.000.000		5.145.000.000		5.805.000.000		5.805.000.000		5.805.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100	2.925.000.000	100	5.145.000.000	100	5.805.000.000	100	5.805.000.000	100	5.805.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.002.063.120		1.102.968.941		1.203.874.761		1.304.780.582		1.405.686.403	
Meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.002.063.120	100	1.102.968.941	100	1.203.874.761	100	1.304.780.582	100	1.405.686.403	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					501.031.560		551.484.470		601.937.381		652.390.291		702.843.201	
Meningkatnya Etika dan Budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	501.031.560	100	551.484.470	100	601.937.381	100	652.390.291	100	702.843.201	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					751.547.340		827.226.706		902.906.071		978.585.437		1.054.264.802	
Meningkatnya Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	0	0	0	751.547.340	0	827.226.706	0	902.906.071	0	978.585.437	0	1.054.264.802	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					199.766.405		212.947.645		226.128.885		239.310.126		239.310.127	

RPJMD KABUPATEN SERAM BAGAIAN TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Prosentase Konflik Sosial yang yang diselesaikan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	0	0	0	199.766.405	0	212.947.645	0	226.128.885	0	239.310.126	0	239.310.127	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					940.660.662.939		1.028.762.919.551		1.114.207.433.555		1.210.986.317.476		1.307.830.222.308	

Target indikator makro sebagaimana diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2025 – 2029 menampilkan dua aspek utama: keberlanjutan kemajuan dan upaya mengurangi kesenjangan. Dari sisi keberlanjutan, dokumen menunjukkan arah yang jelas menuju pertumbuhan yang inklusif dan peningkatan kapasitas manusia. Dari sisi kesenjangan, terdapat pengakuan bahwa kondisi geografis dan infrastrukturnya menuntut pendekatan yang bersifat adaptif dan terfokus. Dengan menggunakan indikator makro sebagai panduan operasional dalam lima tahun ke depan, Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki landasan strategis untuk mewujudkan visi “Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing” secara lebih konkret.

Tabel 4.2 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun Ke						Sumber
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,58	4,40	4,90	5,40	5,90	6,40	6,90	RPJMD Provinsi
				3,78	3,98	4,20	4,43	4,68	4,94	Data Diolah BPS Kab. SBT
2	PDRB Perkapita(ADHK)	Rp Juta	14,98	15,50	16,46	17,42	18,37	19,33	20,29	RPJMD Provinsi
				15,26	15,55	15,85	16,15	16,45	16,77	Data Diolah BPS Kab. SBT
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	%	5,92	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	RPJMD Provinsi
				6,13	6,35	6,57	6,80	7,04	7,28	Data Diolah BPS Kab. SBT
4	Tingkat Kemiskinan	%	21,03	15,76	14,81	13,93	13,09	12,04	11,32	RPJMD Provinsi
				20,40	19,79	19,19	18,62	18,06	17,52	Data Diolah BPS Kab. SBT
5	Rasio Gini	Indeks	0,2010	0,1833	0,1627	0,1443	0,1281	0,1127	0,1000	RPJMD Provinsi
				0,2002	0,1994	0,1986	0,1978	0,1970	0,1962	Data Diolah BPS Kab. SBT
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,28	70,88	71,51	72,14	72,78	73,44	74,09	RPJMD Provinsi
				71,97	73,69	75,46	77,27	79,13	81,03	Data Diolah BPS Kab. SBT
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	82,62	84,47	84,64	84,81	84,98	85,16	85,33	RPJMD Provinsi
				84,47	84,64	84,81	84,98	85,16	85,33	Data Diolah BPS Kab. SBT
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,24	2,99	2,92	2,85	2,77	2,70	2,63	RPJMD Provinsi
				3,17	3,11	3,04	2,98	2,91	2,85	Data Diolah BPS Kab. SBT

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025–2030 merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lintas sektor selama lima tahun ke depan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja, keberhasilan implementasi RPJMD diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan dampak dari pelaksanaan kebijakan publik daerah.

Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Seram Bagian Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	59 (CC)	61,95(B)	65,05(B)	68,30(B)	71,71(BB)	75,30(BB)
2	Tingkat Kemiskinan	(%)	20,40	19,79	19,19	18,62	18,06	17,52
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,97	73,69	75,46	77,27	79,13	81,03
4	Prevalensi Stunting	%	33,25	31,59	30,01	28,51	27,08	25,73
5	Rasio Gini	angka	0,200	0,199	0,199	0,198	0,197	0,196
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	3,11	3,04	2,98	2,91	2,85
7	Indeks Infrastruktur	angka	2,99	3,02	3,05	3,08	3,11	3,14
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,78	3,98	4,20	4,43	4,68	4,94
9	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	15,26	15,55	15,85	16,15	16,45	16,77
10	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	1,71	1,73	1,74	1,76	1,77	1,79
11	Persentase Desa Mandiri	%	3,54	4,04	4,55	5,05	5,56	6,06
12	Indeks Ketahanan Pangan	angka	72,69	74,87	77,11	79,43	81,81	84,26
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	84.47	84.64	84.81	84.98	85.16	85.33
14	Indeks Risiko Bencana	angka	121,81	118,52	115,32	112,21	109,18	106,23

4.2.2. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) berfungsi sebagai alat evaluasi yang bersifat komprehensif untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan, termasuk dalam aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Melalui IKD, kinerja pemerintah daerah dapat dinilai secara objektif berdasarkan capaian hasil pembangunan, efektivitas pelayanan, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan standar nasional. Dengan demikian, IKD tidak hanya berperan sebagai alat ukur administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan umpan balik bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Periode 2025–2030 menjadi fase strategis dalam konteks pelaksanaan agenda pembangunan jangka menengah daerah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Pada periode ini, target penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk memperkuat integrasi kebijakan pusat dan daerah.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Kabupaten Seram Bagian Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	angka	72,69	74,87	77,11	79,43	81,81	84,26
2	Prevalensi Ketidakcukupan pangan	%	30,01	27,01	24,30	21,87	19,69	17,72
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/orang	2116,03	2199,05	2282,06	2365,08	2448,09	2531,107
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	80,85	81,26	81,66	82,07	82,48	82,89
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	84.47	84.64	84.81	84.98	85.16	85.33
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	76,87	77,64	78,42	79,20	79,99	80,79
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton	22.087,69	22.529,45	22.980,03	23.439,64	23.908,43	24.386,60
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	14,20	15,40	16,00	16,30	16,80	16,90
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	0	0	0	2	3	4
10	Indeks Risiko Bencana	angka	121,81	118,52	115,32	112,21	109,18	106,23
11	Indeks Ketahanan Daerah	angka						
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,61	1,53	1,52	1,51	1,44	1,41
13	Rasio Penduduk	%	103,08	102,91	102,87	102,70	102,59	102,52
14	Kepadatan Penduduk	orang/km ²	29,80	30,26	30,71	31,18	31,63	32,08
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,78	3,98	4,20	4,43	4,68	4,94
2	Tingkat kemiskinan	%	20,40	19,79	19,19	18,62	18,06	17,52
3	PDRB Per Kapita (juta) ADHK	Rp	15,26	15,55	15,85	16,15	16,45	16,77
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	3,11	3,04	2,98	2,91	2,85
5	Indeks Gini	angka	0,2002	0,1994	0,1986	0,1978	0,1970	0,1962
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	71,97	73,69	75,46	77,27	79,13	81,03
7	Usia Harapan Hidup	tahun	69,69	70,67	71,66	72,66	73,68	74,71
8	Integrasi Layanan Primer	angka						
9	Prevalensi Stunting	%	33,25	31,59	30,01	28,51	27,08	25,73
10	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,17	9,33	9,50	9,68	9,86	10,04

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,96	13,00	13,04	13,08	13,11	13,15
12	Angka Literasi/Numerasi	%	40-50	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	52,68	55,20	57,84	60,61	63,50	66,54
14	Indeks Literasi Digital	angka	3,92	4,05	4,19	4,33	4,48	4,63
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	77,02	72,74	78,77	82,27	93,92	100
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	angka	81,35	82,16	82,98	83,81	84,65	85,49
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	63,51	65,68	67,93	70,25	72,66	75,14
19	Indeks Perlindungan Anak	angka	66,08	69,39	72,86	76,50	80,33	84,34
20	Indeks Kualitas Keluarga	angka	75,57	76,32	77,09	77,86	78,64	79,42
21	Indeks Pembangunan Keluarga	angka	60,40	61,80	63,20	64,50	65,80	67,00
22	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,605	0,599	0,593	0,587	0,581	0,575
23	Indeks Pembangunan Gender	angka	89,06	89,29	89,52	89,75	89,99	90,22
24	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	59,46	60,69	61,95	63,23	64,54	65,87
25	Indeks Pembangunan Pemuda	angka	56,67	57,88	59,12	60,38	61,67	62,98
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Angka Ketergantungan	%	46,77	46,67	46,79	47,04	47,41	47,76
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	1,71	1,73	1,74	1,76	1,77	1,79
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%						
5	Rasio Kewirausahaan	%						
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,34	63,70	65,08	66,50	67,95	69,43
7	Indeks Inovasi Daerah	angka	37,74	42,83	48,62	55,18	62,63	71,08
		kategori	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
8	Indeks Ekonomi Hijau	angka	53,71	54,01	54,32	54,63	54,94	55,26
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	angka	67,99	68,38	68,77	69,16	69,55	69,95
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	angka	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	angka	6,36	6,59	6,82	7,06	7,31	7,56

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp	1.361,40	1.406,04	1.452,15	1.499,77	1.548,96	1.599,75
13	Ekspor Barang dan Jasa	Rp	- 1.230,76	- 1.150,70	- 1.075,85	- 1.005,87	- 940,44	- 879,26
14	Indeks Infrastruktur/Indeks kepuasan Layanan Infrastruktur	angka	2,99	3,02	3,05	3,08	3,11	3,14
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	58,33	59,50	60,69	61,90	63,14	64,41
16	Persentase Desa Mandiri	%	3,54	4,04	4,55	5,05	5,56	6,06
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,18	0,20	0,21	0,23	0,25	0,26
18	Indeks Akses Keuangan Daerah	angka	2,49	2,56	2,63	2,70	2,77	2,80
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	kategori	CC	B	B	BB	BB	A
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	2,57	2,74	2,92	3,12	3,33	3,55
		kategori	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	2,09	2,23	2,38	2,54	2,71	2,89
		kategori	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik
5	Indeks Integritas Nasional	angka	72,16	72,75	73,35	73,94	74,54	75,13
6	Persentase Penegakan Perda	%						
7	Persentase Capaian Aksi HAM	%						
8	Indeks Demokrasi Indonesia	%	73,60	77,28	81,15	85,20	89,46	93,94
9	Indeks Rasa Aman	angka						
10	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	angka						
11	Indeks Persepsi Korupsi	angka						
12	Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,00	3,05	3,10	3,14	3,19	3,24
V	INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN							
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,60	2,60	2,58	2,57	2,55	2,54
2	Age Specific Fertility Rate 15-19	Angka	21,30	20,30	19,40	18,70	18,10	17,60
3	Demand Satisfied	%	48,50	49,50	50,40	51,30	52,20	53,00
4	Kehamilan Tidak Diinginkan	Angka	12,20	9,30	8,20	7,80	7,60	7,50
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	57,40	61,90	64,80	66,60	67,80	68,60

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
6	Indeks Lansia Berdaya	Angka	67,50	68,70	69,80	70,80	71,80	72,70
7	Indeks Pengasuhan Remaja	Angka	80,60	81,60	82,60	83,50	84,40	85,30
8	Proporsi Kampung KB Mandiri	Angka	6,70	7,30	7,90	8,50	9,00	9,60
VI	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
1	Pendidikan							
1,01	Pendidikan dasar:							
1.01.01	SD/MI							
	a. Angka Partisipasi Sekolah (%)	%	97	98	99	100	100	100
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah	Angka	124	127	129	132	134	137
	c. Rasio guru/ murid	Angka	01:10	01:10	01:09	01:09	01:08	01:08
	d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per-1.000)	Angka	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16
1.01.02	SMP/MTs							
	a. Angka Partisipasi Sekolah (%)	%	97	100	100	100	100	100
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	%	184	187	191	194	198	201
	c. Rasio guru/ murid	Angka	01:08	01:08	01:08	01:07	01:07	01:07
	d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per-10.000)	Angka	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
1,02	Pendidikan Menengah							
	1. Angka Partisipasi Sekolah (%)	%	32	35	38	41	45	49
	2. Rasio ketersediaan sekolah (%)	%	113	108	103	99	94	90
	3. Rasio guru terhadap murid	Angka	01:09	01:09	01:08	01:08	01:07	01:07
	4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (per- 10.000)	Angka	0,112	0,113	0,114	0,115	0,116	0,117
	5. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (%)	%	96,18	97,44	98,71	100	100	100
1,03	Fasilitas Pendidikan							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	1. Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI (%)	%	14,5	15,22	15,98	16,78	17,62	18,5
	2. Sekolah kondisi bangunan baik SMP/Mts (%)	%	21,11	21,37	21,63	21,89	22,16	22,43
	3. Sekolah kondisi bangunan baik SMA/SMK/MA (%)	%	29,28	30,75	32,28	33,9	35,59	37,37
1,04	PAUD							
	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA (siswa)	Siswa	5.902,30	5.961,32	6.020,93	6.081,14	6.141,96	6.203,38
1,05	Angka Putus Sekolah							
1.05.01	SD/MI	Angka	146,61	131,95	118,75	106,88	96,19	86,57
1.05.02	SMP/MTs	Angka	16,25	15,43	14,66	13,93	13,23	12,57
1.05.03	SMA/SMK/MA	Angka	3,61	3,43	3,26	3,1	2,94	2,79
1,06	Angka Kelulusan							
	1. Angka Kelulusan SD/MI (%)	%	100	100	100	100	100	100
	2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	%	100	100	100	100	100	100
	3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	%	100	100	100	100	100	100
	4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	%	100	100	100	100	100	100
	5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	%	100	100	100	100	100	100
	6. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	%	88,04	88,95	89,86	90,78	91,71	92,65
2	Kesehatan							
2,01	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000)	Angka	39,56	41,54	43,61	45,79	48,08	50,49
2,02	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (/1.000)	Angka	0,7	0,78	0,85	0,94	1,03	1,13
2,03	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)	Angka	0,012	0,013	0,014	0,015	0,017	0,019
2,04	Rasio dokter per satuan penduduk (/1000)	Angka	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2,05	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1000)	Angka	9,13	9,59	10,06	10,57	11,1	11,65
2,06	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	%	100	100	100	100	100	100
2,07	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	%	27,33	28,7	30,13	31,64	33,22	34,88
2,08	Cakupan kelurahan UCI (%)	%	25,06	26,31	27,63	29,01	30,46	31,98
2,09	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	%	100	100	100	100	100	100
2,10	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)	%	12,06	13,26	14,59	16,05	17,65	19,42
2,11	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	90	90	90	90	90	90
2,12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	%						
2,13	Cakupan kunjungan bayi (%)	%	75,33	79,1	83,06	87,21	91,57	96,15
2,14	Cakupan puskesmas (%)	%	49,8	52,29	54,9	57,65	60,53	63,56
2,15	Cakupan pembantu puskesmas (%)	%	51	53,55	56,23	59,04	61,99	65,09
2,16	PHBS							
2,17	Jumlah kematian balita		0	0	0	0	0	0
2,18	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis		8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95
2,19	Cakupan imunisasi bayi lengkap							
2,20	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	59.67	63.46	67.49	71.78	76.34	81.19
2,21	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	100
2,20	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
3	Pekerjaan Umum							
3,01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	%	100,926	102,426	109,491	116,556	123,621	130,686
3,02	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk	Angka	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
3,03	Rasio tempat ibadah mesjid per 1000 penduduk umat Islam	Angka	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
3,04	Rasio tempat ibadah gereja per 1000 penduduk umat Kristen	Angka	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
3,05	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	%	76,87	77,64	78,42	79,2	79,99	80,79
3,06	Persentase rumah tangga pengguna Air Bersih (%)	%	80,85	81,26	81,66	82,07	82,48	82,89
3,07	Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk	Angka						
3,08	Panjang jalan dilalui roda 4 (Km)	Km	645,97	645,97	645,97	645,97	645,97	645,97
3,09	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) (Km)	Km	50,57	50,57	50,57	50,57	50,57	50,57
3,10	Presentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	(minimal 1,5 m)	7,30	12,30	17,80	27,60	33,50	38,70
3,11	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (orang/km)	(orang/km)	202,47	204,50	206,54	208,61	210,69	212,80
3,12	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	%						
3,13	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	%	24,30	36,40	64,20	65,30	70,35	80,56
3,14	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	%	16,20	40,85	73,20	82,40	89,40	95,20
4	Perumahan							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
4,01	Rasio rumah layak huni	Angka	19,92	20,32	20,73	21,14	21,56	21,99
4,02	Rasio permukiman layak huni	Angka	1	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05
4,03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	%	58,33	59,5	60,69	61,9	63,14	64,41
4,04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	%	3,76	4,66	5,78	7,16	8,87	11
4,05	Persentase permukiman yang tertata (%)	%	100	100	100	100	100	100
4,06	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	%	1,28	1,21	1,15	1,09	1,04	0,99
4,07	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	%	78,9	74,96	71,21	67,65	64,27	61,05
4,08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	%	1,33	1,26	1,2	1,14	1,08	1,03
4,09	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	%	26,24	28,87	31,75	34,93	38,42	42,26
5	Penataan Ruang							
5,01	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	Angka	>0,5	>0,6	>0,7	>0,8	>0,9	>0,10
5,02	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Angka						
6	Perencanaan Pembangunan Daerah							
6,01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6,02	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6,03	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
6,04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6,05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	%	100	100	100	100	100	100
6,06	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (%)	%	100	100	100	100	100	100
6,07	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	%	100	100	100	100	100	100
7	Perhubungan							
7,01	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	Orang	100	100	100	100	100	100
7,02	Rasio ijin trayek	Angka						
7,03	Jumlah uji kir angkutan umum	Angka						
7,04	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Angka	11	11	11	11	11	11
7,05	Persentase layanan angkutan darat (%)	%	55,13	57,88	60,78	63,81	67	70,36
7,06	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	%	>50%	>55%	>60%	>65%	>70%	>75%
7,07	Pemasangan Rambu rambu (%)	%	100	100	100	100	100	100
7,08	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Angka	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
7,09	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	Orang						
7,1	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very (orang)	Orang	84.055,15	88.257,91	92.670,80	97.304,34	102.169,56	107.278,04
7,11	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	Orang	7.103,41	7.458,58	7.831,51	8.223,08	8.634,24	9.065,95
8	Lingkungan Hidup							
8,01	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Angka	-	1	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
8,02	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	%	0	65	75	85	95	100
8,03	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8,04	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	%	7	14	14	16	18	20
8,05	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina) / (Org.)	Org	0	3	5	7	8	10
8,06	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (ada/tidak ada)	Angka	0	0	Ada	Ada	Ada	Ada
8,07	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	%	0	1	2	1	1	2
8,08	Timbulan sampah yang ditangani (ton)	Ton	22.088	22.529	22.980	23.440	23.908	24.387
8,09	Presentase cakupan area pelayanan (%)	Angka	20,19	20,7	21,23	21,76	22,31	22,88
8,10	Presentase jumlah sampah yang tertangani (%)	%	4.309,01	4.364,11	4.419,92	4.476,45	4.533,69	4.591,67

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
8,11	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota (%)	%	96,14	96,33	96,53	96,72	96,91	97,11
9	Pertanahan							
9,01	Luas Lahan bersertifikat (%)	%	100	100	100	100	100	100
9,02	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	%						
10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
10,01	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	%	100	100	100	100	100	100
10,02	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	%	89,78	93,06	96,47	100	100	100
10,03	Rasio pasangan berakte nikah (%)	%	100	100	100	100	100	100
10,04	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak ada)	Angka	61,95	66,28	70,92	75,89	81,2	86,88
10,05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	Angka						
10,06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	%	78,5	82,4	86,48	90,77	95,27	100
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11,02	Partisipasi perempuan di lembaga swasta / partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	%	26,25	27,56	28,94	30,39	31,91	33,5
11,03	Rasio KDRT (%)	%	6,57	6,53	6,5	6,47	6,44	6,4
11,04	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	%	100	100	100	100	100	100
11,05	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	Angka						
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12,01	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	%	1,61	1,53	1,52	1,51	1,44	1,41

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
12,02	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	Org	2	2	2	2	2	2
12,03	Rasio akseptor KB (%)	%	80,67	84,21	87,91	91,77	95,8	100
12,04	Cakupan peserta KB aktif/Angka pemakaiankontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	%	80,67	84,21	87,91	91,77	95,8	100
12,05	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	%	14,77	15,51	16,29	17,1	17,96	18,86
13	Sosial							
13,01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	%	3,73	4,06	4,41	4,8	5,23	5,69
13,02	Persentase PMKS yang tertangani (%)	%	3,73	4,06	4,41	4,8	5,23	5,69
13,03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	%	10,97	12,07	13,28	14,6	16,06	17,67
13,04	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	%						
13,05	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	%						
13,06	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	%	50,56	54,1	57,88	61,94	66,27	70,91
13,07	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana	%						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	prasarana tanggap darurat lengkap (%)							
13,08	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	%						
14	Ketenagakerjaan							
14,01	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		0	0	0	0	0	0
14,02	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	%	0	0	0	0	0	0
14,03	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	%						
14,04	Keselamatan dan perlindungan (%)	%						
14,05	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	%						
14,06	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	%	0	0	0	0	0	0
14,07	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	%						
15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
15,01	Persentase koperasi aktif (%)	%						
15,02	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	%						
15,03	Persentase BPR/LKM aktif (%)	%						
15,04	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	%						
16	Penanaman Modal							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
16,01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Angka	1.052	1.104	1.160	1.218	1.278	1.342
16,02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Angka	25,36	26,63	27,96	29,35	30,82	32,36
16,03	Rasio daya serap tenaga kerja	Angka						
16,04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Angka						
17	Kebudayaan							
17,01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Keg)	Kegiatan						
17,02	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	%	100	100	100	100	100	100
17,03	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Angka	8	8	8	8	8	8
17,04	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Angka	8	8	8	8	8	8
18	Pemuda dan Olah Raga							
18,01	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	%	16,28	18,03	19,97	22,12	24,5	27,14
18,02	Persentase wirausaha muda (%)	%						
18,03	Cakupan pembinaan olahraga (%)	%						
18,04	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	%						
18,05	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	%	25	25	26	27	27	28
18,06	Jumlah atlet berprestasi	Angka						
18,07	Jumlah prestasi olahraga	Angka	12	12	12	12	12	12
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
19,01	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Keg)	Angka	-	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
19,02	Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)	Angka	-	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
20,01	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Angka	0,01577	0,01578	0,0158	0,01581	0,01583	0,01584
20,02	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Angka	0,39	0,43	0,48	0,52	0,57	0,63
20,03	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	Angka						
20,04	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (Ada/tidak)	Angka						
20,05	Penegakan PERDA (%)	%	0,43	0,47	0,52	0,57	0,63	0,69
20,06	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	%						
20,07	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	%	100	100	100	100	100	100
20,08	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	%	31,97	33,57	35,25	37,01	38,86	40,81
20,09	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	%	100	100	100	100	100	100
20,1	Tingkat waktu tanggap/response time rate (%)	%	100	100	100	100	100	100
20,11	Indeks Resiko Bencana (%)	%	121,81	118,52	115,32	112,21	109,18	106,23
20,12	Desa Rawan Bencana (desa)	Desa						
20,13	Desa Tangguh Bencana (desa)	Desa						
20,14	Tingkat Fasilitasi Penanganan Pasca Bencana (%)	%						
20,15	Tingkat Penanganan Bencana (%)	%						
20,16	Jumlah Sistim Informasi Manajemen / SIM (ada/tidak)							
20,17	Maturitas SPIP (Level)	Level						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
20,18	Kapabilitas APIP (Level)	Level						
21	Ketahanan Pangan							
21,01	Ketersediaan pangan utama Beras / Non Beras	Angka	17.193	18.224	19.318	20.477	21.705	23.007
21.01.01	Ketersediaan pangan utama (%)	%	212	216	221	225	230	234
21.01.02	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (kkal/kap/hr)	Angka	81	82	84	86	87	89
21.01.03	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	%	100	100	100	100	100	100
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan							
22,01	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	%	64	64	65	66	66	67
22,02	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat /LPM (%)	%						
22,03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	%						
22,04	Persentase LSM aktif (%)	%						
22,05	Persentase LPM Berprestasi (%)	%						
22,06	Persentase PKK aktif (%)	%	100	100	100	100	100	100
22,07	Persentase Posyandu aktif (%)	%	100	100	100	100	100	100
22,08	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	%						
22,09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	%						
23	Statistik		-	-	-	ADA	ADA	ADA
23,01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (ada/tidak ada)		-	-	-	ADA	ADA	ADA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
23,02	Buku "kabupaten dalam angka" (ada/tidak ada)		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
23,03	Buku "PDRB" (ada/tidak ada)		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
24	Kearsipan							
24,01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	%	100	100	100	100	100	100
24,02	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kali)	Kali	10	10	10	10	10	10
25	Komunikasi dan Informatika							
25,01	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	%	61	64	67	70	74	77
25,02	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Angka	40	44	49	54	59	65
25,03	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon(%)	%	86	90	95	100	100	100
25,04	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Angka	83	87	91	96	100	100
26	Perpustakaan							
26,01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (pengunjung)	Angka	3.590	3.769	3.958	4.156	4.363	4.582
26,02	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Angka	15.247	16.401	17.641	18.976	20.411	21.955
26,03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk /1.000	Angka	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,31
26,04	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (buku)	Angka	25.568	28.428	31.608	35.143	39.074	43.444
26,05	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	%						
27	Pertanian							
1,01	Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	%	34,14	35,51	36,94	38,42	39,96	41,57

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1,02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	%						
1,03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	%						
1,04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	%						
1,05	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	%						
1,06	Cakupan bina kelompok petani (%)	%						
1,07	Nilai tukar petani (%)	%	114	116	119	122	124	127
28	Kehutanan							
2,01	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	%	100	100	100	100	100	100
2,02	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	%						
2,03	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Angka						
29	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3,01	Persentase rumah tangga pengguna listrik(%)	%	79	80	81	82	83	84
3,02	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka						
3,03	Persentase pertambangan tanpa ijin (%)	%						
30	Pariwisata							
4,01	Kunjungan wisata (%)	%	100	100	100	100	100	100
4,02	Lama kunjungan Wisata (hari)	Waktu	5-6 Jam	5-6 Jam	5-6 Jam	5-6 Jam	5-6 Jam	5-6 Jam
4,03	PAD sektor pariwisata (%)	%	100	100	100	100	100	100
31	Kelautan dan Perikanan							
5,01	Produksi perikanan (%)	%	0,17	0,23	0,3	0,41	0,54	0,73

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
5,02	Konsumsi ikan (%)	%	46,67	48,07	49,51	50,99	52,52	54,1
5,03	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	%	6,06	6,97	8,02	9,22	10,6	12,19
5,04	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	%	0,42	0,44	0,48	0,51	0,54	0,58
5,05	Nilai tukar nelayan (%)	%	0,24	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33
5,06	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	23.111	23.479	23.852	24.231	24.616	25.008
5,07	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	124,29	132,99	142,3	152,26	162,92	174,33
32	Perdagangan							
6,01	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%						
6,02	Ekspor Bersih Perdagangan (Poin)	Angka						
6,03	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	%						
33	Perindustrian							
7,01	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	%	1,82	1,85	1,89	1,92	1,96	1,99
7,02	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	%						
34	Transmigrasi							
8,01	Transmigran swakarsa (%)	%						

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai acuan arah pembangunan lima tahunan. Dengan mengacu pada visi "**Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Timur Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berbudi Luhur**", seluruh strategi, program, dan kebijakan pembangunan telah dirumuskan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Pembangunan daerah diarahkan pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan pemanfaatan potensi unggulan daerah, terutama di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan minyak dan pariwisata. Keseluruhan substansi RPJMD menjadi dasar pijakan dalam merancang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RPJMD harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah.

Kaidah pelaksanaan pembangunan daerah mengacu pada keterpaduan antar sektor, antar wilayah, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun pemerintah desa. Selain itu, pendekatan pembangunan juga harus responsif terhadap dinamika dan tantangan eksternal, termasuk perubahan iklim, kondisi geopolitik, dan perkembangan teknologi.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan secara berkala melalui sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah dan evaluasi eksternal oleh instansi vertikal dan lembaga legislatif.

Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur perencanaan, sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari kebijakan dan program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan penyesuaian strategi di tahun-tahun berikutnya.

5.4 Penutup

Dokumen RPJMD ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi proses pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan komitmen yang kuat, sinergi antar pemangku kepentingan, serta keterlibatan aktif masyarakat, maka visi "**Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Timur Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berbudi Luhur**" dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan demi kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur. (2019). Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur. (2025). Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Seram Bagian Timur. 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Maluku Dalam Angka 2025. Ambon: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kota Ambon 2025. [Link: Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id>]
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2024). Data Iklim dan Cuaca Wilayah Maluku. Jakarta: BMKG.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2024). Laporan Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) Nasional 2024. Jakarta: BKKBN.
- Hasil analisis Tim KLHS RPJPD Kabupaten SBT, 2024, merujuk pada laporan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.
- Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka (terbitan Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur)
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2025). Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Seram Bagian Timur, 2022–2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia 2023. Jakarta: Kominfo.

Kementerian Kesehatan RI. (2024). Profil Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkes RI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pasal 12 ayat 2, tentang penyusunan RPJMD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur



Ita Wotu Nusa

